



JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING

MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNSRAT

Goodwill

VOLUME 4 – NOMOR 2, DESEMBER 2013

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI dan PENGALAMAN TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT KOTA TOMOHON DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Marrieta Sylvie Bolang, Jullie J. Sondakh, Jenny Morasa

PENGARUH CHARACTER, CHAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL dan CONDITION OF ECONOMY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT pada BANK RAKYAT INDONESIA di KOTA MANADO.

Indri Wasti Malonda, Jullie J. Sondakh, Jenny Morasa

PERSEPSI PENGGUNA pada PENERAPAN LELANG PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) SALAH SATU WUJUD PENINGKATAN KUALITAS GOOD GOVERNANCE di KEMENTERIAN AGAMA SE SULAWESI UTARA.

Siska Sofian, Ventje Ilat, Heince Wokas

PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT, di PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, SENTRA KREDIT MENENGAH MANADO.

Ronald David A. Iroth, Herman Karamoy, Lidia Mawikere

PENENTUAN PENGALOKASIAN BIAYA BERSAMA pada PRODUK BERSAMA pada DOLPHIN DONUTS BAKERY.

Gladies C.N. Polii, Grace B. Mogi Nangoy

HUBUNGAN RESIKO BISNIS dan UTANG serta DAMPAKNYA ATAS PROFITABILITAS (STUDI KASUS pada PERUSAHAAN TERDAFTAR di BURSA EFEK INDONESIA).

Winston Pontoh

KUALITAS AUDIT INSPEKTORAT dan OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Grace Wilhelmina Djara, David Paul E. Saerang, Jenny Morasa

PENGARUH NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH dan INDEKS HARGA SAHAM REGIONAL ASIA (STI, HANG SENG, NIKKEI) TERHADAP PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN di BURSA EFEK INDONESIA.

Syermi Mintalangi

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN dan KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PIMPINAN pada PERGURUAN TINGGI SWASTA di KOTA MANADO.

Nur Fitry Latief, Ventje Ilat, Harijanto Sabijono

ANALISIS STRATEGY GAP pada PT. INDONESIA POWER di BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Anneke Wangkar

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MANADO

Andre Tulungen, Herman Karamoy, Treesje Runtu

JURNAL RISET AKUNTANSI dan AUDITING Goodwill

Pelindung	:	Prof. DR. D. P. E. Saerang, SE.,M.Com (Hons)
Penanggung jawab	:	DR. Jullie J. Sondakh, SE.,MSi.,CPA DR. Agus T. Poputra, SE.,MM.,MA.,Ak
Pimpinan Redaksi	:	DR. Herman Karamoy, SE.,MSi.,Ak
Reviewer	:	Prof. DR. D. P. E. Saerang, SE.,M.Com (Hons) DR. Ventje Ilat, SE.,MSi DR. Jenny Morasa, SE.,MSi.,Ak DR. Agus T. Poputra, SE.,MM.,MA.,Ak
Redaksi	:	Lidia Mawikere, SE.,MSi.,Ak Novi Budiarmo, SE.,MSA.,Ak Winston Pontoh, SE.,MM.,Ak HeinceWokas, SE.,MM.,Ak Steven Tangkuman, SE.,MAk.,Ak Meily Kalalo, SE.,MSA.,Ak Christian Datu, SE.,MSi.,Ak
Operator Pelaksana	:	Andreita Agama, SE.,Ak Claudia W. M. Korompis, SE.,Ak Princilvanno A. Naukoko, SE.,ME.,Ak
Administrasi & Sirkulasi	:	Marnix Tuwongkesong, ST Ayu Lestiani Mandalling, SE
Alamat Redaksi	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Jl. Kampus Bahu. Gedung Program Magister Akuntansi Telepon (0431) 823018

Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill Diterbitkan Oleh Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi, penelitian dan karya ilmiah antara Pengajar, Alumni, Mahasiswa dan Masyarakat pada umumnya. Jurnal ini terbit dua kali setahun yaitu bulan Juni dan Desember.

Redaksi menerima naskah yang belum diterbitkan oleh media dan tinjauan atas buku-buku akuntansi terbitan dalam dan luar negeri yang baru serta catatan/komentar atas artikel yang dimuat dalam jurnal ini. Surat-surat mengenai naskah yang diterbitkan, langganan, keagenan, dan lainnya dapat dialamatkan langsung ke redaksi.

Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat



VOLUME 4 – NOMOR 2, DESEMBER 2013

ISSN. 2088-8899

Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. Marietta Sylvie Bolang, Jullie J. Sondakh, Jenny Morasa	1 - 15
Pengaruh Character, Chapacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economy Terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia di Kota Manado. Indri Wasti Malonda, Jullie J. Sondakh,	16 - 36
Persepsi Pengguna pada Penerapan Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Salah Satu Wujud Peningkatan Kualitas Good Governance di Kementerian Agama Se Sulawesi Utara. Siska Sofian, Ventje Ilat, Heince Wokas, Jenny Morasa	37 - 73
Pelaksanaan Audit Kepatuhan Dalam Proses Pemberian Kredit, di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado. Ronald David A. Irot, Herman Karamoy, Lidia Mawikere	74 - 98
Penentuan Pengalokasian Biaya Bersama pada Produk Bersama pada Dolphin Donuts Bakery. Gladies C. N. Polii, Grace B. Nangoy	99 - 109
Hubungan Resiko Bisnis dan Utang serta Dampaknya Atas Profitabilitas (Studi Kasus pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Winston Pontoh	110 - 116
Kualitas Audit Inspektorat dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Grace Wilhelmina Djara, David P.E. Saerang, Jenny Morasa	117 - 137
Pengaruh Nilai Tukar Mata Uang Rupiah dan Indeks Harga Saham Regional Asia (<i>Sti, Hang Seng, Nikkei</i>) Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Syermi Mintalangi	138 - 159
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pimpinan pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Nur Fitry Latief, Ventje Ilat, Harijanto Sabijono	160 - 179
Analisis Strategy Gap pada PT. Indonesia Power di Bidang Teknologi Informasi Anneke Wangkar	180 - 199
Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Manado Andre Tulungen, Herman Karamoy, Treesje Runtu	200 - 208

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT KOTA TOMOHON DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**Marietta Sylvie Bolang
Jullie J. Sondakh
Jenny Morasa**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman terhadap kualitas audit aparat inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan penting untuk meningkatkan kualitas audit dari pengelolaan keuangan karena dengan kebijakan desentralisasi maka pemerintah daerah telah memperoleh otoritas tidak hanya untuk mengelola sumber daya alam tetapi juga di bidang keuangan. Sebagaimana dapat dilihat dimana masih ada begitu banyak masalah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sangat sering ditemukan ketidaksesuaian antara laporan yang dihasilkan oleh auditor internal yakni Inspektorat dengan laporan yang dihasilkan oleh auditor eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit sedangkan variabel independennya terdiri dari kompetensi auditor (X1), independensi auditor (X2), dan pengalaman auditor (X3).

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Tomohon yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 36 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) terstruktur disertai wawancara langsung dengan Sekretaris Inspektorat Kota Tomohon disertai dengan data sekunder berupa peraturan-peraturan pemerintah dan literatur yang berguna berkaitan dengan penelitian, kedua data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini tampak bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 64,5%, sedangkan sisanya sebesar 35,5% diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Setelah melakukan pengujian hipotesis disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat, sedangkan independensi dan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kota Tomohon.

Implikasi temuan penelitian ini bagi upaya terwujudnya audit yang berkualitas adalah perlunya upaya peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan tentang akuntansi dan audit.

Kata kunci : kualitas audit, kompetensi, independensi dan pengalaman.

ABSTRACT

This study examined the influence of the auditors' competency, independency, and experiences towards audit quality of financial auditing of the staff of inspectorate in Tomohon City as part of their supervision function. The finding of this study could be an important input for improving the quality of financial management of the local government since the policy of decentralization has given the local governments authority not only to manage natural resources but also their financial sector. However, as could be seen there are still a lot of problems related to financial management mostly caused by the poor knowledge and skills related to financial auditing of government officials responsible for this specific task. It is common to find inconsistency in the financial report of internal auditor (inspectorate) and external auditor, Supreme Audit Agency (Badan Pemeriksa Keuangan).

There were two variables in this study. Audit quality was the dependent variable (Y) while the independent variables elaborated into three variables, namely: auditor's competency (X1), auditor's independency (X2) and auditor's experiences (X3). There were 36 personnel of the Inspectorate's Office of Tomohon City participated as the sources of this study. Thus, the population of this research is the Tomohon City Regional Inspectorate officers. Data used in this study were primary and secondary data, while questioner and in-depth interview as well as document study used as the data collection methods. The first consecutive methods employed to obtain primary data while the last used for obtaining secondary data. Both data analyzed using the multiple linear regression techniques.

This study found that the influence of independent variable which were competency, independency and experiences towards dependent variables which was audit quality was significant. The 0.645 value of coefficient determination showed the significant relationship between both variables. This means that the equation model used in this study found the significancy at about 64,5%. The remaining proportion which was 35,5% explained by the other factors which were not part of this model. After examining the hypotheses, it can be concluded that partially competency had positive influence but not too significant to the quality of the inspectorate officer. However, independency and experiences had a positive and significant influence to the auditing quality of the public servant working in the inspectorate's office.

This study recommends to improving the knowledge and skills of the public apparatus by conducting short courses and training in accounting and auditing.

Keywords : *audit quality, competency, independency and experiences*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesadaran akan pentingnya lembaga inspektorat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal (*auditor internal*) pemerintahan semakin meningkat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu agenda utama reformasi sektor publik di Indonesia. Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005 dalam Efendy 2010). Boynton (dalam Efendy, 2010) menjelaskan bahwa fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Untuk dapat menjalankan fungsi ini, seorang auditor harus memiliki kompetensi, independensi dan pengalaman. Hal ini sangat penting mengingat pengelolaan keuangan pemerintah daerah banyak mendapat sorotan dengan maraknya pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut *Peraturan Walikota Tomohon Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Inspektorat Kota Tomohon*, Inspektorat sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Tomohon mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Tomohon, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kota. Namun ada indikasi bahwa kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Tomohon dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan daerah masih lemah. Indikatornya adalah masih banyak temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK.

Berdasarkan hasil temuan BPK (Tahun Anggaran 2011) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain didapatkan hasil berupa adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan dan kesalahan administrasi dalam hal pelaporan keuangan. Pengalaman tiga tahun terakhir, Kota Tomohon memperoleh penilaian *disclaimer* dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan adanya temuan tersebut, berarti kualitas audit aparat inspektorat Kota Tomohon sebagai auditor internal pemerintah dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan daerah masih lemah dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.”**

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Apakah ada pengaruh dari ketiga variabel, kompetensi independensi dan pengalaman terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel kompetensi, independensi dan pengalaman aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan oleh para pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat.
2. Sebagai masukan bagi Inspektorat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam meningkatkan kinerjanya sebagai internal auditor/aparat pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam hal pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
4. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian *Good Governance*

Good governance menurut Sapariyah 2011, merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Pemahaman *good governance* dapat didefinisikan dengan seberapa jauh pemahaman atas konsep tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik oleh para auditor. Pemahaman *good governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman atas *good governance* adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur (*good corporate governance*) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik atau pemerintahan (*good government governance*).

2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam azas umum Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar, yakni: perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan. Sampai sejauh ini, di Indonesia belum di atur mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah yang merupakan acuan untuk menyusun dan membuat pelaporan keuangan pemerintah (Efendy, 2010).

2.3. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 308, dikatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, *good governance* dan *clean government* diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004 dalam Efendy 2010).

Cahyat (2004) dalam Efendy 2010, berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah yaitu melakukan pengawasan keuangan. Beberapa kewenangan daerah yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah pelaksanaan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi, penyelesaian ganti rugi, serta inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

2.4. Kualitas Audit

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam lampiran 3 SPKN (Paragraf 7) disebutkan bahwa : “Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Hal pengukuran kualitas audit memerlukan indikator-indikator antara lain kualitas proses, apakah audit dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis yang dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Probabilitas auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi *auditee*, tergantung pada kemampuan teknis, independensi auditor dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan.

2.5. Kompetensi

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek yang akan diaudit berupa pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat, intuitif, seksama dan jarang melakukan kesalahan.

2.6. Independensi

Arens, *et al.*, (2000) dalam Efendy (2010), mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai "Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit". Sedangkan menurut Mulyadi (2008:26) dalam Sapariyah (2011) Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

2.7. Pengalaman

Knoers dan Haditono (1999) dalam Asih (2006: 12) mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Variabel pengalaman akan diukur dengan menggunakan indikator lamanya bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan banyaknya pelatihan yang telah diikutinya.

2.8. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Mansur (2007) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit ditinjau dari persepsi auditor atas pelatihan dan keahlian, independensi dan penggunaan kemahiran profesional. Hasilnya bahwa pendidikan dan pengalaman, pelatihan, dan independensi, berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Alim dkk (2007) meneliti tentang kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pada kantor Akuntan Publik se-Jawa Timur. Variabel kompetensi dan independensi sebagai variabel independen, kualitas audit sebagai variabel dependen, dan etika auditor sebagai variabel moderasi. Hasilnya diketahui bahwa independensi dan kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Aji (2009) dalam Bawono (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit ditinjau dari persepsi auditor atas independensi, pengalaman, dan akuntabilitas. Hasilnya adalah independensi, pengalaman, dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Selain itu, variabel independensi dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit dan variabel pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Rahman (2009) dalam Bawono (2010) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan *due professional care* terhadap kualitas audit. Hasilnya adalah ketiga variabel independen tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

Efendy (2010) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi aparat inspektorat terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Fahdi (2012) meneliti tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas, kompetensi, dan motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa independensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

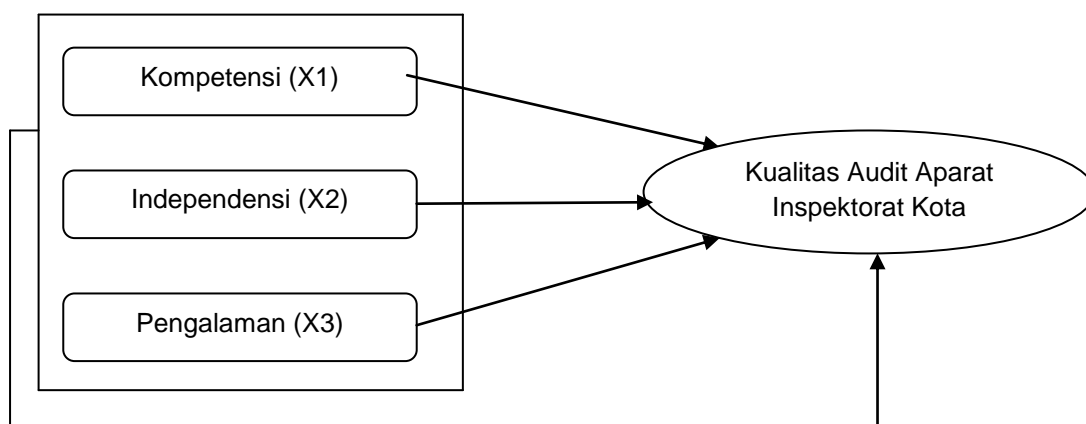
kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk pengalaman kerja, obyektivitas, integritas, dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Persamaan penelitian-penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel dependen yang digunakan, yaitu : kualitas audit dan objek penelitian pada sektor publik yakni Pemerintah Kota Tomohon. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada variabel independen dimana penelitian ini fokus pada tiga variabel yakni: kompetensi, independensi dan pengalaman.

3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 3.1. Kerangka konseptual pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Kota Tomohon



3.2. Hipotesis

Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini:

H₁ : Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

H₂ : Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

H₃ : Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

4. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis/ Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory/confirmatory research*) karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan causal antara variabel-variabel dengan melalui pengujian hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu yang diambil dari kuesioner dan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara.

4.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Tomohon yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 36 orang. Karena jumlah populasi sedikit, maka semua populasi akan dijadikan sampel. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, dimana penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi.

4.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (kompetensi, independensi dan pengalaman auditor) dan satu variabel dependen yakni kualitas audit.

Variabel-variabel tersebut di atas menggunakan kuesioner yang terdiri dari 21 pertanyaan dan diukur dengan skala *Likert* 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan yaitu :

- | | | |
|------------------------------|---|--------|
| 1. Sangat setuju (SS) | = | Skor 5 |
| 2. Setuju (S) | = | Skor 4 |
| 3. Netral (N) | = | Skor 3 |
| 4. Tidak Setuju (TS) | = | Skor 2 |
| 5. Sangat Tidak Setuju (STS) | = | Skor 1 |

4.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kota Tomohon pada bulan Maret 2012 sampai selesai di bulan September tahun 2012. Pemilihan Kota Tomohon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat Kota Tomohon hal ini ditandai dengan adanya temuan dari BPK tentang pengelolaan keuangan daerah dan pemberian opini *Disclaimer* sejak tiga tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011).

4.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data tentang variabel-variabel yang diungkapkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi melalui penyebaran kuesioner dan melakukan wawancara.

4.6. Cara Pengolahan dan Teknik Analisis Data

4.6.1. Cara Pengolahan Data

Statistik Deskriptif

4.6.2. Teknik analisis Data

1. Uji asumsi klasik, terdiri atas: uji Normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas ;
2. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji simultan (Uji F) dan uji parsial (Uji t).

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Statistik Responden

Tabel 5.1. Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja responden

Jenis Kelamin (%)		Usia (%)				Tingkat Pendidikan (%)				Masa Kerja (%)		
L	P	<30	30-40	40-50	>50	S2	S1	D3	SMA	<5th	5-10th	>10th
36,1	63,9	13,9	44,4	19,4	22,2	22,2	52,7	11,1	13,9	41,7	13,9	44,4

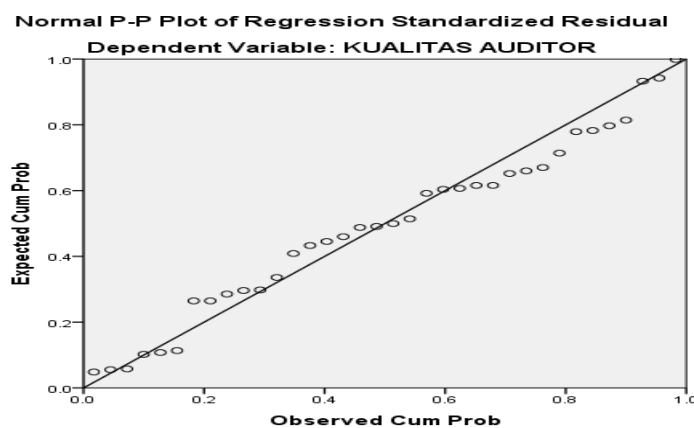
Tabel 5.2. Latar Belakang Pendidikan Responden

Latar Belakang Pendidikan							
Ekonomi (S1)						Non Ekonomi (D3, S1, S2)	
Akuntansi		Manajemen		Ek. Pembangunan			
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2,77	6	16,66	1	2,77	28	77,77

5.2. Uji Asumsi Klasik

5.2.1. Uji Normalitas

Gambar 5.1 Grafik Normal P-P Plot



Sumber : Hasil Olahan, 2012. Data SPSS *Version 20.00*.

Berdasarkan gambar 5.1. grafik normal plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

5.2.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5.3. Hasil Perhitungan *Tolerance* dan *VIF* Coefficients^a

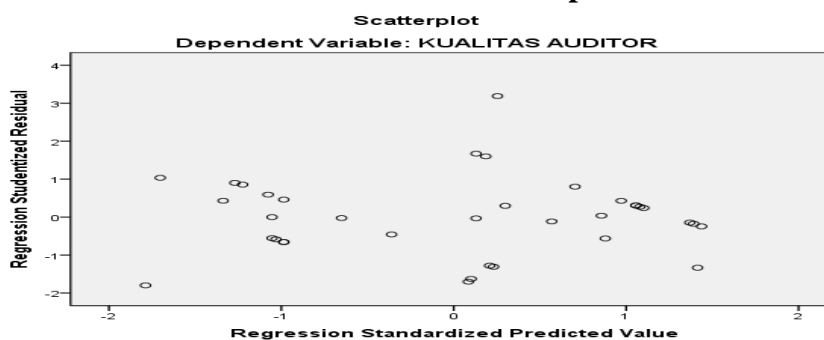
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KOMPETENSI	.997	1.003
	INDEPENDENSI	.925	1.081
	PENGALAMAN	.925	1.081

Dependent Variable: KUALITAS AUDITOR

Sumber : data Hasil Olahan SPSS *Version 20.00*

5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 5.2 Grafik Scatterplot



Sumber : data Hasil Olahan SPSS *Version 20.00*

Berdasarkan Gambar 5.2, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan gambar 5.2, dimana titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola yang teratur atau tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

5.3. Uji Hipotesis

5.3.1. Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS 20.00 tampak pada Tabel 5.3. Berdasarkan tabel 5.3, maka menghasilkan

$$Y = 2,694 + 0,58X_1 + 0,749X_2 + 1,086X_3 + e$$

Tabel 5.4. Hasil Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.694	4.955		.544	.590
	KOMPETENSI	.058	.150	.039	.390	.699
	INDEPENDENSI	.749	.186	.422	4.035	.000
	PENGALAMAN	1.086	.190	.600	5.728	.000

Sumber : Data Olahan, 2012

Berdasarkan persamaan regresi berganda pada Tabel 5.3, dapat dilihat nilai konstanta (a) sebesar 2,694 dan bernilai positif, hal ini berarti besarnya Kualitas Auditor (Y) mempunyai hubungan positif atau searah dengan variabel Independen yaitu variabel Kompetensi (X1), Independensi (X2), dan Pengalaman (X3). Koefisien regresi Kompetensi (X1), sebesar 0,058 dan mempunyai nilai positif

atau searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel Kompetensi (X1), maka akan mengakibatkan peningkatan Kualitas Auditor (Y) dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien regresi Independensi (X2), sebesar 0,749 dan mempunyai nilai positif atau mempunyai hubungan searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel Independensi (X2), maka akan mengakibatkan peningkatan Kualitas Auditor (Y) dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien regresi Pengalaman (X3), sebesar 1.086 dan mempunyai nilai positif atau mempunyai hubungan searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel Pengalaman (X3), maka akan mengakibatkan peningkatan Kualitas Auditor (Y) dengan asumsi faktor lain konstan.

5.3.2. Uji F

Dari hasil *output* uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) dapat diketahui nilai F seperti pada Tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	233.258	3	77.753	22.222	.000 ^b
	Residual	111.965	32	3.499		
	Total	345.222	35			
a. Dependent Variable: KUALITAS AUDITOR						
b. Predictors: (Constant), PENGALAMAN, KOMPETENSI, INDEPENDENSI						

Sumber : Data Olahan, 2012

Berdasarkan Tabel 5.5, hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar $22.222 > F_{tabel}$ 1,764 dengan menggunakan tingkat signifikansi $P = 0,000 < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi, independensi dan pengalaman secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat di Kota Tomohon.

5.3.3. Uji t

Dari analisis regresi *output* dapat dilihat pada tabel 5.6, sebagai berikut:

Tabel 5.6. Hasil Uji t

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.694	4.955		.544	.590
	KOMPETENSI	.058	.150	.039	.390	.699
	INDEPENDENSI	.749	.186	.422	4.035	.000
	PENGALAMAN	1.086	.190	.600	5.728	.000

Sumber : Data Olahan, 2012

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi), dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ atau $(36-3-1) = 32$. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,355, dengan kriteria pengujian:

- H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$
- H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

1. Pengujian hipotesis 1

Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,390 < 2,355$) dan signifikansi $P = 0,699 > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima, dan H_a ditolak artinya secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan antara kompetensi (X_1) dan Kualitas Audit (Y).

2. Pengujian hipotesis 2

Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,035 > 2,355$) dan signifikansi $P = 0,000 < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial berpengaruh signifikan antara independensi (X_2) dan Kualitas Audit (Y).

3. Pengujian hipotesis 3

Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,728 > 2,355$) dan signifikansi $P = 0,000 > \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial berpengaruh signifikan antara pengalaman (X_3) dan Kualitas Audit (Y).

5.3.4. Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS 20.00 tampak pada Tabel 5.7, sebagai berikut :

Tabel 5.7. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.822 ^a	.676	.645	1.87053	1.684
a. Predictors: (Constant), PENGALAMAN, KOMPETENSI, INDEPENDENSI					
b. Dependent Variable: KUALITAS AUDITOR					

Sumber : Data Olahan, 2012

Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit adalah sebesar 64,5%, sedangkan sisanya sebesar 35,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, misalnya akuntabilitas, etika, atau motivasi, tergantung penelitian yang dilakukan.

5.4. Pembahasan

5.4.1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan. Hasil penelitian yang didapat adalah kompetensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit namun mempunyai hubungan yang positif atau searah.

Hasil pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Mansur (2007), Alim, dkk (2007), dan Efendy (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fahdi (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan,

alasanya karena masih kurangnya pengetahuan auditor dalam memahami entitas yang diaudit, kemudian kurangnya kemampuan auditor dalam menganalisa permasalahan.

5.4.2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua bahwa independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya independensi seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit, artinya kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki independensi yang baik.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Mansur (2007), Alim dkk (2007), Aji (2009) dan Fahdi (2012) yang menyatakan bahwa variabel independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

5.4.3. Pengaruh Pengalaman terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian pada hipotesis ketiga ini menyatakan bahwa pengalaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Adanya pengaruh positif variabel pengalaman berarti semakin tinggi tingkat pengalaman auditor semakin tinggi pula tingkat kualitas auditnya. Auditor yang berpengalaman cenderung memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mansur (2007), yang menyebutkan bahwa pengalaman auditor berhubungan positif terhadap kualitas audit.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman aparat Inspektorat Kota Tomohon terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi, independensi, dan pengalaman secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Tomohon.
2. Kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit, hal ini dapat dipahami sebab aparat inspektorat di Kota Tomohon (sesuai dengan data tingkat pendidikan yang diperoleh dalam kuesioner) banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi ataupun auditing.
3. Independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya independensi seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit, artinya kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki independensi yang baik.
4. Pengalaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Adanya pengaruh positif variabel pengalaman berarti semakin tinggi tingkat pengalaman auditor semakin tinggi pula kualitas auditnya. Auditor yang berpengalaman cenderung memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain :

1. Lembaga Inspektorat Kota Tomohon haruslah memperkuat timnya di dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan sumber daya berupa tenaga ahli di bidang audit internal ataupun yang memiliki pendidikan yang memadai dalam bidang akuntansi dan auditing.
2. Mutasi antar satuan kerja sebaiknya tidak dilakukan terhadap aparat yang telah memiliki pengalaman dan sudah mengikuti berbagai pelatihan dalam hal audit.
3. Pola penugasan auditor dalam melakukan audit, sebaiknya dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman dan dipandang mempunyai pengetahuan yang memadai. Apabila diberikan pada junior auditor sebaiknya didampingi oleh minimal seorang senior auditor, dengan maksud untuk menjaga kualitas dan kredibilitas hasil audit di mata para pengguna informasi laporan keuangan, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada junior auditor untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya sebagai seorang auditor. Disamping itu, harus dilakukan telaah hasil pemeriksaan auditor untuk menjamin bahwa pemeriksaan dan bentuk pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesional yang berlaku dan berkualitas.
4. Penempatan pegawai di lingkup Inspektorat Kota Tomohon sebaiknya berdasarkan fungsi dan kompetensi yang dimiliki.
5. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti (kompetensi, independensi dan pengalaman) berpengaruh terhadap variabel kualitas audit sebagai variabel dependen sebesar 64,5%, sedangkan sisanya sebesar 35,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini, misalnya akuntabilitas, etika, ataupun motivasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Asih, Dwi Ananing Tyas. 2006. *Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Auditor Dalam Bidang Audit*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Skripsi. 2006.
- Badan Pusat Statistik Kota Tomohon bekerja sama dengan BAPPEDA Kota Tomohon, 2012. *Tomohon Dalam Angka (Tomohon in Figures) 2012*. BPS Kota Tomohon. 2012.
- Bawono, Icuk Rangga dan Elisha Muliani Singgih, 2010. *Faktor-Faktor Dalam Diri Auditor dan Kualitas Audit: Studi Pada KAP 'Big Four' di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi 2010.
- Christiawan, Y.J. 2002. *Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris*. Journal Directory : Kumpulan Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unika Petra. Vol. 4 / No. 2.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD), 2013. *300 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi*, diakses 23 April 2013, <http://djk.d.kemendagri.go.id/?jenis=news&p=detail_berita&id=861>
- Efendy, Muh. Taufiq. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)*. Tesis 2010.

- Fahdi, Muhammad. 2012. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas, Kompetensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*. Tesis 2012.
- Lastanti Sri, Hexana. 2005. *Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005.
- Mansur, Tubagus. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit ditinjau dari persepsi auditor atas pelatihan dan keahlian independensi dan penggunaan kemahiran profesional*. Tesis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, tentang *Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta. 2007.
- No. 13 Tahun 2006, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. 2006.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta. 2008.
- Peraturan Walikota Tomohon Nomor 22 Tahun 2009. *Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Inspektorat Kota Tomohon*. Tomohon.
- Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM, *Reviu Laporan Keuangan, Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah*. 2007.
- Romli, Lili. 2006. *Efektivitas Pemerintah Daerah Era Otonomi: Studi Kasus Efektivitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Kota Semarang*. Jurnal Desentralisasi Vol. 7, No. 4. 2006.
- Saifuddin. 2004. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasi eksperimen pada Auditor dan Mahasiswa)*. Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sapariyah, Rina Ani. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor dan Komitmen Organisasi (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta)*. STIE "AUB" , Surakarta. 2011.
- Singgih, EM, dan IR Bawono, 2010. *Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP "Big Four" di Indonesia)*. Universitas Jenderal Soedirman pada Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Tim Peneliti UNSRAT, Pemda SULUT, dan staf Bank Dunia, 2011. *Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Utara 2011, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan di Bumi Nyiur Melambai*. Kantor Bank Dunia Jakarta. 2011.

PENGARUH CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL DAN CONDITION OF ECONOMY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA DI KOTA MANADO

Indri Wasti Malonda

Jullie J. Sondakh

Jenny Morasa

ABSTRAK

Objek penelitian ini adalah para analis kredit Bank Rakyat Indonesia yang ada di kota Manado dengan jumlah sampel 46 orang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* secara parsial maupun bersama-sama terhadap keputusan pemberian kredit

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, yaitu untuk meramalkan keadaan (naik turun) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai *vector predictor* dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya) dan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji F untuk pengaruh secara simultan dan uji T untuk pengaruh secara parsial.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit Bank Rakyat Indonesia dikota Manado. Secara bersama-sama, *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit Bank Rakyat Indonesia dikota Manado.

Kata Kunci : *character, capacity, capital, collateral, condition of economy, pemberian kredit*

ABSTRACT

Object of this research is credit analysts of Bank Rakyat Indonesia in the city of Manado with the number of 46 people.

This research aims to determine influence of character, capacity, capital, collateral and condition of economy partially or together to the loan approval of Bank Rakyat Indonesia in Manado city. The analytical method used is multiple linear regression, which is to predict the state (up and down) dependent variable when two or more independent variables manipulated as vector predictor (increase and decrease the value) and to determine the effect of independent variable on the dependent variable using F test to simultaneously influence and T test for partial influence.

From this research that has been done, it is known that the character, capacity, collateral and condition of economy partially has influence to loan approval of Bank Rakyat Indonesia in Manado city. Together with character, capacity, capital, collateral and condition of economy influence to loan approval of Bank Rakyat Indonesia in Manado city.

Keyword : *character, capacity, capital, collateral, condition of economy, loan approval*

1. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, bank dihadapkan pada tingkat persaingan yang sangat kompetitif, mengingat masing-masing bank berusaha untuk menarik simpati masyarakat dengan berbagai daya dan upaya, seperti menawarkan kemudahan syarat kredit yang prosedurnya lebih sederhana dan tidak berbelit-belit, kredit tanpa agunan, kredit bunga murah dan cara lainnya, yang kesemuanya bermuara kepada kemampuan bank dalam menarik sejumlah nasabah.

Dampak dari kemudahan tersebut menimbulkan adanya kredit yang bermasalah. Untuk itu kehati-hatian bank senantiasa diperlukan guna mencegah terjadinya kredit macet, mengingat keberhasilan usaha bank diukur dari kelancaran pengembalian kredit dan sedikitnya jumlah kredit seperti rendahnya tingkat *non performance loan* (NPL).

Untuk menghindari terjadinya kredit macet salah satu yang dapat dilakukan bank adalah melakukan analisis kredit secara profesional, yaitu dengan melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Cakupan analisis yang digunakan dalam perbankan adalah paling tidak harus memuat *the five c's of credit* (5C) yang terdiri atas Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), Kondisi Ekonomi (*Condition Of Economy*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Vida (2011) yang menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit mikro pada PT. Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat Area Sumatera Utara, dari hasil tersebut disimpulkan bahwa secara simultan variabel lama usaha, kapasitas usaha, karakter debitur, sektor ekonomi yang dibiayai berpengaruh terhadap keputusan kredit yang akan diambil dapat diterima. Secara parsial variabel kapasitas usaha berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan kredit.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pemberian kredit dengan judul “ **Pengaruh *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* Terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia di Kota Manado.**

1.2. Perumusan Masalah

Dengan didasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Character* berpengaruh terhadap keputusan kredit pada Bank Rakyat Indonesia ?
2. Apakah *Capacity* berpengaruh terhadap keputusan kredit pada Bank Rakyat Indonesia?
3. Apakah *Capital* berpengaruh terhadap keputusan kredit pada Bank Rakyat Indonesia?
4. Apakah *Collateral* berpengaruh terhadap keputusan kredit pada Bank Rakyat Indonesia?
5. Apakah *Condition of economy* berpengaruh terhadap keputusan kredit pada Bank Rakyat Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *character* terhadap keputusan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *chcapacity* terhadap keputusan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *capital* terhadap keputusan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *collateral* terhadap keputusan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh *condition of economy* terhadap keputusan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menjalankan perusahaannya untuk menghindari kredit bermasalah.
2. Dapat memberikan manfaat dalam hal pengaplikasian teori – teori yang telah didapat selama perkuliahan.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan kontribusi bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kajian

5c

2. LANDASAN TEORI

2.1 Perkreditan.

Kredit berasal dari kata *Credo* artinya percaya. Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan (Supriyono, 2012). Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain-lain).

2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Kredit

2.2.1 Character

Dalam Kasmir (2012), *Character* diartikan sebagai sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang diberikan kredit harus benar-benar bisa dipercaya. Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya.

Character calon debitur dapat dilihat dari dua aspek yakni :

1. Aspek internal

Mengenai aspek internal ini meliputi hal-hal yang langsung berkaitan dengan diri calon debitur seperti faktor keturunan keluarga calon debitur, latar belakang pendidikan, daftar riwayat hidup calon debitur.

2. Aspek Eksternal

Umumnya aspek eksternal adalah hal-hal yang muncul dari luar diri calon debitur dan bisa mempengaruhi perubahan sifat dan *character* calon debitur. Adapun aspek eksternal antara lain faktor lingkungan baik itu lingkungan kehidupan sosial, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pergaulan.

2.2.2 Capacity

Dalam Kasmir (2012), *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui mengenai kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk itu bank harus memperhatikan laporan keuangan perusahaan calon debitur.

2.2.3 Capital

Menurut Sanusi (2011), *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya, hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, dan ratio-ratio keuangan. *Capital* menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi “*tangible net work*”. Bank harus mengetahui bagaimana perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah modal sendiri. Untuk itu bank harus menganalisa neraca setidaknya selama dua tahun terakhir, mengadakan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, *solvabilitas/leverage* dan *rentabilitas/profitabilitas* dari perusahaan calon debitur.

2.2.4 Collateral

Dalam Kasmir (2012), *Collateral* diartikan sebagai jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

2.2.5 Condition of Economy

Analisis terhadap kondisi ekonomi mikro dan makro baik nasional, regional maupun internasional, politik, perundang-undangan dan lain lain (Supriyono 2011). Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum, serta kondisi pada sektor usaha debitur. Dalam hal ini yang harus diperhatikan bank adalah keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon debitur, kondisi usaha calon debitur, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya, Keadaan pemasaran dari usaha calon debitur, prospek usaha dimasa yang akan datang, untuk kemungkinan bantuan kredit dari bank, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri, dimana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya.

2.3 Pengambilan Keputusan

Menurut Hasan (2004), pengambilan keputusan diartikan sebagai pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Mengambil atau membuat keputusan berarti memilih satu di antara sekian banyak alternatif. Pada umumnya suatu keputusan dibuat dalam rangka

untuk memecahkan permasalahan atau persoalan (*problem solving*), setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang akan dicapai. Inti dari pengambilan keputusan terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan apa yang sedang diperhatikan dan dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi (penilaian) mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambil keputusan. Salah satu komponen terpenting dari proses pengambilan keputusan ialah kegiatan pengumpulan informasi dimana suatu apresiasi mengenai situasi keputusan dapat dibuat. Apabila informasi yang cukup dikumpulkan guna memperoleh suatu spesifikasi yang lengkap dari semua alternatif dan tingkat keefektifitasannya dalam situasi yang sedang menjadi perhatian, proses pembuatan atau pengambilan keputusan relatif sangat mudah. Akan tetapi di dalam praktek sangat tidak mungkin untuk mengumpulkan informasi secara lengkap, mengingat keterbatasan dana, waktu, dan tenaga.

2.4 Hubungan 5Cs Terhadap Kredit

Dasar untuk mengukur kemampuan dan kemauan debitur membayar kembali fasilitas kreditnya adalah dengan melakukan analisis sebagai berikut:

1. *Character*, dalam Tohir (2012) menyatakan *account officer* hanya akan memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang memiliki karakter dan reputasi baik.
2. *Chapacity*, dalam Tohir (2012) menyatakan *account officer* harus melihat kemampuan debitur menjalankan aktivitas produksi, pemasaran, dan pengefisienan biaya, sehingga debitur dapat menghasilkan laba dan cash flow yang memadai untuk menyelesaikan dan mengangsur fasilitas kredit yang diterima.
3. *Capital*, dalam Tohir (2012) menyatakan *capital* merupakan jumlah uang yang ditanamkan oleh debitur untuk menjalankan usahanya. Semakin banyak uang yang ditanamkan maka semakin meningkatkan keyakinan bank kepada debitur yang bersangkutan mengenai komitmennya menjalankan usaha. Apabila *account officer* mendapat fakta bahwa sebagian besar aktiva tetap perusahaan diperoleh secara leasing, maka mereka harus berhati-hati dengan kelangsungan kepemilikan harta tetap tersebut.
4. *Collateral*, dalam Supriyono (2011) dikatakan bahwa untuk memutuskan kredit *accout officer* akan melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikannya objek jaminan, serta tingkat resiko bank semakin berkurang.
5. *Condition Of Economy*, menurut Tohir (2012) untuk memutuskan kredit *account officer* akan melakukan analisis industri setiap sektor usaha yang dibiayainya, pengaruh peraturan pemerintah terhadap usaha industri, perkembangan industri, perkembangan ekonomi, persaingan pasar, produk impor sejenis dengan harga lebih murah dan mutu lebih baik.

2.5 Penelitian Terdahulu

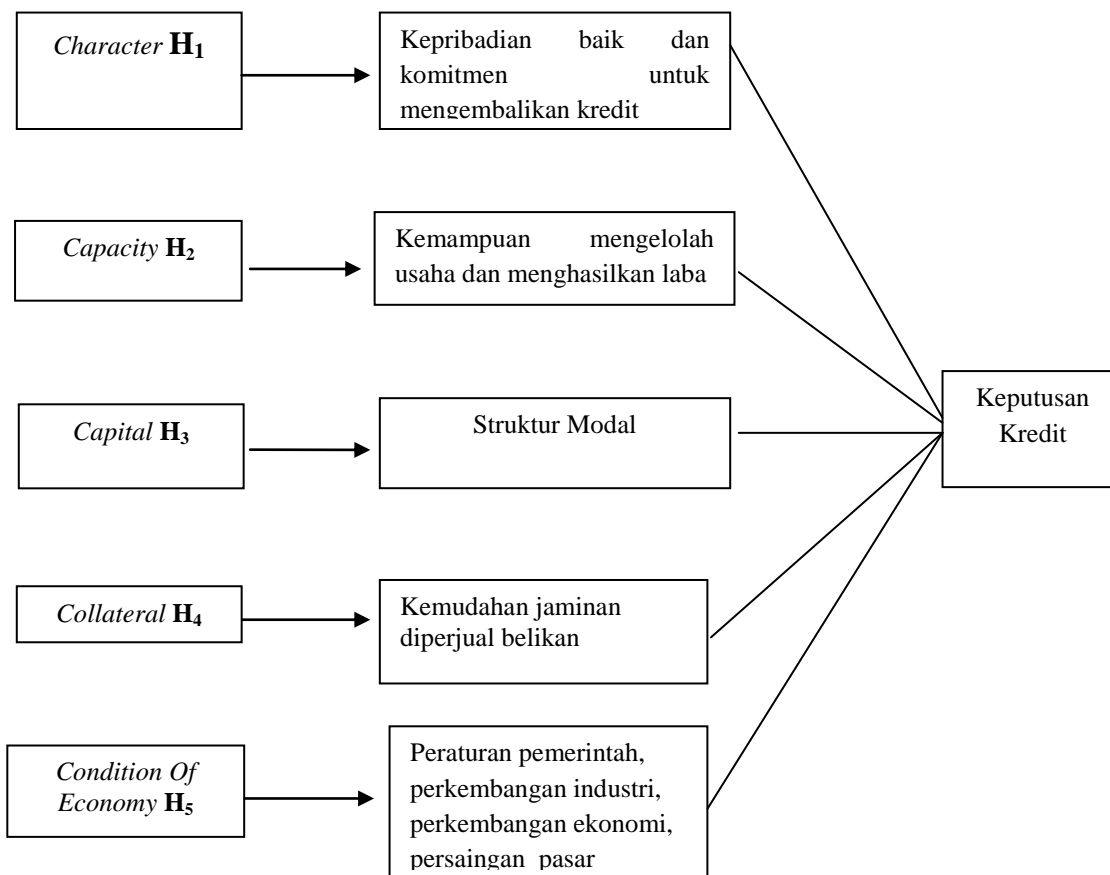
Putri (2010), dalam penelitian yang berjudul pengaruh *the five C's principles* terhadap keputusan pemberian kredit (Studi kasus pada PD BPR Bank Bantul). Yang menjadi populasi dalam penelitian tersebut adalah pegawai PD. BPR Bank Bantul yang menangani masalah kredit bank baik yang berada di kantor pusat maupun yang berada di 17 kantor unit pelayanannya dengan jumlah 35 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan jumlah populasi. Uji instrumen dilakukan pada pegawai bagian kredit PD. BPR Bank Sleman sebanyak 30 orang. Uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment* dari Pearson dan uji reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach Alpha*. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh *The Five C's Principles* (X) Terhadap Keputusan Pemberian Kredit (Y)

yang terjadi pada PD. BPR Bank Bantul digunakan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *The Five C's Principles* terhadap keputusan pemberian kredit pada calon nasabah bank yang terjadi pada PD. BPR Bank Bantul. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung yang lebih besar dari pada t-tabel yaitu $5,515 > 2,0369$ dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dari hasil penelitian ini diperoleh juga nilai koefisien X sebesar 0,524 dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,503

Sudaryono (2005), dalam penelitian yang berjudul persepsi analis kredit tentang informasi akuntansi dan non akuntansi pengaruhnya terhadap keputusan kredit (studi perbandingan antara BNI dengan Bank Mandiri Wilayah Jateng dan DIY). Tujuan penelitian ini ingin menguji secara empiris, persepsi analis kredit tentang informasi akuntansi dan non akuntansi pengaruhnya terhadap keputusan kredit BNI dan Bank Mandiri dan perbedaan persepsi analis kredit tentang informasi akuntansi dan non akuntansi antara BNI dan Bank Mandiri. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 92 dari seluruh kantor cabang BNI dan Bank Mandiri Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan *logistic regression* disimpulkan bahwa untuk BNI informasi akuntansi lebih berpengaruh terhadap keputusan kredit dibandingkan informasi non akuntansi. Tetapi untuk Bank Mandiri informasi non akuntansi lebih berpengaruh terhadap keputusan kredit dibandingkan informasi akuntansi. Analisis uji beda menunjukkan bahwa informasi akuntansi dan non akuntansi antara BNI dengan Bank Mandiri tidak berbeda atau sama.

3. KERANGAKA KONSEPTUAL

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis.



- H_{a1} : *Character* berpengaruh terhadap keputusan kredit.
H_{a2} : *Capacity* berpengaruh terhadap keputusan kredit.
H_{a3} : *Capital* berpengaruh terhadap keputusan kredit.
H_{a4} : *Collateral* berpengaruh terhadap keputusan kredit.
H_{a5} : *Condition of economy* berpengaruh terhadap keputusan kredit.

4. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis dan Sumber Data

Menurut Kuncoro (2003), data adalah sekumpulan informasi yang di perlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data terbagi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur dalam skala numerik (angka) sedangkan data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi data tersebut berupa angka-angka absolut dari hasil analisis kuesioner yang diisi oleh sampel penelitian.

Berdasarkan Sumbernya, data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga pengumpul data atau pihak-pihak lain yang datanya telah diolah terlebih dahulu (Kuncoro, 2003). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer tersebut diperoleh dari kuesioner yang di bagikan kepada sampel penelitian.

4.2. Populasi dan Sampel

Menurut Uma Sekaran (2006), populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh analis kredit bank BRI yang ada dikota Manado yaitu berjumlah 68 orang. Dari 68 kuesioner yang disebarkan ke semua analis kredit bank BRI yang ada dikota Manado, kuesioner yang kembali berjumlah 46 kuesioner.

4.3. Definisi Operasional Variabel.

1. Definisi operasional *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* yang mempengaruhi keputusan kredit yaitu :
 - a. *Character*, yaitu sifat atau watak calon debitur yang dijadikan sebagai ukuran tentang *willingness to pay* (kemauan untuk membayar). Variabel ini diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan dengan skala likert (skor jawaban 1-5)
 - b. *Capacity*, yaitu kemampuan calon debitur dalam dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memperoleh penghasilan. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan dengan skala likert (skor jawaban 1-5)
 - c. *Capital*, yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan dengan skala likert (skor jawaban 1-5)
 - d. *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 3 butir pertanyaan dengan skala likert (skor jawaban 1-5)

- e. *Condition of economy* , yaitu melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing calon debitur. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 2 butir pertanyaan dengan skala likert (skor jawaban 1-5).
- f. Keputusan Kredit, yaitu keputusan yang diambil oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari nasabah berdasarkan hasil analisis atas berbagai aspek. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 butir pertanyaan dengan skala likert (skor jawaban 1-5).

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh penulis adalah Kota Manado, fokus penelitian adalah pada Bank Rakyat Indonesia di Kota Manado.

4.5 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data

Data dan informasi lain yang relevan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Survey pendahuluan, yaitu kegiatan langkah awal untuk mencari judul penelitian tesis dengan mengangkat masalah yang dirasa penulis penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi melalui bahan referensi berupa buku-buku teori, karya-karya ilmiah dari penulis-penulis sebelumnya lalu kemudian menentukan objek penelitian yang tepat bagi judul tesis ini.
2. Studi lapangan, yaitu dengan cara melakukan pengamatan pada obyek penelitian dalam hal ini BRI di Kota Manado, wawancara dan diskusi dengan pihak manajemen perusahaan dan pihak-pihak lain yang terkait.
3. Kuesioner, pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis guna menunjang wawancara untuk mendapatkan data yang akurat.

4.6 Metode Analisis Data

4.6.1 Uji kualitas data

Uji kualitas data dilakukan untuk meyakinkan kualitas data yang akan diolah yang terdiri dari pengujian validitas dan reliabilitas.

1.6.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
2. Uji Autokorelasi
3. Uji Heteroskedastisitas
4. Multikolinieritas

4.6.3 Analisis data

1. Regresi Linear Berganda

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5$$

Keterangan:

- Y = Keputusan pemberian kredit
 X_1 = *Character*

- $X_2 = Capacity$
 - $X_3 = Capital$
 - $X_4 = Collateral$
 - $X_5 = Condition\ of\ economy$
 - a = Nilai Intercept (Konstan)
 - b = Koefisien arah regresi
2. Pengujian Hipotesis
 - a. Uji Statistik t
 - b. Uji Statistik F
 3. Koefisien Korelasi dan Determinasi

4.6.4 Uji Ankova

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilihan karir pada mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja maka dilakukan uji anкова atau analisis kovarians. **Analisis Kovarians (ANCOVA)** merupakan model linier dengan satu variabel dependen kontinu dan satu atau lebih variabel independen. Jikalau kalimat tersebut mengingatkan anda kepada regresi linier berganda, yap, anda betul, karena **ANCOVA** merupakan penggabungan antara ANOVA dan regresi linier yang lazimnya menggunakan variabel kontinu (kuantitatif).

5. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Uji Validitas

Tabel 5.1
Hasil Pengujian Validitas (X_1)
Character

Pertanyaan	Pearson Correlation	Keterangan
P1	.506	Valid
P2	.698	Valid
P3	.570	Valid
P4	.627	Valid

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel *character* dengan empat butir pertanyaan, diketahui bahwa nilai korelasi masing – masing pertanyaan adalah diatas 0.3, hal ini menjelaskan bahwa masing- masing pertanyaan adalah valid dan dapat digunakan dalam kuesioner.

Tabel 5.5
Hasil Pengujian Validitas (X_2)
Chapacity

Pertanyaan	Pearson Correlation	Keterangan
P1	.383	Valid
P2	.538	Valid
P3	.437	Valid
P4	.672	Valid

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Dari Tabel 5.5 menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel *capacity* dengan empat butir pertanyaan, dimana masing-masing pertanyaan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian dimana keenam pertanyaan valid untuk digunakan dalam kuesioner.

Tabel 5.6
Hasil Pengujian Validitas(X₃) Capital

Pertanyaan	Pearson Correlation	Keterangan
P1	.683	Valid
P2	.655	Valid
P3	.710	Valid
P4	.703	Valid

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Tabel 5.6 menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel X3 yaitu *capital*, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai korelasi untuk masing-masing pertanyaan adalah diatas 0.3, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan yang digunakan dalam variabel ini valid untuk digunakan sebagai dasar pertanyaan dalam penelitian.

Tabel 5.7
Hasil Pengujian Validitas (X4) Collateral

Pertanyaan	Pearson Correlation	Keterangan
P1	.695	Valid
P2	.339	Valid
P3	.762	Valid

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Tabel 5.7 menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel X4 yaitu *collateral* , dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai korelasi untuk masing-masing pertanyaan adalah diatas 0.3, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan yang digunakan dalam variabel ini valid untuk digunakan sebagai dasar pertanyaan dalam penelitian.

Tabel 5.8
Hasil Pengujian Validitas (X5) Condition Of Economy

Pertanyaan	Pearson Correlation	Keterangan
P1	.455	Valid
P2	.447	Valid

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Tabel 5.8 menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel X5 yaitu *condition of economy* , dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai korelasi untuk masing – masing pertanyaan adalah diatas 0.3, hal ini menunjukkan bahwa masing – masing pertanyaan yang digunakan dalam variabel ini valid untuk digunakan sebagai dasar pertanyaan dalam penelitian.

**Tabel 5.9 Hasil Pengujian Validitas (Y)
Keputusan pemberian Kredit**

Pertanyaan	Pearson Correlation	Keterangan
P1	.747	Valid
P2	.787	Valid
P3	.715	Valid
P4	.758	Valid
P5	.792	Valid

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Tabel 5.9 menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel Y yaitu *Keputusan pemberian kredit*, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai korelasi untuk masing-masing pertanyaan adalah diatas 0.3, hal ini menunjukkan bahwa masing -masing pertanyaan yang digunakan dalam variabel ini valid untuk digunakan sebagai dasar pertanyaan dalam penelitian.

5.3.2 Uji Reliabilitas

**Tabel 5.10
Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Croanbach's Alpha	Standar	Keterangan
X1	.675	0.6	Reliabel
X2	.687	0.6	Reliabel
X3	.747	0.6	Reliabel
X4	.715	0.6	Reliabel
X5	.770	0.6	Reliabel
Y	.800	0.6	Reliabel

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada output *reability statistics* dalam tabel 5.10. Dalam tabel tersebut masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* yang lebih dari 0.6, hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel.

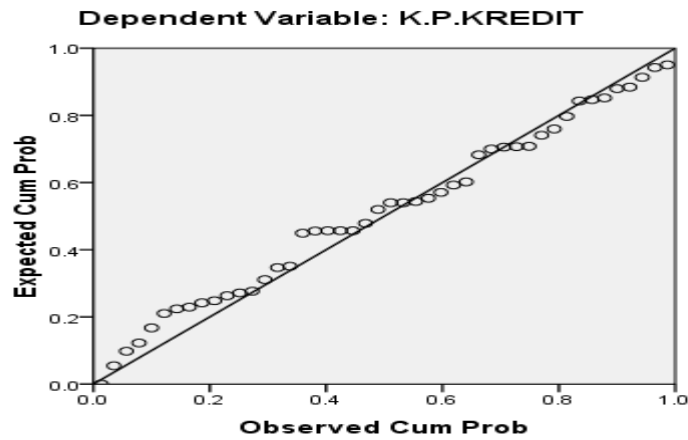
5.4 Uji Asumsi Klasik

5.4.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dengan grafik yang diolah SPSS, *normal probability* ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar 5.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



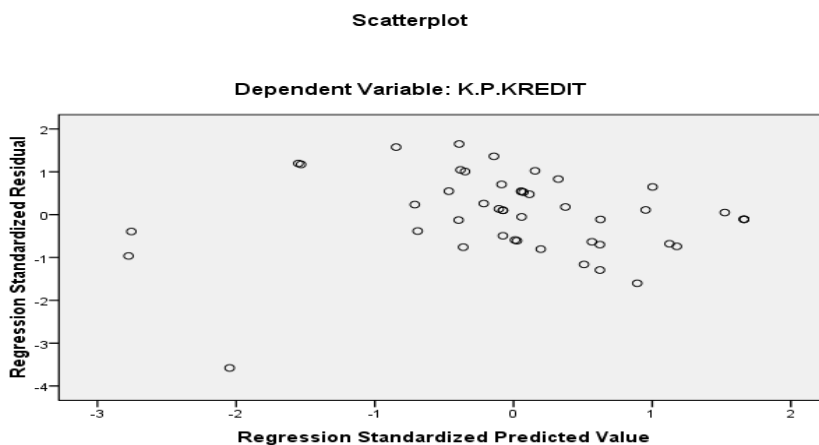
Sumber : Data olahan SPSS, 2012

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal sehingga dapat dikatakan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

5.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. *Scatterplots* dapat dilihat pada output regresi dan disajikan sebagai berikut:

Gambar 5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data olahan SPSS, 2012

Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam persamaan regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari penyebaran titik-titik yang tidak memiliki pola yang jelas, serta titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dalam persamaan ini tidak terjadi gejala heteroskedisitas.

5.4.3 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan ada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Menurut Ghozali (2005), model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.

Tabel 5.11
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 ^a	.596	.545	1.685	1.130

Sumber : Data olahan SPSS, 2012

Hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan nilai statistic Durbin Watson (DW) sebesar 1.130 maka dapat dikatakan penelitian ini bebas dari problem autokorelasi atau kesalahan pengganggu sebab DW terletak diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak ada autokorelasi.

5.4.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2005). Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10.

Tabel 5.12
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<i>Karakter</i>	.448	2.233
<i>Capacity</i>	.338	2.961
<i>Capital</i>	.356	2.808
<i>Coe</i>	.429	2.333
<i>Colateral</i>	.689	1.451

Sumber : Data olahan SPSS, 2012

Dari tabel 5.10 terlihat bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil uji VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

5.5 Pengujian Hipotesis

5.5.1 Uji Parsial (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah masing-masing variable independen, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy* berpengaruh terhadap keputusan pemberian, dilakukan uji statistic t sebagai berikut :

Tabel 5.13
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.023	4.080		.741	.463
<i>CHARACTER</i>	.636	.284	.337	2.241	.031
<i>CAPACITY</i>	.376	.340	.192	1.108	.024
<i>CAPITAL</i>	.609	.245	.419	2.488	.017
<i>COE</i>	.545	.259	.322	2.099	.042
<i>COLATERAL</i>	.267	.378	.086	.707	.048

Sumber : Data olahan SPSS, 2012

Berdasarkan tabel uji T diatas dapat dijelaskan pengaruh masing – masing variabel x terhadap y sebagai berikut :

1. *Character* (X_1) mempunyai nilai signifikansi 0.031 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05, dengan t hitung sebesar 2.241 dan t tabel 0.68052, t hitung > t tabel, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable ini berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit BRI karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung > t table.
2. *Capacity* (X_2) mempunyai nilai signifikansi 0,024 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 1.108 dan t tabel 0.68052, t hitung> t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable *capacity* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit BRI karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung > t table.
3. *Capital* (X_3) mempunyai nilai signifikansi 0,017 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 2.488 dan t tabel 0.68052, t hitung> t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable *capital* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung > t table.
4. *Collateral* (X_4) mempunyai nilai signifikansi 0,048 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 0.707 dan t tabel 0.68052, t hitung> t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable *collateral* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung > t table.

5. *Condition of economy* (X_5) mempunyai nilai signifikansi 0,042 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 2,009 dan t tabel 0.68052, t hitung > t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable *condition of economy* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung > t table.

5.5.2 Interpretasi Model Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = 3.023 + 0.636 X_1 + 0.376 X_2 + 0.609 X_3 + 0.267 X_4 + 0.545 X_5$$

Dimana Y = Keputusan Pemberian Kredit

$X_1 = Character$

$X_2 = Capacity$

$X_3 = Capital$

$X_4 = Collateral$

$X_5 = Condition Of Economy$

Interpretasi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut :

- $\alpha = 3.023$, nilai konstanta ini menunjukkan apabila tidak ada variabel X (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), maka nilai keputusan pemberian kredit adalah sebesar 3.023
- $\beta = +0.636$, koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel *character* naik 1% maka akan menaikkan variabel keputusan pemberian kredit 0.636% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
- $\beta = +0.376$, koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel *capacity* naik 1% maka akan menaikkan variabel akuntabilitas kinerja senilai 0.376% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
- $\beta = +0.609$, koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel *capital* naik 1% maka akan menaikkan variabel akuntabilitas kinerja senilai 0.609% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
- $\beta = +0.267$, koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel *collateral* naik 1% maka akan menaikkan variabel keputusan pemberian kredit senilai 0.267% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
- $\beta = +0.545$, koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel *condition of economy* naik 1% maka akan menaikkan variabel keputusan pemberian kredit senilai 0.545% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

5.5.3 Uji-F

Kemudian untuk menguji pengaruh variable *character, capacity, capital, collateral dan condition of economy* terhadap keputusan pemberian kredit secara bersama– sama, di gunakan uji statistik f. Hasil uji statistik f dengan program SPSS dapat dilihat dalam table berikut :

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	167.436	5	33.487	11.797	.000 ^a
	Residual	113.542	40	2.839		
	Total	280.978	45			

Sumber : Data olahan SPSS, 2012

Berdasarkan tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 11.797 dengan tingkat signifikansi 0.000, jauh lebih kecil dari 0.05, oleh karena itu maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi variabel keputusan pemberian kredit atau dengan kata lain, variabel *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pemberian kredit pada BRI cabang Manado.

5.5.4 Koefisien Korelasi dan Determinasi (R²)

Koefisien korelasi adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya. Angka koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai dengan ± 1.00 (artinya paling tinggi ± 1.00 dan paling rendah 0). Tanda plus minus pada angka koefisien korelasi ini fungsinya hanya untuk menunjukkan arah korelasi. Apabila angka koefisien korelasi bertanda plus (+) maka korelasi tersebut positif dan arah korelasi satu arah, sedangkan jika angka koefisien korelasi bertanda negatif (-) maka korelasi tersebut negatif dan arah korelasi berlawanan arah. serta apabila angka koefisien korelasi = 0, maka hal ini menunjukkan tidak ada korelasi.

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai r² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.15

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 ^a	.596	.545	1.685	1.130

Sumber : Data olahan SPSS, 2012

Pada model summary diatas, angka R sebesar 0.772 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan variable dependen dengan variable independen cukup kuat yaitu sebesar 77.2%, sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi adalah 59.6, nilai ini mengindikasikan bahwa 59.6% variasi atau perubahan dalam variable dependen dapat dijelaskan oleh variasi atau perubahan variable dependen. Sedangkan sisanya 40.4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

5.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda yang telah dilakukan diketahui persamaan regresi berganda yang diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil adalah $Y = 3.023 + 0.636 X_1 + 0.376 X_2 + 0.609 X_3 + 0.267 X_4 + 0.545 X_5$, dimana hubungan variable dependen dengan variable independen cukup kuat yaitu sebesar 77.2%, sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi adalah 0.596, nilai ini mengindikasikan bahwa 59.6% variasi atau perubahan dalam variable dependen dapat dijelaskan oleh variasi atau perubahan variable independen, dan sisanya yaitu 40.04% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Dalam Kasmir (2012) dikatakan bahwa kredit macet dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor external. Faktor internal yaitu dalam melakukan analisisnya, para analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi dari sekarang, atau dapat pula terjadi adanya kolusi oleh pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan. Sedangkan faktor external yaitu adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet dan unsur tidak sengaja artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir sehingga tidak mampu membayar kredit yang diberikan oleh bank, faktor-faktor ini dapat menjadi alasan mengapa kredit macet masih terjadi sekalipun telah dilakukan analisa 5c.

Berdasarkan hasil uji t dan uji f yang telah dilakukan diketahui bahwa secara parsial variabel *character* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pemberian kredit, sama halnya dengan variabel *capacity*, variabel *capital*, variabel *collateral* dan variabel *condition of economy* berpengaruh terhadap variabel keputusan pemberian kredit. Kemudian secara simultan kelima variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel keputusan pemberian kredit. Penjelasan masing-masing variabel dan pengaruhnya adalah sebagai berikut :

5.6.1 Pengaruh *character* terhadap keputusan pemberian kredit

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan untuk melihat pengaruh *character* terhadap variabel keputusan pemberian kredit diketahui bahwa *character* (X_1) mempunyai nilai signifikansi 0.031 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05, dengan t hitung sebesar 2.241 dan t tabel 0.68052, t hitung > t tabel, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable ini berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit BRI karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung > t tabel dan hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh antara *character* terhadap keputusan pemberian kredit dapat diterima. Hal ini berarti semakin baik *character* yang dimiliki nasabah, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan bagi kreditur dalam memutuskan memberikan kredit kepada nasabah.

Hasil penelitian untuk variabel ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari(2012), penelitian tersebut menyebutkan bahwa variabel *character* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit.

Hal tersebut sependapat dengan yang dikemukakan Tohir (2012) bahwa *account officer* hanya akan memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang memiliki karakter dan reputasi baik. Artinya Keputusan pemberian kredit didasari oleh kepercayaan pihak pemutus kredit bahwa nasabah memiliki moral, watak, sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Apabila debitur dinilai kredibilitasnya

positif, maka tingkat terjadinya resiko tak tertagihnya hutang semakin kecil sehingga kreditur dalam memutuskan pemberian kredit semakin besar.

5.6.2 Pengaruh *Capacity* terhadap keputusan pemberian kredit

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh variabel *capacity* terhadap variabel keputusan pemberian diketahui bahwa *capacity* (X_2) mempunyai nilai signifikansi 0,024 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 1.108 dan t tabel 0.68052, t hitung > t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable *capacity* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit BRI karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung > t table dan hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh antara *capacity* terhadap keputusan pemberian kredit dapat diterima. Hal ini berarti semakin tinggi *capacity* yang dimiliki nasabah, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan bagi kreditur dalam memutuskan memberikan kredit kepada nasabah.

Hasil penelitian untuk variabel ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari(2012) yang menyatakan *capacity* mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh *capacity* terhadap keputusan pemberian kredit terbukti atau dapat diterima. Hal ini berarti semakin tinggi *capacity* yang dimiliki para nasabah, maka semakin tinggi kemungkinan kreditur memutuskan memberikan kredit kepada nasabah.

Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Tohir (2012) bahwa *account officer* harus melakukan analisa mengenai *capacity* atau kemampuan debitur menjalankan aktivitas produksi, pemasaran dan pengefisienan biaya yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan sehingga debitur dapat menghasilkan laba dan *cash flow* yang memadai untuk mengangsur fasilitas kredit yang diberikan

5.6.3 Pengaruh *Capital* terhadap keputusan pemberian kredit

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh variabel *capital* terhadap variabel keputusan pemberian kredit diketahui bahwa *capital* (X_3) mempunyai nilai signifikansi 0,017 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 2.488 dan t tabel 0.68052, t hitung > t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable *capital* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung > t table.

Hasil penelitian untuk variabel ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari(2012) yang menyatakan *capital* mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit sehingga dugaan adanya pengaruh *capital* terhadap keputusan pemberian kredit terbukti atau dapat diterima.

Menurut Tohir (2012) Semakin banyak uang yang ditanamkan maka semakin meningkatkan keyakinan bank kepada debitur yang bersangkutan mengenai komitmennya menjalankan usaha. Apabila *account officer* mendapat fakta bahwa sebagian besar aktiva tetap perusahaan diperoleh secara leasing, maka mereka harus berhati-hati dengan kelangsungan kepemilikan harta tetap tersebut. Dengan terbuktinya hasil penelitian tersebut, maka *capital* mempunyai peranan besar dalam menentukan layak atau tidaknya pihak pemutus kredit dalam memberikan keputusan kredit.

Hal ini sangat diperlukan guna melihat kemampuan debitur dalam membayar kredit. Untuk itu upaya yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen bank adalah dengan mempertimbangkan modal yang dimiliki calon debitur dalam mengelola usahanya. Artinya bahwa pihak pemutus kredit sebelum memutuskan pemberian kredit harus melihat sumber dana atau modal yang dimiliki nasabah, termasuk

persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, kemudian diketahui berapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman. Pihak manajemen harus berupaya terus untuk melihat alokasi dana yang digunakan untuk menekan jumlah pengeluaran. Artinya bahwa pihak pemutus kredit harus melihat apakah dana yang diajukan dari pemilik perusahaan tersebut untuk mengelola usahanya atautkah untuk membayar kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak pemilik perusahaan.

5.6.4 Pengaruh *Collateral* terhadap keputusan pemberian kredit

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh variabel *collateral* terhadap variabel keputusan pemberian kredit diketahui bahwa *collateral* (X_3) mempunyai nilai signifikansi 0,048 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 0.707 dan t tabel 0.68052, t hitung > t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable *collateral* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung > t table.

Hasil penelitian untuk variabel ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari(2012) yang menyatakan *collateral* mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit sehingga dugaan adanya pengaruh *collateral* terhadap keputusan pemberian kredit terbukti atau dapat diterima.

Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Supriyono (2011), bahwa untuk memutuskan kredit *accout officer* akan melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikannya objek jaminan, stabilitas nilai jaminan serta tingkat resiko bank semakin berkurang.

5.6.5 Pengaruh *Condition Of Economy* terhadap keputusan pemberian kredit

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh variabel *condition of economy* terhadap variabel keputusan pemberian kredit diketahui bahwa *condition of economy* (X_3) mempunyai nilai signifikansi 0,042 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 2,009 dan t tabel 0.68052, t hitung > t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable *condition of economy* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung > t table.

Hasil penelitian untuk variabel ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari(2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *condition of economics* dengan keputusan pemberian kredit atau menyatakan pengaruh antara kedua variabel adalah positif.

Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Tohir (2012) bahwa untuk memutuskan kredit *account officer* akan melakukan analisis industri setiap sektor usaha yang dibiayainya, pengaruh peraturan pemerintah terhadap usaha industri, perkembangan industri, perkembangan ekonomi, persaingan pasar, produk impor sejenis dengan harga lebih murah dan mutu lebih baik.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. *Character* (X_1) mempunyai nilai signifikansi 0.031 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05, dengan t hitung sebesar 2.241 dan t tabel 0.68052, t hitung > t tabel, berdasarkan hal tersebut

disimpulkan bahwa secara parsial variable ini berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank BRI karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung $>$ t table. Keputusan pemberian kredit didasari oleh kepercayaan pihak pemutus kredit bahwa nasabah memiliki moral, watak, sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Apabila debitur dinilai kredibilitasnya positif, maka tingkat terjadinya resiko tak tertagihnya hutang semakin kecil sehingga kemungkinan kreditur memutuskan memberikan kredit semakin besar.

2. *Capacity* (X_2) mempunyai nilai signifikansi 0,024 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 1.108 dan t tabel 0.68052, t hitung $>$ t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable *capacity* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank BRI karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung $>$ t table, artinya *capacity* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit. Apabila pihak manajemen mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengelola usahanya, maka risiko hutang tak tertagih akan semakin kecil sehingga kemungkinan kreditur memutuskan memberikan kredit semakin besar.
3. *Capital* (X_3) mempunyai nilai signifikansi 0,017 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 2.488 dan t tabel 0.68052, t hitung $>$ t tabel, artinya *capital* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank BRI. Pemutus kredit sebelum memutuskan pemberian kredit harus melihat sumber mana atau modal yang dimiliki nasabah, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, kemudian diketahui berapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman, hal ini sangat diperlukan guna melihat kemampuan debitur dalam membayar kredit.
4. *Collateral* (X_4) mempunyai nilai signifikansi 0,048 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 0.707 dan t tabel 0.68052, t hitung $>$ t tabel. artinya *collateral* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank BRI. Banyaknya agunan dari debitur, seperti sertifikat tanah, mobil, rumah dan lain-lain dapat menjadi aspek penting bagi pemutus kredit dalam memberikan kredit. Karena banyaknya agunan yang dimiliki debitur maka kemungkinan risiko hutang tak tertagih akan semakin kecil sehingga kreditur tidak segan – segan akan mengabulkan pemberian kredit
5. *Condition of economy* (X_5) mempunyai nilai signifikansi 0,042 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 2,009 dan t tabel 0.68052, t hitung $>$ t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variable *condition of economy* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 dan t hitung $>$ t table. Apabila jenis usaha tersebut sangat prospektif sehingga dapat memajukan usaha perusahaan, maka akan mempengaruhi pihak pemutus kredit dalam mengambil keputusan pemberian kredit.

6.2 Saran

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy* berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit pada BRI cabang Manado, oleh karena itu perlu diperhatikan faktor-faktor tersebut dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemberian kredit pada debitur sehingga masalah kredit macet dapat dikurangi serta *cash flow* perusahaan tidak terganggu.

Bagi peneliti lain yang akan mereplikasi penelitian ini, sekiranya bisa mengambil atau memperluas factor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. 2011. *Variabel – Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Pemberian Kredit*. Jawa Timur : Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” .
- Harahap . 2008. *Teori Akuntansi* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hery. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah* , Jakarta
- Hasan, M.Iqbal. 2004. *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat . 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga : Jakarta
- Mustafidah . 2012. *Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar)*. Penerbit Alfabeta : Bandung
- Putri. 2010. *Pengaruh The Five C’s Principles Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Calon Nasabah Bank*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riyanto, Bambang. 2005. *Manajemen Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Ekasia.
- Sanusi. 2011. *Analisa Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Santoso, Imam. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat
- Sentra Pendidikan BRI. 2010. *Materi Analisa Kupedes*. Divisi Pendidikan dan Pelatihan , Jakarta
- Sudaryono. 2005. *Persepsi analis kredit tentang informasi akuntansi dan non akuntansi pengaruhnya terhadap keputusan kredit*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Sundjaja, Ridwan S, Inge Barlian, dan Darma Putra Sundjaja. 2007. *Manajemen Keuangan I*. Edisi Keenam. UNPAR : Press Bandung.
- Supriyono. 2011, *Buku Pintar Perbankan*. Andi, Yogyakarta
- Vida. 2011, *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Kredit Mikro Pada Pt. Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut)*. Medan : Universitas Sumatra Utara
- Tohir. 2012, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Wulandari. (2012) , *Pengaruh Five “C”S Of Credit Terhadap Proses Pemberian Kredit Pada Bpr Di Kota Semarang*. Ilmu Administrasi Bisnis: Semarang.

PERSEPSI PENGGUNA PADA PENERAPAN LELANG PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) SALAH SATU WUJUD PENINGKATAN KUALITAS *GOOD GOVERNANCE* DI KEMENTERIAN AGAMA SE SULAWESI UTARA

**Siska Sofian
Ventje Ilat
Heince Wokas**

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa Kementerian Agama Prov. Sulawesi Utara yang efisien merupakan salah satu bagian yang penting dalam rangka meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka implementasi *good governance*. Salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa yang efisien adalah melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Kementerian Agama e-Procurement), yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Pelaksanaan pengadaan yang berbasis internet, menggantikan pengadaan sebelumnya yang dilakukan secara manual sebagai salah satu cara untuk mendukung pelaksanaan *Good Governance* karena bisa meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan publik monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerimaan panitia dan rekanan pengadaan barang dan jasa terhadap Kementerian Agama e-Procurement.

Penelitian dilakukan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Agama Sulawesi Utara pada seluruh pengguna *e-procurement* antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Penyedia Barang/Jasa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif etnografi.

The results proved that the Electronic Procurement Auctions (LPSE) Audited implemented to realize one manifestation of good governance, as bribery minimize, fair, save costs, more transparent and accountable.

Kata kunci : *e-procurement, LPSE, Good Governance.*

ABSTRACT

Procurement of goods and services of the Ministry of Religious Affairs efficient North Sulawesi is one of the important parts in order to improve the procurement process. Procurement of goods and services of the Ministry of Religious Affairs efficient North Sulawesi is one of the important parts in order to improve the procurement process for the implementation of good governance. One form of procurement of goods and services, through the efficient procurement of goods and services electronically (e-Procurement Ministry of Religious Affairs), the use of communication technologies and informasing facilities and services for the implementation of good governance. One form of procurement of goods and services, through the efficient procurement of goods and services electronically (e-Procurement Ministry of Religious Affairs), the use of communications and information technology facilities.

This study aimed to measure the extent to which admission committee and the procurement of goods and services partners to the Ministry of Religious Affairs e-Procurement.

The study was conducted at the Electronic Procurement Service (LPSE) Ministry of Religious North Sulawesi on all users of e-procurement include Budget User Authority (KPA), Commitment Officer, Committee and Provider of Goods / Services by using qualitative ethnographic research methods.

Keywords : *e-procurement, LPSE, Good Governance*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 2010, salah satu misi Kementerian Agama RI yaitu Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, mencerminkan bahwa titik berat pengelolaan instansi harus dimulai dengan penataan pemerintahan yang berorientasi pada kualitas pelayanan.

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan alat yang efektif dalam penyediaan jasa layanan oleh Kementerian Agama RI yang merupakan pemerintah pusat yang terdapat di setiap daerah di seluruh Indonesia.

Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan tuntutan bagi setiap instansi pemerintah. Perubahan paradigma aparatur pemerintahan dimaksudkan untuk mempercepat proses transformasi pemerintah daerah dan pusat menjadi pemerintahan yang kompetitif.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2010 pasal 25 ayat 2 dan 3, Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan di *website* Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya (K/L/D/I) masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (ayat 3). Setiap instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, wajib membentuk LPSE Tahun 2011.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi unsur dalam reformasi birokrasi Indonesia. Salah satu melalui perbaikan sistem pengadaan barang/ jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien dan akuntabel. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang mewajibkan setiap K/L/D/I untuk melaksanakan seluruh/sebagian kegiatan pengadaan barang/ jasa secara elektronik melalui LPSE.

Pengadaan barang dan jasa tanpa *E-Procurement* telah mengakibatkan enyalahgunaan anggaran negara mencapai 10-50%. Berikut ini disajikan contoh-contoh penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa yang sering terjadi :

1. Perencanaan Pengadaan
2. Pembentukan Panitia
3. Prakualifikasi Perusahaan
4. Penyusunan Dokumen Pemilihan
5. Pengumuman Lelang
6. Pengambilan Dokumen Pemilihan
7. Penyusunan HPS
8. Rapat Penjelasan (*aanwijzing*)
9. Penyerahan dan Pembukaan Penawaran
10. Evaluasi Penawaran
11. Pengumuman Calon Pemenang
12. Sanggahan Peserta Lelang
13. Penunjukan Pemenang Lelang

14. Penandatanganan Kontrak

15. Penyerahan Barang.

Tabel 1.1 dibawah ini memaparkan data kasus yang ditangani KPK pada proses barang/jasa di pemerintahan :

Tabel 1.1 Data Kasus yang Ditangani KPK Pada Proses Barang/Jasa Pemerintah

JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	86
Perizinan			5	1	3	1		10
Penyuapan		7	2	4	13	12	19	57
Pungutan			7	2	3			12
Penyalahgunaan APBN/APBD			5	3	10	8	5	31
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	196

Sumber : Pembentukan LPSE di K/L/D/I, 2012

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014.

Berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik maka pembahasan ini akan melihat upaya Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Utara dalam menyediakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE), bagi panitia dan rekanan berupa informasi pelelangan, pengumuman lelang, pendaftaran penyedia barang dan jasa di Sulawesi Utara yang bisa dilihat di website <http://lpse.kemenag.go.id>.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang secara elektronik ini membangun suatu sistem antara rekanan dengan pemerintah yang dikenal dengan sebutan *e-procurement* (*e-proc*) yang mampu membantu pemerintah untuk lebih transparan pada informasi serta layanan masyarakat berbasis web pada pengadaan barang dan jasa diatas 200 juta rupiah. Membuat *e-procurement* bukanlah suatu investasi yang murah untuk jangka pendek. Namun untuk jangka panjang sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Cara kerjanya seperti pada gambar 1.2 dibawah ini:

Untuk mendukung tujuan pemerintah tersebut, keluarlah Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggantikan Keppres No. 80/2003. Pada prinsipnya peraturan ini untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, efisiensi belanja negara dan percepatan pelaksanaan APBN yang mana memerlukan sistem dan prosedur lelang yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan *good governance* serta mendukung terciptanya kepastian aturan.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lanjutan tentang LPSE dengan judul **“Persepsi Pengguna Pada Penerapan Lelang Pengadaan Secara**

Elektronik (LPSE) Atau *E-Procurement* Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan *Good Governance* Di Kementerian Agama Se Sulawesi Utara.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi panitia dan penyedia barang dan jasa sebelum dan sesudah penerapan *e-procurement* di Kementerian Agama se Sulawesi Utara?
2. Bagaimana penggunaan *e-procurement* dalam mewujudkan *Good Governance* di Kementerian Agama se Sulawesi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Persepsi panitia dan penyedia barang dan jasa sebelum dan sesudah penerapan *e-procurement* di Kementerian Agama se Sulawesi Utara.
2. Apakah setelah diterapkannya *e-procurement* telah terwujud *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama se Sulawesi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Kementerian Agama se Provinsi Sulawesi Utara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar penerapan *e-procurement* bisa maksimal.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, wawasan tentang *e-procurement* dan cara pemerintah untuk menekan praktek korupsi dalam ka mewujudkan *good governance*.
3. Diharapkan agar panitia yang memanfaatkan LPSE bisa terus meningkatkan pelayanan dengan lebih maksimal.
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian LPSE (*E-Procurement*)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. LPSE pada awalnya merupakan sistem *e-procurement* (pengadaan secara elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP dikembangkan dengan basis *free license* untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Hingga pertengahan 2010, telah terdapat sekitar 60 instansi yang memiliki LPSE.

Sedangkan Kalakota, Ravi dan Robinson (dalam Henry Antonius Eka Widjaja, 2009:39) menyatakan bahwa *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk *website* dan manfaat *eprocurement* dibagi menjadi 2 kategori yaitu: efisien dan efektif. Efisiensi *eprocurement* mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses *procurement*, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi dan pengintegrasian fungsi-fungsi *procurement* sebagai kunci pada sistem *back-office*. Sedangkan efektivitas *eprocurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.

Lebih jelasnya apa yang dimaksudkan dengan e-procurement digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 2.1 E-Procurement di Indonesia



Sumber: <http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id>, 2013

Keuntungan menggunakan *e-procurement*:

1. Menyederhanakan proses *procurement*
2. Meningkatkan komunikasi
3. Mempererat hubungan dengan pihak supplier
4. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telepon, fax atau dokumen-dokumen yang menggunakan kertas
5. Mengurangi waktu pemesanan barang
6. Menyediakan laporan untuk evaluasi
7. Meningkatkan kepuasan *user*

Pada perkembangan selanjutnya, LPSE didefinisikan sebagai unit pelaksana yang memfasilitasi Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP.

Pada proses pengadaan, LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan melainkan panitia pengadaan atau *Unit Layanan Pengadaan/ULP*. Inpres ini resminya bernama Inpres nomor 17 tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Salah satu poin yang terkait dengan e-procurement adalah target penerapan e-procurement sebesar 75% anggaran di Kementerian/Lembaga/Institusi lain serta 40% di Daerah.

Berdasarkan definisi *e-procurement* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah kegiatan yang dilakukan oleh sektor publik baik itu pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga publik lain termasuk BUMN dengan menggunakan fasilitas teknologi internet yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan landasan hukum Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006.

2.1.2 Manfaat dan Tantangan Pelaksanaan E-Procurement

Sebagai salah satu alat dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme sebagai manfaat secara makro dari *e-procurement*, manfaat langsung yang diharapkan dari penerapan sistem baru ini adalah proses yang lebih singkat terutama dari segi waktu dan birokrasi, serta penghematan biaya dalam proses pengadaan (Hardjowijono, 2009).

Dalam peraturan perundangan yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa yaitu Keputusan Presiden 80/2003 dan Peraturan Presiden nomor 8/2006 dinyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang dan jasa, spesifikasi teknis dan harga maupun penyedia barang dan jasa yang memenuhi kriteria.

Manfaat dari *e-procurement* adalah tercapainya kolaborasi yang baik antara pembeli dan pemasok, mengurangi penggunaan tenaga lapangan, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi dan siklus pengadaan, tingkat persediaan yang rendah dan transparansi yang baik (Palmer, 2003). Menurut Michael Hammer dan James Champy (1994), ekonomi global berdampak terhadap 3C yaitu customer, competition, dan change. Pelanggan menjadi penentu, pesaing menjadi banyak dan perubahan menjadi konstan. Beberapa orang menolak perubahan dan beberapa orang yang lain menerima dan menghadapi hal tersebut karena mereka menganggap bahwa perubahan adalah perlu agar proses dan dampak dari perubahan tersebut membawa hal positif.

E-procurement sebagai salah satu upaya dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, mempunyai beberapa tantangan diantaranya pemahaman dan penolakan atas peralihan sistem pengadaan barang dan jasa konvensional ke sistem baru secara on-line. Penolakan atas sebuah perubahan adalah wajar.

Negara Australia sebagai salah satu negara pelopor pelaksanaan *e-procurement* yang dimulai pada tahun 1990 telah menggunakan *e-procurement* sebagai salah satu alat dalam efisiensi pengeluaran anggaran serta mempermudah dalam penyediaan barang dan jasa (*Review of e-procurement Project*, 2005).

Negara lain yang telah sukses dalam mengembangkan sistem *e-procurement* adalah Skotlandia yaitu www.eprocurementscotlandia.com. *E-procurement* Skotlandia (EPS) didirikan pada tahun 2002 dan saat ini menjadi salah satu yang paling komprehensif dan inovatif serta sukses dalam penerapan *e-procurement* di sektor publik. Salah satu bukti kesuksesan pelaksanaan *e-procurement* di Skotlandia yaitu bertambahnya tiap tahun jumlah organisasi sektor publik yang berpartisipasi dalam EPS.

Keberhasilan negara Australian dan Skotlandia menjadi tolok ukur implementasi e-procurement di Indonesia yang dipelopori oleh pemerintah kota Surabaya dan Departemen Pekerjaan Umum (DPU), bukan saja dari implementasi awal sistem maupun keberhasilan dari segi rantai nilai pelaku *e-procurement*.

2.1.3 Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara, akuntabilitas diartikan sebagai “*required or expected to give an explanation for one's action*”. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN BPKP : 43).

LPSE di Kementerian Agama RI harus dilaksanakan di seluruh Provinsi dan Satuan Kerjanya merupakan upaya reformasi di bidang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Karena masyarakat mendapatkan bermacam-macam informasi pengadaan barang dan jasa secara terbuka.

2.1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini bisa dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Regulasi Pendukung Pelaksanaan LPSE

No	Regulasi	Uraian
1	Inpres No. 3 Tahun 2003 (Lampiran I) Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>e-Government</i>	“ <i>...e-Procurement</i> dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah....”
2	Inpres No. 5 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Ekonomi Selama dan Setelah Program Kerjasama Dengan IMF	Program Stabilitas Ekonomi Makro-Rencana Tindak Kebijakan Peningkatan Efisiensi Belanja Negara berkewajiban mengembangkan dan implementasi <i>e-procurement</i> . (Menko Perekonomian, <i>Pengadaan yang kredibel, mensejahterakan bangsa</i> , Meneg. kominfo, Bappenas, dan Setneg)
3	Lampiran I Bab IV Kepres No. 80 Tahun 2003 (Huruf D) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	“ <i>.....e-procurement</i> disesuaikan dengan kepentingan PPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
4	Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	“..... menginstruksikan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menkeu, Bappenas melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem <i>e-Procurement</i> yang dapat digunakan bersama oleh Instansi Pemerintah.”

5	Perpres No. 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dewan TIK Nasional	Salah satu tugasnya adalah menentukan program <i>flagship</i> (<i>e-procurement</i> oleh Bappenas)
6	Perpres No. 106 Tahun 2007 (Pasal 3 huruf d) Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	“Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik (<i>electronic procurement</i>);“
7	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	– Pasal 5 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan <i>alat bukti hukum yang sah</i> . – Pasal 11: Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum Pengadaan yang kredibel, mensejahterakan bangsa yang sah.
8	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	– Pasal 2 (1) : Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Pasal 4 ayat (1, 2, dan 4): (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak : a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan/atau d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan Pengadaan yang kredibel, mensejahterakan bangsa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
9	Perpres No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan pemerintah Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014	Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara elektronik menuju satu pasar nasional dengan jumlah LPSE 500 buah sampai tahun 2014

Sumber : Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tahun 2010

2.1.5 Sistem Informasi

2.1.5.1 Pengertian Sistem

Suatu sistem sangatlah dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintahan, karena sistem sangat menunjang kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Agar bisa berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama antara unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut. Jogiyanto (2008:1) memberikan mendefinisikan pengertian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Jogiyanto (2008:2) mendefinisikan kembali lebih terarah bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.5.2 Pengertian Informasi

Informasi merupakan data yang telah diproses sehingga mempunyai arti tertentu bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data, sedangkan data itu sendiri adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kejadian itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, dalam hal ini informasi dan data saling berkaitan. Jogiyanto (2008:8) memaparkan informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

Menurut James A. O'Brien (2007:45) pengertian sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Sedangkan definisi Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis (dalam Jogiyanto 2008:11), sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

2.1.5.3 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Jones & Rama (2008:5) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang menyediakan informasi tentang akuntansi dan keuangan sebaik informasi lain yang diperoleh dari proses rutin dalam transaksi akuntansi.

Sementara Romney & Steinbart (2004:28) menyampaikan ada beberapa manfaat dan tujuan penting Sistem Informasi Akuntansi pada sebuah organisasi antara lain:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi
2. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, serta
3. Melakukan pengendalian secara tepat terhadap aset organisasi.

Romney & Steinbart (2009:29) juga menjelaskan, terdapat 5 komponen dalam Sistem Informasi Akuntansi, yaitu:

1. *People*, yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi
2. *Prochcedure*, baik manual maupun terotomatisasi, termasuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data yang berhubungan aktivitas organisasi
3. *Data*, mengenai kegiatan atau proses bisnis organisasi
4. *Software*, digunakan untuk memproses data yang ada di organisasi
5. *Information Technology Infrastructure*, termasuk didalamnya komputer, peralatan periperal dan peralatan komunikasi jaringan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengertian, hambatan dan beberapa implementasi *e-procurement* di Australia, Skotlandia, dan juga beberapa sektor publik di Indonesia, maka dalam penelitian ini penulis kembangkan beberapa aspek yang nantinya menjadi dasar dalam penilaian keberhasilan sistem *e-procurement* khususnya yang ada di Kementerian Agama se Sulawesi Utara.

Hal tersebut juga didukung dengan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penilaian keberhasilan sistem teknologi dan aspek teknis yang mendukung keberhasilan sebuah sistem *e-procurement*.

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

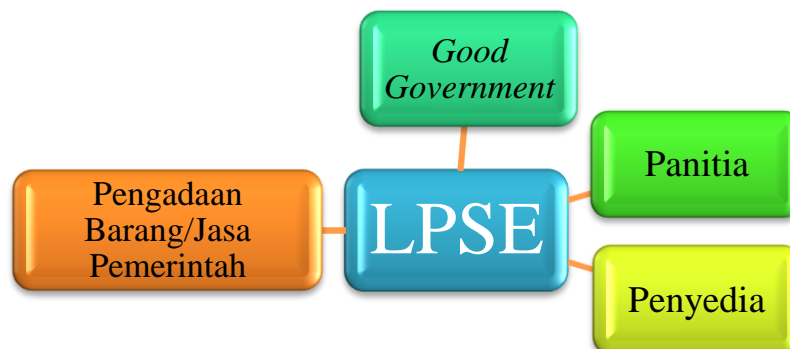
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan penelitian ini	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Diaswati Mardiasmo (2007)	Studi Penerapan <i>E- Procurement</i> Pada Proses Pengadaan Di Pemerintah Kota Surabaya	Pemusatan manajemen dan kontrol yang lebih baik menciptakan proses pengadaan yang bersih, transparan dan dapat diterima.	Penelitian mengukur penciptaan proses pengadaan yang bersih transparan dan dapat diterima, dan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap efisiensi pengadaan meliputi pengurangan biaya per tender (Cost per Tender) dan mengurangi waktu proses pengadaan	Waktu dan lokasi penelitian
2	Ita Akyuna Nightisabha, Djoko Suhardjanto dan Bayu Tri Cahya (2009)	Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem <i>E-procurement</i>	Kehadiran teknologi sebagai penunjang dalam kegiatan pelayanan publik berupa e-government dan pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa e-procurement membawa dampak positif dalam berbagai hal, terutama dalam menciptakan transparansi publik dan efektivitas kegiatan pengadaan barang dan jasa.	<i>E-procurement</i> sedang berada dalam tahap yang sama yaitu proses penyesuaian atas perubahan sistem pengadaan konvensional ke sistem elektronik	Waktu dan lokasi penelitian
3	Didik Wisnugroho (2011)	Implementasi Kebijakan <i>E-Procurement</i> Di sektor publik (Perbandingan LPSE Provinsi DIY dan LPSE Kota Yogyakarta)	Komitmen dari Gubernur Jogjakarta untuk memaksimalkan sistem <i>e-procurement</i> tidak didukung oleh <i>middle manager</i> . Hal ini disebabkan karena lemahnya dukungan atas implementasi sistem ini.	Penelitian pelaksanaan <i>e-procurement</i> melihat pelaksanaan <i>good governance</i> dengan meminimalisir praktek KKN.	KPA di setiap Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama mendukung pelaksanaan <i>e-procurement</i> .
4	Endang Asliana (2012)	Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia	Komitmen yang kuat dari semua pihak terutama para kepala daerah dan pejabat teras untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa di yang lebih mensejahterakan bangsa serta efisien melalui pelelangan secara <i>on-line</i> dan dukungan DPR RI.	<i>E-procurement</i> menciptakan persaingan yang sehat, lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta lebih aman. Kelemahan terletak pada server yang <i>down</i>	Lokasi penelitian lebih spesifik dalam hal ini hanya di Kementerian Agama se Provinsi Sulawesi Utara

3. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Persepsi pengguna dalam implementasi sistem *e-procurement* Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang dikembangkan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Agama RI tertuang dalam kerangka pikir berikut :

Gambar 3.1: Kerangka Berpikir



3.2 Model Analisis

Penelitian menggunakan metode kualitatif secara etnografi. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, dimana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu per satu dengan anggota kelompok tersebut.

Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan budaya tertentu. Metode penelitian etnografi dianggap mampu menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas. Dengan teknik "*observatory participant*", etnografi menjadi sebuah metode penelitian yang unik karena mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu.

Penelitian etnografer berlangsung tidak secara linear, melainkan dalam bentuk siklus. Berbagai tahapan, seperti pengumpulan data, analisis data dan interpretasi, dilakukan secara simultan dan bisa diulang-ulang. Menurut Spradley (2007) siklus penelitian etnografi mencakup enam langkah :

1. pemilihan proyek etnografi,
2. pengajuan pertanyaan,
3. pengumpulan data,
4. perekaman data,
5. analisis data dan
6. penulisan laporan.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang bersifat empiris (dapat diamati dengan panca indera sesuai dengan kenyataan), hanya saja pengamatan atas data bukanlah berdasarkan ukuran-ukuran matematis yang terlebih dulu ditetapkan peneliti dan harus dapat disepakati (direplikasi) oleh pengamatan lain, melainkan berdasarkan ungkapan subjek penelitian, sebagaimana yang dikehendaki dan dimaknai oleh subjek penelitian. Pendekatan kualitatif terutama layak untuk menelaah sikap atau perilaku dalam lingkungan yang agak artifisial, seperti dalam survei atau eksperimen. Kualitatif merupakan kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, pengamatan. (Septiawan, 2010: 5).

Penelitian kualitatif yang digunakan untuk menilai persepsi para pengguna *e-procurement* menggunakan metode etnografi yang secara harfiah bermakna “menulis tentang kelompok-kelompok orang”. Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai etnografi :

Sebagai metode penelitian kualitatif, etnografi dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Spradley mengungkapkan beberapa tujuan penelitian etnografi, yakni: Pertama, untuk memahami rumpun manusia. Dalam hal ini, etnografi berperan dalam menginformasikan teori-teori ikatan budaya; menawarkan suatu strategi yang baik sekali untuk menemukan teori grounded. Kedua, etnografi ditujukan guna melayani manusia. Tujuan ini berkaitan dengan prinsip menyuguhkan *problem solving* bagi permasalahan di masyarakat, bukan hanya sekadar ilmu untuk ilmu. (Spradley, 2007: 4).

Dalam kaitan dengan penelitian ini, peneliti adalah anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Agama Prov. Sulawesi Utara, sehingga terjun langsung untuk berhubungan dengan pengguna yang ditelitinya. Dengan menggunakan metode ini, bisa diamati bagaimana pengguna bertindak, bagaimana mereka berinteraksi dalam praktek keseharian ketika terjadi lelang barang/jasa berbasis *e-procurement*, seperti pengumuman tepat waktu, kekuatan jaringan internet dan harapan pengguna terhadap pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*).

Penelitian etnografi meneliti suatu proses dan hasil akhir. Akhir dari penelitian adalah membuat tulisan yang kaya akan gambaran detail dan mendalam mengenai objek penelitian (*thick description*). Sebagai penelitian suatu proses, seorang etnografer melakukan *participant observation*, dimana seorang peneliti melakukan eksplorasi terhadap kegiatan hidup sehari-hari dari objek kelompoknya, melakukan pengamatan dan mewawancarai anggota kelompok dan terlibat didalamnya.

Participant observation juga berarti bahwa peneliti ikut terlibat dan ikut berperan dalam pengamatan. Bagi keperluan penelitian ini seorang etnografer memerlukan seorang *key informant* atau *gatekeeper* yang bisa membantu menjelaskan dan masuk ke dalam kelompok tersebut. Selain itu seorang etnografer harus mempunyai sensitivitas tinggi terhadap partisipan yang sedang ditelitinya, karena bisa jadi peneliti belum familiar terhadap karakteristik mereka. Berikut ini aspek atau karakteristik etnografi yang dirangkum dari Wolcott dan Gay, Mills dan Airasian adalah sebagai berikut :

1. Berlatar alami bukan eksperimen di laboratorium;
2. Interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan;

3. Mengambil data utama dari pengalaman di lapangan;
4. Menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen dan material visual;
5. Peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi;
6. Peneliti menyajikan ceritanya secara informal seperti seorang pendongeng;
7. Menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial bukan untuk menguji hipotesis;
8. Format keseluruhannya adalah deskriptif, analisis dan interpretasi;

4.2 Responden Penelitian

Menurut Kanto (2003:53), penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi. Sampel dipilih dengan kriteria tertentu, berdasarkan teori dan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar sample sungguh-sungguh mewakili (bersifat representatif terhadap) fenomena yang dipelajari.

Oleh karena itu untuk mendapatkan sejumlah informasi dan data primer yang berkaitan dengan pokok permasalahan utama, penelitian hanya dibutuhkan beberapa responden saja, 2 (dua) responden utama (informan kunci) dan 4 (empat) responden penunjang.

Adapun Satuan Kerja (satker) di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara digambarkan pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Satuan Kerja Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN KERJA
1	Manado	Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Utara
2		STAIN Manado
3		STAKN Manado
4		Balai Diklat Keagamaan Manado
5		Kantor Kementerian Agama Kota Manado
6		MAN Model Manado
7		MTsN Manado
8		MIN 2 Bailang
9		MIN Molas
10	Tomohon	Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon
11	Bitung	Kantor Kementerian Agama Kota
12		MTsN Maesa Bitung
13		MIN Bitung
14	Minahasa	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa
15		MTsN Kawangkoan
16		MIN Sea

17	Minahasa Selatan	Kantor Kementerian Agama Kab. Minahasa Selatan
18	Minahasa Utara	Kantor Kementerian Agama Kab. Minahasa Utara
19	Minahasa Tenggara	Kantor Kementerian Agama Kab. Minahasa Tenggara
20	Kota Kotamobagu	Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu
21		MAN Kotamobagu
22		MTsN Kotamobagu
23		MTsN Kotamobagu Selatan
24	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kantor Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow
25		MAN Dumoga Utara
26		MTsN Dumoga
27		MTsN Lolak
28		MIN Lolak
29		MIN Mopuya
30		MIN Wangga
31	Kabupaten Bolmut	MTsN Bolangitang Timur
32	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	MTsN Biniha
33		MTsN Tolutu
34		MTsN Tolondadu
35		MIN Tolondadu
36		MIN Bolaang Uki
37	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kantor Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Timur
38		MTsN Bongkudai
39		MTsN Kotabunan
40	Kabupaten Kepl. Sangihe	Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Sangihe
41		MTsN Tahuna
42		MIN Beha Tabukan Utara
43		MIN Ngalipaeng
44	Kabupaten Kepl. Talaud	Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Talaud
45	Kabupaten Kepl. Sitaro	Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Sitaro

Sumber : Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2013

4.3 Instrumen Penelitian

Etnografer adalah orang yang melakukan penelitian, menggali informasi dari informan dan tinggal di lapangan bersama subyek penelitian untuk mengumpulkan semua data dan menuliskannya dalam sebuah tulisan etnografi. Emzir (2011) mengatakan bahwa penelitian etnografi menggunakan tiga macam pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumen.

Seorang etnografer mencari informan kunci, yaitu individu yang mampu memberikan pandangan yang berguna tentang kelompok dan dapat mengarahkan si peneliti mengumpulkan informasi dan hubungan. Seperti pada penelitian ini yang berusaha mengumpulkan informasi dari para pengguna, panitia dan terlibat pada Orientasi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pelatihan Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dari tesis ini adalah pada Kementerian Agama Se Sulawesi Utara, yang pernah mengadakan pelelangan barang/jasa secara elektronik sejak 2012-2013. Sedangkan untuk waktu penelitian, diperkirakan penelitian ini akan diperlukan waktu sekira 3 bulan untuk penyelesaian tesis ini.

4.5 Cara Pengolahan dan Analisis Data

Teknik yang dipilih pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Netnografi
Netnografi adalah studi etnografi yang dikerjakan secara *online* (melalui internet). Observasi yang dilakukan untuk penelitian ini adalah melalui *internet browsing* mengenai topik penelitian.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Studi kepustakaan diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian dalam tesis ini, menghubungkan penelitian tesis dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang topik yang sama, dan memberi kerangka untuk melakukan analisis terhadap topik penelitian. Studi kepustakaan dalam rangka penelitian tesis dilakukan dengan cara mempelajari sejumlah literatur, jurnal, paper, naskah akademis dan tesis yang dinilai mampu memberikan kerangka teori bagi penelitian ini.
Peneliti juga mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan mengenai pengadaan barang/jasa serta penerapan *e-procurement* untuk menunjang pelaksanaan *good governance*. Di samping itu, peneliti juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh baik dari website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maupun website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Agama RI. Data-data sekunder diperlukan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai bahan yang diteliti.
3. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) menggunakan pedoman wawancara terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan website <http://lpse.kemenag.go.id>. Wawancara terhadap para pengguna tersebut, untuk mencapai sasaran penelitian, yakni mendapatkan data mengenai persepsi mereka setelah adanya pemanfaatan website <http://lpse.kemenag.go.id> dalam

proses pengadaan barang dan jasa antara lain Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Penyedia Barang/Jasa.

Narasumber pertama adalah Kepala Kantor Wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan dari mulai pelaksanaan anggaran, pengadaan barang, dan kebenaran surat keputusan yang diterbitkan. KPA-lah yang melakukan pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Tim Pengelola Keuangan serta membentuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia pengadaan barang/jasa.

Wawancara terhadap narasumber ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang pelaksanaan *e-procurement* di Kementerian Agama se Sulawesi Utara dan apa manfaat yang dirasakan setelah pemanfaatan *e-procurement* pada proses pelelangan barang dan jasa diatas Rp. 200 juta, mengingat apabila terjadi kerugian keuangan negara akibat perubahan teknis pekerjaan menjadi tanggung jawab KPA/PPK untuk dikenakan ganti rugi bahkan jia terbukti tindak perubahan teknis pekerjaan itu sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri (manipulasi anggaran) akan dikenakan tindakan pidana korupsi.

Narasumber kedua adalah Pejabat Pembuat Komitmen diambil sampel Pembimas Katolik. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. PPK dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan/proyek disahkan dengan ketentuan anggaran telah tersedia atau cukup tersedia.

Narasumber utama adalah kepada kelompok Panitia pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Tugas Panitia yang menggunakan LPSE antara lain menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk dan mengusulkan calon pemenang. Panitia beresiko mendapatkan tekanan dari penyedia, kemudian pemeriksaan yang intensif dari Inspektorat, BPKP, BPK, dan KPK.

Narasumber terakhir adalah Penyedia barang/jasa di pemerintahan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa. Persyaratan kualifikasi penyedia barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 antara lain seperti yang diatur dalam pada pasal 19 ayat (1) huruf k yang berbunyi:

“Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan”.

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Garis Besar Pengadaan Barang dan Jasa

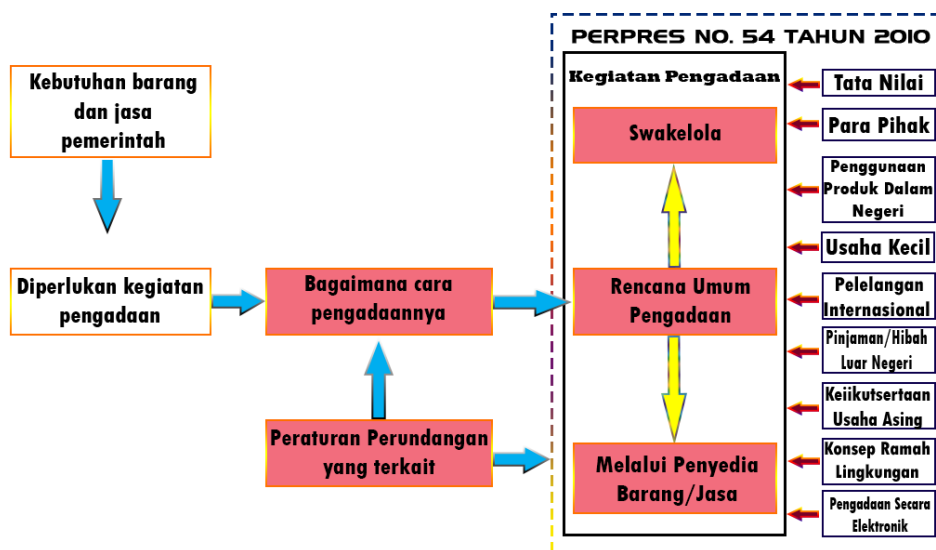
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 telah mengalami perubahan sebanyak 8 kali yaitu: melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2006, Peraturan Presiden nomor 85 tahun 2006, dan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007.

Pertimbangan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 menjadi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 adalah:

1. Untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara,
2. Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam pelaksanaan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah,
3. Agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlaksana dengan baik sesuai dengan konteks dan kondisi kebutuhan pengadaan barang/jasa.

Secara garis besar, Perpres 54/2010 dapat dilukiskan seperti berikut ini :

Gambar 5.2 Garis Besar Proses Barang dan Jasa



Sumber : Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia, tahun 2010

Secara garis besar, Perpres 54/2010 mengatur bagaimana kegiatan pengadaan harus dilakukan (BAB VI Perpres 54/2010) yaitu Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (BAB IV) dan kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara:

1. **Melalui Swakelola**, yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

2. **Melalui Penyedia Barang/Jasa**, yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

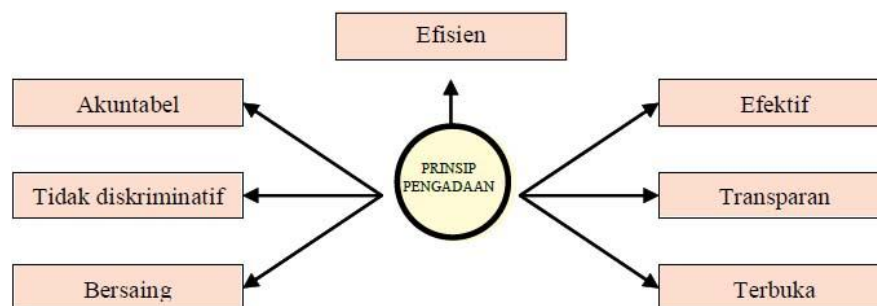
Pengelompokan kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan kedalam jenis-jenis barang/jasa sebagai berikut:

1. **Barang**, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
2. **Pekerjaan Konstruksi**, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
3. **Jasa Konsultansi**, yaitu Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
4. **Jasa Lainnya**, yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

5.2.2 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar seperti disajikan dalam bentuk gambar yang dapat dilihat pada Gambar 5.5 berikut ini :

Gambar 5.5 Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa



Sumber: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia, tahun 2010

Penerapan ketujuh prinsip diharapkan dapat membuat pengadaan barang/jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yang maksimal bagi semua pihak.

5.2.3 Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan dan Aturan Khusus

5.2.3.1 Peraturan dan Kebijakan

Dasar hukum dan ketentuan/peraturan pengadaan barang/jasa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Dasar Hukum Utama
 - a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan-Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Dasar Hukum Terkait
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pennyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi;
 - e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5.2.3.2 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya.

5.2.4 Para Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa

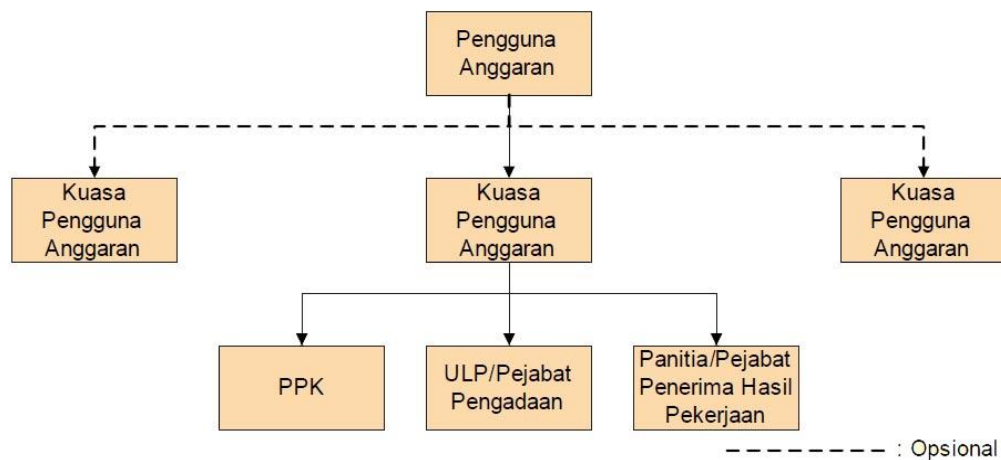
5.2.4.1 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari unsur-unsur :

1. PA/KPA
2. PPK
3. ULP/Pejabat Pengadaan
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Secara diagram struktur organisasi tersebut dapat digambarkan seperti yang dapat dilihat pada gambar 5.6 :

Gambar 5.6 Struktur Organisasi Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa



Sumber : Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia, tahun 2010

5.2.4.2 Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Para pihak dalam pengadaan barang/jasa terdiri dari:

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pembuat Komitmen
4. Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
6. Penyedia Barang/Jasa

Ketentuan-ketentuan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Perpres 54/2010 pada pasal 7 sampai dengan pasal 21. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur:

1. Penanggungjawab utama terhadap anggaran yang diberikan kepada K/L/D/I adalah PA atau KPA yang diberi kewenangan oleh PA.
2. Fungsi-fungsi yang ada dalam proses pengadaan terdiri dari:
 - a. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa, dalam hal ini dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
 - c. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam hal ini dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan.

Hubungan kerja antara ketiga fungsi tersebut bersifat koordinatif dan ketiga-tiganya diangkat dan bertanggung-jawab kepada PA/KPA. Dengan demikian ketiga fungsi tersebut bisa bekerja secara independen dengan harapan akan terjadi saling mengendalikan.

5.2.5 Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Ruang lingkup berlakunya Perpres 54/2010 ini dapat disajikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Ruang Lingkup Berlakunya Perpres 54/2010

SUMBER DANA PENGADAAN	PERUNTUKAN PENGADAAN
<ul style="list-style-type: none">- Sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD; atau- Sebagian atau seluruhnya dari pinjaman/hibah luar negeri	<p>Semua jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan K/L/D/I</p> <p>Semua jenis Barang/Jasa investasi yang dibutuhkan di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah</p>
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bila ada perbedaan peraturan dengan pemberi pinjaman/hibah, maka para pihak dapat membuat kesepakatan tentang tata cara pengadaan- Contoh barang/jasa investasi adalah kendaraan, bangunan kantor, pelatihan SDM untuk pengembangan kapasitas kerja, pengadaan alat kerja (komputer, furniture kantor), pengembangan sistem informasi, pembelian mesin untuk meningkatkan produksi dan sejenisnya	

Sumber : Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia, tahun 2010

5.2.6 Etika Pengadaan dan *Good Governance*

5.2.6.1 Etika Pengadaan

Etika pengadaan barang/jasa meliputi :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Para pihak tidak boleh memiliki peran ganda atau terafiliasi dalam proses pengadaan demi menjamin perilaku konsisten para pihak dalam melakukan pengadaan.

5.2.6.2 Good Governance

Istilah *good governance*, baru kita kenal dalam sepuluh tahun terakhir, terutama dengan merebaknya tuntutan/desakan agar dapat dilakukan kontrol/pengawasan (*exercised*) terhadap pemerintah, yang berkaitan dengan:

1. Proses pemilihan pemerintah, yang harus jujur dan transparan.
2. Kemampuan dan kapasitas pemerintah mengelola sumberdaya (*resources*) secara efisien dan cara memformulasikan, kebijakan dan mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik (*sound*) dan tidak berpihak;
3. Kemampuan pemerintah menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial diantara para pihak terkait (*stake holders*), dengan secara adil, transparan dan akuntabel.

Mulai disadari pula bahwa pemerintah selalu kurang/terlambat mendapatkan akses informasi, oleh karena itu sering kebijakan yang dikeluarkan pemerintah malah menimbulkan distorsi. Karenanya, banyak yang sepakat, bahwa mekanisme pasar akan dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

Bank Dunia mendefinisikan "*good governance*" adalah terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik (*sound development management*). Kemudian faktor kuncinya ialah manajemen sektor publik yang antara lain memenuhi kaidah-kaidah: akuntabilitas (*accountability*), kerangka pengaturan (*legal frame work*) untuk pembangunan, informasi, transparansi.

Sedangkan, Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*), pada dasarnya memiliki pandangan yang sama dengan Bank Dunia, memperhatikan *issue "good governance"* dari segi efektivitas pemerintah melakukan fungsinya, dampak dari program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kapasitas penyerapan (*absorptive capacity*) terutama berkaitan dengan penggunaan dana-dana yang berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia.

Selanjutnya, Bank Pembangunan Asia menguraikan empat elemen dasar dari "*good governance*", yaitu: akuntabilitas, partisipasi, *predictability*, dan transparansi.

5.2.7 Pelaksanaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia Barang dan Jasa

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa merupakan penyusunan rencana kerja secara rinci untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam persiapan ini sebagai berikut:

1. Pengkajian ulang rencana umum pengadaan
2. Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan
3. Pemilihan sistem pengadaan yang meliputi:
 - a. Memilih dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa
 - b. Memilih dan menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran
 - c. Memilih dan menetapkan metode evaluasi penawaran
 - d. Memilih dan menetapkan jenis kontrak
4. Memilih dan menetapkan metode penilaian kualifikasi
5. Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan
6. Penyusunan dokumen pengadaan
7. Penyusunan HPS
8. Menetapkan Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi

5.2.8 Ketentuan Dalam Mengumumkan Rencana Pengadaan Barang/Jasa

Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam melakukan pengumuman ini adalah sebagai berikut :

1. Waktu pengumuman:
 - a. Setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.
 - b. Dapat mengumumkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Media pengumuman:
 - a. Website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) masing-masing; dan
 - b. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; serta
 - c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
3. Materi pengumuman paling kurang berisi:
 - a. Nama dan alamat PA;
 - b. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, baik dilaksanakan melalui penyedia jasa maupun melalui swakelola.
 - c. Lokasi pekerjaan; dan
 - d. Perkiraan besaran anggaran.

5.2.8.1 Sanksi

Sanksi yang dapat diberikan kepada penyedia karena pelanggaran tersebut berupa:

1. sanksi administratif;
2. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
3. gugatan secara perdata; dan/atau
4. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Sedangkan sanksi yang dapat diberikan kepada ULP/Pejabat pengadaan yang melakukan kecurangan :

1. dikenakan sanksi administrasi;
2. dituntut ganti rugi; dan/atau;
3. dilaporkan secara pidana.

Pada tabel 5.2 dan tabel 5.3 dan tabel 5.4 dapat dilihat jenis-jenis perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPK yang dapat dikenakan sanksi beserta jenis-jenis sanksi yang dikenakan.

Tabel 5.2 Perbuatan ULP/Pejabat Pengadaan Yang Dapat Dikenakan Sanksi

Perbuatan atau Tindakan	Sanksi
Adanya pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan	Administratif, dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana
Kecurangan dalam pengumuman pengadaan	Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Sumber: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia, tahun 2010

Tabel 5.3 Perbuatan/Tindakan PPK Yang Dapat Dikenakan Sanksi

Perbuatan atau Tindakan	Sanksi
Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak (misalnya: Keterlambatan pembayaran)	Membayar bunga terhadap nilai tagihan yang belum dibayar, atau membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak

Sumber: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia, tahun 2010

Tabel 5.4 Perbuatan Penyedia Yang Dapat Dikenakan Sanksi

Perbuatan atau Tindakan	Sanksi
Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenang untuk melanggar ketentuan	Administratif dan/atau Daftar Hitam dan/atau gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana
Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur proses pengadaan	
Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar/palsu	
Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima oleh ULP/PP	
Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak	
Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.	Administratif dan Daftar Hitam + Finansial
Terlambat menyelesaikan perjaan Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara	Denda keterlambatan sebesar 1/1000 per hari dari harga kontrak atau bagian kontrak, maksimal sebesar Jaminan Pelaksanaan Menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan/atau tuntutan ganti rugi

Sumber : Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia, tahun 2010

5.2.9 Pembentukan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. K/L/D/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (*Service Level Agreement*) dengan LKPP. LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki alamat LPSE sendiri, tapi langsung menggunakan <http://lpse.kemenag.go.id> (alamat ini milik LPSE Kementerian Agama RI) seperti pada gambar 5.8 dibawah ini :

Gambar 5.8 Website LPSE Kementerian Agama RI



Sumber: <http://lpse.kemenag.go.id>, tahun 2013

Fungsi LPSE adalah :

1. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
4. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
5. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa.

Gambar 5.9 Tahapan Mengikuti *e-Procurement* Melalui LPSE



Sumber : Modul Penggunaan *E-Procurement*, tahun 2010

5.2.9.1 *E-procurement*

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003 dan pada Perpres No.54 Tahun 2010 ditegaskan pula. Terhadap semua informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan *e-Tendering* atau *e-Purchasing*:

1. *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
3. Para pihak yang terkait dengan *E-Procurement* dapat digambarkan seperti gambar berikut ini :



Sumber: Modul Penggunaan *E-Procurement*, tahun 2010

5.2.9.2 Hubungan Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan LPSE

ULP dapat melaksanakan pelelangan secara elektronik, melalui LPSE, dimana :

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan unit Layanan yang memfasilitasi ULP dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE)
2. Layanan yang diberikan LPSE diutamakan terhadap ULP terdekat dalam territorial tetapi tidak tertutup kemungkinan yang letaknya berjauhan berdasarkan pertimbangan efektifitas dan kemudahan pelaksanaan pengadaan secara elektronik bagi pihak-pihak yang terlibat.
3. Layanan yang diberikan meliputi:
 - a. Memfasilitasi PA/KPA dengan memberikan dukungan teknis dalam hal pengumuman rencana umum pengadaan pada portal pengadaan nasional;
 - b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihanpenyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. Memfasilitasi ULP dalam pelatihan dan dukungan teknispengoperasian aplikasi SPSE;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - f. Memberikan User ID dan Password sebagai sarana login bagi ULP untuk memulai Pengadaan secara elektronik;
 - g. Menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e+epofting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik jika diperlukan;
 - h. Memberikan akses bagi pemeriksa terhadap proses paket-paket pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP bersangkutan, setelah mendapatkan ijin dari KPA/PA dengan menunjukkan surat tugas;
 - i. Menonaktifkan User ID dan Password bagi ULP yang sudah tidak berhak menggunakan atau apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*;
 - j. LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat;
 - k. LPSE dapat melayani kebutuhan ULP bagi BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

4. Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
5. Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.

5.2.10 Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan ;
4. Mendukung proses monitoring dan audit ; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dikembangkan oleh LKPP. LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Untuk itu, LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.

Gubernur/Bupati/Walikota dan K/L/I membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi.

Kementerian Agama RI dalam hal ini menyediakan website sendiri yang bisa diakses oleh Satuan Kerja (SATKER) yang ada diseluruh Indonesia yaitu dengan cara mengakses <http://lpse.kemenag.go.id>.

5.2.10.1 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *E-Tendering* yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada SPSE dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Tata cara *E-Tendering*, syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (*user guide*) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*.

5.2.10.2 Admin Agency LPSE

Admin Agency adalah administrator dari suatu instansi yang menggunakan SPSE. Admin Agency mendapat kode akses (*User ID* dan *Password*) untuk masuk ke dalam SPSE dari pengelola LPSE dengan menunjukkan surat pengangkatan sebagai Admin Agency.

5.2.10.3 Helpdesk LPSE

Helpdesk merupakan seorang yang bertugas memberikan informasi atau membantu Pengguna SPSE apabila mengalami masalah. Dalam SPSE, *Helpdesk* mempunyai wewenang menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam menu Tanya Jawab halaman utama SPSE. *Helpdesk* mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) dari Admin PPE dengan menunjukkan Surat Penunjukan sebagai *Helpdesk*. Helpdesk dapat mengirim ulang konfirmasi *email* dari sistem apabila ada Pengguna yang merasa belum menerima konfirmasi *email* tertentu.

5.2.10.4 Panitia LPSE

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Dalam SPSE, Panitia mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Membuat Paket;
2. Menyusun spesifikasi lelang dan mengumumkannya;
3. Melakukan penjelasan lelang (*aanwijzing*);
4. Mengunggah Dokumen Adendum Lelang (jika terdapat adendum dokumen lelang);
5. Mengunduh dan melakukan pembukaan dokumen penawaran;
6. Melakukan evaluasi lelang;
7. Mengunggah berita acara evaluasi penawaran dan hasil pelelangan;
8. Menetapkan pemenang lelang;
9. Mengumumkan pemenang lelang;
10. Menjawab sanggahan.

Untuk mengakses ke dalam SPSE, panitia mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) dari Admin Agency dengan menunjukkan Surat Penunjukan sebagai Panitia Pengadaan dan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang merupakan perangkat lunak keamanan informasi elektronik yang hanya diperkenankan untuk aplikasi *e-Procurement* yang diselenggarakan oleh LKPP. APENDO terdiri dari dua aplikasi yaitu APENDO Peserta dan APENDO Panitia.

Terdapat pula *link* untuk mengunduh Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) dan buku petunjuk penggunaan aplikasi untuk Panitia/Kelompok Kerja. Apendo digunakan juga untuk membuka dokumen penawaran peserta. Selain itu juga terdapat filter untuk melihat data lelang yang masih berupa draft, aktif, selesai, dibatalkan atau ditolak. Gambar 5.13 menggambarkan Apendo Panitia.

Gambar 5.13 Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) Panitia



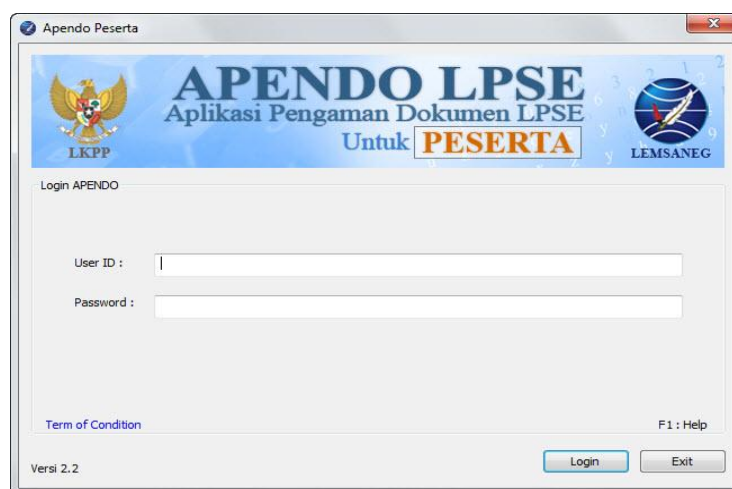
Sumber : Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, tahun 2010

5.2.10.5 Penyedia LPSE

Untuk dapat mengikuti lelang melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), terlebih dahulu Publik (masyarakat umum yang termasuk didalamnya perusahaan yang akan menjadi penyedia) harus mendaftar untuk menjadi penyedia. Pendaftaran ini dilakukan secara *online* dan *offline*. Pendaftaran secara *online* dilakukan di <http://lpse.kemenag.go.id> sedangkan secara *offline* dilakukan setelah selesai melakukan pendaftaran secara *online* dengan cara mendatangi langsung LPSE setempat.

ADP Inaproc memungkinkan satu Penyedia yang terdaftar di satu LPSE dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa melakukan registrasi dan verifikasi ulang. Untuk dapat *login* di LPSE lain Penyedia harus melakukan aktivasi secara *online* di salah satu LPSE di mana Penyedia telah terdaftar sebelumnya. Setelah melakukan aktivasi maka akan terbentuk *User Id* tunggal, yaitu *User Id* yang akan digunakan di seluruh LPSE, tapi terlebih dahulu harus mengisi seluruh dokumen penawaran lewat APENDO Peserta seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 5.14 dibawah :

Gambar 5.14 Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) Peserta



Sumber : Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, tahun 2010

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh Penyedia dalam SPSE, yaitu:

1. Pendaftaran Penyedia;
2. Melengkapi data Penyedia;
3. Mendaftar untuk ikut lelang;
4. Mengunduh dokumen lelang;
5. Mengikuti penjelasan lelang (*aanwijzing*);
6. Mengirim dokumen kualifikasi;
7. Mengirim dokumen penawaran;
8. Melakukan sanggah;
9. Mengunggah tembusan sanggah banding.

5.2.10.6 Verifikator LPSE

Verifikator merupakan pejabat yang bertugas menangani pendaftaran Penyedia untuk dapat menggunakan SPSE. Dalam SPSE, Verifikator mempunyai wewenang untuk menyetujui/tidak menyetujui pendaftaran dari Penyedia untuk dapat masuk ke dalam SPSE.

5.3 Pembahasan

Pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik yaitu e-Procurement merupakan alat bantu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Siahaya (2012:80) pengadaan secara elektronik (*e-Proc*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau Electronic Data Interchange (EDI). Pengadaan secara elektronik tersebut diharapkan mampu membantu serta meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam melakukan proses pengadaan. Pengadaan secara elektronik melalui e-Procurement sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari adanya *e-Procurement* yang dikemukakan oleh Siahaya (2012:80) sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Di dalam penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa dirasa masih ada beberapa kekurangan. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan, monitoring serta evaluasi dari hasil pengadaan secara elektronik dan melakukan analisis sistem *e-Procurement*, dan untuk mengetahui adanya kekurangan sistem tersebut.

5.3.1 Analisis Pelaksanaan *E-Procurement* Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Agama Se Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan di lapangan dan didasarkan dengan teori yang berkaitan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa setelah menggunakan *e-procurement* di Kementerian Agama se-Sulawesi Utara berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala. Mekanisme pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* Kementerian Agama telah mengikuti dengan baik prinsip-prinsip pengadaan seperti menurut Siahaya (2012:11-12) sebagai berikut:

1. Efisien

Berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003, efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.

Efisien tidak selalu diwujudkan dengan harga barang/jasa termurah, karena selain harga masih ada elemen lain yang harus dipertimbangkan antara lain, besarnya biaya operasional dan pemeliharaan, ketersediaan suku cadang atau jangka waktu/umur barang yang dibeli.

Dibandingkan dengan pelelangan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya yang jauh lebih besar, penerapan *e-procurement* di Kementerian Agama Sulawesi Utara sangat efisien. Salah seorang PPK di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan pada

sistem konvensional, penggunaan dokumen lelang, waktu yang banyak terbuang, biaya makan minum bagi para peserta lelang adalah hal mutlak dan banyak memakan biaya. Dia menganggap metode *e-procurement* jauh lebih murah karena *paperless*.

2. Efektif

Efektif berarti pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Pengadaan barang/jasa yang bisa diakses lewat <http://lpse.kemenag.go.id> telah bisa dirasakan manfaatnya baik dari sisi panitia dan penyedia terutama sekali dari sisi biaya baik biaya foto copy dokumen, transportasi bahkan konsolidasi. Dengan adanya *e-procurement* maka penyedia tidak perlu menyiapkan dokumen dalam bentuk *hard copy* yang tentunya memakan banyak biaya dan dari sisi panitia tidak perlu menumpuk seluruh berkas penyedia. Panitia hanya perlu mencetak dokumen penyedia yang menang lelang.

3. Kompetitif

Dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan. Dari sisi pengguna barang/jasa dalam hal ini Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Utara, memiliki lebih banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik.

4. Transparan

Menurut Keppres 80/2003, transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, transparansi juga berkaitan erat dengan tersedianya waktu yang cukup bagi calon peserta penyedia barang/jasa, sehingga mereka bisa mempersiapkan respon atas pengumuman.

Pada lelang konvensional, transparansi informasi didapatkan dengan datang langsung ke kantor Kementerian Agama yang mengadakan lelang pengadaan barang/jasa. Tahap *aanwijzing* yang seharusnya bisa memberikan penjelasan kepada seluruh penyedia yang berarti ada tatap muka, memungkinkan terjadinya persekongkolan. Setelah adanya penerapan *e-procurement* di Kementerian Agama sejak 2012, maka seluruh kegiatan antara penyedia dan panitia berbasis website. Proses tanya jawab dapat dibaca semua pihak atau tepatnya lebih transparan. Salah seorang panitia yang berasal dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara berharap agar pelatihan LPSE sebaiknya tidak hanya ditujukan kepada panitia saja, tapi juga seluruh pegawai yang telah memiliki sertifikat L4 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini sangat diperlukan untuk regenerasi SDM. Dengan adanya LPSE, terjadi peningkatan informasi pengadaan dimana :

- a. Memaksimalkan penggunaan/Pengembangan *e-procurement*
- b. Memberikan informasi dan kesempatan untuk berkompetisi kepada penyedia barang/jasa melalui media:
 - i. Surat kabar lokal, regional dan nasional;
 - ii. Website Kementerian Agama Prov. Sulawesi Utara
 - iii. Papan pengumuman resmi

5. Akuntabel

Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai *supply*. Akuntabilitas disini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan norma, etika dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui hasil wawancara dengan penyedia bahwa selama ini tidak menemukan kejanggalan pada keputusan pemenang lelang, maka dapat dikatakan dengan adanya *e-procurement* di Kementerian Agama telah tercipta akuntabilitas yang baik.

Selain hal tersebut diatas, tingkat akuntabilitas e-procurement dilihat dari sejauh mana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) puas dengan keputusan panitia dan kinerja penyedia barang/jasa terpilih.

6. Adil

Pada lelang konvensional, penjelasan lelang (*aanwijzing*) dilaksanakan secara terbuka untuk suatu tender, para penyedia saat itu bisa mengetahui siapa saja yang memberikan penawaran dalam lelang. Hal ini bisa terjadi persekongkolan diantara penyedia barang dan jasa untuk menciptakan persaingan semu. Dengan sistem *e-procurement* kemungkinan tersebut bisa diperkecil karena informasi lelang hanya bisa diakses lewat website. Siapapun yang menang itu terjadi dengan adil. Secara keseluruhan perbedaan antara pengadaan barang/jasa secara manual dan elektronik bisa dilihat pada tabel 5.5 seperti dibawah ini :

Tabel 5.5 Manual vs Elektronik

No	Uraian	Manual	Elektronik
1	Proses Administrasi	Sulit	Mudah
2	Pendaftaran Vendor	Berulang-ulang	Satu kali saja
3	Penyerahan Dokumen	Datang langsung	Melalui internet
4	Frekuensi Tatap Muka	Sering	Hampir tidak ada (<i>faceless</i>)
5	Kerahasiaan Peserta Tender	Tidak terjamin	Terjamin
6	Transparansi	Rendah	Tinggi
7	Persaingan	Relatif tertutup	Terbuka
8	Peluang KKN	Terbuka	Tertutup
9	Panitia Pengadaan	Susah tidur	Nyenyak
10	Waktu Pelelangan	18 – 45 hari	18 hari
11	Efisiensi	Rendah	20 – 30%
12	Sanggah/Sanggah Banding	Banyak	Sedikit
13	Proses Pemeriksaan	Lama	Cepat, Akurat
14	Monitoring	Sulit	Mudah, Akurat

Sumber : Sumber Olahan Data, 2013

5.3.2 Hambatan Penerapan *E-Procurement* di Kementerian Agama Se Sulawesi Utara

Dalam masa tersebut, beberapa kendala dan permasalahan teknis dihadapi pada pelaksanaan *e-procurement* di Kementerian Agama antara lain:

1. Penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum menguasai teknologi dalam hal ini pemanfaatan internet, sehingga pada sistem *e-procurement* mengalami banyak kesulitan, terutama vendor di Kabupaten/Kota.
2. Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (seperti *scanner*, *installer adobe*) masih sangat terbatas untuk Panitia Pengadaan di lingkungan Kementerian Agama se Provinsi Sulawesi Utara. Terbatasnya *bandwidth* baik di Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Utara, bahkan di beberapa Kabupaten/Kota jaringan internet di kantor masih mengandalkan modem, menyebabkan masih seringnya terjadi kegagalan proses pada aplikasi *e-Procurement*.
3. Server yang *down* atau *website* yang tidak bisa diakses dalam sekian waktu bisa menyebabkan peserta tender bisa gagal melakukan *upload* dokumen penawaran karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
4. Kelemahan lainnya adalah pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang terlambat dicairkan sehingga panitia harus menggunakan ATK dari program di Sub Bagian atau Bidang dimana panitia melaksanakan tugas fungsinya masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. Tidak ada ruangan Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menunjang pengadaan barang/jasa agar lebih lancar.

5.3.3 *E-Procurement* Penunjang *Good Governance*

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan tindak pidana korupsi di setiap tahapannya. Solusi terbaik untuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan mempergunakan sistem *e-procurement* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan *e-procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan.

Penerapan LPSE di Kementerian Agama se Sulawesi Utara dapat mendorong terciptanya persaingan usaha yang semakin sehat serta memperkecil peluang kolusi dalam pengadaan barang/jasa. Lewat LPSE setiap pengusaha mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses tender atau lelang pengadaan barang/jasa secara transparan dan adil. Kecenderungan untuk memenangkan perusahaan tertentu yang sudah biasa mengerjakan proyek yang didanai APBN akan dapat dihindari.

Dalam LPSE pertemuan langsung antara panitia dan peserta lelang sangat minim, hanya dua kali, yakni saat menyerahkan dokumen untuk verifikasi dan saat peserta dinyatakan menang lelang. Diluar itu, semua diproses secara elektronik dan otomatis melalui formula program (peranti lunak) yang sudah dirancang sebelumnya.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka secara garis besar peneliti menyimpulkan:

1. Sebelum adanya sistem e-procurement, pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama se Sulawesi Utara mulai dari proses administrasi antara lain pendaftaran penyedia/vendor harus dilakukan berulang-ulang pada setiap satker yang mengadakan pelelangan diatas Rp. 200 juta. Setelah adanya *e-procurement* maka vendor hanya perlu sekali mendaftar untuk seluruh pelelangan barang/jasa di instansi manapun. Dengan keadaan ini maka panitia maupun penyedia merasa diuntungkan karena adanya penghematan waktu dan tenaga.
2. Ketika proses barang/jasa masih manual, kerahasiaan peserta tender tidak terjamin, persaingan tertutup dan tingkat transparansi rendah. Memasuki masa LPSE (Lelang Pengadaan Secara Elektronik) maka seluruhnya berubah 180 derajat. Hal ini membuat para panitia dan penyedia barang/jasa merasakan manfaat yang luar biasa, antara lain penyedia merasa persaingan terjadi secara adil dan transparan, panitia pun bisa tidur nyenyak karena tidak ada rongrongan dari berbagai pihak serta bisa menilai kelayakan suatu perusahaan lebih baik lagi.
3. Dari sisi waktu pelelangan saat pengadaan barang/jasa secara manual, 18-45 hari. Hal ini disebabkan karena proses sanggah banding yang alot sampai berhari-hari, proses pemeriksaan dan monitoring yang sulit. Saat ini seluruh proses tersebut hanya memakan waktu 18 hari saja karena dilakukan secara elektronik. Baik panitia maupun penyedia merasa diuntungkan dengan sistem elektronik ini karena terjadi penghematan anggaran yang luar biasa dan terhindar dari praktek KKN sehingga bisa meningkatkan kualitas *good governance*.
4. Saat seluruh pengadaan barang/jasa masih bersifat tertutup dan hanya diketahui oleh sedikit pihak maka dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui proses pengadaan. Hal ini membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti proses lelang dan dari sisi panitia mendapatkan penawaran yang lebih banyak serta mudahnya pertanggung jawaban proses pengadaan.

6.2 Saran

Setelah dilakukannya penelitian ini, maka disarankan :

1. Membangun dan memperluas jaringan internet pada instansi-instansi di lingkungan Kementerian Agama se Sulawesi Utara;
2. *Training* juga sebaiknya dilakukan bukan hanya terbatas pada panitia tapi kepada seluruh pegawai yang telah memegang sertifikat L2 dan L4, agar saat menjadi panitia tidak terlalu banyak melakukan kesalahan karena telah memahami proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
3. Perbaiki menu-menu lain pada situs <http://lpse.kemenag.go.id> yang diupdate sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga keamanan akan selalu terjaga atau lebih *user friendly*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Djojokusarto. 2010. *E-Procurement di Indonesia-Pengembangan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Indonesia*, LPSE Nasional, Jakarta
- Bodnar, GH & Hopwood, W.S. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta
- Croom, S.R, Brandon-Jones, A. 2007. *Impact of E-procurement: Experiences From Implementation In The UK Public Sector*, Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 13
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Rama, Dasaratha V-Jones, Frederick L. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 18, Salemba Empat, Jakarta
- James A. O'Brien. 2007. *Management Information Systems*, 10th edition, Palgrave, Basingstoke
- Jogiyanto, Hartono. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, Andi Yogyakarta.
- Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*. 2010. LKPP, Jakarta.
- Modul Persiapan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*. 2010. LKPP, Jakarta.
- Modul Penggunaan E-Procurement*. 2010. LKPP, Jakarta
- Maleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Septiawan Santana K. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Edisi II, Yogyakarta
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta
- Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 2009. *Implementasi E-procurement di Indonesia-LKPP Galakkan Lelang Via Elektronik (e-procurement)*, Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta.
- Richardus Eko Indrajit & Richardus Djokopranoto. 2005. *Dasar, Prinsip, Teknik dan Potensi Pengembangan E-Procurement*, Dinastindo, Jakarta
- Siahaya Willem. 2012. *Manajemen Pengadaan: Procurement Management*, Alfabeta, Bandung
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang
- Yudho Giri Sucahyo, S.Kom, M.Kom, Ph.D, CISA dan Yova Ruldeviyani, S.Kom, M.Kom. 2010. *Implementasi e-Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik*, LKPP, Jakarta
- Peraturan Presiden 35 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang *Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik*
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*
- Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik*. 2012. LKPP, Jakarta
- Prof. Himawan Adinegoro. 2012. *Presentasi Pembentukan LPSE di K/L/D/I*, LKPP, Jakarta.
- <http://lpse.kemenag.go.id>
- www.kpk.go.id
- www.lkpp.go.id

**PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT
DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK,
SENTRA KREDIT MENENGAH MANADO**

**Ronald David A. Irot
Herman Karamoy
Lidia Mawikere**

ABSTRAK

Kredit yang diberikan merupakan pos terbesar dalam aktiva lancar bank, karena presentasinya yang sangat besar dalam neraca maka kredit memegang peranan sangat penting dalam menentukan baik-buruknya operasional suatu bank. Bank yang berhasil biasanya berhasil mengelola kredit yang disalurkan atau sebaliknya keadaan bank terancam jika sebagian kredit yang disalurkan mengalami permasalahan. Resiko pemberian kredit oleh Bank selaku Kreditur adalah bahwa kredit tersebut tidak kembali atau kemungkinan kreditnya bermasalah/macet. Untuk mengantisipasi kerugian financial tersebut diatas diatas biasanya bank menyusun kebijakan kredit dengan memperhitungkan segala faktor risiko untuk memitigasi kerugian bank. Salah satu kebijakan perkreditan adalah audit kepatuhan sebelum kredit dikomitekan atau disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan audit kepatuhan dalam proses pemberian kredit pada Bank BNI Sentra Kredit Menengah Manado. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado. Penelitian menggunakan metode kualitatif secara etnografi. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada responden yang mewakili penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado, hal ini dapat dilihat dari jumlah kredit NPL yang semakin menurun dan kolektibiliti pinjaman yang saat ini telah mencapai 95.19%.

Kata Kunci : Audit Kepatuhan, Kredit, Kerugian Financial dan PT. Bank Negara Indonesia (Tbk), Sentra Kredit Menengah, *Credit Compliece Review*.

ABSTRACT

Loans, as the biggest part of a Bank's quick assets, have the most influence among all to decide whether the Bank is in a good -or bad- conditions. One that can be called in a good condition usually capable to maintains and controls the loans given, whereas one that has a lot of Non-performing loans (NPL) is usually in a tough spot. The risk of a Bank as a creditor is that the loans given are in default or close to being in default. In order to anticipate financial loss due to NPL, corporate governances are made to calculate all risk factors to mitigate and minimize losses. One of the governance is Credit Compliance Review, which is held before a credit application is being committed or approved by Credit Approval Officers. The aim of this research is to understanding the need and process of Credit Compliance Review in PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, SKM Manado. This research uses qualitative and ethnography method, and uses intense interview with respondents as sources. The result of this research shows that Credit Compliance Review has been done accordingly in PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, SKM Manado, which is proven by its decreasing NPL, and that Collectibility of Loans already passed 95.19%.

Keywords : Credit Compliance Review, Loans, Financial Loss, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, SKM.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peran dalam intermediasi antara pihak yang kelebihan (*surplus*) dana dengan pihak yang kekurangan (*defisit*) dana, serta peran jasa-jasa bank lainnya. Aktivitas nyata dari perwujudan fungsi bank ini adalah dengan kegiatan pengumpulan dana (*funding*) melalui produk dalam bentuk simpanan yang secara umum digolongkan ke dalam tabungan, giro, dan deposito. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan (*lending*) melalui mekanisme pemberian pinjaman/kredit. Pendapatan bank adalah berasal dari *spread* yakni selisih antara pendapatan bunga pinjaman yang merupakan kewajiban debitur dengan biaya bunga simpanan yang merupakan hak nasabah. Selain itu secara makro ekonomi, bank berperan sebagai *development agent* yang diharapkan dapat turut berperan serta secara finansial dalam pembangunan suatu negara. Untuk mendukung peran ini, bank harus mampu secara bijak dan hati-hati mendayagunakan dana masyarakat yang berhasil terhimpun kemudian menyalurkan dana tersebut ke dalam sektor-sektor ekonomi yang perlu dikembangkan dengan cara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian kredit oleh bank selaku kreditur kepada debitur yang membutuhkan dana diharapkan dapat dikembalikan oleh debitur sesuai ketentuan dan *schedule* yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian kredit. Bank tidak pernah mempunyai maksud bahwa dengan pemberian kredit, bank akan memiliki atau menguasai perusahaan yang dimiliki oleh debiturnya. Namun dalam pelaksanaannya dapat pula terjadi debitur tidak dapat membayar kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu perjanjian kredit.

Kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada pengusaha merupakan kegiatan operasional yang sangat penting dalam suatu operasional perbankan, karena saat ini untuk bank-bank di Indonesia sebagian besar pendapatan operasional bank berasal dari pendapatan bunga pinjaman.

Kredit yang diberikan merupakan pos terbesar dalam aktiva lancar bank, karena persentasenya yang sangat besar dalam neraca maka kredit memegang peranan sangat penting dalam menentukan baik buruknya operasional suatu bank. Bank yang berhasil biasanya berhasil mengelola kredit yang disalurkan atau sebaliknya keadaan bank terancam jika sebagian kredit yang disalurkan mengalami permasalahan.

Salah satu upaya pencegahan timbulnya kredit bermasalah adalah diperlukannya perangkat analisis kredit yang lebih komprehensif, adaptif dan aplikabel agar dapat memprediksi risiko kredit (*business and financial risk*). *business risk* (risiko bisnis) adalah suatu risiko yang timbul sebagai akibat dari ketidakpastian keuntungan yang diharapkan karena perubahan harga produk dan harga faktor produksi, perubahan selera konsumen, perubahan metode produksi dan reaksi pesaing. Dengan kata lain, risiko bisnis timbul dari kondisi bisnis umumnya, dan juga karena kondisi khusus tentang permintaan dan penawaran. Sedangkan *financial risk* (risiko keuangan) timbul sebagai akibat adanya penggunaan hutang yang tidak efektif dan efisien sehingga meningkatkan beban usaha yang melebihi pertumbuhan pendapatan usaha yang dapat memperburuk kondisi keuangan atas usaha yang dibiayai.

Dalam analisis pemberian kredit yang diberikan oleh bank, setiap proses kredit yang ada senantiasa mengedepankan aspek kehati-hatian (*prudential banking*) sesuai dengan acuan baik dari Bank Indonesia maupun dari peraturan intern bank itu sendiri, guna menghindari kemacetan dari suatu kredit yang bisa timbul karena *fraud*, *side streaming* (penyalahgunaan kredit) atau sebab-sebab lain. Jadi prosedur dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu bank selalu memperhatikan aspek legalitas secara hukum sehingga kepentingan kreditur maupun debitur terjaga. Apabila terjadi kemacetan suatu fasilitas kredit, dimana kewajiban debitur tidak dapat dilaksanakan atau tidak berjalan lancar sesuai kesepakatan awal, maka terjadilah tunggakan kredit. Kondisi ini sangat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja dari suatu bank. Tunggakan dari debitur kepada bank berupa kewajiban pembayaran bunga pinjaman maupun pokok pinjaman, oleh Bank Indonesia digolongkan sebagai non performing loan atau kredit bermasalah, yang bisa berakibat portofolio suatu bank semakin memburuk.

Peraturan Bank Indonesia nomor. 5/8/PBI/2003 menyatakan “bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan membentuk komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko”. Penerapan manajemen risiko diperlukan karena bank berada dalam bisnis yang berisiko tinggi. Bank dalam menjalankan usahanya melakukan penawaran jasa-jasa keuangan sehingga bank akan menerima dan mengelola berbagai jenis risiko untuk dikendalikan secara efektif supaya dapat terhindar dari kerugian yang besar.

Per 31 Desember 2012, PT. Bank Negara Indonesia mencatat jumlah kredit bermasalah sebesar Rp. 5.636.814.- juta, dan kredit dalam perhatian khusus sebesar Rp. 6.913.686. juta, dimana jumlah kredit macet sebesar Rp. 5.636.814.- juta. Perincian kredit bermasalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk 4 (empat) tahun terakhir yang dipublikasikan diperlihatkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Kredit Bermasalah Pada Bank BNI Tahun 2009-2012

Keterangan	(dlm jutaan)			
	2012	2011	2010	2009
Lancar	188,191,805	149,882,340	121,452,603	105,441,979
Dalam Perhatian khusus	6,913,686	7,734,160	5,725,308	9,638,916
Kurang lancar	641,351	476,588	517,437	1,258,274
Diragukan	666,263	722,330	362,953	608,973
Macet	4,329,200	4,718,005	811,410	3,894,928
Total NPL	5,636,814	5,916,923	1,691,800	5,762,175

Sumber : Laporan Keuangan *Publish* Bank BNI Tahun 2012 dan Tahun 2011

Untuk mengantisipasi kerugian *financial* tersebut diatas diatas biasanya bank menyusun kebijakan kredit dengan memperhitungkan segala faktor risiko untuk memitigasi kerugian bank. Salah satu kebijakan perkreditan adalah audit kepatuhan sebelum kredit dikomitekan atau disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Audit Kepatuhan Dalam Proses Pemberian Kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Manado, Sentra Kredit Menengah Manado”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah proses pelaksanaan audit kepatuhan pada proses pemberian kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Wilayah Manado, Sentra Kredit Menengah Manado”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis penerapan efektifitas audit kepatuhan pada proses pemberian kredit menengah pada Bank BNI Sentra Kredit Menengah Manado.
2. Menganalisis proses pemberian kredit yang sesuai manajemen risiko kepatuhan dan asas perkreditan yang sehat pada Bank BNI Sentra Kredit Menengah Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang audit kepatuhan.
2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengaplikasian teori - teori yang telah didapat selama perkuliahan dan diharapkan dapat berguna di masa yang akan datang.
3. Bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kajian akuntansi, khususnya tentang audit kepatuhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kontribusi dalam pengembangan teori dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Menurut Peraturan Bank Indonesia

Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank

tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/2/PBI/2011). Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk hal-hal berikut.

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan
4. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dasar hukum munculnya fungsi kepatuhan dalam peraturan Bank Indonesia nomor 13/2/PBI/2011 di perbankan Indonesia sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Dalam pelaksanaan kepatuhan perbankan di Indonesia dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa

kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

2.2. Risiko Ketidapatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasar PBI nomor 5/8/PBI/2003 dan perubahannya PBI nomor PBI/11/25/PBI/2009, terdapat 8 jenis risiko yang harus dikelola bank, yaitu sebagai berikut.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit mencakup risiko kegagalan debitur, *counterparty*, dan setelmen. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas seperti prekreditasi (pembiayaan), aktivitas treasuri, investasi, pembiayaan perdagangan (*trade finance*), baik yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Risiko kredit dapat terjadi apabila terjadi transaksi / kejadian sebagai berikut.

- a. Bank memberikan kredit kepada nasabah.
- b. Bank menempatkan dana pada bank lain sebagai penempatan antar bank.
- c. Bank melakukan transaksi derivative seperti kontrak *forward* atau *swap* dengan nasabah atau bank lain.
- d. Bank membeli korporasi.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, sebagai akibat dari perubahan faktor pasar, termasuk perubahan harga *option*. Faktor pasar adalah nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas. Risiko pasar dapat terjadi apabila terjadi transaksi / kejadian berikut.

- a. Bank membeli obligasi negara dengan kupon tetap, dimana harga pasar dapat turun apabila suku bunga pasar meningkat.
- b. Bank membeli valuta USD dimana nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah.
- c. Bank melakukan transaksi *derivative interest rate swap* yang dapat menimbulkan kewajiban *derivative*.
- d. Bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden dengan bank lain. Risiko likuiditas dapat terjadi transaksi/kejadian berikut.

- a. Bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah karena dana yang tersedia tidak mencukupi.
- b. Bank mengalami kalah kliring dan tidak dapat memenuhi kekurangan dana di Bank Indonesia.
- c. Bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba.
- d. Bank tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank lain pada saat memerlukan likuiditas.

4. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan / atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik dapat terjadi apabila kejadian sebagai berikut.

- a. Bank mengikuti arus mengembangkan bisnis mikro, tetapi bank belum berpengalaman di bidang bisnis mikro sehingga bank mengalami banyak permasalahan.
- b. Bank memutuskan bersaing dengan bank asing dengan meluncurkan bisnis produk terstruktur yang kompleks, tetapi bank belum memiliki infrastruktur yg memadai, sehingga bank rugi.
- c. Bank memutuskan melakukan bisnis tertentu yang ternyata kemudian mendatangkan kerugian besar bagi bank.

5. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat terjadi apabila terjadi kejadian sebagai berikut.

- a. Pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan kredit.
- b. Kesalahan *posting* uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman.
- c. Terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal.
- d. Kejahatan keuangan seperti *fraud* yang sering dilakukan pihak luar dengan bekerja sama dengan pegawai bank.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko suatu kejadian menimbulkan persepsi negatif terhadap bank yang mengakibatkan tingkat kepercayaan *stakeholder* menurun. Risiko reputasi dapat terjadi apabila terjadi kejadian sebagai berikut.

- a. Penagihan kartu kredit dilakukan pihak ketiga yang tidak memperhatikan etika penagihan, sehingga menurunkan reputasi bank di mata masyarakat.
- b. Terjadi kerugian besar akibat *internal fraud*, sehingga nasabah meragukan keamanan menyimpan dana di bank.
- c. Produk kartu kredit menjadi sasaran kejahatan keuangan, sehingga reputasi bank sebagai bank yang aman menurun, dan berpotensi memberikan dampak menurunnya bisnis kartu kredit.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti berikut ini.

- a. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).
- b. Kualitas Aktiva Produktif.
- c. Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

- d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- e. Posisi Devisa Neto (PDN).
- f. Risiko strategik terkait Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
- g. Risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

Risiko Kepatuhan dapat timbul apabila terjadi kejadian sebagai berikut.

- a. Bank tidak mengirimkan laporan harian wajib kepada Bank Indonesia sehingga harus membayar denda.
- b. Bank melanggar ketentuan limit posisi devisa neto dan mendapat teguran serta denda dari *regulator*.
- c. Akibat persaingan, bank tidak secara utuh mengikuti prosedur seperti yang ditetapkan oleh *regulator*.

2.3 Pengendalian Intern Dalam Penetapan Manajemen Risiko

Untuk memastikan seluruh jajaran organisasi melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang sudah digariskan, bank memerlukan suatu sistem pengendalian intern, yang dapat secara efektif mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Peranan manajemen risiko sebagai berikut.

1. Sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank sehingga bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali.
2. Menciptakan industri yang semakin sehat melalui penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank.
3. Untuk menghadapi risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks akibat perkembangan pesat lingkungan internal dan eksternal perbankan.
4. Meningkatkan *shareholder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta membantu meningkatkan daya saing bank.
5. Bagi Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank.

2.4 Pemberian Kredit

Bagi lembaga perbankan di Indonesia pengertian kredit sesuai Undang-Undang Pokok Perbankan No.2 tahun 1992 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya, setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Proses pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kredit

Yaitu suatu proses yang meliputi pengumpulan data (jenis data yang diperlukan, sumber data dan cara memperolehnya, melaksanakan pengumpulan data, menyeleksi data yang perlu/tidak perlu), verifikasi data (melakukan pemeriksaan setempat, meminta informasi kepada Bank Indonesia, verifikasi kepada pembeli, pemasok & pesaing), analisis laporan keuangan & aspek2 perusahaan

lainnya (analisis ratio, analisis rekonsiliasi modal & harta tetap, analisis pernyataan pengadaan kas, analisis aspek-aspek perusahaan lainnya, aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis dan produksi/pembelian dan analisis risiko), analisis proyeksi keuangan (menyusun proyeksi arus kas dalam skenario wajar), evaluasi kebutuhan keuangan (untuk menentukan jumlah kredit, schedule penarikan/pelunasan kredit & jangka waktu kredit), struktur fasilitas kredit (menetapkan jenis kredit yang akan diberikan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan serta penutupan asuransinya dan menetapkan syarat-syarat kredit).

2. Persetujuan Kredit

Merupakan keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal bank pada aktiva yang berisiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan, bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah nasabah yang layak, meliputi, kelayakan kredit, telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit, tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit, telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya, diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit. Dengan demikian persetujuan kredit pada dasarnya adalah merupakan sarana pengendalian risiko, sarana pengendalian proses manajemen perkreditan, cermin kemampuan pengelolaan kredit, dan akan memperlihatkan kualitas portepel perkreditan secara keseluruhan.

3. Pemantauan Kredit

Merupakan rangkaian aktivitas untuk mengikuti sejauh mana perkembangan usaha nasabah dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas. Menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran lainnya telah dipenuhi oleh debitur. Menilai kelayakan usaha debitur dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventip yang diperlukan. Pelaksanaan pemantauan nasabah diperlukan kebijakan dan prosedur yang mempunyai fungsi dan ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Berlaku untuk semua nasabah.
- b. Ditetapkan standar minimal untuk setiap nasabah yaitu, aktivitas yang harus dipantau, kriteria pemantauan, frekuensi pemantauan.
- c. Difokuskan untuk mendeteksi perkembangan kredit yang kurang baik dengan maksud untuk mengidentifikasi nasabah yang mengarah bermasalah, dan dapat mengetahui masalah-masalah secara dini agar lebih mudah untuk diperbaiki.
- d. Intensitas pemantauan nasabah yang tinggi dan teknik pemantauan yang khusus diperlukan bagi nasabah yang bermasalah. Dalam pemantauan nasabah ini terdapat 2 fokus utama sebagai berikut.
 - a. Pemantauan hasil prestasi performance nasabah adalah untuk menjamin penilaian dan kesinambungan atas *first way out*.
 - b. Pemantauan barang jaminan kredit agar dapat menjamin penilaian yang berkesinambungan atas *second way out*.

4. Penyelamatan Kredit

Merupakan usaha bank untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas suatu kredit yang tidak lancar melalui hubungan dengan debitur. Fasilitas kredit yang diberikan oleh

bank tidak seluruhnya berjalan lancar, oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan dan prosedur penyelamatannya. Penyelamatan kredit dilakukan sebagai berikut.

a Menilai sampai sejauh mana aktivitas usaha debitur dalam penyelamatan dapat dikembangkan untuk memenuhi kewajiban kepada bank.

b Menyusun beberapa pilihan strategi dan menetapkan strategi penyelamatan.

Langkah-langkah analisis penyelamatan kredit meliputi.

a Analisis masalah, terdiri dari identifikasi masalah dan diagnosa masalah.

b Penetapan strategi terdiri dari menyusun prognosa, menetapkan sasaran, merumuskan strategi dan membuat *action plan*.

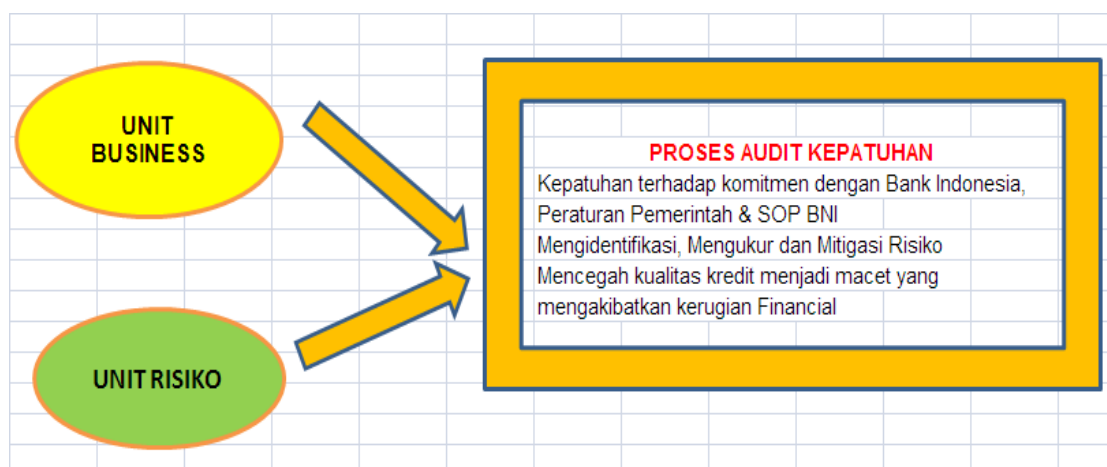
5. Pengendalian Kredit

Digunakan untuk mengukur tingkat yang dicapai suatu unit dalam memenuhi tujuan kredit, baik pada tingkat proses maupun sub proses. Proses pengendalian kredit dimaksudkan untuk mengevaluasi aspek-aspek yang berkaitan dengan proses kredit dan portepel kredit, sehingga dapat mengetahui gambaran terakhir secara menyeluruh dengan cepat.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Audit Kepatuhan Dalam proses Pemberian Kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Manado, Sentra Kredit Menengah Manado tertuang dalam kerangka pikir sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Pelaksanaan Audit Kepatuhan Dalam Proses Pemberian Kredit

3.2 Proposisi

Berdasarkan pengertian, hambatan dan implementasi audit kepatuhan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, maka dalam penelitian ini penulis kembangkan beberapa aspek yang nantinya menjadi dasar dalam penilaian keberhasilan audit kepatuhan khususnya yang ada di Sentra Kredit Menengah Manado. Hal tersebut juga didukung dengan kebijakan Bank Indonesia khususnya dalam bidang manajemen risiko dimana dalam peraturan Bank Indonesia nomor PBI/11/25/PBI2009 yang menegaskan perlunya suatu bank mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau,

dan mengendalikan risiko. Salah satu cara pengendalian risiko khususnya kerugian *financial* dalam proses pemberian kredit yaitu dengan adanya audit kepatuhan.

3.3 Model Analisis

Penelitian menggunakan metode kualitatif secara etnografi. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, dimana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu per satu dengan anggota kelompok tersebut.

4 METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian Yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Kualitatif.

Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif lebih melihat kepada proses daripada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan pada perhitungan matematis. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan adalah data mengenai pelaksanaan audit kepatuhan dalam proses pemberian kredit pada SKM Manado.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah data mengenai realisasi fasilitas kredit yang disetujui oleh komite kredit yang telah melalui proses audit kepatuhan.

4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data primer yaitu semua data yang didapat langsung dari sumber data yang diteliti. Sumber data primer berasal dari observasi hasil C2R (*Credit Compliance Review*) dari *Regional Quality Assurance* dan wawancara dengan anggota komite kredit di SKM Manado.
2. Data sekunder yaitu berupa literatur-literatur kepustakaan yang digunakan sebagai dasar teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan penelitian-penelitian sebelumnya. Data sekunder yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan audit kepatuhan di bank umum, serta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4.3 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado.

4.4 Instrumen Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut :

1. Menurut pendapat responden apa yang dimaksud audit kepatuhan.

2. Menurut responden apa fungsi audit kepatuhan di bank BNI.
3. Menurut pendapat responden apakah audit kepatuhan dapat memperbaiki kualitas kredit khususnya di bank BNI.
4. Menurut pendapat responden waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan audit kepatuhan cukup.
5. Menurut pendapat responden apakah dengan tidak melihat langsung usaha calon debitur, pemeriksaan audit kepatuhan cukup representatif.
6. Menurut responden apa yang dimaksud dengan ketidakpatuhan dalam proses pemberian kredit
7. Menurut pendapat responden apakah unit kepatuhan harus melibatkan sejak dari awal pemberian kredit.
8. Menurut responden apa yang dimaksud dengan budaya kepatuhan.
9. Menurut pendapat responden bagaimana cara melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dan mengidentifikasi kerawanan.
10. Menurut pendapat responden bagaimana kegunaan audit kepatuhan.
11. Menurut pendapat responden apa tujuan budaya kepatuhan.
12. Menurut pendapat responden apakah yang dimaksud dengan risiko likuiditas.
13. Menurut pendapat responden apakah yang dimaksud dengan risiko pasar.
14. Menurut pendapat responden apakah yang dimaksud dengan risiko kredit.
15. Menurut pendapat responden apakah yang dimaksud dengan risiko hukum.
16. Menurut pendapat responden apakah yang dimaksud dengan risiko kepatuhan.
17. Menurut pendapat responden apakah yang dimaksud dengan risiko reputasi.
18. Menurut pendapat responden apakah yang dimaksud dengan risiko startegik.
19. Menurut pendapat responden apa yang menyebabkan ketidakpatuhan.
20. Menurut pendapat responden apakah kerugian *Financial* berawal dari ketidakpatuhan.
21. Menurut pendapat responden apakah ketidaktiadaan SOP akan sangat berpengaruh pada audit kepatuhan.
22. Menurut pendapat responden apakah peraturan eksternal sudah di update secara manual bagaimana dampak ke C2R (*Credit Compliance Review*)
23. Menurut pendapat responden apakah audit kepatuhan sudah berlaku sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan.
24. Menurut pendapat responden apakah mitigasi risiko kredit dengan audit kepatuhan sudah sesuai seperti yang diharapkan.
25. Menurut pendapat responden apa saran saran untuk perbaikan audit kepatuhan.

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2013.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

4.5.1 Observasi Partisipatif

Dalam hal observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan

observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

4.5.2 Observasi Terus Terang Atau Tersamar

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang pada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan, kemungkinan kalau dilakukan terus terang maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

4.5.3 Observasi Tak Berstruktur

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi.

4.5.4 Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data.

4.5.5 Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

4.5.6 Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti.

4.5.7 Pengumpulan Data Dengan Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa :

1. Perangkat Aplikasi Kredit Sentra Kredit Menengah.
2. *Credit Compliance Review* dari *Regional Quality Assurance*.
3. Tanggapan *Credit Compliance Review* dari Unit *Business*.
4. Notulen Keputusan Kredit.
5. Surat Keputusan Kredit.
6. Surat surat dari Divisi Kepatuhan Bank BNI dalam pelaksanaan audit kepatuhan.

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Bank BNI

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, selama 66 tahun usia BNI sejak didirikan pertama kali pada tanggal 5 Juli 1946, BNI terus tumbuh dan berkembang bersama negeri, mengawal pembangunan di berbagai sektor industri, sesuai dengan tagline BNI Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa" Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

5.1.1 Manajemen Risiko Bank BNI

Manajemen risiko di BNI berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum serta dokumen-dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision*, terutama konsep *Basel Accord II*. Pengelolaan risiko di BNI mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha. Manajemen risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi usaha dengan pengelolaan risikonya.

5.1.2 PT. Bank Negara Indonesia(Persero)/Tbk, SKM Manado.

Sentra Kredit Menengah Manado merupakan unit bisnis dibawah pengelolaan Kantor Wilayah Manado. Target pasar Sentra Kredit Menengah Manado meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara. Minimum proses kredit di Sentra Kredit Menengah Manado sebesar Rp. 15 miliar sampai dengan Rp. 150 miliar untuk debitur group.

5.2 Hasil Penelitian

Responden merupakan instrumen penting dalam penelitian, pemilihan responden yang baik dapat membantu menghasilkan penelitian yang baik. Penelitian ini memilih enam responden yang akan di wawancarai, alasan memilih ke enam responden tersebut didasarkan pada pengalaman kerja, keterlibatan dalam pelaksanaan pemeriksaan, dan peranan dalam proses pemberian kredit. Keenam responden yang dipilih memiliki didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

1. Responden I (Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Manado)

Pemilihan Pemimpin risiko kredit wilayah didasarkan bahwa beliau merupakan pengendali risiko dalam proses pemberian kredit. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan risiko dalam proses kredit berada dalam kendali dan tanggung jawab beliau.

2. Responden II (Pemimpin Sentra Kredit Menengah)

Pemilihan Pemimpin Sentra Kredit Menengah didasarkan bahwa beliau merupakan salah satu pemutus kredit untuk fasilitas kredit sampai dengan komite komersial.

3. Responden III (Pemimpin *Compliance Regional Group* Wilayah Manado)
Pemilihan Pemimpin *Compliance Regional Group* didasarkan bahwa beliau merupakan salah satu orang yang bertanggung jawab langsung terhadap audit kepatuhan.
4. Responden IV (Pemimpin Kelompok Risiko Wilayah)
Sama halnya dengan Pemimpin Risiko Wilayah untuk kredit kewenangan *commercial*, pemimpin kelompok risiko wilayah menjadi pemutus kredit, jika kewenangan melebihi kewenangan komite komersial beliau menjadi pengusul kredit.
5. Responden V (*Manager Compliance Regional Group* Manado)
Sama halnya dengan *Manager Compliance Regional Group* Manado, *Manager* audit bertanggung jawab atas pelaksanaan audit kepatuhan, dan beliau yang turun secara langsung memeriksa setiap perangkat aplikasi kredit sebelum dikomitekan.
6. Responden VI (Pemimpin Kelompok Bisnis)
Sama halnya dengan Pemimpin Sentra Kredit Menengah untuk kredit kewenangan *commercial*, pemimpin kelompok bisnis menjadi pemutus kredit.

5.2.1 Pendapat Responden

Pendapat keenam responden mengenai audit kepatuhan dalam proses pemberian kredit hampir sama, hal ini didasarkan bahwa keenam responden telah memenuhi persyaratan kompetensi dan telah mendapat Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 dan Level 2 yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, selain itu untuk memegang sebuah jabatan dalam kredit pegawai yang bersangkutan telah melalui beberapa tahap pendidikan dan pelatihan sehingga pemahaman dan pengertian mengenai kepatuhan hampir dikatakan rata-rata sama. Pendapat responden tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Audit kepatuhan adalah suatu audit untuk memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam proses kredit sudah mematuhi standar dan prosedur yang ditetapkan bank BNI dan peraturan eksternal seperti Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah.
2. Audit kepatuhan dapat menciptakan industri perbankan yang sehat.
3. Fungsi kepatuhan adalah suatu fungsi yang memastikan bahwa kredit yang dikomitekan telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
4. Audit kepatuhan memperbaiki kualitas kredit khususnya di bank BNI, karena dengan audit kepatuhan ada beberapa risiko yang dapat dimitigasi dari awal.
5. Waktu yang diperlukan dalam proses audit kepatuhan khususnya sebelum kredit dicairkan sangat tergantung dari pengalaman yang dimiliki oleh pegawai yang melakukan dan wawasan beliau dalam mengetahui dan mengaplikasikan SOP bank BNI dan Peraturan Bank Indonesia. Saat ini waktu yang diperlukan untuk melakukan audit kepatuhan cukup, sehingga kepentingan bisnis dapat tercapai tanpa mengorbankan kepatuhan.
6. Unit kepatuhan sebaiknya dilibatkan sejak dari awal dalam pembuatan perangkat analisa kredit sehingga pada saat terdapat ketidakpatuhan dapat diindikasikan dari awal.
7. Proses audit kepatuhan dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan.
8. Proses audit kepatuhan dapat mengidentifikasi kerawanan.
9. Proses audit kepatuhan dapat memperbaiki ketidakpatuhan yang ada.
10. Fungsi Kepatuhan di perbankan di Indonesia didasarkan pada peraturan Bank Indonesia Nomor. PBI No. 13/2/PBI/2011 tgl 12 Januari 2011.

11. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul karena ketidakpatuhan misalnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko lainnya yang mengakibatkan kerugian *financial* bagi perusahaan.
12. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban kepada bank.
13. Risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, sebagai akibat dari perubahan faktor pasar, termasuk perubahan harga *option*.
14. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
15. Risiko Strategik Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan / atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis.
16. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
17. Risiko reputasi adalah risiko suatu kejadian menimbulkan persepsi negatif terhadap bank yang mengakibatkan tingkat kepercayaan *stakeholder* menurun.
18. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
19. Budaya kepatuhan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Saat ini audit kepatuhan dan review audit internal dilakukan oleh person yang sama sebaiknya ada pemisahan antara person yang melakukan audit kepatuhan dan yang melakukan audit internal.
21. Peraturan internal terdiri dari kebijakan, SOP dan Juklak.
22. Peraturan eksternal terdiri dari Bapepam, PBI dan otoritas lainnya.
23. Tugas utama fungsi kepatuhan mewujudkan terciptanya budaya kepatuhan, mengelola risiko kepatuhan, mereview ketentuan dan prosedur, memastikan komitmen dengan Bank Indonesia dan otoritas lainnya yang berwenang.
24. Risiko ketidakpatuhan dapat diidentifikasi pada awal kredit sehingga kerugian *financial* dapat dihindari. Contohnya pemberian fasilitas kredit yang dilarang oleh pemerintah.
25. Ketiadaan SOP atau terlambatnya up date SOP akan sangat berpoengaruh pada unit kepatuhan.
26. Audit kepatuhan sudah sesuai dengan yang diharapkan kedepannya agar pegawai yang melakukan audit kepatuhan, tidak ditugaskan lagi untuk melalukan audit internal sehingga independensi tetap terjaga.
27. Ketidakpatuhan akan berdampak pada risiko pasar, risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko pasar, risiko operasional, risiko ketidakpatuhan dan risiko strategik.
28. Audit kepatuhan sangat diperlukan terutama untuk meminalisasi risiko, meminimiliasi sanksi atau denda, meningkatkan reputasi, meningkatkan laba perusahaan, dan dapat menumbuhkan kesadaran self monitoring.
29. Audit kepatuhan berguna untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sisdur,

30. Audit kepatuhan juga mereview dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur bank
31. Audit kepatuhan memastikan kebijakan, ketentuan, sisdur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai ketentuan
32. Tugas utama satuan kerja kepatuhan adalah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan, melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dan mengidentifikasi kerawanan
33. Penyebab utama ketidakpatuhan adalah rendahnya budaya kepatuhan, supervisi lemah, rendahnya integritas, ketiadaan SOP, Tidak memahi SOP, SOP yang tidak up date, Parameter IT yang tidak sesuai.

5.2.4 Penerapan C2R di SKM Manado

Hasil *Compliance Credit Review* di SKM Manado terdiri dari hal-hal yang ditampilkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Pelaksanaan *Credit Compliance Review* di SKM Manado

Teori / SOP Kepatuhan	Hasil Penelitian	Keterangan
Kredit yang diberikan bukan kredit yang dilarang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada pihak terkait dengan persetujuan Dewan Komisaris. 2. Pemilik/pengurus/pemegang saham tercatat dalam daftar <i>black list</i> (seijin Direksi). 3. Usaha yang dilarang. 4. Untuk keperluan ekspor kayu mewah. 5. Kepada perusahaan penerima kredit konsorsium (dengan konsultasi anggota konsorsium). 6. Untuk jual beli saham yang bukan perusahaan sekuritas. 7. Pengadaan/pengolahan tanah yang bukan untuk rumah sederhana/jalan tol. 8. Sektor yang tidak ada <i>space available</i>-nya. 9. Kredit kepada PMA mengacu ketentuan berlaku. 10. Kredit kepada WNA 	Sudah sesuai dengan SOP	Larangan pemberian kredit tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.
Debitur/calon debitur telah menyampaikan surat permohonan kredit secara tertulis.	Sudah sesuai dengan SOP	Surat Permohonan oleh debitur secara tertulis dalam pemberian kredit tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit, karena diwajibkan oleh Bank Indonesia
Legalitas dan ijin usaha debitur/calon debitur telah sesuai dan masih berlaku. (Akta pendirian berikut perubahan,	Belum sesuai dengan SOP, Legalitas usaha jatuh	Untuk kepentingan bisnis, maka legalitas usaha yang

SIUP, HO, TDP, AMDAL, dan ijin usaha terkait lainnya)	tempo dan belum diperpanjang oleh debitur	telah jatuh tempo dapat dimintakan pengecualian, oleh unit risiko dimitigasi dalam syarat disposisi kredit, dimana dalam syarat disposisi kredit ditambahkan kewajiban bagi debitur untuk mengurus legalitas usaha yang jatuh tempo.
Pemberian kredit tidak melanggar BMPK yaitu : a. Pihak terkait 10% x Modal BNI b. Pihak tidak terkait 20% x modal BNI (individu) c. Pihak tidak terkait 25% x modal BNI (group) d. BUMN 30% x modal BNI Pemberian kredit tidak melanggar <i>House Limit</i> yaitu tidak melebihi 75% x BMPK.	Sudah sesuai dengan SOP	Larangan pelanggaran BMPK tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.
1. Jika terdapat PAK yang pernah ditolak dan diusulkan kembali telah disertai dengan data pendukung baru. 2. PAK yang diajukan kembali diputus oleh PPK yang berwenang, yaitu : a. sebelum 6 bulan sejak ditolak maka kewenangan memutusnya berada pada PPK yang pernah menolak sebelumnya. b. setelah 6 bulan sejak ditolak, maka kewenangan memutusnya berada pada PPK sesuai maksimum kreditnya. dalam PAK tersebut dicantumkan atau diinformasikan kepada PPK yang berwenang tentang adanya penolakan terhadap PAK sebelumnya.	Sudah sesuai dengan SOP	Prosedur pemberian kredit untuk Perangkat Aplikasi Kredit yang pernah ditolak tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.
Pemberian kredit kepada debitur baru telah sesuai dengan ketentuan. a. Berhubungan dengan bank minimal 6 bulan. b. Berpengalaman berusaha minimal 3 tahun (untuk retail 2 tahun) c. CRR 1 sd. 5. d. Perusahaan yang sudah dirating, telah sesuai rating. <i>Take over</i> dari bank lain, kolektibilitas lancar (6 bulan)	Sudah sesuai dengan SOP	Pemberian kredit kepada debitur baru, tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.
Verifikasi pemasok/pelanggan telah dilakukan.	Sudah sesuai dengan SOP	Verifikasi pemasok dan pelanggan, tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses

		pemberian kredit.
Verifikasi melalui permintaan informasi Bank Indonesia telah dilakukan (termasuk a.n. seluruh pengurus perusahaan)	Sudah sesuai dengan SOP	Verifikasi melalui informasi Bank Indonesia, tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit. Prosedur ini merupakan prosedur awal dalam pemberian kredit.
Kunjungan setempat terhadap lokasi usaha dan proyek yang dibiayai telah dilakukan.	Sudah sesuai dengan SOP	Kunjungan setempat, tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.
Verifikasi jaminan pokok telah dilakukan (bukti kepemilikan, surat penawaran/ pemesanan)	Sudah sesuai dengan SOP	Verifikasi jaminan pokok, tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.
Jaminan tambahan yang diserahkan telah diverifikasi. Jaminan tambahan telah dilakukan plotting (untuk segmen kecil yang belum dilakukan penilaian appraisal independen)	Sudah sesuai dengan SOP	Verifikasi jaminan atas tambahan, tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur/calon debitur dengan kredit langsung di atas Rp5 milyar atau dengan total fasilitas (kredit langsung & kredit tidak langsung) di atas Rp10 milyar telah menyerahkan <i>audited report</i>. 2. Penyampaian <i>audited report</i> oleh debitur telah tepat waktu. 3. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku. 	Sudah sesuai dengan SOP	Penyampaian Audited Report, tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.
<p>Penggunaan KAP oleh Calon Debitur/Debitur telah memenuhi kriteria, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon debitur, tidak diwajibkan menggunakan KAP yang telah terdaftar pada BNI. 2. Debitur, diwajibkan menggunakan KAP yang telah terdaftar pada BNI. 3. Penggunaan KAP yang sama hanya diperbolehkan hingga 3 (tiga) tahun berturut-turut. 	Sudah sesuai dengan SOP	Penggunaan KAP untuk calon debitur, tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.
<p><i>Financial covenant</i> telah memenuhi kriteria, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Current & Debt to Equity Ratio</i> (CR & DER) : 	Sudah sesuai dengan SOP	<i>Financial covenant</i> , tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh)

<p>a. CR minimal 1,0 kali, sedangkan DER maksimal sesuai sektor industrinya.</p> <p>b. Bagi debitur/calon debitur Kredit Investasi (KI) bahwa CR tidak sesuai persyaratan karena bagian hutang jangka panjang yang menjadi hutang lancar dikecualikan, sepanjang sumber dana yang berasal dari EAT dan Penyusutan dapat mengcover bagian lancar dari hutang jangka panjang tsb.</p> <p>c. Khusus untuk debitur/calon debitur yang usahanya dalam masa pembangunan, persyaratan <i>Current Ratio</i> (CR) tidak diberlakukan.</p> <p><i>Debt Service Coverage</i> (DSC) minimal 100%, bagi perusahaan baru dalam masa pembangunan, referensi DSC diberlakukan setelah beroperasi secara komersial.</p>		<p>dalam proses pemberian kredit.</p>
<p>Pos-pos keuangan yang signifikan (Persediaan, Piutang, Hutang) telah dijelaskan.</p>	<p>Sudah sesuai dengan SOP</p>	<p>Pos pos keuangan yang signifikan sudah dijelaskan dalam Momerandum analisa kredit.</p>
<p>Pinjaman perusahaan kepada pemilik telah disyaratkan atau telah didudukkan dalam SOL.</p>	<p>Sudah sesuai dengan SOP</p>	<p>Pengikatan SOL, tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.</p>
<p>Perhitungan KMK telah menggunakan metode Perputaran Modal Kerja (untuk segmen kecil) Perhitungan KI telah menggunakan metode arus kas yang dibuat sampai dengan jatuh tempo kredit dan dibuatkan asumsi.</p>	<p>Sudah sesuai dengan SOP</p>	<p>Perhitungan kebutuhan KMK dan KI untuk fasilitas KI wajib menggunakan metode arus cash, penggunaan metode lain tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.</p>
<p>Penetapan CEF jaminan telah sesuai. Perhitungan dan pemenuhan CEV telah sesuai.</p>	<p>Sudah sesuai dengan SOP</p>	<p>Perhitungan nilai CEF dan pemenuhan CEF tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.</p>
<p>Untuk calon debitur/debitur di atas Rp.5 milyar telah menggunakan appraisal independent yang terdaftar di BNI. Penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperbolehkan 3 kali berturut-turut.</p>	<p>Sudah sesuai dengan SOP</p>	<p>Taksasi jaminan oleh appraisal independen tidak dapat dimintakan pengecualian (tidak patuh) dalam proses pemberian kredit.</p>
<p>Struktur fasilitas kredit yang diusulkan</p>	<p>Sudah sesuai dengan SOP</p>	<p>Sebelum didudukkan dalam</p>

<p>telah sesuai dengan analisa, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimum Kredit sesuai dengan perhitungan kebutuhan kredit. 2. Jenis kredit sesuai tujuan pemberian kredit. 3. Keperluan kredit sesuai dengan permohonan dan analisa kebutuhan kredit 4. Jangka waktu sesuai dengan analisa kebutuhan kredit 5. Sifat kredit sesuai dengan analisa dan jenis kredit. 6. Jaminan telah sesuai dengan data yang tercantum dalam Formulir Informasi Agunan termasuk rencana pengikatan. 7. Persyaratan penutupan asuransi, penyampaian <i>audited report</i> dan appraisal independent. 8. Syarat lainnya : memuat ketentuan yang berlaku antara lain terkait: <i>covenants</i>. 		<p>struktur fasilitas bagian legal BNI akan mereview semua persyaratan kredit dan mitigasinya sebelum pembuatan Perjanjian Kredit.</p>
---	--	--

Sumber : Data Olahan, 2013.

5.3 Hasil Pembahasan

Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat diketahui bahwa audit kepatuhan dalam proses pemberian kredit di Bank BNI Sentra Kredit Menengah Manado telah dilaksanakan dengan baik. Hasil pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kepatuhan

Dalam upaya untuk memitigasi risiko yang dihadapi Bank BNI dalam proses pemberian kredit dan makin kompleksitas kegiatan usaha Bank, maka Bank BNI telah melakukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Dalam pelaksanaan mitigasi risiko yang bersifat preventif (*ex – ante*) dalam bidang kredit, Bank BNI telah mempunyai suatu perangkat audit kepatuhan yang dinamakan *Credit Compliance Review*(C2R). C2R ini memastikan bahwa risiko ketidakpatuhan dalam proses pemberian kredit dapat diketahui sebelum suatu fasilitas kredit dikomitekan, sehingga kerugian *financial* akibat ketidakpatuhan dapat dimitigasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 2 /PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan di Sentra Kredit Menengah Manado khususnya kepatuhan dalam proses pemberian kredit telah dilakukan oleh Regional Compliance Group Manado, hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 2 /PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank BNI ada dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bank BNI telah mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, termasuk dalam proses pemberian kredit.
- b. Bank BNI telah mengelola risiko kepatuhan.

- c. Bank BNI telah memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank BNI telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Bank BNI telah melakukan komitmen kepatuhan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
3. Pelaksana Audit Kepatuhan di Lapangan
- Dalam pelaksanaan audit kepatuhan proses pemberian kredit dilakukan oleh seorang Regional Compliance Manager dibawah supervisi Pemimpin Regional Compliance Group Manado, hal ini hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Regional Compliance Manager sudah memiliki kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- Tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank BNI khususnya di Regional Compliance Group Manado yang melaksanakan fungsi kepatuhan untuk Sentra Kredit Menengah Manado telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 2 /PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Audit kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik pada PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado, dimana dengan adanya audit kepatuhan dapat mengurangi risiko kredit hal ini dapat dilihat dari nilai kualitas kredit yang diberikan selama 2,5 tahun terakhir. Kolektibiliti per bulan Juni 2013 sebesar 95.19% jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kolektibiliti tahun 2011 sebesar 91.21%. Kredit *Non Performing Loan* juga terus membaik, pada tahun 2011 sebesar Rp. 70.000. juta dan per Juni 2013 turun menjadi 40.000. juta.
2. Perangkat audit kepatuhan C2R (*Credit Compliance Review*) yang dilakukan dalam proses pemberian kredit dapat memitigasi risiko pada awal pemberian kredit, sehingga kerugian *financial* ketika kualitas kredit memburuk dapat dihindari.
3. Terdapat beberapa situasi dan kondisi yang tidak dapat dimitigasi oleh perangkat audit kepatuhan C2R yang berdampak pada kerugian *financial* pada saat kualitas kredit yang diberikan memburuk. Situasi dan kondisi tersebut yaitu sebagai berikut.
 - a. Perubahan regulasi pemerintah.
 - b. Kondisi dunia usaha menurun.
 - c. Persaingan usaha.
 - d. Piutang tak tertagih akibatnya kesulitan likuiditas.
 - e. Kenaikan biaya produksi dari calon debitur yang akan menerima fasilitas kredit.
 - f. Konflik internal perusahaan yang akan menerima fasilitas kredit.
 - g. Karakter debitur yang tidak baik (penyalahgunaan kredit).
 - h. *Force Majeur* (bencana alam atau *key person* meninggal).

6.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Komponen-komponen dalam perangkat audit kepatuhan C2R dibuat dalam suatu sistem komputer *on line* sehingga jika terdapat perubahan ketentuan baik peraturan internal Bank BNI dan peraturan *eksternal* dari otoritas yang berwenang khususnya peraturan Bank Indonesia dapat dengan cepat ter *up-date* ke seluruh unit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan hanya dilakukan pada awal (*ex-ante*), sebaiknya juga dilakukan pada waktu pemantauan kredit (*post-ante*) untuk semua debitur secara rutin.
3. Pada saat terdapat pelanggaran kepatuhan, dalam hal ini untuk kepentingan bisnis bank BNI, maka sebaiknya harus mendapat persetujuan dari unit kepatuhan sehingga kerugian *financial* dapat dihindari.
4. Audit kepatuhan sebaiknya juga dilakukan setelah pencairan kredit khususnya untuk kepatuhan pengikatan jaminan dan kepatuhan penutupan asuransi, sehingga jika terjadi kualitas kredit yang diberikan memburuk, kerugian *financial* masih dapat dicover dengan *second way out* dalam hal ini kesempurnaan pengikatan jaminan.
5. Pada saat dilakukan audit kepatuhan(*ex-ante*) sebaiknya unit administrasi kredit juga dilibatkan untuk memastikan jaminan yang ada dapat diikat hak tanggungan, *Fidusia*, dan penutupan asuransi dapat dilaksanakan sehingga mitigasi risiko kredit dapat dilaksanakan dengan baik.
6. Pegawai yang melakukan audit kepatuhan (*ex-ante*) sebaiknya tidak melakukan audit internal untuk debitur yang sama, karena akan menimbulkan benturan kepentingan dalam pemeriksaan audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Andono Fidel A. 2013. *Evaluasi Audit Kepatuhan Dari Regional Quality Assurance 06 Bank Negara Indonesia(BNI) Dalam Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah di SKC Graha Pangeran Surabaya*. Universitas Surabaya Journal Vol 2 No.1.
- Arens Alvin A et al.. 2007. *Auditing dan pelayanan verifikasi*. Jakarta: PT. Indeks
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2009. *Dasar-Dasar Auditing*. Jakarta: Pusdiklat BPKP.
- Banker Association For Risk Managemen. 2012. *Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko Buku I*. Jakarta: Banker Association For Risk Managemen.
- Banker Association For Risk Managemen. 2012. *Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko Buku II*. Jakarta: Banker Association For Risk Managemen.
- Bank Indonesia. 1999. Penugasan Direktur Kepatuhan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 Tanggal 20 September 1999.
- Bank Indonesia. 2009. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI Tahun 2009.
- Bank Indonesia. 2011. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tanggal 12 Januari 2013.

- Bank Negara Indonesia. 2013. Compliance Awareness. Divisi Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.
- Bank Negara Indonesia. 2013. Penyebab Ketidakpatuhan. Divisi Kepatuhan Bank PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.
- Bank Negara Indonesia. 2013. Credit Compliance Review. Divisi Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.
- Bank Negara Indonesia. 2013. Aspek Rawan Dalam Proses Prekreditasi. Divisi Risiko PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.
- Bank Negara Indonesia. 2013. Risk Awareness. Divisi Risiko PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.
- Bank Negara Indonesia. 2013. Compliance Charter. Divisi Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.
- Bank Negara Indonesia. 2013. Early Warning Signal. Divisi Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.
- Bank Negara Indonesia. 2013. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.
- Cederquist, J. G. R. 2007. *Audit Based Compliance Control*. International Audit Journal
- Ghosh Saibal. 2007. *External Auditing, Managerial Monitoring and Firm Valuation*. International Journal Of Auditing.
- Junaidi. 2007. *Audit Ketaatan Prosedur Pengelolaan Piutang Dalam Miminalisir Piutang Tak Tertagih Pada PT. Calmic Indonesia*. Journal STIE MDP.
- Jusuf Joppie. 2012. *Analisis Kredit Untuk Account Officer Jopie Jusuf*. Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama
- Perfomance Omega. 2011. *Business Risk Analysis*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega. 2011. *Opurtunity Assesment*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega. 2011. *Loan Structuring*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega. 2011. *Projection*. Singapore : Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega. 2011. *Borrowing Causes*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega. 2011. *Industry Risk Analysis*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega. 2011. *Fiancial Statement Analysis*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega.2011. *Cash flow Analysis*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega. 2011. *Accounting For Lender*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega. 2011. *Introduction to Accrual Accounting*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega. 2011. *Accountying For the Capital Investment Cycle*. Singapore : Omega Perfomance.
- Perfomance Omega. 2011. *Accounting forliabilities and Equity*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Perfomance Omega. 2011. *Financial Reporting*. Singapore: Omega Perfomance Publisher.
- Parker Christine. 2003. *Regulator Required Corporate Compliance Program Audit*. Journal Black Weell Publishing Ltd.
- Sukirno.2012. *Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan dan Kompensasi Manajemen Terhadap Prilaku Etis Karyawan*. Journal Nominal Volume I Nomor I.

- Susanto Daniel. 2003. *Peranan Audit Internal Terhadap Kepatuhan Manajemen Perusahaan*. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Tohir Noel Chabannel. 2012. *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.

PENENTUAN PENGALOKASIAN BIAYA BERSAMA PADA PRODUK BERSAMA PADA DOLPHIN DONUTS BAKERY

Gladies C. N. Polii
Grace B. Nangoy

ABSTRAK

Banyak perusahaan manufaktur meningkatkan produksi dengan memanfaatkan bahan baku, tenaga kerja dan overhead yang sama untuk menghasilkan lebih dari satu macam produk yang disebut produk bersama atau produk sampingan tergantung dari nilai jualnya. Tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah untuk menentukan alokasi biaya bersama pada setiap produk dengan menggunakan metode harga pasar untuk produk bersama susen keju dan susen coklat dan metode biaya rata-rata per unit untuk produk bersama roti manis. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alokasi biaya bersama pada susen keju sebesar Rp 105.416,4 dan susen coklat sebesar Rp 91.623,6 dari total biaya produksi bersama Rp 197.040. Untuk produk bersama roti manis diperoleh alokasi biaya bersama sebesar Rp 74.445 untuk roti coklat keju, roti coklat dan roti keju dan masing-masing sebesar Rp 63.810 untuk roti sosis, roti kacang, roti srikaya, roti coco diamond dan roti magnum serta sebesar Rp 58.492 untuk roti cum-cum, roti mexico, roti tulip, roti sweetheart dan roti rocky dari total biaya produksi bersama sebesar Rp 834.846. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa alokasi biaya bersama pada Dolphin Donuts Bakery sudah tepat namun disarankan alokasi biaya bersama dijadikan acuan untuk melihat biaya-biaya persediaan dalam rangka menentukan laba yang diharapkan serta sebagai evaluasi kinerja.

Kata Kunci : *Alokasi Biaya Bersama, Produk Bersama*

ABSTRACT

Many industries and manufactures trying to increase their productions using the same materials, workers, and overhead to get more than one kind of productions called the joint product or by product. The purpose of this research is to measure the allocated joint cost of product with market value methods for the joint product of cheese's susen and chocolate's susen and using average cost unit methods for joint bread product. The research method is descriptive qualitative. The result is common cost allocated to cheese's susen is Rp 105.416,4 and chocolate's susen is Rp 91.623,6 from production joint cost Rp 197.040. For joint bread product the common cost allocated Rp 74.445 for chocolate cheese's bread, chocolate's bread and cheese's bread and Rp 63.810 for sosis's bread, peanut's bread, srikaya's bread, coco diamond's bread and magnum's bread and Rp 58.492 for cumcum's bread, mexico's bread, tulip's bread, sweetheart's bread and rocky's bread from total production joint cost Rp 834.846. The result shows that joint allocated common costs in Dolphin Donuts Bakery have already in the right direction, but there is a suggestion that allocated common cost could be used as a reference in order to measure the profits and evaluate the works.

Keywords : *Joint Cost, Joint Product*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi persaingan yang ada banyak perusahaan melakukan suatu terobosan dengan meningkatkan efektivitas proses produksinya agar supaya produk yang dihasilkan berkualitas dan akan terus memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu langkah yang diambil perusahaan yaitu melakukan produksi dengan memanfaatkan bahan baku utama, tenaga kerja dan overhead pabrik untuk menghasilkan beberapa jenis produk jadi yang siap dipasarkan.

Produk-produk tersebut dihasilkan melalui satu kali proses produksi dengan memanfaatkan bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik yang sama. Jenis-jenis produk yang dihasilkan tersebut dapat dibedakan berdasarkan kualitas, bentuk fisik, sifat, dan lain sebagainya (Mursyidi, 2010: 160). Proses produksi inilah yang disebut proses produksi bersama. Proses produksi bersama akan menghasilkan lebih dari satu produk, produk-produk yang dihasilkan tersebut disebut produk bersama (*joint product*).

Dalam proses produksi bersama (*joint process*) tentunya mengeluarkan biaya-biaya, biaya-biaya tersebut dinamakan biaya bersama. Biaya bersama (*Joint Cost*) atau dikenal juga dengan biaya produksi bersama (*Joint Production Cost*) adalah biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang sama dalam satu kali proses produksi menghasilkan berbagai jenis produk utama (Mursyidi, 2010 : 159).

Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan adalah pengalokasian biaya bersama pada produk bersama yang dihasilkan, karena pada dasarnya biaya produk bersama adalah utuh dan tidak dapat dibagi sehingga sukar ditentukan atau dialokasikan, padahal pengalokasian biaya pada masing-masing produk sangat diperlukan bagi manajemen dengan tujuan untuk penentuan harga pokok yang relevan dan sesuai serta untuk perhitungan biaya persediaan, penentuan laba, pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja.

Sama halnya dengan Dolphin Donuts Bakery yang menggunakan proses produksi bersama dalam menghasilkan berbagai jenis kue. Adapun produk bersama yang dihasilkan Dolphin Donuts Bakery yaitu dua jenis kue susen (susen keju dan susen coklat) yang diproduksi dalam satu kali proses produksi bersama dengan bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik yang sama. Dan adapun produk bersama lainnya yang dihasilkan Dolphin Donuts Bakery dalam satu kali proses produksi bersama yaitu produk bersama roti manis yang menghasilkan tigabelas (13) jenis roti manis.

Perusahaan yang menghasilkan produk bersama melalui proses produksi bersama tentunya sangat memerlukan suatu metode yang dapat mengalokasikan biaya bersama yang tepat dan akurat sehingga dapat mengetahui seberapa besar kontribusi biaya produksi yang terdapat dalam masing-masing produk yang dihasilkan sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk melihat harga pokok dan harga jual sehingga perusahaan dapat mengetahui seberapa besar laba yang dihasilkan oleh masing-masing produk bersama yang dihasilkan. Untuk mengalokasikan biaya pada produk bersama terdapat empat macam metode yaitu metode nilai jual/harga pasar, metode rata-rata biaya satuan, metode rata-rata tertimbang, dan metode satuan fisik.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengalokasian biaya bersama kepada masing-masing produk pada Dolphin Donuts Bakery.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi dengan cara-cara tertentu yang sistematis, serta penafsiran terhadap hasilnya (Mardiasmo, 2012: 1).

Akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan memproses (menganalisis, menghitung dan mencatat) informasi keuangan mengenai sebuah organisasi dan melaporkan informasi tersebut kepada pengambil keputusan (Libby, et al. 2008: 4).

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan (Reeve, et al 2012: 9).

Akuntansi (accounting) adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Horngren & Harrison, 2007: 4).

2.2 Akuntansi Biaya

Mursyidi (2010: 10) akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan biaya pabrikasi, dan penjualan produk dan jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.

2.3 Definisi Biaya

Witjaksono (2006: 6) biaya (cost) adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai akuntan mendefinisikan biaya sebagai satuan moneter atas pengorbanan barang dan jasa untuk memperoleh manfaat di masa kini atau masa yang akan datang.

2.4 Klasifikasi Biaya

Adapun klasifikasi biaya menurut Widilestariningtyas, dkk (2012: 3) sebagai berikut:

- a. Biaya dalam Hubungannya dengan Produk.
Dalam lingkungan manufaktur, total biaya operasi terdiri atas dua elemen: Biaya manufaktur dan Biaya komersial (Widilestariningtyas, dkk. 2012: 3).
- b. Biaya dalam Hubungannya dengan Volume Produksi.
Dalam lingkungan manufaktur, biaya dalam hubungannya dengan volume produksi terdiri atas biaya variabel, biaya tetap dan biaya semivariabel.

2.5 Proses Produksi Bersama

Beberapa perusahaan dalam melaksanakan proses produksi biasanya memanfaatkan bahan baku utama, tenaga kerja dan overhead pabrik sebagai input yang sama dan diolah dalam satu kali proses produksi sehingga menghasilkan beberapa jenis produk. Proses produksi tersebut dinamakan proses produksi bersama. Produk yang dihasilkan dapat dikategorikan menjadi produk bersama atau menjadi produk utama dan produk sampingan tergantung dari karakteristik masing-masing produk yang dihasilkan.

2.6 Produk Sampingan

Produk yang dihasilkan dari proses produksi gabungan yang memiliki total nilai jual yang rendah dibandingkan dengan total nilai jual produk utama atau produk gabungan disebut sebagai produk sampingan (*byproduct*) (Horngren, et al. 2008: 135).

2.7 Produk Bersama

Produk bersama (*joint product*) adalah beberapa jenis produk yang dihasilkan dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang sama dengan satu kali proses produksi (Mursyidi, 2010: 152).

Mursyidi (2010: 152) memberikan gambaran bahwa sifat dari produk bersama adalah:

1. Dihasilkan dari biaya produk yang sama;
2. Dihasilkan dalam satu kali proses produksi;
3. Pada umumnya merupakan produk yang menjadi tujuan utama usaha perusahaan;
4. Produk-produk tersebut mempunyai nilai ekonomi yang relatif seimbang sesuai dengan kualitasnya ;
5. Tidak dapat dinyatakan sebagai limbah industry apabila produk tersebut tidak laku dijual.

2.8 Biaya Bersama

Mursyidi (2010: 159) mendefinisikan biaya bersama (*Joint Cost*) atau dikenal juga biaya produksi bersama (*Joint Production Cost*) adalah biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang sama dalam satu kali proses produksi menghasilkan berbagai jenis produk utama. Jenis-jenis produk yang dihasilkan tersebut dapat dibedakan berdasarkan kualitas, bentuk fisik, dan lain sebagainya.

2.9 Metode Pengalokasian Biaya Bersama

a. Metode Nilai Jual/Harga Pasar

Salman (2013: 146) menyatakan harga pasar atau harga jual relatif didasarkan atas nilai jual relatif masing-masing produk individual.

b. Metode Biaya Rata-rata Per Unit

Menurut Salman (2013: 148) didalam metode biaya rata-rata per unit, biaya gabungan (*joint cost*) dialokasikan kesetiap produk jadi dengan menggunakan dasar biaya rata-rata per unit. Biaya rata-rata per unit ditentukan dari pembagian antara total biaya produksi gabungan dengan total unit yang diproduksi.

c. Metode Rata-rata Tertimbang

Menurut Salman (2013: 149) metode ini diterapkan untuk menjawab masalah yang timbul apabila diterapkan metode biaya rata-rata per unit. Metode rata-rata per unit sebagaimana yang lalu pembahasannya tidak membedakan antara produk A, B, C, dan D dari semua aspek artinya semua produk diasumsikan sama. Faktor pembobotan dapat didasarkan pada atribut-atribut seperti ukuran unit, tingkat kesulitannya, waktu yang diperlukan untuk memproduksi unit tersebut, perbedaan dalam jenis tenaga kerja yang digunakan, dan perbedaan dalam jumlah bahan baku yang digunakan (Carter, dikutip dalam Salman, 2013: 149). Jadi metode ini didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan memiliki faktor penimbang yang sama.

d. Metode Satuan Fisik

Mursyidi (2010: 163) menyatakan bahwa metode satuan fisik hanya dapat dipergunakan sebagai dasar alokasi biaya bersama jika produk yang dihasilkan mempunyai ukuran yang sama misalnya pon, gallon atau ton. Jika tidak mempunyai ukuran yang sama, maka harus dicari koefisien ekuivalensinya untuk menentukan ukuran produk-produk yang dihasilkan menjadi ukuran yang sama.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Sunarni (2012)	Analisis alokasi biaya bersama untuk produk bersama sate kambing dan tongseng kambing pada UD. Pak Bardan.	Untuk menghitung dan mengetahui alokasi biaya bersama pada produk bersama sate kambing dan tongseng kambing.	Kualitatif	Diperoleh alokasi biaya bersama untuk sate kambing sebesar Rp 6.751.642,633 dan untuk tongseng kambing sebesar Rp 12.708.974,37 dari total biaya bersama sebesar Rp 19.460.617.	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu menghitung alokasi biaya bersama pada produk bersama.	Peneliti sebelumnya menghitung satu macam produk bersama sedangkan penelitian ini menghitung dua macam produk bersama.
Rio Nurjaya (2012)	Penentuan alokasi biaya bersama dan pengaruhnya terhadap laba produk pada perusahaan roti lezat bakery.	Untuk mengetahui alokasi biaya bersama pada produk roti tawar dan donat dan untuk menentukan laba keduanya	Kualitatif	Hasil memperlihatkan bahwa pentingnya biaya depresiasi. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan laba yang dihitung penulis.dengan laba perusahaan yang meningkat	Persamaannya terletak pada perhitungan biaya bersama pada produk bersama.	Penelitian sebelumnya mengkaji sampai pada laba perusahaan sedangkan penulis hanya membatasi pada pengalokasian biaya bersama.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan alokasi biaya bersama yang diterapkan oleh perusahaan dengan metode yang sesuai dengan teori yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di perusahaan Dolphin Donuts Bakery yang berlokasi di Jl. Sam Ratulangi No. 45 Manado. Penelitian dilakukan selama bulan Oktober tahun 2013.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Observasi Objek Penelitian
- b. Pengumpulan Data
- c. Pengolahan Data
- d. Pemberian Kesimpulan dan Saran

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Menurut Kuncoro (2009: 145) data berdasarkan jenis terbagi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
2. Data kualitatif, di lain pihak, adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni gambaran umum perusahaan dan informasi operasi perusahaan dan data kuantitatif yang berupa biaya produksi dan metode perhitungan pengalokasian biaya bersama berupa metode harga pasar dan metode biaya rata-rata per unit.

2. Sumber Data

Sumber data adalah data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian, untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder (Iskandar, 2013: 77).

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa biaya produksi, sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan yang diperoleh langsung dari Dolphin Donuts Bakery.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut.

- a. Penelitian Lapangan
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang diperoleh secara langsung dari Dolphin Donuts Bakery dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2010: 194).
- b. Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder. Penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengcopyan atas data-data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dimana data dan informasi yang diperoleh dari Dolphin Donuts Bakery dideskripsikan secara kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif sederhana yang berupa tabel data biaya produksi yang menjadi dasar dalam perhitungan alokasi biaya bersama dengan menggunakan alat analisis berupa metode perhitungan harga pasar untuk produk bersama susen dan metode biaya rata-rata per unit untuk produk

bersama roti manis dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau alokasi biaya produksi pada masing-masing produk bersama tersebut.

Dalam penelitian ini data yang terkumpul secara keseluruhan terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif, kemudian seluruh data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dolphin Donuts Bakery berlokasi di Jl. Sam Ratulangi No. 45 Manado. Lokasi perusahaan yang sangat strategis sangat mendukung kemajuan dalam pengembangan usaha dan penjualan produk.

Dolphin Donuts Bakery pertama kali didirikan oleh Bapak Hamiko Irwan pada tanggal 1 Maret 1997. Dolphin Donuts Bakery adalah suatu unit usaha yang bergerak dalam bidang bakery dan pastry.

Hasil Penelitian

Produk Bersama Susen Keju dan Susen Coklat

Susen keju dan susen coklat diproduksi melalui proses produksi bersama dengan total biaya produksi bersama sebesar Rp 197.040 dan total biaya pemrosesan lebih lanjut sebesar Rp 137.600. Proses produksi bersama tersebut menghasilkan 100 unit susen keju dengan harga jual Rp 4.500/unit dan 140 unit susen coklat dengan harga jual Rp 3.000/unit. Untuk menghitung alokasi biaya bersama pada susen keju dan susen coklat menggunakan alokasi biaya bersama dengan metode harga pasar atau harga jual relatif. Metode ini digunakan karena harga jual dari masing-masing produk susen keju dan susen coklat mengikuti harga pasaran yang ada dan metode ini digunakan karena tingkat kesukaran setiap produk sangat berbeda sehingga harga jual menjadi dasar untuk pengalokasian biaya bersama.

Tabel berikut ini akan menguraikan pengalokasian biaya bersama pada produk bersama susen keju dan susen coklat.

Tabel 2 Alokasi Biaya Bersama – Metode Harga Pasar

Produk	Unit yang diproduksi	Harga jual per unit setelah titik pisah	Total harga jual setelah titik pisah	Biaya proses setelah titik pisah	Harga pasar hipotesis	Rasio harga hipotesis	Alokasi biaya bersama	Harga pokok persediaan
Susen Keju	100	Rp 4.500	Rp 450.000	Rp 58.300	Rp 391.700	53,5 %	Rp 105.416,4	Rp 163.716,4
Susen Coklat	140	Rp 3.000	Rp 420.000	Rp 79.300	Rp 340.700	46,5 %	Rp 91.623,6	Rp 170.923,6
Total	240	Rp 7.500	Rp 870.000	Rp 137.600	Rp 732.400	100%	Rp 197.040	Rp 334.640

Sumber : Olahan Data, Oktober 2013

Jadi, alokasi biaya bersama pada susen keju sebesar Rp 105.416,4 dan susen coklat sebesar Rp 91.623,6 dari total biaya produksi sebesar Rp 197.040.

Produk Bersama Roti Manis

Roti manis diproduksi melalui proses produksi bersama dengan biaya produksi sebesar Rp 834.846 dan biaya pemrosesan lebih lanjut sebesar Rp 586.650. Proses produksi bersama tersebut menghasilkan 785 unit dengan harga jual semua produk Rp 6.000/unit. Untuk menghitung alokasi

biaya bersama roti manis menggunakan alokasi biaya bersama dengan metode biaya rata-rata per unit. Metode ini digunakan karena harga jual dari masing-masing produk roti manis sama dan semua unit yang diproduksi diukur dalam satuan berat yang sama yakni 70gr/roti dan semua produk tidak banyak berbeda. Biaya rata-rata per unit roti manis adalah sebesar Rp 1.063/unit yang diperoleh dari total biaya bersama dibagi total unit produksi. Berikut ini alokasi biaya bersama pada masing-masing produk berdasarkan metode biaya rata-rata per unit.

Tabel 3 Alokasi Biaya Bersama – Metode Biaya Rata-rata Per Unit

Produk	Unit yang Diproduksi	Alokasi Biaya Bersama	Biaya Pemrosesan Lebih Lanjut	Harga Pokok Persediaan
Roti Coklat Keju	70	Rp 74.445	Rp 77.000	Rp 151.445
Roti Coklat	70	Rp 74.445	Rp 47.600	Rp 122.045
Roti Keju	70	Rp 74.445	Rp 73.500	Rp 147.945
Roti Sosis	60	Rp 63.810	Rp 60.000	Rp 123.810
Roti Kacang	60	Rp 63.810	Rp 10.800	Rp 74.610
Roti Srikaya	60	Rp 63.810	Rp 22.500	Rp 86.310
Roti Coco Diamond	60	Rp 63.810	Rp 39.000	Rp 102.810
Roti Magnum	60	Rp 63.810	Rp 39.000	Rp 102.810
Roti Cum-cum	55	Rp 58.492	Rp 34.375	Rp 92.867
Roti Mexico	55	Rp 58.492	Rp 63.250	Rp 121.742
Roti Tulip	55	Rp 58.492	Rp 30.250	Rp 88.742
Roti Sweetheart	55	Rp 58.492	Rp 55.000	Rp 113.492
Roti Rocky	55	Rp 58.492	Rp 34.375	Rp 92.867
Total	785	Rp 834.846	Rp 586.650	Rp 1.421.496

Sumber : Olahan Data, Oktober 2013

Melalui perhitungan alokasi biaya bersama dengan metode biaya rata-rata per unit diperoleh alokasi biaya bersama sebesar Rp 74.445 untuk roti coklat keju, roti coklat dan roti keju dan masing-masing sebesar Rp 63.810 untuk roti sosis, roti kacang, roti srikaya, roti coco diamond dan roti magnum serta sebesar Rp 58.492 untuk roti cum-cum, roti mexico, roti tulip, roti sweetheart dan roti rocky dari total biaya produksi bersama sebesar Rp 834.846.

Pembahasan

Produk Bersama Susen Keju dan Susen Coklat

Dalam satu bulan Dolphin Donuts Bakery memproduksi 25 jenis kue dengan total penjualan sebesar Rp 735.900.000. Melalui total penjualan tersebut, didapat presentase kue susen sebesar 3,5 % dan presentase roti manis sebesar 19,2 %.

Dolphin Donuts Bakery memproduksi susen keju dan susen coklat melalui proses produksi bersama dengan biaya produksi bersama sebesar Rp 197.040. Dari proses produksi bersama tersebut menghasilkan dua (2) macam jenis produk yaitu susen keju sebanyak 100 unit dan susen coklat sebanyak 140 unit.

Biaya bersama yang terjadi dalam proses produksi susen keju dan susen coklat adalah pada proses produksi bersama berupa pembuatan adonan kulit susen. Pada proses produksi bersama tersebut terdapat biaya yang dikeluarkan, biaya tersebut adalah biaya produksi bersama. Setelah itu adonan dipisahkan untuk dibentuk menjadi susen keju dan susen coklat. Titik inilah merupakan titik pisah (*split-off point*). Produk yang dihasilkan tidak dapat dijual pada saat titik pisah, maka perlu diproses

lebih lanjut agar produk menjadi barang jadi yang siap dipasarkan. Terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemrosesan lebih lanjut, tetapi biaya-biaya tersebut bukan biaya bersama sehingga dapat dibebankan ke masing-masing produk yang diproduksi.

Biaya produksi bersama yang dikeluarkan dalam memproduksi susen keju dan susen coklat terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik. Untuk memproduksi 240 unit susen mengeluarkan biaya bahan baku bersama sebesar Rp 128.800/hari. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam memproduksi susen adalah sebesar Rp 700.000/bulan atau Rp 23.333/hari. Total biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk memproduksi kue susen keju dan susen coklat adalah sebesar Rp 1.347.208 atau Rp 44.907/hari yang diperoleh dari penjumlahan total biaya variabel dan total biaya tetap. Jadi, dalam proses produksi bersama untuk menghasilkan kue susen sebanyak 240 unit mengeluarkan biaya produksi bersama sebesar Rp 197.040 yang diperoleh dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dan total biaya pemrosesan lebih lanjut sebesar Rp 137.600.

Proses produksi bersama tersebut menghasilkan 100 unit susen keju dengan harga jual Rp 4.500/unit dan 140 unit susen coklat dengan harga jual Rp 3.000/unit. Untuk menghitung alokasi biaya bersama pada susen keju dan susen coklat menggunakan alokasi biaya bersama dengan metode harga pasar atau harga jual relatif. Metode ini digunakan karena harga jual dari masing-masing produk susen keju dan susen coklat mengikuti harga pasaran yang ada dan metode ini digunakan karena tingkat kesukaran setiap produk sangat berbeda sehingga harga jual menjadi dasar untuk pengalokasian biaya bersama.

Melalui perhitungan alokasi biaya bersama dengan metode harga pasar, didapat alokasi biaya bersama pada susen keju sebesar Rp 105.416,4 dan susen coklat sebesar Rp 91.623,6 dari total biaya produksi sebesar Rp 197.040. Sehingga melalui alokasi biaya bersama tersebut diperoleh harga pokok persediaan untuk susen coklat sebesar Rp 1.637/unit dan susen keju sebesar Rp 1.220/unit sehingga dapat dilihat laba yang dihasilkan susen keju lebih besar yakni Rp 286.300 dibandingkan dengan susen coklat yakni sebesar Rp 249.200. Penetapan harga jual oleh perusahaan sudah tepat, perbedaan laba hanya disebabkan pada harga jual setiap produk yang berbeda dan alokasi biaya produksi pada setiap produk yang berbeda, sehingga perusahaan dapat lebih meningkatkan produksi untuk meraih laba yang lebih besar.

Produk Bersama Roti Manis

Dolphin Donuts Bakery memproduksi roti manis melalui proses produksi bersama dengan biaya produksi bersama sebesar Rp 834.846. Dari proses produksi bersama tersebut menghasilkan tigabelas (13) jenis roti manis yaitu 70 unit roti coklat keju, 70 unit roti coklat, 70 unit roti keju, 60 unit roti sosis, 60 unit roti kacang, 60 unit roti srikaya, 60 unit roti coco diamond, 60 unit roti magnum, 55 unit roti cumcum, 55 unit roti mexico, 55 unit roti tulip, 55 unit roti sweetheart dan 55 unit roti rocky.

Biaya bersama yang terjadi dalam proses produksi bersama roti manis adalah pada saat pembuatan adonan roti. Pada proses produksi bersama tersebut terdapat biaya yang dikeluarkan, biaya tersebut adalah biaya produksi bersama. Setelah itu adonan dipisahkan untuk dibentuk menjadi tiga belas macam roti manis dengan berat roti yang sama. Titik inilah merupakan titik pisah (*split-off point*). Produk yang dihasilkan tidak dapat dijual pada saat titik pisah, maka perlu diproses lebih lanjut agar produk menjadi barang jadi yang siap dipasarkan. Terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam

pemrosesan lebih lanjut, tetapi biaya-biaya tersebut bukan biaya bersama sehingga dapat dibebankan ke masing-masing produk yang diproduksi.

Biaya produksi bersama yang dikeluarkan dalam memproduksi roti manis terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik. Untuk memproduksi 785 unit roti manis mengeluarkan biaya bahan baku bersama sebesar Rp 460.500. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam memproduksi roti manis adalah sebesar Rp 3.840.000/bulan atau Rp 128.000/hari. Total biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk memproduksi roti manis adalah sebesar Rp 7.390.400/bulan atau Rp 246.346/hari yang diperoleh dari penjumlahan total biaya variabel dan total biaya tetap. Dalam proses produksi bersama untuk menghasilkan ketigabelas jenis roti manis sebanyak 785 unit mengeluarkan biaya produksi bersama sebesar Rp 834.846 yang diperoleh dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik.

Pada saat titik pisah (*split-off point*), roti manis masih merupakan bahan mentah yang belum siap untuk dijual sehingga dibutuhkan proses produksi lebih lanjut agar produk mentah tersebut menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Proses produksi lebih lanjut adalah pemberian topping pada masing-masing roti manis serta proses pembakaran untuk mematangkan roti. Dalam proses produksi lebih lanjut terdapat aliran biaya yang dikeluarkan yang disebut biaya proses lebih lanjut.

Roti manis diproduksi melalui proses produksi bersama dengan biaya produksi sebesar Rp 834.846 dan biaya pemrosesan lebih lanjut sebesar Rp 586.650. Proses produksi bersama tersebut menghasilkan 785 unit dengan harga jual semua produk Rp 6.000/unit. Untuk menghitung alokasi biaya bersama roti manis menggunakan alokasi biaya bersama dengan metode biaya rata-rata per unit. Metode ini digunakan karena harga jual dari masing-masing produk roti manis sama dan semua unit yang diproduksi diukur dalam satuan berat yang sama yakni 70gr/roti dan semua produk tidak banyak berbeda.

Melalui perhitungan alokasi biaya bersama dengan metode biaya rata-rata per unit diperoleh alokasi biaya bersama sebesar Rp 74.445 untuk roti coklat keju, roti coklat dan roti keju dan masing-masing sebesar Rp 63.810 untuk roti sosis, roti kacang, roti srikaya, roti coco diamond dan roti magnum serta sebesar Rp 58.492 untuk roti cum-cum, roti mexico, roti tulip, roti sweetheart dan roti rocky dari total biaya produksi bersama sebesar Rp 834.846. Melalui alokasi biaya bersama tersebut diperoleh harga pokok persediaan untuk semua produk roti manis sebesar Rp 1.810/unit sehingga diperoleh laba rata-rata semua produk sebesar Rp 3.289.150. Harga jual pada setiap produk yang ditetapkan perusahaan sudah tepat sehingga laba yang dihasilkan perusahaan harus terus dipertahankan.

5. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah diadakan pada Dolphin Donuts Bakery, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Penentuan Pengalokasian Biaya Bersama Pada Produk Bersama yakni alokasi biaya bersama pada produk bersama susen keju dan susen coklat dihitung berdasarkan metode harga pasar. Metode ini digunakan karena harga jual susen keju dan susen coklat berbeda satu sama lain dan harga jual kedua jenis susen tersebut mengikuti harga jual relatif atau harga pasar yakni harga jual susen keju Rp 4.500 dan harga jual susen coklat Rp 3.000.

Metode yang digunakan pada roti manis yaitu metode biaya rata-rata per unit, metode ini digunakan karena harga jual semua jenis roti manis sama yakni Rp 6.000 dan berat yang terkandung

dalam setiap roti diukur dalam satuan yang sama yakni 70gr/roti dan tingkat kesukaran setiap produk tidak jauh berbeda. Sehingga alokasi biaya bersama dapat langsung dialokasikan pada setiap jenis roti yang dihasilkan.

2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran kepada pihak perusahaan sebagai berikut:

1. Pentingnya alokasi biaya bersama dalam mengambil keputusan bagi pihak manajemen yang memproduksi produk melalui proses produksi bersama dan biaya produksi bersama, karena melalui alokasi biaya bersama perusahaan dapat melihat berapa besar kontribusi biaya produksi yang diserap masing-masing produk yang dihasilkan sehingga dapat dilihat harga pokok dan dapat dilihat pula laba yang dihasilkan masing-masing produk.
2. Pada dasarnya Dolphin Donuts Bakery sudah tepat dalam mengalokasikan biaya bersama sehingga produksi harus lebih ditingkatkan agar dapat meraih keuntungan yang lebih besar, penulis berharap semoga dengan perhitungan alokasi biaya bersama yang dilakukan penulis dengan metode harga pasar dan metode biaya rata-rata per unit dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan dimasa yang akan datang yaitu dalam perhitungan biaya-biaya persediaan dalam rangka menentukan laba yang diharapkan dimasa yang akan datang serta sebagai evaluasi kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hongren, et al. 2008. *Cost Accounting, A Managerial Emphasis*. Diterjemahkan oleh Lestari. *Akuntansi Biaya, Penekanan Manajerial Jilid 2*. Edisi Keduabelas. Penerbit Erlangga.
- Horngrén & Harrison. 2007. *Accounting*. Diterjemahkan oleh Gania & Pujiati. *Akuntansi Jilid 1*. Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga.
- Iskandar, 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Cetakan Kelima. Penerbit Referensi. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Penerbit Erlangga.
- Libby, et al. 2008. *Financial Accounting*. Diterjemahkan oleh Seputro. *Akuntansi Keuangan*. Edisi Kelima. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2012. *Akuntansi Keuangan Dasar 1*. Cetakan Ketiga. Edisi Ketiga. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mursyidi, 2010. *Akuntansi Biaya*. Cetakan Kedua. Penerbit Refika Aditama. Bandung
- Reeves, et al. 2012. *Principles of Accounting*. Diterjemahkan Oleh Damayanti Dian. *Pengantar Akuntansi Buku 1*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Salman, Kautsar. 2013. *Akuntansi Biaya*. Cetakan Pertama. Penerbit Akademia. Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-15. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Widilestariningtyas, dkk. 2012. *Akuntansi Biaya*. Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Witjaksono, Armanto. 2006. *Akuntansi Biaya*. Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

HUBUNGAN RISIKO BISNIS DAN UTANG SERTA DAMPAKNYA ATAS PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Winston Pontoh

ABSTRAK

Utang merupakan salah satu pembentuk struktur modal sebuah organisasi bisnis dan merupakan salah satu alternatif dana yang berasal dari pihak eksternal organisasi yang dapat digunakan dalam pembiayaan operasi dan investasi. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh utang, sebuah organisasi bisnis harus mempertimbangkan risiko kesulitan keuangan atau risiko kebangkrutan yang mungkin akan terjadi sebagai konsekuensi diterimanya utang tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia untuk periode 2009 sampai dengan 2011, dimana 253 perusahaan dipilih sebagai sampel.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, DOL berpengaruh terhadap DER, DER berpengaruh terhadap ROE, dan ROE berpengaruh terhadap EPS. Hasil ini mengimplikasikan bahwa, keputusan utang dari sebuah organisasi bisnis dapat ditentukan dengan mempertimbangkan faktor risiko bisnis, terkait dengan masalah kesulitan keuangan yang akan mengarah pada risiko kebangkrutan yang akan berdampak pada profitabilitas organisasi bisnis.

Kata Kunci : *Risiko Bisnis, Keputusan Utang, DOL, DER*

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Memaksimumkan nilai perusahaan melalui pencapaian laba adalah merupakan tujuan utama dari sebuah organisasi bisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka segala usaha dalam pemberdayaan sumber daya organisasi yang ada akan dilakukan oleh organisasi bisnis tersebut secara optimal. Akan tetapi, dalam menjalankan operasional sebuah organisasi, terkadang berbagai kendala akan muncul sehingga tujuan-tujuan yang dimaksud oleh organisasi tidak akan atau belum tercapai, sehingga membutuhkan strategi dan kebijakan tertentu.

Salah satu kendala yang pada umumnya terjadi adalah ketika sebuah organisasi bisnis tidak memiliki kecukupan dana dalam membiayai operasionalnya atau kegiatan pembiayaan investasinya, atau dengan pertimbangan tertentu, belum akan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasinya, sehingga membutuhkan dana tambahan lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Dana tambahan lain yang akan digunakan dalam kegiatan pembiayaan operasional atau investasi, biasanya akan berasal dari pihak eksternal dari organisasi tersebut, atau biasanya disebut sebagai utang.

Utang merupakan salah satu pembentuk struktur modal sebuah organisasi bisnis dan merupakan salah satu alternatif dana yang berasal dari pihak eksternal organisasi yang dapat digunakan dalam pembiayaan operasi dan investasi. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh utang, sebuah organisasi bisnis harus mempertimbangkan risiko kesulitan keuangan atau

risiko kebangkrutan yang mungkin akan terjadi sebagai konsekuensi diterimanya utang tersebut, misalnya masalah pembayaran bunga utang.

Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah faktor risiko bisnis, yaitu faktor yang akan menjamin lancarnya perputaran dan keberlanjutan bisnis sebuah organisasi dalam menjalankan operasinya. *Degree of Operating Leverage*, merupakan salah satu indikator untuk mengukur risiko sebuah bisnis, yang terkait dengan pembagian biaya variabel dan biaya tetap. Bodie, Kane & Marcus (2009), menyatakan bahwa organisasi bisnis dengan biaya tetap yang tinggi akan memiliki *operating leverage* yang tinggi juga, sehingga guncangan yang kecil pada kondisi bisnis akan memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan penciptaan laba organisasi bisnis tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pecking Order Theory

Nadaraja, et al. (2011), menyatakan bahwa *pecking order theory* pada dasarnya menyatakan bahwa pihak manajemen akan cenderung akan melakukan pembiayaan dengan menggunakan modal organisasi bisnis itu sendiri daripada menggunakan utang dari sudut pandang informasi asimetri dan manfaat atas pengurangan biaya transaksi. Berdasarkan teori ini, organisasi bisnis yang memiliki kemampuan penciptaan laba yang tinggi akan cenderung untuk menggunakan dana internal sebagai sumber pembiayaannya, sedangkan organisasi yang memiliki kemampuan penciptaan laba yang rendah akan cenderung untuk menggunakan pembiayaan dari eksternal.

Dalam konteks keuangan internal, teori ini mengindikasikan bahwa, dana internal seperti laba ditahan pada umumnya sering digunakan dan untuk pendanaan eksternal, maka utang selalu dipilih disamping penggunaan dana sendiri. Juga, apabila organisasi bisnis menggunakan dana yang bersumber dari pihak eksternal, maka organisasi bisnis akan cenderung diindikasikan memiliki kemampuan penciptaan laba yang rendah, sehingga harga sahamnya di dalam pasar modal mungkin akan dipengaruhi. Hal ini terkait dengan informasi asimetris di mana manajer biasanya memiliki informasi lebih lanjut tentang perusahaan. Oleh karena itu, mereka akan menerbitkan saham baru ketika diyakini bahwa harga saham adalah wajar atau meningkat.

2.2. Hubungan Risiko Bisnis, Keputusan Utang dan Profitabilitas

Alaghi (2012), berpendapat bahwa, baik investor dan organisasi bisnis akan menggunakan *leverage* untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar pada aset mereka. Namun, menggunakan *leverage* tidak menjamin kesuksesan, dan kemungkinan kerugian yang berlebihan akan lebih meningkat dalam posisi tersebut. Bagi perusahaan, ada dua jenis *leverage* yang dapat digunakan, yaitu: *operating leverage* dan *financial leverage*. *Operating leverage* berkaitan dengan hasil kombinasi yang berbeda dari biaya tetap dan biaya variabel. Secara khusus, rasio biaya tetap dan variabel dapat ditentukan berdasarkan jumlah *operating leverage* digunakan. Sebuah perusahaan yang memiliki rasio biaya tetap atas biaya variabel yang lebih besar dikatakan menggunakan *operating leverage* yang tinggi. Sebuah perusahaan dengan beberapa penjualan dan margin tinggi dikatakan menggunakan *leverage* yang tinggi. Di sisi lain, sebuah perusahaan dengan volume penjualan yang tinggi dan margin yang lebih rendah akan menggunakan utang untuk membiayai sebagian besar asetnya dengan mengambil utang. Perusahaan melakukan hal ini ketika mereka tidak dapat meningkatkan modal yang cukup dengan menerbitkan saham di pasar untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka. Ketika

perusahaan mengambil utang, maka kewajiban adalah kewajiban untuk membayar biaya bunga. Sebuah perusahaan hanya akan mengambil sejumlah besar utang ketika mereka yakin bahwa tingkat pengembalian atas aset (ROA) akan lebih tinggi dari biaya bunga pinjaman yang dibayarkan. Sebuah *operating leverage* yang tinggi berarti bahwa perusahaan membuat beberapa penjualan dengan margin yang tinggi, sehingga hal ini dapat menimbulkan risiko yang signifikan jika perusahaan salah memperkirakan penjualan masa depan. Jika perkiraan penjualan masa depan sedikit lebih tinggi dari apa yang sebenarnya terjadi, maka hal ini dapat menyebabkan perbedaan besar antara arus kas aktual dan yang dianggarkan, yang akan sangat mempengaruhi kemampuan operasi masa depan perusahaan. Risiko terbesar yang timbul dari utang tinggi terjadi ketika ROA perusahaan tidak melebihi bunga pinjaman, yang sangat mengurangi tingkat pengembalian atas ekuitas dan profitabilitas.

Kale (1991) dan Ullah (2012), menyatakan bahwa resiko bisnis adalah salah satu penentu utama dari struktur modal perusahaan, karena adanya utang di struktur modal meningkatkan probabilitas kebangkrutan, dan perusahaan dengan arus kas lebih bervariasi, yaitu risiko bisnis yang lebih tinggi atau, memiliki probabilitas lebih tinggi dari kebangkrutan untuk tingkat utang. Pernyataan ini didukung oleh Cuong (2012), dimana risiko bisnis atau volatilitas laba juga merupakan penentu struktur modal. Selain itu, Cuong (2012), mengatakan bahwa, hampir semua studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan volatilitas tinggi dalam pendapatan menghadapi risiko yang lebih tinggi tingkat pendapatan turun di bawah komitmen pembayaran utang. Hal ini dapat memaksa perusahaan untuk mengelola anggaran dengan unsur dana dengan biaya yang tinggi untuk membayar utang atau mengarah pada proses kebangkrutan dalam kasus yang ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan volatilitas laba yang tinggi akan meminjam setidaknya dan lebih atas ekuitas, ketika menghadapi pilihan pendanaan eksternal. Chowdhury (2010), berpendapat bahwa risiko bisnis diwakili oleh *operating leverage*, dan menurut Lev (1974), secara umum, semakin tinggi *operating leverage*, maka semakin tinggi volatilitas laba dengan mempertimbangkan fluktuasi permintaan. Bodie (2009), menyatakan bahwa, perusahaan dengan jumlah biaya variabel yang lebih besar daripada biaya tetapnya, akan memiliki sensitifitas bisnis yang kurang atas kondisi bisnis. Hal ini karena dalam kemerosotan ekonomi, perusahaan-perusahaan ini dapat mengurangi biaya output akibat adanya penurunan penjualan. Sedangkan bagi perusahaan dengan biaya tetap yang tinggi akan cenderung tidak stabil akibat adanya penjualan yang tidak seiring, sehingga akan berdampak pada kemampuan penciptaan labanya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia untuk periode 2009 sampai dengan 2011, dimana 253 perusahaan dipilih sebagai sampel dengan perincian :

Agriculture	13
Mining	22
Basic Industry and Chemicals	49
Miscellaneous Industry	38
Consumer Goods Industry	29
Infrastructure, Utilities & Transportation	25
Trade, Services & Investment	77

3.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis jalur.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

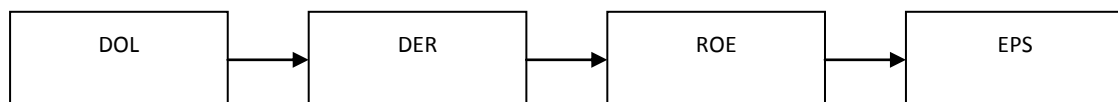
- Rasio utang atas modal (DER), yang diukur dengan total utang dibagi dengan total ekuitas.
- Laba per Saham (EPS) yang diukur dengan jumlah laba bersih dibagi jumlah saham beredar.
- Risiko Bisnis (DOL) yang diukur dengan persentase perubahan atas laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dibagi persentase perubahan penjualan.

3.4. Hipotesis dan Model

Hipotesis dan model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : DOL has relationship with DER.

H2 : DER has relationship with EPS.



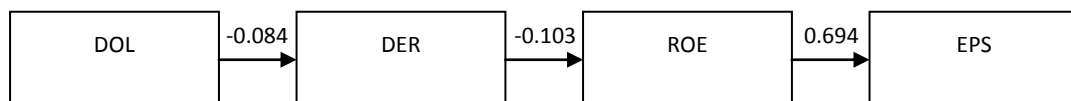
$$DER = \alpha + \beta DOL + \epsilon$$

$$ROE = \alpha + \beta DER + \epsilon$$

$$EPS = \alpha + \beta ROE + \epsilon$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis jalur, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :



Hasil analisis menunjukkan bahwa, DOL berpengaruh terhadap DER, DER berpengaruh terhadap ROE, dan ROE berpengaruh terhadap EPS. Hasil ini mengimplikasikan bahwa, keputusan utang dari sebuah organisasi bisnis dapat ditentukan dengan mempertimbangkan faktor risiko bisnis, terkait dengan masalah kesulitan keuangan yang akan mengarah pada risiko kebangkrutan. Hal ini ditunjukkan melalui fungsi risiko bisnis, dimana apabila faktor risiko bisnis meningkat, maka jumlah utang akan berkurang. Sedangkan dampaknya terhadap kemampuan untuk menciptakan laba (profitabilitas), adalah pada saat jumlah utang meningkat, maka tingkat pengembalian atas modal pemegang saham akan mengalami penurunan, yang disebabkan oleh biaya bunga utang tersebut.

Disudut pandang yang lain, hal ini juga berdampak karena tingkat pengembalian ekuitas adalah merupakan salah satu fungsi dari laba per saham.

Apabila dikaitkan dengan *Pecking Order Theory*, maka sampel dalam penelitian mengindikasikan adanya perilaku yang mendukung teori tersebut, karena jumlah utang yang terjadi secara umum dapat dikatakan bersifat optimum. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa, secara umum, organisasi-organisasi bisnis yang berada di Indonesia, menggunakan dana eksternal, dalam hal ini adalah utang, sebagai salah satu alternatif dana yang akan digunakan dalam operasinya ataupun kegiatan investasinya.

5. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa, *Pecking Order Theory* berlaku pada organisasi bisnis yang berada di Indonesia, khususnya yang telah terdaftar dalam pasar modal. Dan pada umumnya, organisasi bisnis yang ada di Indonesia cenderung untuk menggunakan utang dalam struktur modalnya secara berhati-hati dengan mempertimbangkan faktor risiko bisnis yang nantinya akan berdampak pada tingkat kemampuan untuk menciptakan laba dari organisasi bisnis tersebut atau profitabilitas.

6. REFERENSI

- Alaghi, Kheder. (2012). Operating leverage and systematic risk. *African Journal of Business Management* Vol.6 (3), pp. 1095-1099,25 January, 2012 Available online at <http://www.academicjournals.org/AJBM> DOI: 10.5897/AJBM11.2266 ISSN 1993-8233 ©2012 Academic Journals.
- Alkhatib, Khalid. (2012). The Determinants of Leverage of Listed Companies. *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 24, Special Issue – December 2012.
- Ahmad, Zuraidah, Abdullah, Norhasniza Mohd Hasan & Roslan, Shashazrina. (2012). Capital Structure Effect on Firms Performance: Focusing on Consumers and Industrials Sectors on Malaysian Firms. *International Review of Business Research Papers* Vol. 8. No.5. July 2012. Pp. 137 – 155.
- Bagchi, B, & Khamrui, B. (2012). Relationship between Working Capital Management and Profitability : A Study of Selected FMCG Companies in India. *Business and Economics Journal*, Vol. 2012: BEJ-60.
- Bodie, Zvi, Kane, Alex, & Marcus, Alan J. (2009). *Investments* 8th Edition. Mc Graw Hill-Irwin. The McGraw-Hill Companies, Inc, New York.
- Chen, Jean J. (2004). Determinants of capital structure of Chinese-listed companies. *Journal of Business Research* 57, 1341– 1351. Elsevier.
- Ching, Hong Yuh, Novazzi, Ayrton & Gerab, Fábio. (2011). Relationship between Working Capital Management and Profitability in Brazilian Listed Companies. *Journal Of Global Business And Economics* July 2011. Volume 3. Number 1.
- Chowdhury, Anup, & Chowdhury, Suman Paul. (2010). Impact of capital structure on firm's value : Evidence from Bangladesh. Peer-reviewed and Open access journal ISSN: 1804-1205 | www.pieb.cz. BEH - Business and Economic Horizons Volume 3 | Issue 3 | October 2010 |pp. 111-122.

- Cuong, Nguyen Thanh & Canh, Nguyen Thi. (2012). The Factors Affecting Capital Structure for Each Group of Enterprises in Each Debt Ratio Threshold: Evidence from Vietnam's Seafood Processing Enterprises, *International Research Journal of Finance and Economics* ISSN 1450-2887 Issue 94 (2012) EuroJournals Publishing, Inc.
- Ebadi, Mehdi, Thim, Chan Kok, & Choong, Yap Voon. (2011). Impact of Firm Characteristics on Capital Structure of Iranian Listed Firms. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* ISSN 1450-2275 Issue 42 (2011) © EuroJournals, Inc.
- Homaifar, Ghassem, Joachim Zietz and Omar Benkato. (1994). An Empirical Model of Capital Structure : Some New Evidence. *Journal of Business Finance & Accounting*, 21(1), January 1994.
- Javed, Benish & Akhtar, Shehla. (2012). Interrelationships between capital structure and financial performance, firm size and growth: comparison of industrial sector in KSE. *European Journal of Business and Management* www.iiste.org ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol 4, No.15.
- Kale, Jayant R., Noe, Thomas H., & Ramirez, Gabriel G. (1991). The Effect of Business Risk on Corporate Capital Structure : Theory & Evidence. *The Journal of Finance*, Volume 46, Issue 5 (Dec 1991), 1693-1715.
- Khrawish, Husni Ali & Khraiwesh, Ali Husni Ali. (2010). The Determinants of the Capital Structure : Evidence from Jordanian Industrial Companies. *JKAU: Econ. & Adm.*, Vol. 24 No. 1, pp: 173-196 (2010 A.D./1431 A.H.) DOI: 10.4197/Eco. 24-1.5.
- Lev, Baruch. (1974). On the Association Between Operating Leverage and Risk. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 9, No. 4 (Sep., 1974), pp. 627-641 Published by: University of Washington School of Business Administration Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2329764>.
- Lim, Thian Cheng et al. (2012). Capital Structure and Political Patronage : Evidence from China. *American Journal of Business & Management* Vol. 1, No. 4.
- Nadaraja, Punitharaja, Zulkafli, Abdul Hadi & Masron, Tajul Ariffin. (2011). Family Ownership, Firm's Financial Characteristics and Capital Structure : Evidence from Public Listed Companies in Malaysia. *Economia. Seria Management* Volume 14, Issue 1.
- San, Ong Tze, Teh Boon Heng. (2011). Capital Structure and Corporate Performance of Malaysian Construction Sector. *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 1 No. 2; February.
- Shah, Attaullah & Khan, Safiullah. (2007). Determinants of Capital Structure : Evidence from Pakistani Panel Data. *International Review of Business Research Papers* Vol. 3 No.4, 2007 pp. 265-282.
- Shamshur, Anastasiya. (2010). Access to Capital and Capital Structure of the Firm. Working Paper Series, November (ISSN 1211-3298).
- Ullah, Zeeshan, et al. (2012). Managers' Risk Taking Behavior for Adjusting Capital Structure. *World Applied Sciences Journal* 20 (11): 1478-1483.
- Yue, Ho-Yin. (2011). Determinants of Corporate Capital Structure Under Different Debt Maturities. *International Research Journal of Finance and Economics* - Issue 66.

LAMPIRAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.579	.211		7.492	.000
	DOL	-.001	.001	-.084	-2.322	.020

a. Dependent Variable: DER

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.242	.046		-48.860	.000
	DER	-.022	.008	-.103	-2.851	.004

a. Dependent Variable: ROE

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.426	.111		57.990	.000
	ROE	1.136	.043	.694	26.495	.000

a. Dependent Variable: EPS

KUALITAS AUDIT INSPEKTORAT DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Grace Wilhelmina Djara

David P.E. Saerang

Jenny Morasa

ABSTRAK

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan tugas pokoknya melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah secara berkala. Fenomena yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Kota Manado belum pernah meraih Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disebabkan karena efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara belum optimal serta masih tingginya korupsi terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana kualitas audit Inspektorat apakah berpengaruh terhadap pencapaian Opini WTP. Obyek dalam penelitian ini adalah APIP Inspektorat Kota Manado. Responden yang dipilih adalah Inspektur dan para Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Kesimpulan yang diperoleh adalah kualitas audit tidak hanya dihasilkan dari kualitas auditor yang baik tapi juga dari proses audit yang terstruktur dan sistematis serta manajemen audit yang baik. Kualitas audit yang baik dapat mendeteksi adanya pelanggaran untuk segera direkomendasikan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin sedikit temuan audit yang diperoleh oleh auditor eksternal BPK-RI maka keyakinan akan kewajaran penyajian LKPD akan semakin tinggi sehingga Opini LKPD WTP dapat diraih.

Kata Kunci : *Kualitas Auditor Inspektorat, Proses Audit, Manajemen Audit, Kualitas Audit, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

ABSTRACT

Internal Supervision Inspectorate as government officials in accordance with the principal task of inspection and supervision of the implementation of the regional administration, financial management of local and regional assets periodically. The phenomenon that occurs when this is Manado City Government has never won Unqualified Opinion of Financial Statements of Local Government. This is because the efficiency and effectiveness of financial management is still not optimal and high levels of corruption, especially in the procurement of goods / services of the government and the poor quality of public services. Issues to be observed is how the Inspectorate whether audit quality affect achievement Unqualified Opinion. Objects in this study is APIP Inspectorate Manado. Respondents were selected are Inspector and the Assistant Superintendent of Region I, II, and III. This study used a qualitative approach with ethnographic methods. The

conclusion is not only the quality of the audit resulting from the good quality but also the auditor of the audit process in a structured and systematic audits and good management. Good quality audit can detect violations recommended for immediate repairs in accordance with applicable regulations. The fewer audit findings obtained by the external auditors of BPK-RI then belief in the fairness of the presentation will be higher so Opinion of Financial Statements of Local Government is Unqualified Opinion can be achieved.

Keywords : *Quality Auditor, Audit Quality, Financial Statements of Local Government, and Opinion Financial Statements of Local Government.*

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Manado selaku eksekutif dan masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislatif memiliki hubungan keagenan. Eksekutif selaku *agent* dan legislatif selaku *principal* membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit, dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal* (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Masyarakat mendelegasikan kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta aset daerah kepada pemerintah dengan harapan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan pengelolaan keuangan daerah serta aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Sebagai upaya konkrit transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fenomena yang ada dan sudah menjadi permasalahan nasional saat ini yaitu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum banyak yang dapat meraih Opini WTP. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara belum optimal serta masih tingginya korupsi terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan rendahnya kualitas pelayanan publik. LKPD yang ada di Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara selama kurun waktu 4 (empat) tahun sejak 2008-2011 baru ada 2 (dua) yang meraih Opini WTP.

Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan internal di sektor publik disebut juga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut Falah (2005), Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Inspektorat Kota Manado sebagai APIP yang ada di Pemerintah Kota Manado memiliki peran dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan serta akuntabilitas

keuangan dan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Manado No. 31 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Manado Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Secara berkala, Inspektorat Kota Manado melakukan pengawasan dan audit terhadap SKPD yang ada di Pemerintah Kota Manado. Begitu banyaknya pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat maka adalah suatu hal yang riskan jika masih ditemukan banyak kekurangan oleh pihak eksternal auditor BPK-RI. Semakin besarnya tingkat materialitas temuan audit yang ada maka semakin sukarlah bagi Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD-nya.

Diharapkan dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat maka kekurangan yang ada dapat dideteksi lebih dini dan segera di rekomendasikan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila temuan audit yang diperoleh Inspektorat telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang mengatur maka semakin banyaklah SKPD yang taat aturan karena pada prinsipnya aturan yang digunakan oleh eksternal auditor sama dengan aturan yang digunakan oleh internal auditor. Semakin sedikitnya temuan audit yang diperoleh pihak BPK-RI maka semakin besarlah peluang untuk mendapatkan Opini WTP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti bagaimana kualitas audit Inspektorat Kota Manado dan bagaimana kualitas audit yang ada dapat menunjang pencapaian Opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian oleh karena itu penelitian ini diberikan judul “Kualitas Audit dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kualitas auditor Inspektorat.
2. Mengevaluasi proses audit yang dilakukan.
3. Mengevaluasi manajemen audit.
4. Mengevaluasi kualitas audit Inspektorat dalam menunjang pencapaian Opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemegang Kebijakan dan Pengambil Keputusan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan akan pentingnya peran dan fungsi dari Inspektorat dalam menunjang tugas Pemerintah Daerah demi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terciptanya *good governance and clean goverment*.
2. Bagi APIP khususnya Inspektorat Kota Manado, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi guna peningkatan kualitas audit yang lebih baik sehingga dapat menunjang dalam pencapaian Opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan dapat menambah atribut baru dalam melaksanakan penelitian.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2012). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang sering timbul di antara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

2.1.2 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2.1.3 Kualitas Auditor

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, auditor yang berkualitas memenuhi kriteria sebagai mana yang diatur dalam Prinsip-prinsip Dasar, Standar Umum, Standar Pelaksanaan, Standar Pelaporan, dan Standar Tindak Lanjut.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP, auditor yang berkualitas juga harus patuh terhadap kode etik. Maksud ditetapkan Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP.

2.1.4 Auditing

1. Pengertian Audit

Arens, Elder & Beasley yang dialihbahasakan oleh Tim Dejacarta (2003:15) mengemukakan definisi auditing sebagai berikut :

“Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen”.

William F. Messier. Steven M. Glover dan Douglas F. Prawitt yang diterjemahkan oleh Nuri H (2005:16) sebagai berikut :

“Auditing adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa :

“Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

2. Jenis Audit

Menurut pihak yang melakukan audit dapat dikelompokkan menjadi audit intern dan ekstern. Audit intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi audit. Sebagai contoh, untuk pemerintah daerah maka audit intern adalah audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sedangkan pada organisasi kementerian negara audit intern dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen dan dalam organisasi pemerintah pusat audit intern dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi auditi. Dalam pemerintahan Republik Indonesia, peran audit eksterna dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Mereka menjalankan audit atas pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah) oleh seluruh organ pemerintahan, untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut tujuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat 3 (tiga) jenis audit keuangan negara, yaitu :

1. Audit Keuangan.

Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Audit Kinerja/Audit Operasional.

Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara obyektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

3. Audit Dengan Tujuan Tertentu.

Audit dengan tujuan tertentu adalah audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (*examination*), revidu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agreed-upon*

procedures). Audit ini mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

3. Proses Audit

Proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mekanisme dan sistematika audit adalah sebagai berikut :

1. Persiapan pemeriksaan

a. Koordinasi Rencana Pemeriksaan

Sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi mengenai waktu dan obyek yang akan diperiksa.

b. Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek Yang Diperiksa.

1) Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa antara lain :

a) Peraturan perundang-undangan

b) Data umum obyek yang diperiksa

c) Laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa

d) Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas sebelumnya

e) Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan program/kegiatan obyek yang akan diperiksa

2) Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan

c. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan sebagai berikut :

1) Penentuan personil

2) Penentuan Jadwal Waktu Pemeriksaan

3) Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

4) Menyusun langkah-langkah pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Pertemuan awal (*Entry Briefing*)

Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala Daerah atau yang mewakili, Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan.

b. Kegiatan Pemeriksaan

1) Tim Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan.

2) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

a) Setiap Auditor wajib menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

b) KKP direview secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Wilayah dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan.

c) Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas diserahkan oleh Ketua Tim kepada Sub Bagian Tata Usaha Wilayah untuk diarsipkan.

3) Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan

Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasi kepada pimpinan obyek yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4) Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)

Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta diketahui oleh Inspektur Wilayah.

c. Pertemuan Akhir (*Exit Briefint*)

Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah atau yang mewakili dan Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/ yang mewakili.

3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan

a. Ekspose Hasil Pemeriksaan

- 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemeriksaan.
- 2) Inspektur Wilayah menyerahkan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- 3) Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin Inspektur Wilayah dengan penyanggah terdiri dari para Pejabat Pengawas Pemerintah, kelompok kerja bidang pengawasan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian terkait.
- 4) Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi kuorum (50% + 1), bila tidak memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan berikutnya dengan maksimal penundaan 2 (dua) kali.
- 5) Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan membuat notulen ekspose sebagai bahan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.

b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta Nota Dinas Inspektur Wilayah kepada Inspektur Jenderal, Konsep Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada Menteri dan Petunjuk Menteri kepada Kepala Daerah atau Pimpinan Komponen.

4. Kualitas Audit

Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya.

De Angelo (dalam Alim dkk, 2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi *auditee*. Sedangkan Deis dan Groux (dalam Alim dkk, 2007) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Government Accountability Office (*GAO*) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit. (Lowenshon *et al*, 2005). Standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas kinerja auditor (Messier *et al*, 2005).

AAA *Financial Accounting Committee* (2000) dalam Christiawan (2002 : 83) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor berkualitas jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu. Sejalan dengan Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) yang menyatakan bahwa audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pelaksanaan dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Kriteria kualitas audit menurut SPKN adalah sebagai berikut :

1. Audit harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
4. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya.
5. Audit harus dilaksanakan oleh pemeriksa yang memiliki kemampuan/keahlian pemeriksa dan independen.

Didasarkan pada beberapa definisi yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Audit adalah :

1. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik.
3. Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik.
4. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten.
5. Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.
6. Meningkatkan pendidikan profesional auditornya.
7. Mempertahankan independensi dalam sikap mental.

2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Komponen Laporan Keuangan menurut PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Komponen Laporan Keuangan menurut PP 71 tahun 2010 tentang perubahan PP 24 tahun 2005 mengalami penambahan komponen sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan pemerintah daerah berguna untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antargenerasi

Laporan Keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik sesuai dengan peraturan yang mengatur. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan PP RI No. 71 tahun 2010 terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, adalah :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.6 Opini Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Mahmudi (2010) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah. Jenis-jenis pendapat auditor terdiri dari lima bentuk opini, sebagai berikut :

1. Pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)”.
2. Pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas”.
3. Pendapat “Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)”.
4. Pendapat “Tidak Wajar (*adversed opinion*)”.
5. Pendapat “Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)”.

Menurut BPK RI dalam webside resminya www.bpk.go.id/web/ Opini yang dikeluarkan oleh BPK memiliki berbagai tingkatan, mulai dari yang paling baik sampai yang tidak mendapatkan opini. Laporan pemeriksaan yang baik atau wajar dan tidak memiliki penyimpangan sama sekali diberi opini “Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)” atau WTP. Opini “Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)” atau WDP diberikan kepada laporan keuangan yang baik dan wajar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan namun tidak untuk beberapa hal yang dikecualikan. Untuk laporan keuangan yang penyajian saldonya lebih besar dari seharusnya diberikan opini “Lebih Saji (*overstated*)”. Opini “Tidak Wajar” atau *Adversed Opinion* diberikan kepada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sedangkan opini “Pernyataan Menolak Memberikan Opini” atau *Disclaimer of Opinion* diberikan jika tim pemeriksa tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan SAP.
2. Kecukupan dengan pengungkapan.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Batubara (2008) tentang Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi empiris pada Bawasko Medan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi pemeriksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Bawasko Medan. Secara parsial hanya latar belakang pendidikan yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Bawasko Medan.

Penelitian Lubis (2009) tentang Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Studi kasus pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara). Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel Komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP 24 Tahun 2005 di Kabupaten Labuhan Batu sedangkan variabel Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung tidak berpengaruh.

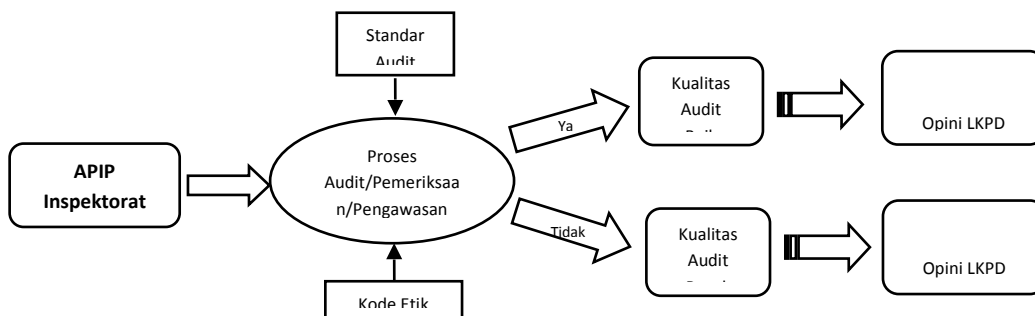
Penelitian Efendy (2010) tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). Kompetensi, independensi, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh Aparat Inspektorat Kota Gorontalo. Secara parsial independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sehingga independensi yang dimiliki aparat inspektorat tidak menjamin apakah yang bersangkutan akan melakukan audit secara berkualitas.

Penelitian Ayuningtyas (2012) tentang Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi kasus pada auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah). Hasil penelitian menunjukkan Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Kompetensi sebagai variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit sebagai variabel dependen.

Penelitian Setyaningrum (2012) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK-RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik auditor dan karakteristik auditee secara bersama-sama mempengaruhi kualitas audit. Namun secara parsial menunjukkan bahwa karakteristik auditor yang terdiri dari latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, dan pendidikan profesional berkelanjutan tidak mempengaruhi kualitas audit. Sedangkan untuk karakteristik auditee hanya ukuran pemerintah daerah yang terbukti berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, namun kompleksitas pemerintah daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit.

3 KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Data olahan sendiri

4 METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode etnografi. Studi etnografi merupakan salah satu dari lima tradisi kualitatif, yaitu biografi, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian alamiah (*naturalistic inquiry*), atau *qualitative inquiry*.

4.1.1. Jenis Data

Jenis data ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data tersebut. Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap APIP Inspektorat. Pengamatan dilakukan terhadap tingkat kompetensi, kepatuhan terhadap aturan pemeriksaan, proses pemeriksaan di lapangan, sampai dengan penyusunan

Laporan Hasil Pemeriksaan. Data sekunder adalah data pelengkap untuk menunjang keabsahan data primer. Dalam penelitian ini data sekunder adalah Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Peraturan-peraturan, dan data pendukung lainnya yang menurut peneliti dapat memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

4.1.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah wawancara mendalam terhadap responden, observasi langsung dilapangan, dan permintaan dokumen pendukung lainnya. Responden yang diwawancarai mendalam adalah pejabat Inspektorat Kota Manado yang dalam pelaksanaan pemeriksaan memiliki kapasitas sebagai penanggung jawab atau pengendali mutu dan ketua tim atau pengendali teknis.

4.2 Populasi dan Sampel

4.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh APIP di Inspektorat Kota Manado yang berjumlah 42 pegawai.

4.2.2. Sampel

Desain kualitatif memiliki sifat yang luwes, oleh sebab itu tidak ada aturan yang pasti dalam jumlah sampel yang harus diambil untuk penelitian kualitatif. Sampel yang diambil adalah Inspektur, dan tiga orang Inspektur Pembantu. Alasan peneliti mengambil responden tersebut adalah karena Inspektur Kota Manado merupakan pengambil kebijakan dan yang bertanggungjawab terhadap hasil pemeriksaan APIP di Inspektorat Kota Manado, beliau yang menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa. Sedangkan untuk para Inspektur Pembantu mereka dipilih karena merupakan pengendali teknis pemeriksaan di lapangan atau ketua tim. Ketua tim mengetahui secara pasti situasi dan kondisi yang terjadi pada saat proses pemeriksaan berlangsung, selain itu ketiga Inspektur Pembantu ini sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam birokrasi dan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

4.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan.

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Inspektorat Kota Manado yang beralamat di Jalan Balai Kota No.1 Tikala Ares, Manado. Waktu penelitian adalah selama Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012 serta ditambahkan dengan pengamatan dari pengalaman yang diperoleh penulis selama menjadi APIP di Inspektorat Kota Manado.

4.5 Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan proses triangulasi, yaitu :

1. Wawancara
2. Pengamatan/Observasi
3. Dokumentasi

4.6 Cara Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas dan fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, tahapan analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data.
2. Reduksi data.
3. Penyajian data.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi.

5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

5.1.1 Pemerintah Kota Manado

Hari jadi Kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 1623. Walikota Manado dalam menyelenggarakan pemerintahan yang ada dibantu oleh unsur-unsur organik pemerintah yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah. Masing-masing SKPD memiliki tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap SKPD saling bersinergi satu dengan yang lain untuk menciptakan pemerintahan Kota Manado yang baik menuju pada *good governance and clean government*.

Satuan Unit Kerja yang menjadi objek pemeriksaan di Pemerintah Kota Manado baik pemeriksaan Periodik maupun Pemeriksaan Insidental sejumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) objek.

5.1.2 Inspektorat Kota Manado

Susunan organisasi Inspektorat Kota Manado berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kota Manado adalah Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 tahun 2008. Sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Walikota Manado Nomor: 31 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Manado, sebagai pedoman bagi Inspektorat Kota Manado dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

5.1.3 Gambaran Umum Responden

Keempat responden yang dipilih didasarkan pada :

1) Responden I (Inspektur Kota Manado)

Pemilihan Inspektur Kota Manado didasarkan bahwa beliau merupakan orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin Inspektorat selain itu juga sebagai pengendali mutu dalam proses pemeriksaan.

2) Responden II, III, dan IV (Inspektur Pembantu)

Inspektur Pembantu dalam tugasnya merupakan ketua tim pemeriksa atau supervisi. Ketua Tim adalah orang yang memimpin tim melaksanakan pemeriksaan. Ketua Tim/Inspektur Pembantu merupakan pengendali teknis pemeriksaan jadi mereka memahami situasi dan kondisi yang terjadi selama proses pemeriksaan karena mereka juga terjun langsung ke lapangan.

5.2 Hasil Penelitian

- Auditor

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Manado terdiri dari beragam latar belakang pendidikan formal, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang rendah. Pegawai yang ada berjumlah 42 orang, dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) orang Strata 3 (Doktor), 4 (empat) orang Strata 2 (Magister), 32 (tiga puluh dua) orang Strata 1 (Sarjana), 2 (dua) orang Diploma, dan 3 (tiga) orang SLTA.

Proses perekrutan pegawai yang akan ditempatkan di Inspektorat Kota Manado tidak melalui mekanisme khusus seperti harus mengikuti tes tertentu terlebih dahulu. Perekrutan pegawai terpusat pada satu SKPD pelaksana yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai adalah dengan menugaskan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun internal.

- Independensi dan Obyektifitas

Kedudukan Inspektorat Kota Manado yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Manado menyebabkan terjadinya gangguan terhadap independensi dan obyektifitas auditor. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kinerja dan akuntabilitas kepala SKPD, serta sering diperhadapkan dengan obyek pemeriksaan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan auditor menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan tidak optimal. Namun dengan adanya komitmen yang kuat dari Walikota Manado beserta para jajarannya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan pengelolaan keuangan daerah yang bersih maka auditor Inspektorat Kota Manado dapat bekerja dengan optimal.

- Manajemen audit

Manajemen audit dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit.

1) Perencanaan Audit

Perencanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Manado sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2) Pelaksanaan audit

Setiap APIP Inspektorat Kota Manado dalam penugasan senantiasa berusaha untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama untuk menghasilkan kualitas

audit yang baik. Usaha ini dilakukan untuk mendeteksi apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan aturan yang mengatur, hal ini dimaksudkan agar ketika pelanggaran terdeteksi lebih dini oleh Tim Pemeriksa maka akan dapat segera diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan. Dengan demikian akan semakin sedikit pelanggaran yang akan menjadi temuan audit BPK-RI ketika melakukan audit di Pemerintah Kota Manado.

Satuan unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan baik Pemeriksaan Periodik maupun Pemeriksaan Insidental ada sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) unit kerja. Pemeriksaan dilakukan secara berkala terhadap unit kerja yang ada namun jumlah tenaga pemeriksanya tidak mencukupi, sebab selain pemeriksaan terhadap 145 obyek pemeriksaan tersebut masih terdapat pemeriksaan khusus yang harus segera diperiksa.

Jumlah tenaga pemeriksa yang ada tidak sepadan dengan jumlah obyek pemeriksaan serta penugasan yang ada. Jumlah waktu pemeriksaan yang terbatas sering membuat APIP tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Akibatnya masih terdapat kekurangan yang tidak terdeteksi oleh APIP selama pemeriksaan. Meskipun dengan waktu yang terbatas namun dalam pengumpulan bukti audit dilakukan dengan optimal dengan memperhatikan kriteria bukti audit yang ada yakni relevan, kompeten, cukup, dan material.

3) Pelaporan Hasil Audit

Setelah selesai melaksanakan audit, auditor wajib melaporkan hasilnya kepada pimpinan. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan audit. Hal-hal yang ditemukan selama audit dan perlu untuk diperbaiki harus diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif yaitu eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2012). Diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang sering timbul di antara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan. Pemerintah Kota Manado dalam perannya sebagai *agent* mendapat pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dari masyarakat selaku *principal* untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip *good governance and clean goverment*.

Prinsip *good governance and clean goverment* tidak pernah lepas dari prinsip tiga pilar yaitu partisipatif, transparansi, dan bertanggungjawab. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah dilakukan dengan bertanggungjawab dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah berguna untuk kepentingan Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, dan Keseimbangan antargenerasi.

LKPD yang telah disusun selanjutnya di audit oleh auditor eksternal yang independen dan tidak berpihak pada *principal* (legislatif) maupun *agent* (eksekutif) untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah di audit oleh auditor eksternal BPK-RI selanjutnya LKPD dapat diberikan opini penilaian atas kewajaran penyajiannya.

Fenomena yang ada dan sudah menjadi permasalahan nasional saat ini yaitu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah belum semuanya baik. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara belum optimal serta masih tingginya korupsi terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Khususnya di Provinsi Sulawesi Utara masih banyak Laporan Keuangan yang tidak bisa meraih opini auditor Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kota Manado selama kurun waktu 4 (empat) tahun (2008 – 2011) belum pernah meraih opini WTP. Padahal intensitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Manado adalah sering. Pemeriksaan dilakukan terhadap keuangan, kinerja/operasional, dan untuk permasalahan-permasalahan tertentu yang perlu untuk diperiksa. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kualitas audit Inspektorat Kota Manado selama ini dan apakah kualitas audit yang baik dapat menunjang pencapaian Opini LKPD WTP?

Merujuk pada teori tentang kualitas audit serta dibandingkan dengan hasil penelitian pada Inspektorat Kota Manado diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik.

Perencanaan pekerjaan audit Inspektorat Kota Manado masih kurang hal ini terlihat dari PKP yang tidak dibuat sesuai dengan permasalahan yang akan diaudit serta tidak diperbarui sesuai dengan peraturan terbaru.

2. Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik.

Pemahaman terhadap struktur pengendalian intern klien tidak terlalu diperhatikan pada saat penugasan.

3. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten.

Setiap penugasan auditor berusaha untuk selalu memperoleh bukti audit guna menunjang hasil pemeriksaan. Bukti audit yang diambil harus memenuhi kriteria relevan, cukup, dan material.

4. Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.

Setelah melakukan audit, auditor wajib secepatnya menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP memuat tentang kondisi yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Waktu pembuatan LHP paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya penugasan.

5. Meningkatkan pendidikan profesional auditornya.

Kualitas pendidikan formal APIP Inspektorat Kota Manado sudah memadai namun untuk kualitas kompetensi pemeriksaan masih kurang. Pegawai yang ada berjumlah 42 orang, dengan latar belakang pendidikan formal sebagai berikut 1 (satu) orang Strata 3 (Doktor), 4 (empat) orang Strata 2 (Magister), 32 (tiga puluh dua) orang Strata 1 (Sarjana), 2 (dua) orang Diploma, dan 3 (tiga) orang SLTA.

Hasil survei pada tahun 2010-2011 oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa hampir 95% auditor intern pemerintah masih berada pada tingkat keahlian pemula. Survei dilakukan dengan pemetaan/assessment kapabilitas APIP 2010-2011 terhadap 331 APIP pusat dan daerah, dengan pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor-IIA, atas lima level

kapabilitas yang mungkin dicapai oleh APIP, menunjukkan bahwa secara nasional 93,96% APIP masih berada di level 1 (*initial*), selanjutnya 5,74% berada di level 2 (*infrastructure*) dan hanya 1 APIP yang berada di level 3 (*integrated*). Secara kapabilitas tingkat satu belum bisa mendeteksi tingkat korupsi di K/L.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dari APIP Inspektorat Kota Manado adalah dengan menugaskan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun internal. Pendidikan dan Pelatihan dari pihak eksternal seperti Pembentukan P2UPD yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri dan Jabatan Fungsional Auditor yang diselenggarakan oleh BPKP. Sedangkan yang dari pihak internal seperti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Selain itu masih ada beberapa pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, maupun profesi yang diberikan kepada para pegawai Inspektorat Kota Manado hal ini dimaksudkan untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada.

6. Mempertahankan independensi dalam sikap mental.

Independensi dan obyektifitas APIP Inspektorat Kota Manado dipengaruhi oleh kedudukannya yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan hubungan kekerabatan yang ada karena wilayah kerja yang kecil yaitu hanya dalam lingkungan Pemerintah Kota Manado. Resiko bahwa auditi adalah keluarga ataupun kerabat adalah besar.

7. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Auditor melaksanakan audit dengan optimal sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Pegawai baru yang belum memahami tentang audit namun telah ditugaskan akan dibimbing dan terus diawasi oleh Ketua Tim dan senior lainnya yang telah paham pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas audit yang baik tidak hanya dihasilkan dari pemenuhan 7 (tujuh) kriteria diatas sedangkan merujuk dari kriteria kualitas audit menurut SPKN yang menyatakan sebagai berikut :

1. Audit harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
4. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya.
5. Audit harus dilaksanakan oleh pemeriksa yang memiliki kemampuan/keahlian pemeriksa dan independen.

Penulis menemukan bahwa kualitas audit tidak hanya dihasilkan oleh 4 (empat) kriteria tersebut namun auditor juga harus melaksanakan proses audit yang benar sesuai dengan prosedur yang ada. Proses audit yang tertib dan terstruktur membantu meminimalisir kemungkinan tidak terdeteksinya pelanggaran yang terjadi. Selain proses audit, peneliti menemukan juga bahwa perlu adanya manajemen audit yang baik. Perencanaan personil yang akan ditugaskan harus disesuaikan antara kompetensi auditor dengan kasus yang akan diperiksa. Pelaksanaan audit harus mematuhi

standar dan aturan yang berlaku. Pelaporan audit harus tepat waktu sehingga hasil yang dilaporkan tidak akan sulit untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan dalam laporan haruslah yang dapat ditindaklanjuti.

Rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mengurangi tingkat materialitas temuan audit oleh BPK-RI. Sehingga kewajaran penyajian LKPD dapat diyakini dan Opini WTP dapat diraih oleh Pemerintah Kota Manado.

6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas auditor Inspektorat Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta dibandingkan dengan teori maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas audit APIP Inspektorat Kota Manado tidak hanya dihasilkan dari 7 (tujuh) kriteria yang diungkapkan para ahli dalam teorinya, yaitu :
 - 1) Meningkatkan pendidikan profesional auditornya.
 - 2) Mempertahankan independensi dalam sikap mental.
 - 3) Dalam melaksanakan pekerjaan audit, auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
 - 4) Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik.
 - 5) Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik.
 - 6) Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten.
 - 7) Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.
2. Kualitas audit yang baik ditunjang juga oleh :
 - 1) Kualitas auditor yang sesuai standar audit APIP (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit) dan mematuhi Kode Etik (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP)
 - 2) Pelaksanaan proses audit yang terstruktur dan sistematis oleh auditor.
 - 3) Manajemen audit yang baik.
3. Kualitas audit Inspektorat yang berkualitas dapat mendeteksi adanya pelanggaran serta mengurangi jumlah temuan audit. Temuan audit yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dapat mengurangi jumlah temuan audit oleh pihak BPK-RI. Semakin sedikitnya temuan audit yang diperoleh berarti tingkat kepatuhan terhadap peraturan semakin meningkat. Oleh karena itu Opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat diberikan oleh BPK-RI terhadap LKPD yang di audit. Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diterima sebagai opini terbaik terhadap LKPD maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah selaku *agent* akan semakin meningkat. Pihak *principal* akan semakin yakin bahwa keuangan daerah yang ada telah dikelola dengan baik. Dengan demikian akan terciptalah *Good Government and Clean Governance*. Tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan dapat dicapai. Demikian juga dengan pemerataan pembangunan di segala bidang di seluruh Indonesia dapat terwujud. Dengan demikian masyarakat Indonesia akan semakin maju dan dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan kualitas auditor Inspektorat dengan cara peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dukungan dana dalam proses peningkatan kualitas auditor harus di perbesar. Sarana dan prasarana penunjang pengembangan kompetensi perlu untuk disediakan
2. APIP Inspektorat dalam pelaksanaan audit harus mengikuti proses audit yang ada secara sistematis. Program Kerja Pemeriksaan harus selalu dibuat pada saat penugasan dan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan terbaru.
3. Manajemen pemeriksaan yang terdiri dari manajemen perencanaan pemeriksaan, manajemen pelaksanaan pemeriksaan, dan manajemen pelaporan hasil pemeriksaan harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Harvita, Yulian, (2012), **Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi kasus pada auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah)**. Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro.
- Setyaningrum, Dyah, (2012), **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK-RI**. Tesis Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Tidak Dipublikasikan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang **Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara**.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang **Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Keputusan Inspektur Kota Manado Nomor 06 tahun 2011 tentang **Penetapan Kode Etik Khusus Pemeriksa Inspektorat Kota Manado**.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah**
- Efendy, Muh. Taufik, 2010, **Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi auditor terhadap Kualitas Audit Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)**. Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Tidak Dipublikasikan.
- Efendy, Muh. Taufik, 2010, **Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi auditor terhadap Kualitas Audit Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)**. Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Tidak Dipublikasikan.
- BPKP,2009.**Auditing**. Edisi Kelima. Diklat Pembentukan Auditor Ahli.
- BPKP,2009.**Dasar-dasar Auditing**. Edisi Keenam. Diklat Pembentukan Auditor Terampil.
- BPKP,2009.**Sistem Pengendalian Manajemen**. Edisi Keenam. Diklat Pembentukan Auditor Ahli.

- Lubis, Haslinda, 2009, **Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara**. Tesis Magister Sains Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Tidak Dipublikasikan.
- BPKP,2008.**Kode Etik dan Standar Audit**.Edisi Kelima. Diklat Pembentukan Auditor Ahli.
- Batubara, Rizal Iskandar, 2008. **Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan dan Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris pada Bawasko Medan)**. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang **Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**.
- Peraturan Pemerintah Republik Nomor 60 tahun 2008 tentang **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang **Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah**.
- Peraturan Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang **Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah**.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 tahun 2008 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado**.
- Peraturan Walikota Manado Nomor 31 tahun 2008 tentang **Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Manado**.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang **Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang **Pedoman Penanganan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah**.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang **Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota**.
- BPKP,2007.**Kendali Mutu**. Edisi Kedua. Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Mutu.
- BPKP,2007.**Manajemen Pengawasan**. Edisi Keempat. Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis.
- Arens, Alvin A., et al, *Auditing and Assurance Services – An Integrated Approach*, Prentice Hall, 2007
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang **Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**.
- Mardiasmo, 2005. **Akuntansi Sektor Publik** Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sawyer, Lawrence B., dkk., *Sawyer's Intern Auditing*, Penerjemah: Desi Adhariani (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang **Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**.
- Sarundajang, (2004), **Pembukaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengawasan**, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang **Pemerintah Daerah**.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara**.
- Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang **Percepatan Pemberantasan Korupsi**.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang **Keuangan Negara**.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Wilopo. 2001. "**Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah**". **Ventura**. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.
- Partono. 2000. "**Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas**". **Media Akuntansi**. Edisi 14. Oktober.
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**.
- DeAngelo, L. E. 1981a. *Auditor Size and Audit Quality*. *Journal of Accounting and Economics* 3 (1): 167-175.
- <http://manado.bpk.go.id/?p=580>, diakses pada tanggal 13 Juni 2013, jam 08.00
- <http://wirapati.raddien.com/2013/01/kemendagri-siap-bubarkan-inspektorat.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2013, jam 19.15
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) <http://www.primeindonesia.com/index.php/88-artikel/119-pengukuhan-asosiasi-auditor-intern-pemerintah-indonesia-aaipi-dan-pembukaan-seminar-2012>, diakses pada tanggal 13 Juni 2013, jam 19.20

PENGARUH NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH dan INDEKS HARGA SAHAM REGIONAL ASIA (STI, HANG SENG, NIKKEI) TERHADAP PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN di BURSA EFEK INDONESIA

Syermi Mintalangi

ABSTRACT

Movement of the Composite Stock Price Index at the Indonesian Stock Exchange as an indicator of the stock market and also one of the national economic indicators, not only affected by internal factors , but also by external factors . This is due to the globalization of the economy and political economy relation of our country to other countries. The information is relatively easy to obtain by the world and the behavior of market participants who expect the best investor returns from the investment to spur the market players look for stocks to fit with their goals. It is this factor that led to the stock market we assessed integrated with the stock market a few countries in the world .

Godness of fit test showed that together and partially independent variables affect to dependent variable. By having R - Square is 0.786 , which means that the independent variable exchange rate , STI index , the Hang Seng Index and the Nikkei have 78,6 percent of confidence level to explain the dependent variable (Indonesian Composite Index). Where the statistical results indicate that the variable rupiah , index STI and Hang Seng Index significantly influence the index , while the Nikkei stock index variable is not significant at the significance level ($\alpha = 0,05$) .

Based on result, it is known that the index is strongly influenced by fluctuations in exchange rate on the USD , STI Stock Price Index , and the Hang Seng Index . This proves that the stock market (Indonesian Stock Exchange) is integrated with several regional stock exchanges. From the findings is conclude that exchange rate is a variable that has a largest coefficient and it is this fact which can be controlled directly by the government, therefore, is expected to stabilize the exchange rate is a good policy to keep the capital markets conducive and attractive to investors as one of the foundations of economic growth.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu negara terbuka termasuk Indonesia. Pasar modal mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dimana fungsinya sebagai lembaga intermediasi dana dari pihak yang memiliki modal lebih kepada pihak yang membutuhkan modal. Atau dapat juga dikatakan bahwa pasar modal merupakan sarana pembentuk modal dan akumulasi dana jangka panjang yang diarahkan kepada masyarakat domestik maupun asing sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional yang berkesinambungan melalui aktivitas investasi riil.

Pergerakan IHSG di Indonesia dapat diamati dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti variabel makroekonomi, politik dan keamanan, dan globalisasi. Ketiga faktor diatas tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika faktor variabel ekonomi yang semakin kondusif, politik dan keamanan yang mendukung maka investor akan yakin untuk menanamkan modalnya melalui investasi portofolio maupun investasi langsung. Sebaliknya kondisi ekonomi dan politik yang tidak kondusif akan berpengaruh pada variabel makro yang guncang, sehingga kepercayaan investor akan menurun sehingga mengakibatkan peralihan dan pelarian modal oleh pemilik modal.

Faktor globalisasi yang dapat mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat dilihat pada krisis moneter tahun 1997 yang dimulai dengan kejatuhan Bath di Thailand yang menimbulkan *contagion effect* (efek penularan) terhadap kawasan lain terutama pada mitra dagangnya (*partner*) termasuk Indonesia. Krisis mata uang tersebut mempengaruhi kawasan Asia dan telah memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi secara umumnya dan pasar modal secara khususnya. Krisis ini akhirnya tidak hanya mempengaruhi krisis di Asia namun menyebar ke Rusia dan Amerika Latin. Secara teoritis fenomena ini merupakan dampak *spillover* sebagai akibat dari keterkaitan perdagangan (*trade linkages*), dimana devaluasi disuatu negara akan berimbas pada negara *partner* dagangnya.

Dampak globalisasi terhadap Bursa Saham di Indonesia melalui indikator Indeks Harga Saham Gabungan dapat juga dilihat pada tahun 2008 kuartal ke III dimana dunia dikejutkan dengan krisis yang terjadi di Amerika Serikat yakni *Suprime Mortgage*. Kredit macet perumahan yang membengkak bukan saja memberikan dampak negatif pada negara tersebut namun meluas pada negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Variabel makroekonomi sebagai pondasi stabilitas ekonomi yang terganggu sehingga perekonomian menjadi tersendat.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai *shock* yang terjadi pada indeks harga saham regional yakni STI /Straits Times Index (Singapura), Hang Seng (Hongkong) dan Nikkei (Jepang), dimana ketiga negara tersebut merupakan negara yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia khususnya kawasan Asia dimana Indonesia termasuk didalamnya. Ketiga negara tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia dalam sistem keuangan yakni didasarkan pada sektor perbankan.

Bursa saham berpredikat "*emerging market level*" seperti Indonesia, sangat berpengaruh pada situasi yang terjadi pada bursa saham negara lain khususnya negara "*advanced market*" seperti Singapura, Jepang, maupun Hongkong, tetapi sebaliknya *shock* yang terjadi pada bursa saham Indonesia belum tentu mempunyai pengaruh terhadap bursa saham negara lain. Bursa saham yang masih bersifat "*follower*" dan cenderung "*reactive*" adalah merupakan hal yang masih melekat pada bursa saham Indonesia. Kondisi inilah yang membuat kestabilan Indeks Harga Saham di Indonesia sulit di prediksi dan mengakibatkan keraguan akan investor dalam menanamkan modal di Indonesia dan adanya kecenderungan *panic custom* yang berlebihan pada investor jika ada *shock* yang terjadi di bursa saham sebagai akibat dari efek globalisasi dari bursa saham negara lain.

Selain hal yang telah disebutkan (faktor eksternal) diatas *shock* pada Bursa Saham Indonesia dengan Indikatornya IHSG juga dipengaruhi oleh faktor internal diantaranya dari sisi variabel makroekonomi. Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup adalah fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sebagai mata uang Internasional. Fenomena adanya pengaruh fluktuatif Rupiah terhadap IHSG dapat dilihat pada krisis yang terjadi pada dua dekade terakhir yakni moneter pada tahun 1997 dan krisis global pada tahun 2008 bahwa terdapat fenomena penurunan IHSG selalu diikuti oleh perubahan pada nilai tukar Rupiah atau sebaliknya. Fenomena ini dapat

dijelaskan oleh dua teori yang berbeda sebagai kausal yakni *traditional approach* yakni nilai dari suatu perusahaan dan pada akhirnya meningkatnya harga saham perusahaan dan teori *portofolio approach* yakni pergerakan pasar modal akan menyebabkan pergerakan/perpindahan modal dari suatu negara ke negara yang lain yang akan mengakibatkan *capital outflow* yang menguras devisa dan pada akhirnya mengakibatkan pelemahan mata uang domestik.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah nilai tukar Rupiah (Rp/USD) berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia?.
2. Apakah indeks harga saham *STI* (Singapura) berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia?.
3. Apakah indeks harga saham *Hang Seng* (Hongkong) berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia?.
4. Apakah indeks harga saham *Nikkei* (Jepang) berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia?.
5. Apakah nilai tukar rupiah, indeks harga saham *STI*, indeks harga saham *Hang Seng* dan indeks harga saham *Nikkei* secara simultan berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar Rupiah/USD terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh harga saham *STI* (Singapura) terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks harga saham *Hang Seng* (Hongkong) terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh nilai indeks harga saham *Nikkei* (Jepang) terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah, indeks harga saham *STI*, indeks harga saham *Hang Seng* dan indeks harga saham *Nikkei* secara simultan terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Dalam konteks keilmuan, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal di Indonesia dengan indikatornya Indeks Harga Saham Gabungan.
2. Bagi Program Magister Manajemen Universitas Sam Ratulangi, sebagai referensi untuk memperkaya bahan-bahan yang digunakan untuk keperluan proses belajar mengajar.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi dengan analisis yang lebih sempurna guna meningkatkan minat akademis dalam mengetahui perkembangan pasar modal di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan kepada investor baik dalam maupun luar negeri untuk memprediksi pasar modal dengan menggunakan informasi-informasi dari hasil penelitian ini, diantaranya pertimbangan nilai tukar dan indeks harga saham regional Asia dalam menetapkan pilihan investasi yang tepat sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi resiko. Penelitian ini juga memberikan masukan kepada pemerintah (BAPEPAM) untuk memperhatikan stabilitas ekonomi (makroekonomi) yang sangat berpengaruh pada stabilitas pasar modal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1. Perubahan Musiman (*Seasonality*) Pasar Modal dan Kontaigon Efek di Negara-Negara ASEAN

Harjito, D.A (2010) dengan judul “Perubahan Musiman (*Seasonality*) Pasar Modal dan Kontaigon Efek di Negara-Negara ASEAN”. Penelitian ini mengkaji pengaruh dari tiga efek yakni pertama kontaigon efek, perubahan musim efek, dan efek Kalender di 5 negara ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* dengan terlebih dahulu menguji stasioner. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Singapura yang dikalahkan oleh Philipina dan juga Thailand yang dikalahkan oleh Indonesia menetapkan kecenderungan dari gerakan pasar saham di Singapura dan juga di Thailand memiliki efek penularan pada musim di pasar ekuitas Malaysia. Untuk pasar modal Singapura, efek penularan kontemporan berasal dari Philipina, sementara bagi Indonesia, buktinya agak sedikit. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya respons yang berbeda dari satu negara dalam menyikapi *shock* pada bursa saham negara lain. Dari sudut pandang investasi, efek penularan menyebutkan bahwa keputusan tidak boleh semata-mata berdasarkan pada kondisi yang ditegaskan dari satu pasar saja, tetapi pasar-pasar lain dalam kawasan sebagai satu kesatuan.

2.1.2. *Volatility Spillover: Dynamic Regional And World Effects*

Chieh, Ming. W dan Ming, F. S (2010) dengan judul penelitian “*Volatility Spillover Dynamic Regional And World Effect*” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penentu pergerakan pasar saham di lima negara yang termasuk dalam “*emerging market*” dimana negara tersebut tidak termasuk dalam “*European Monetary Union*”. Ke lima negara tersebut adalah Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Rusia, dan Turki. Dengan menggunakan *multi factor model*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh global maupun regional signifikan terhadap perubahan saham di negara-negara “*emerging market*” tersebut, dimana pengaruh variabel makroekonomi di kawasan regional lebih dominan yang ditunjukkan dengan besaran koefisien yang lebih besar dibandingkan dengan faktor global. Dalam penelitian ini melihat kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perubahan nilai tukar mata uang dapat memprediksi *volatilitas spillover* di Republik Ceko, Hungaria, dan Polandia terutama di kawasan regional yang dikontrol melalui variabel aliran modal asing dan perdagangan (ekspor-impor). Sedangkan pengaruh global (antar kawasan) lebih kuat ketika dunia dan regional Eropa mengalami resesi yang berkesinambungan. Sedangkan negara lain dalam penelitian tersebut yang tidak signifikan dapat disebabkan oleh negara berkembang di Eropa lebih banyak melakukan ekspor terhadap negara yang bursa sahamnya termasuk dalam kategori “*emerging market*”.

Shock Bursa saham pada negara negara regional dan global yang disebabkan adanya pergolakan makroekonomi berdampak pada bursa saham negara-negara *emerging market* yang direspons berlebihan. Namun pengaruh *shock* dari regional lebih besar dibandingkan dengan pengaruh faktor global.

2.1.3. Stock Price Index And Exchange Rate Interactions In Emerging Market

Azman, S. W.N.W at all (2008) dengan judul penelitian “ *Stock Price Index and Exchange Rate Interactions In An Emerging Market*”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausal antara nilai tukar mata uang terhadap harga saham di Malaysia sebagai salah satu pasar yang berkategori “*Emerging Market*”. Nilai tukar mata uang dikonversikan terhadap USD sedangkan indeks harga saham dianalisis pada dua bursa yakni *Kuala Lumpur Stock Exchange* (KLSE) dan *Kuala Lumpur Composite Index* (KLCI). Dengan menggunakan dua metode analisis yakni *Granger Causality* dan VAR, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *main stock index* mempengaruhi nilai tukar mata uang selama periode krisis, sedangkan nilai tukar mata uang mempengaruhi *second board index* selama periode sebelum krisis. Dalam semua periode ada hubungan kausalitas antara harga saham dan nilai tukar mata uang. Indikasi ini menyatakan bahwa nilai tukar mata uang hanya dapat digunakan sebagai indikator variabel prediktif pada *second board Index*. Nilai tukar mata uang merupakan variabel independen yang mempengaruhi indeks harga saham di Malaysia khususnya pada *second board indeks*. Semakin terapresiasinya nilai mata uang Ringgit maka berdampak positif terhadap *second board index (traditional approach)* namun akan melemahkan “*trade competitive*” Malaysia.

2.1.4. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergerakan Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) Di Bursa efek Indonesia

Azhar, D. Mauliano (2010) dengan judul penelitian “ *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia*” bersifat *confirmation research* yakni untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian variabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi IHSG dari dua sektor penyebab utama yakni dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri menggunakan variabel makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap USD, dan suku bunga Indonesia (SBI), sedangkan faktor luar negeri yakni pasar saham yang diwakili oleh indeks bursa asing seperti Dow Jones, NYSE, Footsie 100, STI, Nikkei, Hang Seng, KLSE serta harga minyak dunia. Penelitian ini menggunakan metode *enter* dan *backward* dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda (*Ordinary Least Square /OLS*). Dari hasil penelitian maka disimpulkan metode yang terbaik adalah menggunakan metode *backward* dan hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda, maka secara parsial faktor eksternal yang mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan adalah Dow Jones, Hang Seng, KLSE, dan harga minyak dunia, sedangkan faktor internal dalam negeri yang mempengaruhi adalah tingkat SBI dan inflasi. Pengaruh faktor eksternal yang sangat dominan mempengaruhi IHSG di Indonesia dan respons yang berbeda dari *shock* bursa saham di negara lain merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Adanya pengaruh negatif oleh Dow Jones Indeks Amerika (DJAI) namun pengaruh positif dari *KOSPI Korea (KS11)*, *Indeks Hang Seng Hongkong (HSI)*, *Indeks Kuala Lumpur Stock Exchange Malaysia (KLSE)*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Contagion Effect Theory

Contagion Effect dalam Wikipedia, 2011 “*a contagion effect is an adverse condition caused by a company that may affect other companies or an entire industry. An example of a contagion effect would be the improper testing of a product resulting in a recall or further testing. Contagion effects (on a broader scale) can also be a market issue. An adverse issue may spread from one country to another affecting the entire global market*”. Dalam kaitannya dengan Indeks Harga Saham, bahwa informasi akan terjadinya *unstability* di Bursa saham negara lain akan berpengaruh terhadap negara lain khususnya negara yang mempunyai kaitan erat dalam bidang ekonomi maupun politik, hal ini dikarenakan adanya informasi yang bebas didapat dari berbagai sumber. *Contagion effect* atau efek penularan dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu karena ada hubungan dagang (*trade links*) dan kesamaan kondisi dan kebijakan makroekonomi. *Gerlach and Smets* (1998) dalam Dwipraptono 2010 mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan mekanisme efek penularan melalui hubungan perdagangan. Didalam modelnya, serangan terhadap suatu mata uang menyebabkan mata uang tersebut terdepresiasi sehingga dapat meningkatkan daya saing produknya. Peningkatan daya saing ini berarti penurunan ekspor bagi negara-negara pesaingnya, sehingga dapat mengakibatkan negara pesaingnya mengalami defisit transaksi berjalan, penurunan cadangan devisa secara bertahap, dan pada akhirnya menghasilkan suatu serangan terhadap mata uangnya.

Selanjutnya menurut Shiller (1995) dalam Dwipraptono 2010 mengembangkan model untuk menjelaskan salah satu mekanisme efek penularan melalui kesamaan kondisi makroekonomi dimana para pelaku pasar uang sebenarnya banyak menerima informasi yang sama (melalui alat komunikasi yang sama, seperti Reuter), sehingga suatu reaksi atas sepotong informasi yang baru dapat menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat dan menyampaikan pesan pada pelaku pasar internasional untuk melakukan reaksi yang sama. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila respons yang ditempuh sebagian pelaku pasar mampu mengatasi keyakinan pasar dan merubah ekspektasi pasar. Jadi, serangan terhadap suatu mata uang dapat merangsang pelaku pasar internasional untuk melakukan langkah yang sama. Demikian pula sebaliknya, reaksi yang diambil pelaku pasar internasional.

2.2.2. Pasar Modal

Pasar modal (*capital market*) adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal/dana. Dengan kata lain pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi (Fabozzi, 1995:27). Pengertian pasar modal yang ekuivalen dipaparkan oleh Suad Husnan (1998) yang menyatakan bahwa pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta.

2.2.3. Instrumen Pasar Modal

Menurut Anoraga dan Pakarti (2006), pasar modal memperdagangkan instrumen pasar modal, yaitu semua surat-surat berharga (*securities*) yang diperdagangkan di bursa. Instrumen pasar modal tersebut antara lain saham, obligasi dan lain-lain.

a. Saham

Menurut Anoraga dan Pakarti (2006), saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham di suatu perusahaan maka manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. *Dividen*, adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham.
2. *Capital gain*, adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya.
3. Manfaat *non-finansial* yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.

Jenis saham yang diperjualbelikan di bursa saham yang saat ini dikenal ada dua yakni :

1. Saham Biasa (*common stock*) adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Menurut Dahlan Siamat (1995:385), ciri - ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut:
 - Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.
 - Memiliki hak suara (*one share one vote*).
 - Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.
2. Saham Preferen, yaitu saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan direksi. Adapun ciri-ciri dari saham preferen menurut Dahlan Siamat (1995:385):
 - Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen.
 - Tidak memiliki hak suara,
 - Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus.
 - Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi.

b. Obligasi

Menurut Anoraga dan Pakarti obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan. Obligasi mengandung suatu perjanjian atau kontrak yang melibatkan kedua belah pihak, antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penerbit obligasi menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, baik mengenai jatuh tempo pelunasan utang, bunga yang dibayarkan, besarnya pelunasan dan ketentuan-ketentuan tambahan lainnya.

2.3 Teori Pasar Efisien

Menurut Fama (1970) bahwa suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorangpun, baik investor individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh *return* tidak normal (*abnormal return*), setelah disesuaikan dengan risiko, dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada atau "*stock*

prices reflect all available information” (Ary, T. Gumanti. 2002). Ekspresi yang lain menyebutkan bahwa dalam pasar yang efisien harga-harga aset atau sekuritas secara cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas tersebut. Hal ini sangat penting bagi para pemilik dan pengguna modal agar dapat menentukan yang terbaik dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

Efisiensi pasar dikelompokkan ke dalam tiga jenis, berdasarkan jenis informasinya. Menurut Sharpe at all (1995:86) ketiga jenis tersebut adalah:

- a. Efisien dalam bentuk lemah (*weak form*).
- b. Efisien dalam bentuk setengah kuat (*semi strong form*).
- c. Efisien dalam bentuk kuat

Agar pasar efisien ada dalam kehidupan nyata, terdapat beberapa kondisi ideal yang harus terpenuhi atau didekati oleh kenyataan yang ada di pasar (Jogiyanto, 2003):

1. Investor adalah penerima harga (*price takers*),
2. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah.
3. Informasi dihasilkan secara acak (*random*) dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya *random* satu dengan yang lainnya.
4. Investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga sekuritas segera mengalami penyesuaian untuk mencapai keseimbangan yang baru.

2.4. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Saat ini di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat sebelas jenis indeks, yakni :

1. **Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).**
2. **Indeks Sektoral .**
3. **Indeks LQ 45**
4. ***Jakarta Islamic Index (JII).***
5. **Indeks Kompas 100**
6. **Indeks BISNIS-27**
7. **Indeks PEFINDO25**
8. **Indeks SRI-KEHATI.**
9. **Indeks Papan Utama Indeks Papan Pengembangan**
10. **Indeks Individual.**
11. Indeks harga saham masing-masing perusahaan tercatat.

2.5. Nilai Tukar

Shapiro, (2005: 36) mendefenisikan “ *an exchange rate is simply, the price of one nation’s currency in terms of another currency*” atau nilai tukar adalah nilai suatu mata uang tertentu dinilai dengan mata uang negara lain misalkan Rupiah yang dinilai dari USD. Dimana nilai tukar ini dapat digolongkan menjadi *spot rate* dan *forward rate*. *Spot rate* adalah nilai tukar saat ini ketika sedang dilakukan transaksi sedangkan *forward rate* adalah nilai tukar mata uang dimasa yang akan datang yang telah ditentukan misalkan 2 bulan kedepan, yang dinilai saat ini. Dalam *forward rate*, dilakukan *hedging* terhadap nilai tukar dengan mempertimbangkan variabel fundamental ekonomi maupun

situasi politik dan keamanan yang berpotensi untuk memberikan tekanan atau guncangan terhadap keseimbangan nilai tukar. Nopirin (1996 : 163), Kurs adalah Pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut, sedangkan menurut Salvator (1997 : 10) Kurs atau nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Menurut Fabozzi dan Franco (1996:724) *an exchange rate is defined as the amount of one currency that can be exchange per unit of another currency, or the price of one currency in items of another currency*. Krugman dan Maurice (1994 : 73) adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Thei Fei Ming dalam Fahmi dan Hadi (2008:28) menjelaskan mengenai model-model penentuan nilai tukar yang dipakai yakni:

a. *Traditional Theories*

1. *Teori Purchasing Power Parity*. Teori ini berbunyi “ *a price of the good in one country should equal the price of the same good in another country, exchange at the current rayer*”. Teori ini menyatakan bahwa harga barang disuatu negara harus sama dengan harga barang serupa di negara lain sesuai dengan tingkat nilai tukar yang berlaku antar negara tersebut.

2. *Teori Elastis*

Teori ini berbunyi “ *Exchange rate is simply the price of foreign exchange wich maintains the balance payments ini equilibrium*”. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar adalah harga dari valuta asing untuk mempertahankan neraca pembayaran internasional suatu negara agar tetap berada pada tingkat *equilibrium*.

b. *Modern Monetary Theories on Short Term Exchange Rate Volatility*

c. *Synthesis of Traditional And Modern Monetary Views*

2.6. Globalisasi Ekonomi dan Indeks Harga Saham Regional

2.6.1. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi secara sederhana diartikan sebagai integrasi perekonomian suatu negara ke dalam perekonomian dunia (global). Proses integrasi perekonomian global itu sendiri, antara lain dicerminkan oleh adanya liberalisasi perdagangan dan investasi (ekonomi), (Darwin, 2005). Gejala globalisasi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang kemudian mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa.

Proses globalisasi itu telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batas-batas antar negara dalam berbagai praktik dunia usaha atau bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi (Halwani, 2005). Lebih lanjut Halwani (2005) menjelaskan bahwa globalisasi ekonomi ditandai dengan makin tipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional ataupun internasional. Hal itu disebabkan oleh adanya hal-hal berikut ini:

1. Komunikasi dan transportasi yang semakin canggih.
2. Lalu lintas devisa yang semakin bebas.
3. Ekonomi Negara yang makin terbuka.
4. Penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara.
5. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang makin efisien.
6. Semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seluruh dunia.

2.6.2. Indeks Harga Saham Regional

Globalisasi adalah salah satu penyebab terjadinya keterkaitan antara harga saham negara lain dengan dalam negeri. Pasar modal dengan indikatornya IHSG mempunyai korelasi dengan berbagai indeks yang ada di berbagai belahan dunia. Investor, baik perseorangan maupun yang tergabung dalam sebuah *fund* yang dikelola oleh seorang *fund manager*, bisa dengan bebas melakukan alokasi aset tanpa melihat batas-batas negara. Secara khusus, *fund manager* ini membuat IHSG berhubungan dengan bursa yang lain. Maraknya pembentukan *fund regional* yang menggunakan indeks yang terdiri dari saham-saham yang ada dalam satu regional sebagai *benchmark*, adalah penyebab dari semakin besarnya korelasi antara IHSG dengan berbagai indeks regional. Meskipun cukup banyak indeks harga saham gabungan baik global maupun regional, penelitian ini akan mengkaji beberapa kaitan indeks harga saham gabungan regional dengan IHSG. Diantaranya adalah STI, *Hang Seng*, dan Indeks *Nikkei 225 (N- 225)*. Hal ini didasarkan bahwa menurut banyak peneliti ketiga IHS tersebut merupakan pasar yang sudah maju di Asia, dimana selain merupakan pasar yang masih berkembang. Ketiga bursa tersebut dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Indeks *STI/ Straits Times Index*, merupakan indeks harga saham gabungan di bursa Singapura yang terdiri dari 30 perusahaan terbesar di Singapura yang didasarkan pada kapitalisasi pasar.
2. Indeks *Hang Seng (HSI)*, merupakan indeks harga saham gabungan dari 33 perusahaan yang mempunyai kategori Likuid di bursa *Hang Seng*.
3. Indeks *Nikkei 225 (N 225)*, menggunakan 225 likuid saham perusahaan Jepang yang tercatat di *Tokyo Stock Exchange*

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Hubungan Nilai Tukar Rupiah Terhadap IHSG

Modern monetary theories on short Term Exchange rate volatility menyatakan bahwa pasar modal dalam jangka pendek dan peran bursa komoditi dalam jangka panjang berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah (Fei Ming dalam Fahmi dan Hadi, 2008). Hal ini sesuai dengan teori *portofolio (approach theory)* yang menyatakan bahwa pasar modal dengan indikatornya indeks harga saham berpengaruh terhadap perubahan nilai tukar Rupiah. Hal ini dapat dijelaskan dengan meningkatnya indeks harga saham yang mengindikasikan semakin membaiknya kondisi pasar keuangan khususnya pasar modal. Kondisi ini akan menarik minat dari investor asing maupun domestik untuk meningkatkan ataupun menanamkan investasinya di Indonesia sehingga akan menambah jumlah valuta asing, yang akan mendorong terapresiasinya nilai tukar Rupiah. Dari sisi nilai tukar pengaruhnya terhadap indeks harga saham dijelaskan melalui *traditional approach theory*. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap indeks harga saham. Dimana ketika nilai tukar terapresiasi maka akan meningkatkan nilai riil dari investasi. Hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan dimata investor, dan meningkatkan minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk membeli saham perusahaan. Peningkatan jumlah pembeli saham perusahaan, *ceteris paribus* maka akan meningkatkan indeks harga saham perusahaan yang bersangkutan.

2.7.2. Hubungan Indeks Harga saham Regional Terhadap IHSG

Globalisasi saat ini memungkinkan adanya hubungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi diseluruh pasar modal di dunia. Hal ini dibuktikan dimana pasar modal di dunia telah tersambung dengan *online shares trading quotation* yang memberikan informasi bagi investor

diseluruh dunia yang mengakses pasar modal. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan suatu tatanan baru di dunia pasar modal. Cepatnya informasi dan memiliki progresivitas proses perdagangan globalisasi saham, sehingga penyebarluasan informasi pasar modal semakin canggih dan merata bagi setiap investor. Pasar modal Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bursa saham global. Globalisasi telah memungkinkan investor dari negara lain (asing) untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya bursa-bursa yang berdekatan lokasinya. Oleh karena itu, perubahan di satu bursa juga akan ditransmisikan ke bursa negara lain, dimana bursa yang lebih besar akan mempengaruhi bursa yang kecil. Achsani (2000) menyatakan bahwa *shock* yang terjadi di bursa Amerika Serikat tidak akan terlalu direspon oleh bursa regional Asia. Namun *shock* yang dialami oleh bursa Singapura, Australia, atau Hongkong akan segera ditransmisikan ke hampir semua bursa saham di Asia Pasifik termasuk Bursa Indonesia.

3. KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN HIPOTESA

3.1 Kerangka Pemikiran

Studi teoritik dan empirik memberikan dasar dari kerangka pemikiran pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Nilai Tukar Mata Uang Rupiah dan Indeks Harga Saham Regional Asia (*STI, Hang Seng, Nikkei*) Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa efek Indonesia”. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat kaitan antara teori dan empirik yang bertujuan untuk menjelaskan kaitan antara teori dengan kajian nyata di bursa saham.

Dasar penyusunan kerangka konseptual dalam penelitian ini diawali dari pemikiran bahwa perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal (Makroekonomi, situasi politik dan keamanan) dan Eksternal (negara lain). Dari sisi eksternal dapat dijelaskan bahwa saat ini negara-negara yang menerapkan sistem negara terbuka sedikit banyak akan saling mempengaruhi dalam perekonomian negara. Pasar saham yang semakin terintegrasi karena adanya globalisasi akan memberikan ruang bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menentukan negara dan pasar saham mana yang akan dijadikan pelabuhan investasinya. Hal ini sesuai dengan *Contagion Effect Theory* yang menyatakan bahwa perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap perekonomian negara lain, tentunya dengan proporsi yang berbeda dimana negara yang mempunyai perekonomian kuat akan lebih berpengaruh terhadap negara yang perekonomian lemah. Teori ini dikenal dengan teori pasar kuat dengan pasar lemah. Indonesia yang merupakan negara dengan perekonomian terbuka dalam hal ini tentunya akan menerima dampak dari adanya globalisasi. Perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi di negara lain akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kondisi bursa saham di regional Asia yang diwakili oleh bursa saham *STI* (Singapura), *Hang Seng* (Hongkong) dan *Nikkei* (Jepang).

Sesuai dengan *traditional approach theory* yang menyatakan bahwa indeks harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. Hal ini dapat dijelaskan dimana nilai tukar akan mempengaruhi nilai perusahaan dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga saham. Contohnya, jika nilai tukar terapresiasi maka nilai perusahaan akan meningkat dimana hal tersebut disebabkan oleh nilai yang bertambah dilihat dari sebelum terjadinya apresiasi. Dengan meningkatnya nilai perusahaan maka indeks harga saham perusahaan tersebut akan semakin meningkat.

Untuk melihat kesesuaian teori dengan empiris maka penelitian terdahulu melakukan penelitian yang berkaitan dengan teori. Penelitian yang dilakukan oleh Harjito, D.A at all (2010) dengan judul penelitian : Perubahan Musiman (*Seasonality*) Pasar Modal dan Kontaigon Efek di Negara-negara ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan adanya respons yang berbeda dari satu negara dalam menyikapi *shock* pada bursa saham negara lain. Dari sudut pandang investasi, efek penularan menyebutkan bahwa keputusan tidak boleh semata-mata berdasarkan pada kondisi yang ditegaskan dari satu pasar saja, tetapi pasar-pasar lain dalam kawasan sebagai satu kesatuan. Chief Ming at all (2010) dengan judul penelitian *Volatility Spillovers: Dynamic Regional And World Effects*. Menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan atau pengaruh regional dan global terhadap 5 pasar saham di eropa yang berstatus *emerging market*. Dan Penelitian yang dilakukan oleh Azman Saini at.all (2009) dengan judul penelitian *Stock Price Index Rate Interactions In Emerging Market*. Menyimpulkan bahwa adanya pengaruh *main stock index* terhadap nilai tukar mata uang selama periode krisis dan sebaliknya adanya pengaruh nilai tukar mata uang terhadap *second board index* selama periode sebelum krisis.

Dengan konsep antara teori dan hasil empiris (dari berbagai penelitian) maka penelitian ini akan mengamati nilai tukar mata uang dan indeks harga saham regional Asia (*STI, Hang Seng, Nikkei*) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Menguji Hipotesa dengan uji statistik (*Ordinary Least Square/OLS* dengan Eviews 5.1) akan didapatkan pengaruh variabel independen terhadap dependennya.

3.2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu :

1. Nilai tukar (Rp terhadap Dollar) secara parsial berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia.
2. Indeks *STI* secara parsial berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia.
3. Indeks *Hang Seng* dan Indeks *STI* secara parsial berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia.
4. Indeks *Nikkei* secara parsial berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia.
5. Nilai tukar (Rp terhadap Dollar), Indeks *STI*, Indeks *Hang Seng* dan Indeks *Nikkei* secara simultan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis eksplanatif asosiatif (konfirmatif) yang artinya bahwa penelitian dirancang dengan pengujian dan konfirmatif terhadap variabel-variabel yang dibangun menjadi suatu model untuk mengetahui hubungan ataupun pengaruhnya dimana dengan penelitian ini maka akan dapat dilihat kesesuaian suatu teori dengan fakta yang ada.

4.2 Populasi dan Sampel

4.2.1 Populasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG dari sisi Domestik (Makroekonomi dalam hal ini nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD) dan

indeks harga saham regional yang direpresentasikan oleh *STI* (Singapura), *Hang Seng* (Hongkong) dan *Nikkei* (Jepang). Sehingga dalam hal ini populasi adalah data statistik nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Regional Asia (*STI*, *Hang Seng*, *Nikkei*) sebelum dan sesudah krisis global.

4.2.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah data statistik nilai tukar Rupiah terhadap USD, Indeks Harga Saham Regional Asia (*STI*, *Hang Seng*, *Nikkei*) dari tahun 2007 bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2011 (54 bulan). Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan tiga kondisi yakni sebelum krisis global pada tahun 2007 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2008 pada masa krisis global pada kuartal IV tahun 2008 sampai dengan kuartal III tahun 2009, dan masa pemulihan pada kuartal IV tahun 2009 hingga kini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik/metode pengambilan data adalah *purposive sampling* yang artinya sampel yang dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan peneliti.

4.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia (www.bi.go.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), *Bloomberg* (www.bloomberg.org), *yahoo finance* (www.yahoofinance.com) dan *International Monetary Fund* (IMF). Data-data yang dipergunakan antara lain Indeks Harga Saham Gabungan (Y) yang dipublikasikan oleh *Bursa Efek Indonesia*, kurs tengah mata uang Rupiah terhadap USD (\$/Rp) (X_1) yang dipublikasikan oleh *Bank Indonesia*, Indeks Harga Saham *STI* (X_2) yang diterbitkan oleh *Stock exchange of Singapore (SES)*, Indeks Harga Saham *Hang Seng* yang dipublikasikan oleh *Stock Exchange of Hongkong (SEHK)* (X_3), Indeks Harga Saham *Nikkei* yang dipublikasikan oleh *Tokyo Stock Exchange (TSE)* (X_4). Semua data yang digunakan merupakan data *time series* bulanan dengan sampel waktu dari tahun 2007 : 1 sampai 2011 : 6. dengan demikian jumlah data yang menjadi objek penelitian sebanyak 54 bulan ($n > 30$).

4.4. Identifikasi dan Defenisi Operasional Variabel

4.4.1 Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian dibedakan menjadi:

1. Variabel bebas/independent/input/stimulus/*predictor/antecedent* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent dalam penelitian ini yakni variabel yang terdiri dari kurs tengah mata uang Rupiah terhadap USD (\$/Rp) (X_1), Indeks Harga Saham *STI* (X_2), Indeks Harga Saham *Hang Seng* (X_3), Indeks Harga Saham *Nikkei* (X_4).
2. Variabel terikat/dependent/output/konsekuensi adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas atau variabel independent, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (Y).

4.4.2 Defenisi Operasional Variabel

Masing-masing variabel dalam penelitian ini secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Variabel nilai tukar (X_1) adalah rasio perbandingan antara nilai tukar Rupiah terhadap *Dollar* Amerika dengan satuan Rp/\$ setiap akhir bulannya (*monthly closing*).
2. Indeks Harga Saham *STI* (X_2) adalah rata-rata indeks saham yang berada di Singapura yang tercatat dalam bursa saham, satuannya adalah *basis point* (*basis point* menurut dalam wikipedia 2011 “ *is a unit that is equal to 1/100th of 1 percent*” /seperseratus dari 1 persen yang sering digunakan dalam menunjukkan perubahan dalam instrumen keuangan seperti suku bunga, Indeks Harga Saham).
3. Indeks Harga Saham *Hang Seng* (X_3) adalah rata-rata indeks saham yang berada di Hongkong yang tercatat dalam bursa saham, satuannya adalah *basis point*.
4. Indeks Harga Saham *Nikkei* (X_4) adalah rata-rata indeks saham yang berada di Jepang yang tercatat dalam bursa saham, satuannya adalah *basis point*.
5. Indeks Harga Saham Gabungan (Y) adalah nilai indeks gabungan seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan satuan *basis point* (nilai indeks saham penutupan saham bulanan (*monthly closing index*)).

4.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis, yaitu regresi linear berganda (*multiple regression analysis model*) dengan persamaan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*) dan sebagai alat analisis untuk mengolah data adalah dengan menggunakan program *Eviews 5.1 edition*. Dimana dengan formulasi/model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia

a = *intercept*/konstanta

$b_1b_2b_3b_4$ = koefisien regresi, $i = 1,2$

X_1 = Nilai tukar Rupiah terhadap USD (Rp/\$)

X_2 = Indeks *STI*

X_3 = Indeks *Hang Seng*

X_4 = Indeks *Nikkei*

e = *Disturbance error* (faktor pengganggu/residual)

4.5.1. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menentukan ketepatan model regresi perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi sebagai berikut :

1. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear di antara variabel-variabel dalam model regresi. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan besaran-besaran regresi yang didapat yakni :

- a. Variasi besar (dari taksiran *OLS*)
- b. Interval kepercayaan (karena varian besar, maka standar *error* besar sehingga interval kepercayaan lebar).
- c. Uji-t tidak signifikan.
- d. R^2 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari t-test.
- e. Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

Uji Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor (VIF)/Pearson Correlation*. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai *VIF/Pearson Correlation* lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada data yang akan diolah (Gujarati, 2006).

2. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar variabel dependent pada setiap variabel independent. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga uji signifikansi statistik tidak valid lagi. Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residua dan satu pengamatan yang lain. Jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji autokorelasi

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan statistik d dari Durbin-Watson (*DW test*) dimana angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah dL (angka yang diperoleh dari table DW batas bawah), dU (angka yang diperoleh dari tabel DW batas atas), $4-dL$ dan $4-dU$. Jika nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 terjadi autokorelasi (+/-). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi (Gujarati, 2006).

4.5.2. Uji Kesesuaian (*Test Godness Of Fit*)

Estimasi terhadap model yang digunakan dengan metode yang tersedia pada program *evIEWS 5.1 edition*. Koefisien yang dihasilkan dapat dilihat pada output regresi berdasarkan data yang dianalisis yang kemudian diinterpretasikan serta dilihat signifikansi variabel-variabel dalam penelitian terhadap variabel terikatnya.

1. Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikatnya (*dependent Variable*) dan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel X terhadap variasi (naik turunnya) variabel Y.

2. Uji Regresi Serempak (Uji F)

Dimaksudkan untuk melihat signifikansi statistik koefisien regresi secara serempak. kriteria pengujian hipotesis untuk uji secara serempak adalah :

- a. $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$; secara bersama-sama nilai tukar Rupiah terhadap USD, indeks *STI*, *Hang Seng*, dan *Nikkei* tidak berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa efek Indonesia.
- b. $H_a : \text{Minimal satu } b \neq 0$; secara bersama-sama nilai tukar Rupiah terhadap USD, indeks *STI*, *Hang Seng*, dan *Nikkei* berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa efek Indonesia.

Alat uji yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah dengan uji statistik F, dengan ketentuan jika $F_{\text{hitung}} \geq F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. untuk memperoleh F_{hitung} digunakan rumus sebagai berikut:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{MS_R}{MS_E}$$

Dimana :

MS_R = kuadrat rata-rata baris

MS_E =kuadrat rata-rata sisa

3. Uji regresi parsial (Uji t)

Dimaksudkan untuk melihat signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial. Kriteria pengujian hipotesis untuk uji secara parsial adalah:

- a. $H_0 : b_i = 0$; secara parsial nilai tukar Rupiah terhadap USD, indeks *STI*, *Hang Seng*, dan *Nikkei* tidak berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa efek Indonesia.
- b. $H_a : b \neq 0$; secara parsial nilai tukar Rupiah terhadap USD, indeks *STI*, *Hang Seng*, dan *Nikkei* berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa efek Indonesia.

Alat uji yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah uji statistik t dua arah, dengan ketentuan apabila hasil $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} \leq -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Untuk memperoleh t_{hitung} digunakan rumus sebagai berikut :

:

b_i = koefisien regresi variabel X_i ,

S_{b_i} = standard deviasi

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Model statistik dengan model yang telah di bentuk melalui persamaan linear berganda dimana variabel prediktor adalah nilai tukar Rupiah terhadap USD, indeks harga saham STI, indeks harga saham HIS dan Indeks harga saham Nikkei sedangkan variabel dependent adalah pergerakan IHSG yang dapat di simbolkan dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia

a = *intercept*/konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi, $i = 1, 2$

X_1 = Nilai tukar Rupiah terhadap USD (Rp/\$)

X_2 = Indeks *STI*

X_3 = Indeks *Hang Seng*

X_4 = Indeks *Nikkei*

e = *Disturbance error* (faktor pengganggu/residual)

Dari hasil pengolahan menggunakan program *evIEWS 5.1*, maka di dapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel 5.1

Summary Olahan dengan *EvIEWS 5.1*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	453.8976	736.3903	4.009324	0.0007
X1	-1.769870	8.724339	-2.639148	0.0217
X2	-0.353185	0.554090	-1.867893	0.0153
X3	-0.233472	0.196827	-1.994598	0.0072
X4	0.623422	38.90086	1.265546	0.5622

Sumber: Lampiran, hasil olahan *evIEWS 5.1*

dari hasil ouput *EvIEWS 5.1* diatas maka model menghasilkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 453.90 - 1.77 X_1 - 0.35 X_2 - 0.23 X_3 + 0.62 X_4 + e$$

Dari model diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. *Constanta* dengan nilai 453.90 merupakan intersep atau autonomous dari model yang merupakan perpotongan antara kurva x dan y yang artinya bahwa jika independent dianggap 0 maka pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan adalah 453.90.
2. Koefisien variabel nilai tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD) yakni sebesar 1.77, yang artinya adalah jika nilai tukar Rupiah terapresiasi sebesar Rp 1, maka Indeks Harga Saham Gabungan akan meningkat sebesar -1.77 *basis point*, demikian juga jika Rupiah terdepresiasi sebesar Rp 1 terhadap USD 1 maka Indeks Harga Saham Gabungan akan menurun sebesar 1.77 *basis point*, *asumsi ceteris paribus*. Dari hasil t-statistik bahwa variabel ini signifikan pada taraf nyata (α) = 5 %.
3. Koefisien Indeks Harga Saham STI adalah -0.35, yang artinya adalah jika Indeks Harga Saham STI turun sebesar 1 *basis point* maka Indeks Harga Saham Gabungan akan meningkat sebesar 0.35 *basis point*, demikian juga jika Indeks Harga Saham STI naik sebesar 1 *basis point* maka Indeks Harga Saham Gabungan akan menurun sebesar 0.35 *basis point*, *asumsi ceteris paribus*. Dari hasil t-statistik bahwa variabel ini signifikan pada taraf nyata (α) = 5 %.
4. Koefisien Indeks Harga Saham HSI adalah -0.23, yang artinya adalah jika Indeks Harga Saham HSI naik sebesar 1 *basis point* maka Indeks Harga Saham Gabungan akan turun sebesar 0.23 *basis point*, demikian juga jika Indeks Harga Saham HSI menurun sebesar 1 *basis point* maka Indeks Harga Saham Gabungan akan meningkat sebesar 0.23 *basis point*, *asumsi ceteris paribus*. Dari hasil t-statistik bahwa variabel ini signifikan pada taraf nyata (α) = 5 %.
5. Koefisien Indeks Harga Saham Nikkei-225 adalah 0.62, yang artinya adalah jika Indeks Harga Saham Nikkei-225 naik sebesar 1 *basis point* maka Indeks Harga Saham Gabungan akan meningkat sebesar 0.62 *basis point*, demikian juga jika Indeks Harga Saham Nikkei-225 menurun sebesar 1 *basis point* maka Indeks Harga Saham Gabungan akan menurun sebesar 0.62 *basis point*, *asumsi ceteris paribus*. Dari hasil t-statistik bahwa variabel ini tidak signifikan pada taraf nyata (α) = 5 %.

5.2. Pembahasan

5.2.1 Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD Berpengaruh Terhadap IHSG

Variabel nilai tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD) yang signifikan mempengaruhi IHSG dapat dijelaskan dengan pendekatan *traditional approach*. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham. Fluktuasi nilai tukar rupiah secara substansial akan mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan, dan pada akhirnya akan berpengaruh kuat pada harga saham. Adanya perubahan pada nilai tukar akan mengakibatkan perubahan pada indeks harga saham dengan asumsi *ceteris paribus*. Hubungan negatif pada koefisien artinya terjadinya pelemahan Rupiah (terdepresiasi dalam hal ini Rp/USD) maka akan memberikan efek negatif pada IHSG, dimana hubungan negatif terjadi karena jika terjadinya pelemahan Rupiah akan mempengaruhi naiknya harga-harga komoditi dan bahan baku yang akan memacu naiknya inflasi dan *cost* dari perusahaan akan meningkat dan menurunkan laba perusahaan yang akibatnya tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan akan semakin berkurang dan nilai suatu perusahaan akan semakin rendah. Penurunan profit akan direspons oleh investor dengan menarik saham bahkan menjual saham namun gairah untuk aksi beli berkurang yang menurunkan nilai dari perusahaan yang dicerminkan oleh menurunnya indeks harga saham. Demikian juga dengan sebaliknya dimana terapresiasinya nilai tukar Rupiah akan

meningkatkan nilai perusahaan yang akan meningkatkan niat investor untuk melakukan pembelian saham dan akan meningkatkan indeks harga saham suatu perusahaan.

5.2.2. Indeks STI Berpengaruh Terhadap IHSG

Dari ketiga indeks regional yang signifikan berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan adalah Indeks Harga Saham STI dan Indeks Harga Saham Hang Seng, dimana STI lebih besar pengaruhnya yakni -0.35 . Hal ini menunjukkan bahwa semakin terintegrasinya pasar saham yang satu dengan yang lainnya.

Indeks Harga Saham STI berpengaruh negatif terhadap pergerakan IHSG diartikan peningkatan pada Indeks STI akan menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan. Dimana Singapura merupakan negara terbesar yang berinvestasi di Indonesia. Dilihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia bahwa nilai realisasi investasi Singapura di Indonesia mencapai USD 1.9 Millyar, jauh mengalahkan Amerika Serikat, Jepang, Belanda dan Korea yang nilainya sebesar 0.9 M, 0.7 M, 0.7 M, dan 0.3 M. dengan tingginya nilai investasi Singapura tersebut di Indonesia, dengan adanya peningkatan Indeks Harga STI maka investor Singapura dan lainnya akan beralih/menarik dananya ke Singapura yang akan mengakibatkan *capital outflow* dan turunnya nilai IHSG. Koefisien Indeks Harga Saham STI merupakan yang terbesar dari nilai indeks ketiga saham regional yang diteliti. Hal ini dapat dijelaskan selain nilai investasi yang terbesar hal ini juga dapat dilihat dari letak geografis yang saling berdekatan (paling dekat dengan negara lainnya) sehingga memungkinkan hubungan perekonomian, budaya politik, sosial dan keamanan.

5.2.3. Indeks Hang Seng Berpengaruh Terhadap IHSG

Dari ketiga indeks regional yang signifikan berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan juga adalah Indeks Harga Saham Hang Seng, dimana Indeks Hang Seng berpengaruh sebesar -0.23 .

Peningkatan Indeks Saham di Hongkong mengakibatkan melemahnya/ menurunnya IHSG di Indonesia. Pasar saham yang berstatus *emerging market* di Indonesia akan menjadi pilihan ke berapa oleh investor dalam menanamkan modalnya. Investor akan memilih pasar yang mempunyai kepastian yang lebih besar dan resiko yang rendah sebagai tujuan dana yang akan di investasikan dalam hal ini Hongkong. Selain itu juga bahwa HSI lebih fleksibel dalam merespons perubahan yang terjadi pada saham Global dibandingkan dengan IHSG.

5.2.4. Indeks Nikkei Tidak Berpengaruh Terhadap IHSG

Dari keempat variabel independent yang diteliti Indeks Nikkei merupakan variabel yang berpengaruh tidak signifikan terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yaitu sebesar $0,68$. Hasil ini menunjukkan kalau Indeks Harga Saham Nikkei (X_4) sig adalah $0,068 > \alpha (5\%)$.

Dilihat dari teori-teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal dengan variabel nilai tukar dapat terjadi hubungan kausalitas. Dimana nilai tukar dapat mempengaruhi pasar modal dengan indikator indeks harga saham gabungan, sedangkan pasar modal dapat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah hubungan satu arah nilai tukar berpengaruh terhadap pasar modal, sesuai dengan *traditional approach theory*.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dari bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu berdasarkan analisis statistik menggunakan metode analisis *Ordinary Least Square (OLS)* serta mengkonfrontir dengan deskriptif/teori yakni :

1. Model yang dibangun untuk mengestimasi faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG sudah baik dimana terbebas dari asumsi-asumsi klasik pada syarat perlu dan cukup menggunakan metode regresi linear berganda. Dilihat dari koefisien determinasi (*Test Of Good Fit*) bahwa variabel independennya mampu menjelaskan variabel dependennya 78.6 persen , selebihnya yakni sebesar 21.4 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model/penelitian ini . Melalui uji-F (Uji serempak/simultan), bahwa secara bersama-sama variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependennya (Pergerakan IHSG).
2. Dari Uji -t (uji parsial) diketahui bahwa variabel independent nilai tukar Rupiah terhadap USD, STI, dan Hang Seng signifikan mempengaruhi pergerakan IHSG sedangkan Indeks Nikkei tidak signifikan pada $\alpha = 5 \%$. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG adalah kompleks, dimana dari faktor Indeks Harga Saham regional yang signifikan menunjukkan relatif terintegrasinya IHSG dengan Indeks Bursa Saham dan perekonomian regional.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diberikan maka saran yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa fluktuasi IHSG sangat dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah terhadap USD, Indeks Harga Saham STI, dan Indeks Harga Saham Hang Seng. Oleh karena itu faktor yang langsung dapat dikendalikan oleh Indonesia melalui otoritas moneternya adalah nilai Tukar Rupiah. Dan nilai koefisien dari variabel ini merupakan terbesar dari variabel lainnya sehingga diharapkan stabilisasi nilai tukar merupakan salah satu kebijakan yang baik dalam menjaga pasar modal yang kondusif dan menarik bagi investor sebagai salah satu fundasi pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah sebagai regulator ekonomi dalam mengendalikan stabilitas dan meningkatkan IHSG harus memprioritaskan kebijakan internal pada variabel makroekonomi dalam hal ini nilai tukar Rupiah dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya. Kebijakan pengendalian stabilitas IHSG dilakukan dengan memprioritaskan aspek domestik namun tanggap akan aspek ekonomi asing (Indeks Harga Saham Regional), sehingga pengendalian dapat berjalan optimal dan tidak mengakibatkan kelesuan pada bursa saham Indonesia sebagai representasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, Nurdjaman. 1998. *Memilih Sistem Kurs Mata Uang Yang Tepat: Apa Masalahnya ?*. Panutan Bisnis. Vol 2 No. 4, pp: 7-22.
- Azhar, D. Mauliano. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal ekonomi. Universitas Gunadarma.
- Azman, S. W.N.W at al. 2008. *Stock Price Index and Exchange rate Interactions In An Emerging Market. International Review of Economics and Business*. International Journal of Economics. Vol.1, No 1.
- Bank Indonesia. 1997-2010. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Bapepam. 2008. *Analisis Kointegrasi dan Kausalitas serta Hubungan Dinamis Antara Aliran Modal Asing, Perubahan Nilai Tukar Dan Pergerakan IHSG Di Pasar Modal Indonesia*. Bapepam Dan Departemen Keuangan.
- Choudhry Moorad, Joannas Didier, Pereira Richard, and Pienaar Rod. 2002. *Capital Market Instrument: Analysis and Valuation*. Great Britain, Financial Series, Prentice Hall.
- Chieh, Ming. W dan Ming, F. S. 2010. *Volatility Spillover Dynamic Regional And World Effect*. European Journal of Finance and Banking Research Vol. 3. No. 3.
- Dwipraptono Agus Harjito. 2010 *Perubahan Musiman (Seasonality) Pasar Modal Dan Efek Kontagion Di Negara-Negara Asean*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Fabiola Ravazzolo 2000, *Stock Price and Exchange Rate Dynamics*. www.google.com.
- Fahmi, Irham dan Hadi, Y. Lavianti. 2008. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Alfabeta. Bandung.
- Gan, C at al .2006. *Macroeconomic Variables And Stock Market Interactions: Newzealand Evidence*. Investment Management and Financial Innovations, Volume 3, Issue 4
- Gujarati Damodar. 1995. *Econometrics*, 2nd. USA. McGraw Hill International, Inc.
- Husnan, Suad, 1998. Pengujian CAPM di BEJ Periode 1994-1997 : Standard CAPM atukah Zero Beta ?. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 13, No. 4, hal: 89-97.
- Insukindro, 1991. Regresi Linear Lancung Dalam Analisis Ekonomi : Suatu Tinjauan Dengan Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 1, hal: 75-87.
- International Monetary Fund (IMF). International Financial Statistics (IFS)*. www.imf.org (20 Februari 2011)
- Keon, A.J, at al. 2008. *Menejemen Keuangan: Prinsip Dan Penerapan*. PT Indeks. Jakarta
- Madura, Jeff. 1993. *“Financial Management”*, Florida University Press
- Mankiw, Gregory N. 2006. *Principles of Economics. Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Alih Bahasa Chriswan Sungkono. Salemba Empat. Jakarta.
- Manurung, H. Adler dan Wilson Ruben Lumban Tobing. 2010. *Pengaruh Kepemilikan Asing atas Obligasi dan SBI terhadap Volatilitas Kurs Dollar*. Jakarta. ABFI Institute Perbanas.
- Maskie, Ghozalli dan Dias Satria. 2004. *Analisis Asosiasi Kurs dan Harga Saham : Pendekatan Error Correction Model (Periode 2000 - 2003)*. www.google.com.

Mishkin, F.S. 2001. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 6th Edition. Columbia University : USA.

Nopirin. 1997. *Ekonomi Moneter*. Buku I. Yogyakarta: BPFE UGM

Nachrowi,D. Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Ekonometrika*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Opoku-Afari,Maxwell, Oliver Morrissey and Tim Lloyd. 2004. *Real Exchange Rate Response To Capital Inflows: A Dynamic Analysis For Ghana*. Centre for Research in Economic Development and International Trade, CREDIT Research Paper, no 04/12. University of NottinghamAthukorala.

Prema-chandra and Sarath Rajapatirana. 2003. *Capital Inflows and the Real Exchange Rates: A Comparative Study of Asia and Latin America*. Research School of Pacific and Asian Studies Australian National University.

Salvatore, D. 1997. *Ekonomi Internasional*. Haris Munandar [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.

Shapiro, A. C. 2005. *Foundation Of Multinational Financial Management: Fith Edition*. University of Southern California. Wiley. United States.

Sharpe, W. F, at al. 2005. *Investasi*. Jilid Pertama Edisi Bahasa Indonesia. PT Intermasa, Jakarta.

Sugiono, 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke Empat. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Bandung. Alfabeta.

Tandelilin, Eduardus. 1991. *Investasi, Manajemen dan Analisis*. Yogyakarta. PAU – Studi Ekonomi UGM.

Tulandau, G. 2010. *Analisis Causal Effects Net Foreign Purchases, Exchange Rate, dan Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia Dengan Vector Error Correction Model: Pendekatan Jangka Panjang dan Jangka Pendek*. Thesis. Program Magister Manajemen. Universitas Sam ratulangi.

Yamit, Zulian. 2010. *Manajemen Keuangan: Ringkasan Teori dan Penyelesaian Soal*. Ekonesia. Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.

-----www.bi.go.id

.....www.idx.com

-----www.bapepam.go.id.

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PIMPINAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA MANADO

**Nur Fitry Latief
Ventje Ilat
Harijanto Sabijono**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kepuasan kerja terhadap kinerja pimpinan perguruan tinggi swasta yang berada di kota Manado.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada 102 pimpinan yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran yakni para pembantu pimpinan atau dalam istilah perguruan tinggi adalah para pejabat struktural pada 17 Sekolah Tinggi Swasta dalam Koordinasi KOPERTIS Wilayah IX Sulawesi, di kota Manado. Sebanyak 75 kuesioner dikembalikan dan yang layak digunakan sebanyak 60 kuesioner, kemudian diproses menggunakan software SPSS versi 19.00 seterusnya diolah dan dianalisis dengan tehnik regresi linier berganda setelah melalui uji reliabilitas, uji validitas dan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Jadi partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi dapat meningkatkan kinerja pimpinan. Kepuasan kerja secara umum tidak berpengaruh secara permanen melainkan hanya sementara, dan yang lebih mendominasi kepuasan kerja adalah faktor lainnya (pekerjaan itu sendiri, ketidak hadiran dan keluarnya pegawai). Secara simultan, interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan kepuasan kerja ternyata mempunyai pengaruh yang kuat pada kinerja pimpinan perguruan tinggi swasta di Kota Manado.

Kata kunci : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kepuasan Kerja, dan Kinerja Pimpinan.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam era global sekarang ini, dunia pendidikan tinggi di Indonesia baik pendidikan tinggi negeri ataupun pendidikan tinggi swasta sangat berperan dalam menghasilkan lulusan yang mampu bersaing guna memenuhi kebutuhan akan pekerjaan yang dirasakan semakin sulit diperoleh. Pada kenyataan yang dilihat oleh peneliti, keadaan perguruan tinggi swasta di kota Manado belum mencerminkan harapan yang diinginkan oleh masyarakat dalam hal ketersediaan output berupa sarjana yang siap bersaing dalam dunia kerja. Seharusnya, Lembaga Pendidikan Tinggi berlomba-lomba berbenah diri dalam hal pengelolaan manajemen organisasinya agar bisa menjawab tantangan akan kebutuhan publik ini. Setiap organisasi dituntut suatu sistem pengendalian manajemen yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Agar tujuan tersebut dapat dicapai tentunya perlu memperhatikan *Budgetary Partisipation* (Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran). Penganggaran partisipatif (*participative budgeting*) merupakan pendekatan penganggaran yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep penganggaran ini

sudah berkembang pesat dalam sektor swasta (bisnis), namun tidak demikian halnya pada sektor publik. Dalam sektor publik, penganggaran partisipatif belum mempunyai sistem yang mapan sehingga penerapannya pun belum optimal. Partisipasi yang baik memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, adanya penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan akan meningkatkan kinerja para pimpinan yang berada di perguruan tinggi swasta. Anggaran digunakan sebagai pedoman kerja sehingga proses penyusunannya memerlukan organisasi anggaran yang baik, pendekatan yang tepat, serta model-model perhitungan besaran (simulasi) anggaran yang mampu meningkatkan kinerja pada seluruh jajaran manajemen dalam organisasi. Anggaran merupakan rencana tindakan-tindakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan organisasi. Pada organisasi sektor swasta (bisnis), tujuan dimaksud adalah mencari laba (profit oriented), sementara pada organisasi sektor publik/non-bisnis tidak (nonprofit oriented). Oleh karena tujuannya berbeda, maka rencana kerja yang disusun juga berbeda. Dengan demikian, pendekatan dalam penyusunan anggaran di kedua jenis organisasi juga berbeda.

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting sebuah organisasi karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional organisasi. Agar organisasi tetap eksis maka harus berani menghadapi tantangan dan implikasinya yaitu menghadapi perubahan dan memenangkan persaingan. Sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi seperti anggaran modal, metode dan mesin saja tidak bisa memberikan hasil yang optimum apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimum. Di dalam penyusunan anggaran lembaga perguruan tinggi swasta, keterlibatan berbagai komponen unit kerja di dalamnya sangat diperlukan.

(M. Nafarin, 2000:45) menerangkan bahwa penyusunan anggaran merupakan proses penentuan peran setiap manajer dalam melaksanakan program, dalam proses penyusunan anggaran memerlukan kerjasama yang baik antara atasan dengan bawahannya. Partisipasi anggaran dalam perguruan tinggi dapat menggambarkan keterlibatan pimpinan pusat pertanggungjawaban mulai dari tingkat bawah, menengah dan tingkat atas dalam proses penyusunan anggaran. Keterlibatan para pimpinan ini sangat penting dalam upaya memotivasi mereka guna mencapai tujuan perusahaan. Partisipasi para pimpinan dalam proses penyusunan anggaran menciptakan terjadinya komunikasi yang baik, interaksi satu sama lain serta bekerja sama dalam *team* guna mencapai tujuan perusahaan. Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para pimpinan akan meningkat. Hal ini didasari pemikiran bahwa jika suatu tujuan atau standar dirancang secara partisipatif disetujui, maka pimpinan akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan dan pimpinan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunan anggaran.

“Semakin tinggi tingkat keterlibatan manajer dalam proses penyusunan anggaran maka semakin meningkat pula kinerjanya” (Indriantoro dalam Ritonga, 2008:24). Untuk meningkatkan efektifitas anggaran, suatu anggaran haruslah memperhatikan aspek perilaku manusia agar anggaran tersebut mampu memotivasi pimpinan perguruan tinggi swasta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Oleh karena itu anggaran partisipatif diperlukan untuk melibatkan bawahan dalam proses penyusunan anggaran. Proses partisipasi memberikan kesempatan bagi bawahan untuk mengajukan pertanyaan kepada atasan. Dengan mengajukan pertanyaan maupun minta penjelasan, bawahan dapat memperoleh informasi yang lebih baik tentang tugas dan strategi penyelesaiannya. Penerimaan pengetahuan yang berhubungan dengan tugas dapat meningkatkan kinerja.

Howel dan Depboye (Munandar, 2001) : “kepuasan kerja merupakan hasil keseluruhan dari derajat suka dan tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek pekerjaannya, dengan kata lain kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap berbagai aspek dalam pekerjaannya”. Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Kepuasan Kerja merupakan sikap (positif) tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya, penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Pegawai yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak menyukainya.

Kepuasan kerja di lembaga pendidikan tinggi swasta pada dasarnya adalah tentang apa yang membuat seseorang bahagia dalam pekerjaannya atau keluar dari pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai PTS secara signifikan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri (sebagai pimpinan atau sebagai pelaksana), dengan kondisi kerja, dengan pimpinan atau atasan langsung, dengan rekan kerja, dengan pengawasan, dengan promosi jabatan dan dengan gaji yang diterima. Kondisi seperti ini sebagian besar tidak terlihat pada pimpinan perguruan tinggi swasta di kota Manado. Kepuasan kerja yang dirasakan oleh para pimpinan merupakan kunci suksesnya pengelolaan sebuah perguruan tinggi. Jika para pimpinan merasa puas dalam bidang pekerjaan atau tanggungjawab yang diembannya tentu akan menularkan keadaan yang sama bagi mitra kerjanya yakni para staf yang ada di PTS sehingga pelayanan prima yang diharapkan oleh mahasiswa dapat berjalan dengan baik.

Manajemen kinerja menurut Payaman Simanjuntak (2005:17) adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Manajemen kinerja merupakan proses berkelanjutan berbentuk siklus, terdiri dari perencanaan, pembinaan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menghindari peningkatan atau keterlambatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi dan dijadikan sebagai masukan dalam rangka perencanaan kinerja lebih lanjut. Evaluasi kinerja merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses dimana kinerja perseorangan baik pimpinan ataupun staf dinilai dan dievaluasi, sehingga bisa menjawab pertanyaan, “Seberapa baikkah kinerja seorang pegawai (termasuk pimpinan) pada suatu periode tertentu?” Secara substansial penilaian prestasi kerja merupakan momentum bagi seluruh pegawai untuk mempertanggungjawabkan prestasi kerja yang dicapai.

Payaman Simanjuntak (2005:103), kinerja individu adalah tingkat pencapaian seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Tjutju Yuniarsih dan Suwatno (2008:161), kinerja merupakan “prestasi nyata yang ditampilkan seseorang setelah yang bersangkutan menjalankan tugas dan perannya dalam organisasi. Kinerja produktif merupakan tingkatan prestasi yang menunjukkan hasil guna yang tinggi”. Kinerja merupakan hasil dari prestasi kerja individu yang dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Selain kepuasan kerja, kinerja juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Untuk mengukur kinerja, dapat digunakan standar kinerja. Tentunya standar kinerja menyesuaikan keadaan yang terjadi dilingkungan

institusinya, seperti melakukan penyesuaian dalam pelayanan dibidang pendidikan kepada mahasiswanya yang terkait dengan dosen sebagai pengajar dan pegawai untuk mengurus administrasi. Standar kinerja dalam pendidikan tinggi biasanya dibuat oleh Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) atau bagian lain sejenisnya. Pada prinsipnya melakukan analisis kinerja adalah mengukur output dibandingkan dengan ukuran atau standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja pimpinan yang baik tentunya akan menghasilkan pengelolaan manajemen yang baik juga, guna menghasilkan output yang mampu bersaing dan diterima oleh dunia pekerjaan yang diharapkan oleh masyarakat terutama mahasiswa yang menempuh pendidikan pada PTS di kota Manado.

METODE

Jenis penelitian ini adalah survey sedangkan metodenya yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. Metode survey deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini data dan informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner kemudian dikembangkan melalui instrumen dan diproses dengan menggunakan *software* SPSS versi 19.00 yang hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif melalui analisis regresi linier berganda dan korelasi untuk menguji dan membuktikan hipotesis.

Dalam penelitian ini, digunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas 1 yang diberi simbol X_1 adalah variabel partisipasi penyusunan anggaran. Variabel bebas 2 yang diberi simbol X_2 adalah variabel kepuasan kerja. Sedangkan variabel terikat yang diberi simbol Y adalah kinerja pimpinan pada perguruan tinggi swasta di Kota Manado. Sehingga model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan SPSS 19 yang dilakukan dengan menu *regression*. Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel bebas apabila nilai variabel terikat mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas apakah masing-masing variabel terikat berhubungan positif atau negatif, melalui persamaan regresi linier berganda : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$ dimana Y (variabel dependen atau nilai yang diprediksikan), $X_1 + X_2 \dots X_n$ (variabel independen), a (konstanta atau nilai Y bila $X_1 + X_2 \dots X_n = 0$ dan $b_1 + b_2 + \dots + b_n$ (koefisien regresi atau peningkatan/penurunan).

Untuk membuktikan hipotesis penelitian maka dilakukan analisis secara keseluruhan dari persamaan yang ada. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

$H_{a1} : 1 \neq 0$, variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan PTS di Kota Manado.

$H_{01} : 1 = 0$, variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan PTS di Kota Manado.

$H_{a2} : 2 \neq 0$, variabel Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan PTS di Kota Manado.

$H_{02} : 2 = 0$, variabel Kepuasan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan PTS di Kota Manado.

$H_{a3} : 3 \neq 0$, variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan PTS di Kota Manado.

$H_{03} : 3 = 0$, variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kepuasan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan PTS di Kota Manado.

HASIL

1. Uji Validitas

Setelah melakukan uji *validitas* dari output Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) dapat disimpulkan bahwa semua item, nilai *Pearson Correlation*-nya berada di atas 0,254 berarti semua butir dalam instrumen **variabel X_1 adalah valid** dan tidak ada yang dibuang. Demikian pula dengan output Variabel Kepuasan Kerja (X_2), nilai *Pearson Correlation*-nya berada di atas 0,254 berarti semua butir dalam instrumen **variabel X_2 adalah valid** dan tidak ada yang dibuang. Hal yang sama juga terjadi pada Variabel Kinerja Pimpinan (Y) dimana nilai *Pearson Correlation*-nya berada di atas 0,254 yang berarti semua butir dalam instrumen variabel Y adalah valid dan tidak ada yang dibuang. Jadi, semua butir dalam Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1), Kinerja Pimpinan (X_2) dan Kinerja Pimpinan PTS (Y) dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Hasil uji *reliabilitas* variabel partisipasi penyusunan anggaran memperlihatkan bahwa *Cronbach's Alpha* sebesar $0.955 > 0.80$ s.d 1.00, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan sangat reliable. Hal yang sama pula terlihat pada variabel Kepuasan Kerja (X_2) dimana *Cronbach's Alpha* sebesar $0.939 > 0.80$ s.d 1.00, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan sangat reliable dan Kinerja Pimpinan PTS (Y) dimana *Cronbach's Alpha* sebesar $0.907 > 0.80$ s.d 1.00, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan sangat reliable.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian menggunakan uji park, terlihat bahwa signifikansi korelasi dari semua variabel bernilai $> 0,05$. Hal ini menandakan bahwa dalam penelitian ini terlihat bahwa variabel X_1 , Variabel X_2 dan Variabel Y tidak mengalami heteroskedastisitas atau varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap yang disebut *homoskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah *homoskedastisitas* atau tidak heteroskedastisitas.

b. Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas menggunakan program SPSS, terlihat output *Unstandardized Residual* nilai signifikansi pada *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0.060 yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 0.05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data partisipasi penyusunan anggaran, kepuasan kerja dan kinerja pimpinan terdistribusi normal.

c. Uji Multikolinieritas

Dari hasil analisis menggunakan bantuan program SPSS 19 terlihat bahwa nilai VIF untuk Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) dan Variabel Kepuasan Kerja (X_2) sebesar 1.000 yang berarti nilai VIF ini < 5 , maka disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas.

d. Autokorelasi

Dalam penelitian ini, metode pengujian *autokorelasi* menggunakan uji *Durbin-Watson* (uji DW). Dari *output* yang dihasilkan melalui program SPSS 19 diperoleh nilai DW dari model regresi adalah 2.030. Jadi, kesimpulannya adalah karena $1.65 < 2.030 < 2.35$, maka semua variabel tidak ada autokorelasi pada model regresinya.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

a. Analisis Determinasi dan Korelasi

Analisis Determinasi dan Korelasi dengan koefisien korelasi linier (R) pada *Model Summary* yang dihasilkan antara variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1), Kepuasan Kerja (X_2), dan variabel Kinerja Pimpinan (Y) adalah sebesar 0,732. Dari hasil 0,732 ini menunjukkan nilai antara 0 sampai +1, artinya antara variabel X_1 , variabel X_2 , dan variabel Y terdapat hubungan korelasi yang kuat. Hal ini berarti Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran dan Kepuasan Kerja, memiliki keterkaitan dan kontribusi yang kuat terhadap Kinerja Pimpinan. Angka *R Square* pada *Model Summary* atau koefisien determinasinya adalah 0,535 artinya 53,5% dari variabel Kinerja Pimpinan (Y) bisa dijelaskan oleh variabel Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran (X_1) dan Kepuasan Kerja (X_2), sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,465 atau 46,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan *Standar Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y . Dari hasil regresi pada *Model Summary* didapat nilai 3.41713. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam memprediksi kinerja pimpinan sebesar 3.41713.

Dari output yang dihasilkan dapat dibuatkan persamaan regresinya sebagai berikut :

$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2$ $Y' = 29.688 + 0.019X_1 + 0.498X_2$
--

Keterangan :

- Y' = Kinerja Pimpinan yang diprediksi
- a = Konstanta
- b_1, b_2 = Koefisien Regresi
- X_1 = Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran
- X_2 = Kepuasan Kerja

Persamaan regresinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Konstanta sebesar 29.688 pada *Coefficients^a* artinya jika Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) dan Kepuasan Kerja (X_2) nilainya adalah 0, maka Kinerja Pimpinan (Y) nilainya adalah 29.688.
- 2) Koefisien regresi variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) sebesar 0.498 artinya jika Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran (X_1) mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja Pimpinan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.498 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) dengan Kinerja Pimpinan (Y), artinya semakin besar Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran (X_1) maka semakin tinggi Kinerja Pimpinan (Y).
- 3) Koefisien regresi variabel Kepuasan Kerja (X_2) sebesar 0. 019 artinya jika Kepuasan Kerja (X_2) mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja Pimpinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.019 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Kepuasan Kerja (X_2) dengan Kinerja Pimpinan (Y), artinya semakin tinggi Kepuasan Kerja (X_2) maka semakin tinggi Kinerja Pimpinan (Y).

4) Hasil analisis korelasi ganda dapat dilihat pada output *model summary* dari hasil analisis regresi linier berganda di atas. Berdasarkan output diperoleh angka R sebesar 0.732. Karena nilai korelasi ganda 0.732 berada di antara 0.60 s.d 0.799 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, terjadi hubungan yang kuat antara Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Adanya pengaruh positif antara partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja pimpinan menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja pimpinan.

b. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dari hasil output ANOVA pada tabel V.E.2 hasil analisis regresi ganda, memperlihatkan hasil output ANOVA diperoleh nilai signifikan 0.000. Pengujian hipotesis pada uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Partisipasi penyusunan anggaran dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja pimpinan PTS di Kota Manado secara simultan dengan menggunakan kriteria apabila signifikan $<0,05$ maka H_0 ditolak, H_a diterima dan apabila signifikan $>0,05$ maka H_0 diterima, H_a ditolak, dengan nilai sig 0 s.d <1 berarti berpengaruh, sig antara 0 s.d ≥ 1 berarti tidak berpengaruh. Hasil pengujian ini diperoleh signifikan $0.000 < 0.05$, artinya signifikan atau berpengaruh maka kesimpulannya H_0 ditolak, H_3 diterima. Artinya secara simultan, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan PTS di Kota Manado.

c. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Melalui kolom Sig melalui kriteria ($0,05 \leq Sig$ maka H_0 diterima, H_a ditolak, artinya tidak signifikan dan bila $0,05 \geq Sig$ maka H_0 ditolak, H_a diterima, artinya signifikan). Hasil uji t, regresi linier berganda menggunakan bantuan program SPSS 19.00 untuk masing-masing variabel memperlihatkan bahwa :

1. Pengujian koefisien regresi variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000. Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan nilai probabilitas Sig atau $0,05 \leq Sig$ maka H_0 diterima, H_a ditolak, artinya tidak signifikan dan bila $0,05 \geq Sig$ maka H_0 ditolak, H_a diterima, artinya signifikan. Diketahui bahwa tingkat signifikansi dari variabel Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran (X_1) adalah $0,05 \geq 0,00$ hal ini berarti bahwa H_{01} ditolak dan H_1 diterima, artinya signifikan atau berpengaruh. Kesimpulannya secara parsial variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan (Y) Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado.

Jadi partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi dapat meningkatkan kinerja manajerial. Koefisien regresi variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) sebesar 0.498 artinya jika Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja Pimpinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.498 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) dengan Kinerja Pimpinan (Y), semakin tinggi Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) maka semakin tinggi Kinerja Pimpinan (Y) sebesar 0.498 dan sebaliknya, jika semakin menurun Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) maka Kinerja Pimpinan (Y) juga akan semakin menurun sebesar 0.498.

2. Pengujian koefisien regresi variabel Kepuasan Kerja (X_2) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.843. Kriteria pengujian hipotesis dikatakan berpengaruh jika nilai probabilitas $Sig \leq 0,05$ maka H_a diterima H_0 ditolak, artinya signifikan. Diperoleh tingkat signifikan dari variabel Kepuasan Kerja (X_2) adalah $0,843 \geq 0,05$ hal ini berarti tidak signifikan. Maka H_2 ditolak dan H_{02} diterima. Kesimpulannya secara parsial variabel Kepuasan Kerja (X_2) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan (Y) Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Dalam hal ini, kepuasan kerja tidak signifikan terhadap kinerja pimpinan PTS di kota Manado, menandakan bahwa kepuasan kerja secara umum tidak berhubungan secara permanen melainkan hanya sementara, dan yang lebih mendominasi kepuasan kerja adalah faktor lainnya.

Koefisien regresi variabel Kepuasan Kerja (X_2) sebesar 0.019 artinya jika Kepuasan Kerja (X_2) mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja Pimpinan (Y) akan mengalami peningkatan yang sedikit yakni sebesar 0.019 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Kepuasan Kerja (X_2) dengan Kinerja Pimpinan (Y), semakin tinggi Kepuasan Kerja (X_2) maka semakin tinggi Kinerja Pimpinan (Y) sebesar 0.019 dan sebaliknya, jika semakin menurun Kepuasan Kerja (X_2) maka Kinerja Pimpinan (Y) juga akan semakin menurun sebesar 0.019.

PEMBAHASAN

Dari hasil uji *heteroskedastisitas* dapat disimpulkan bahwa variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1), Variabel Kepuasan Kerja (X_2) dan Variabel Kinerja Pimpinan PTS (Y) tidak mengalami heteroskedastisitas karena tingkat signifikansinya berada di atas 0.05 atau varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap yang disebut *homoskedastisitas*. Dari hasil uji *normalitas*, terlihat output *Unstandardized Residual* nilai signifikansi pada *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0.060 yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 0.05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data dari variabel partisipasi penyusunan anggaran, variabel kepuasan kerja dan variabel kinerja pimpinan terdistribusi secara normal. Dari hasil uji multikolinieritas terlihat bahwa nilai VIF untuk Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) dan Variabel Kepuasan Kerja (X_2) sebesar 1.000 yang berarti nilai VIF ini < 5 , maka disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak ditemukan adanya masalah *multikolinieritas* atau data bebas dari pengaruh *multikolinieritas*. Hasil uji *Autokorelasi* menunjukkan bahwa kriteria berdasarkan uji Durbin-Watson (uji DW) memperoleh $1.65 < 2.030 < 2.35$, maka semua variabel tidak ada autokorelasi pada model regresinya. Koefisien korelasi linier (R) pada *Model Summary* yang dihasilkan antara variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1), Kepuasan Kerja (X_2), dan variabel Kinerja Pimpinan (Y) adalah sebesar 0,732. Dari hasil 0,732 ini menunjukkan nilai antara 0 sampai +1, artinya antara variabel X_1 , variabel X_2 , dan variabel Y terdapat hubungan korelasi yang kuat. Hal ini berarti Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kepuasan Kerja, memiliki keterkaitan dan kontribusi yang kuat terhadap Kinerja Pimpinan PTS di Kota Manado. Angka *R Square* pada *Model Summary* atau koefisien determinasinya adalah 0,535 artinya 53,5% dari variabel Kinerja Pimpinan (Y) bisa dijelaskan oleh variabel Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran (X_1) dan Kepuasan Kerja (X_2), sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,465 atau 46,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan *Standar Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi pada *Model Summary* didapat nilai 3.41713. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam memprediksi kinerja pimpinan sebesar 3.41713.

Dari hasil persamaan model regresi $Y' = 29.688 + 0.498X_1 + 0.019X_2$ menerangkan bahwa Konstanta sebesar 29.688 pada *Coefficients^a* artinya jika Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) dan Kepuasan Kerja (X_2) nilainya adalah 0, maka Kinerja Pimpinan (Y) nilainya adalah 29.688. Koefisien regresi variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) sebesar 0.498 artinya jika Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja Pimpinan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.498 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) dengan Kinerja Pimpinan (Y), semakin tinggi Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) maka semakin tinggi Kinerja Pimpinan (Y). Koefisien regresi variabel Kepuasan Kerja (X_2) sebesar 0.019 artinya jika Kepuasan Kerja (X_2) mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja Pimpinan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.019 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Kepuasan Kerja (X_2) dengan Kinerja Pimpinan (Y), semakin tinggi Kepuasan Kerja (X_2) sebesar 0.019 maka semakin tinggi Kinerja Pimpinan (Y) sebesar 0.019. Hasil analisis korelasi ganda dapat dilihat pada output *model summary* dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh angka R sebesar 0.732. Karena nilai korelasi ganda 0.732 berada di antara 0.60 s.d 0.799 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, terjadi hubungan yang kuat antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Adanya pengaruh positif antara partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja pimpinan menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja pimpinan.

Hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa H_{03} ditolak, H_3 diterima. Hal ini ditunjukkan melalui kolom sig yang menunjukkan angka 0.000, artinya signifikan. Kesimpulannya, secara simultan, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kepuasan Kerja berpengaruh karena signifikan terhadap Kinerja Pimpinan PTS di Kota Manado. Penelitian ini didukung oleh penelitian Yogi Andrianto, (2008) dengan hasil pengujian hipotesis 2 yang menunjukkan adanya interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan kepuasan kerja dengan kinerja manajerial signifikan.

Untuk pengujian hipotesis secara parsial (uji t), diketahui bahwa tingkat signifikansi dari variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) adalah $0,000 \leq 0,005$ yang berarti signifikan. Jadi, H_1 diterima, H_{01} ditolak. Kesimpulannya secara parsial variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) berpengaruh karena signifikan terhadap Kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Koefisien regresi variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) sebesar 0.498 artinya jika Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja Pimpinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.498 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) dengan Kinerja Pimpinan (Y), semakin tinggi Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) maka semakin tinggi Kinerja Pimpinan (Y) sebesar 0.498. Penelitian ini didukung oleh penelitian Yogi Andrianto, (2008) dengan hasil Partisipasi penyusunan anggaran secara positif mempengaruhi kinerja manajerial. Selanjutnya untuk tingkat signifikansi secara parsial variabel Kepuasan Kerja (X_2) adalah $0,843 \geq 0,005$. Artinya tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa H_2 ditolak, H_{02} diterima. Kesimpulannya secara parsial variabel Kepuasan Kerja (X_2) tidak berpengaruh karena tidak signifikan terhadap Kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Dalam hal ini, Kepuasan kerja tidak signifikan terhadap kinerja pimpinan PTS di kota Manado, menandakan bahwa kepuasan kerja secara umum tidak berhubungan secara permanen melainkan hanya sementara, dan yang lebih mendominasi kepuasan kerja adalah faktor lainnya (pekerjaan itu sendiri, ketidakhadiran dan keluarnya pegawai).

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Besarnya Pengaruh secara simultan antara variabel Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran (X_1) dan Kepuasan Kerja (X_2) terhadap Kinerja Pimpinan (Y) tergolong kuat. Kontribusi secara bersama-sama (simultan) Variabel X_1 dan X_2 terhadap $Y = R^2 \times 100\%$ atau $0.732^2 \times 100\% = 0.535 = 53.5\%$ sedangkan sisanya 46.5% ditentukan oleh variabel lainnya. Kemudian mengenai naik-turunnya atau besar-kecilnya kinerja pimpinan dapat diprediksi melalui persamaan regresi $Y' = 29.688 + 0.019X_1 + 0.498X_2$ sehingga dari hasil penelitian ini setelah dilakukan analisis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) signifikan terhadap Kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Maka Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Jadi partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi dapat meningkatkan kinerja manajerial. Penelitian ini didukung oleh penelitian Niken Safitri (2006). Secara langsung Hipotesis kerja H_1 diterima dan H_{01} ditolak.
2. Secara parsial variabel Kepuasan Kerja (X_2) tidak signifikan terhadap Kinerja Pimpinan (Y) Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Maka Kepuasan Kerja (X_2) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan (Y) Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Kepuasan kerja tidak signifikan terhadap kinerja pimpinan PTS di kota Manado, menandakan bahwa kepuasan kerja secara umum tidak berpengaruh secara permanen melainkan hanya sementara, dan yang lebih mendominasi kepuasan kerja adalah faktor lainnya (pekerjaan itu sendiri, ketidakhadiran dan keluarnya pegawai). Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Kepuasan Kerja (X_2) dengan Kinerja Pimpinan (Y), dimana semakin tinggi Kepuasan Kerja (X_2) maka semakin tinggi Kinerja Pimpinan (Y). Dengan demikian hipotesis kerja H_2 ditolak dan H_{02} diterima.
3. Secara simultan, variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kepuasan Kerja Signifikan terhadap Kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Manado. Besarnya pengaruh variabel Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pimpinan terdapat hubungan korelasi yang kuat. Hal ini berarti Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kepuasan Kerja, memiliki keterkaitan dan kontribusi yang kuat terhadap Kinerja Pimpinan. Pengujian hipotesis pada uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Partisipasi penyusunan anggaran dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Manado secara simultan. Hasil pengujian ini diperoleh bahwa secara simultan, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kepuasan Kerja signifikan terhadap Kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Manado.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sangat rentan dengan kemungkinan terjadinya bias dalam pemberian jawaban. Hal ini disebabkan karena penggunaan kuesioner dengan skala likert 5 (lima) pilihan jawaban hanya berdasarkan persepsi dari para responden saja. Demikian halnya dengan keterbatasan dalam pengukuran variabel kinerja pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang didasarkan pada persepsi para responden saja, bukan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah IX Sulawesi. Berbeda halnya dengan PNS yang memiliki DP3 sebagai indikatornya. Oleh karena itu pengukuran kinerja berdasarkan persepsi para responden dapat menimbulkan bias, meskipun pengukuran seperti ini banyak dilakukan oleh para peneliti di berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Idrus Salim, Pengaruh Pembelajaran Organisasi, Kepuasan Kerja dan Orientasi Pasar Terhadap Kinerja Manajer Dan Kinerja Unit Bisnis (Studi pada koperasi pengelola susu sapi perah di Jawa Timur), Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007
- Anthony, Robert N dan Govindarajan Vijay, *Management Control system* (Sistem Pengendalian Manajemen, Salemba Empat, Mc Graw-Hill, Edisi 11, buku 1 dan buku 2, 2009
- Bacal. R, Performance Management, Edisi Bahasa Indonesia, Sun, Jakarta, 2001
- Ekha Yunora Sinaga & Narumonrang Siregar, Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja manajerial Pada PT. Perkebunan Nusantara III Sei Sikambing Medan, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2009
- Groweel, 1982 dalam Puput, 2007, *Organization : Behavior Structure Processes*, Irwin; McGraw-hill.
- Handoko, T. Hani, Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 1996
- [.http://www.kopertis9.or.id/](http://www.kopertis9.or.id/), Website Kopertis IX Sulawesi, 2011
- Ilat Ventje, Pengaruh Tujuan Anggaran, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, *Good Governance*, Perilaku Oportunistik Legislatif Terhadap Sikap, Motivasi Kerja Dan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Di Sulawesi Utara, Desertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2010
- Nasution Mustafa Edwin & Hardius Usman, Proses Penelitian Kuantitatif, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007
- Nasution. S, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, 2011
- Nawawi & Hadari, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003
- Prastowo Andi, Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis, Ar-Ruzz Media, Cetakan I, 2011
- Puspaningsih Abriyani, Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Manajer pada Perusahaan Manufaktur, Jurnal, 2003
- Riduwan & Sunarto, Pengantar Statistika, Untuk Penelitian Pendidikan Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis, Lengkap dengan aplikasi SPSS 14, Cetakan keempat, April 2011
- Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan, *Management Control System*, Sistem Pengendalian Manajemen, Salemba Empat, 2005
- Santoso Singgih, Mastering SPSS Versi 19, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011
- Sarwono Jonathan, Buku Pintar IBM SPSS Statistics 19, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011
- Suharjo Bambang, Analisis Regresi Terapan dengan SPSS, Graha Ilmu, Edisi pertama, Cetakan pertama, 2008
- Sujoko Efferin, Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan, Metode Penelitian Akuntansi, Graha Ilmu, Cetakan pertama, 2008
- Supriyono, R. A, 1993, "Akuntansi Manajemen I. Konsep Dasar Akuntansi Manajemen dan Proses Perencanaan". Edisi I. BPFE. UGM. Yogyakarta.
- Supriyono, R.A, 2006. "Pengaruh Usia, Keinginan Sosial, Kecukupan Anggaran, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Manajer Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*. Vol 21. No 1 pp 1-21.
- Syaiin Subakti, Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Klinik Spesialis Bestari Medan Tahun 2007, Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2007
- Thomas C, Alewine, Seri Manajemen Sumber Daya Manusia "Kinerja Performance"(Ed), Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja, hal 224–249, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, 2002
- Wahyudin Nor, Desentralisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial, Jurnal Universitas Palangkaraya, (2007)

Wibowo, Manajemen Kinerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Yogi Adrianto, Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Kepuasan Kerja, *Job Relevant Information* Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Swasta di Wilayah Kota Semarang), Tesis Program Studi Magister Sain Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008

LAMPIRAN

1. Uji Validitas

Korelasi Variabel (X₁) (PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN)

Correlations

KETERANGAN	X1P1	X1P2	X1P3	X1P4	X1P5	X1P6	X1P7	X1P8	X1P9	X1TTL
X1P1 Pearson Correlation	1	.609**	.811**	.679**	.701**	.671**	.734**	.700**	.693**	.855**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1P2 Pearson Correlation	.609**	1	.722**	.639**	.648**	.633**	.658**	.702**	.676**	.813**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1P3 Pearson Correlation	.811**	.722**	1	.728**	.741**	.705**	.695**	.698**	.701**	.881**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1P4 Pearson Correlation	.679**	.639**	.728**	1	.637**	.747**	.687**	.695**	.693**	.840**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1P5 Pearson Correlation	.701**	.648**	.741**	.637**	1	.688**	.783**	.809**	.622**	.860**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1P6 Pearson Correlation	.671**	.633**	.705**	.747**	.688**	1	.701**	.683**	.692**	.844**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1P7 Pearson Correlation	.734**	.658**	.695**	.687**	.783**	.701**	1	.849**	.708**	.882**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1P8 Pearson Correlation	.700**	.702**	.698**	.695**	.809**	.683**	.849**	1	.771**	.895**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1P9 Pearson Correlation	.693**	.676**	.701**	.693**	.622**	.692**	.708**	.771**	1	.851**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1TTL Pearson Correlation	.855**	.813**	.881**	.840**	.860**	.844**	.882**	.895**	.851**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Korelasi Variabel (X₂)
(Kepuasan Kerja)**

Correlations

KETERANGAN		X2P1	X2P2	X2P3	X2P4	X2P5	X2P6	X2P7	X2P8	X2P9	X2P10	X2TTL
X2P1	Pearson Correlation	1	.609**	.737**	.642**	.754**	.682**	.630**	.582**	.574**	.573**	.834**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2P2	Pearson Correlation	.609**	1	.760**	.475**	.585**	.688**	.652**	.449**	.593**	.457**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2P3	Pearson Correlation	.737**	.760**	1	.597**	.645**	.627**	.766**	.663**	.611**	.682**	.875**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2P4	Pearson Correlation	.642**	.475**	.597**	1	.715**	.537**	.640**	.548**	.495**	.453**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2P5	Pearson Correlation	.754**	.585**	.645**	.715**	1	.702**	.591**	.683**	.630**	.544**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2P6	Pearson Correlation	.682**	.688**	.627**	.537**	.702**	1	.575**	.628**	.618**	.523**	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2P7	Pearson Correlation	.630**	.652**	.766**	.640**	.591**	.575**	1	.602**	.596**	.537**	.818**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2P8	Pearson Correlation	.582**	.449**	.663**	.548**	.683**	.628**	.602**	1	.629**	.662**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2P9	Pearson Correlation	.574**	.593**	.611**	.495**	.630**	.618**	.596**	.629**	1	.706**	.804**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2P10	Pearson Correlation	.573**	.457**	.682**	.453**	.544**	.523**	.537**	.662**	.706**	1	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2TTL	Pearson Correlation	.834**	.763**	.875**	.756**	.845**	.806**	.818**	.808**	.804**	.767**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

****.** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Korelasi Variabel (Y)
(Kinerja Pimpinan)
Correlations

KET	YP1	YP2	YP3	YP4	YP5	YP6	YP7	YP8	YP9	YP10	YP11	YP12	YTTL
YP1 PC	1	.662**	.662**	.459**	.465**	.595**	.501**	.277*	.507**	.357**	.145	.275*	.696**
Sig. (2-t)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.032	.000	.005	.270	.033	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP2 PC	.662**	1	.595**	.523**	.599**	.496**	.598**	.452**	.561**	.409**	.396**	.563**	.804**
Sig. (2-t)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.002	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP3 PC	.662**	.595**	1	.481**	.607**	.517**	.405**	.353**	.523**	.277*	.184	.360**	.733**
Sig. (2-t)	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.006	.000	.032	.159	.005	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP4 PC	.459**	.523**	.481**	1	.586**	.514**	.457**	.541**	.521**	.320*	.282*	.342**	.700**
Sig. (2-t)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.013	.029	.008	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP5 PC	.465**	.599**	.607**	.586**	1	.631**	.592**	.286*	.522**	.271*	.284*	.485**	.742**
Sig. (2-t)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.026	.000	.036	.028	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP6 PC	.595**	.496**	.517**	.514**	.631**	1	.572**	.318*	.499**	.366**	.193	.299*	.711**
Sig. (2-t)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.013	.000	.004	.140	.020	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP7 PC	.501**	.598**	.405**	.457**	.592**	.572**	1	.449**	.636**	.474**	.381**	.523**	.766**
Sig. (2-t)	.000	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.003	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP8 PC	.277*	.452**	.353**	.541**	.286*	.318*	.449**	1	.407**	.393**	.312*	.320*	.619**
Sig. (2-t)	.032	.000	.006	.000	.026	.013	.000		.001	.002	.015	.013	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP9 PC	.507**	.561**	.523**	.521**	.522**	.499**	.636**	.407**	1	.495**	.452**	.466**	.798**
Sig. (2-t)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001		.000	.000	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP10 PC	.357**	.409**	.277*	.320*	.271*	.366**	.474**	.393**	.495**	1	.410**	.471**	.597**
Sig. (2-t)	.005	.001	.032	.013	.036	.004	.000	.002	.000		.001	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP11 PC	.145	.396**	.184	.282*	.284*	.193	.381**	.312*	.452**	.410**	1	.479**	.505**
Sig. (2-t)	.270	.002	.159	.029	.028	.140	.003	.015	.000	.001		.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YP12 PC	.275*	.563**	.360**	.342**	.485**	.299*	.523**	.320*	.466**	.471**	.479**	1	.636**
Sig. (2-t)	.033	.000	.005	.008	.000	.020	.000	.013	.000	.000	.000		.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
YTTL PC	.696**	.804**	.733**	.700**	.742**	.711**	.766**	.619**	.798**	.597**	.505**	.636**	1
Sig. (2-t)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

Scale: **Partisipasi Penyusunan Anggaran (X₁)**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.955	9

Scale: **Kepuasan Kerja (X₂)**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.939	10

Scale: **Kinerja Pimpinan PTS (Y)**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.907	12

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas Variabel

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.462	3.659		-1.493	.141
X1	-.046	.051	-.118	-.896	.374
X2	-.005	.079	-.009	-.066	.948

a. Dependent Variable: LR

b. Uji Normalitas

Uji Normalitas Variabel

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.112	60	.060	.955	60	.028

a. Lilliefors Significance Correction

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas Variabel

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	1.000	1.000
X2	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan Yang diolah Tahun 2011

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi Variabel

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.030 ^a

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan Yang Diolah Tahun 2011

4. Analisis Regresi Berganda

a. Analisis Determinasi dan Korelasi

HASIL UJI KOEFISIEN KORELASI DAN DETERMINASI

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KEPUASAN KERJA (X ₂), PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN (X ₁)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KINERJA PIMPINAN

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 ^a	.535	.519	3.41713

a. Predictors: (Constant), KEPUASAN KERJA (X₂),

b. PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN (X₁)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	767.275	2	383.637	32.855	.000 ^a
Residual	665.575	57	11.677		
Total	1432.850	59			

a. Predictors: (Constant), KEPUASAN KERJA (X₂),

b. PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN (X₁)

c. Dependent Variable: KINERJA PIMPINAN (Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29.688	4.383		6.774	.000
PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN (X ₁)	.498	.061	.732	8.104	.000
KEPUASAN KERJA (X ₂)	.019	.095	.018	.198	.843

a. Dependent Variable: KINERJA PIMPINAN (Y)

Sumber : Data Olahan Yang Diolah Tahun 2011

b. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji Koefisien Regresi secara Bersamaan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	767.275	2	383.637	32.855	.000 ^a
Residual	665.575	57	11.677		
Total	1432.850	59			

- a. Predictors: (Constant), KEPUASAN KERJA (X₂), PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN (X₁)
- b. Dependent Variable: KINERJA PIMPINAN (Y)

c. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

d. Uji Parsial (t)

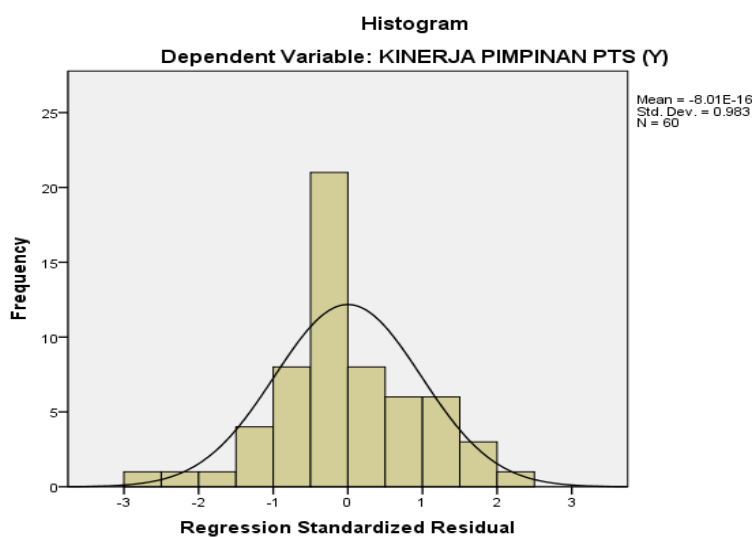
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29.688	4.383		6.774	.000
PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	.498	.061	.732	8.104	.000
KEPUASAN KERJA	.019	.095	.018	.198	.843

a. Dependent Variable: KINERJA PIMPINAN

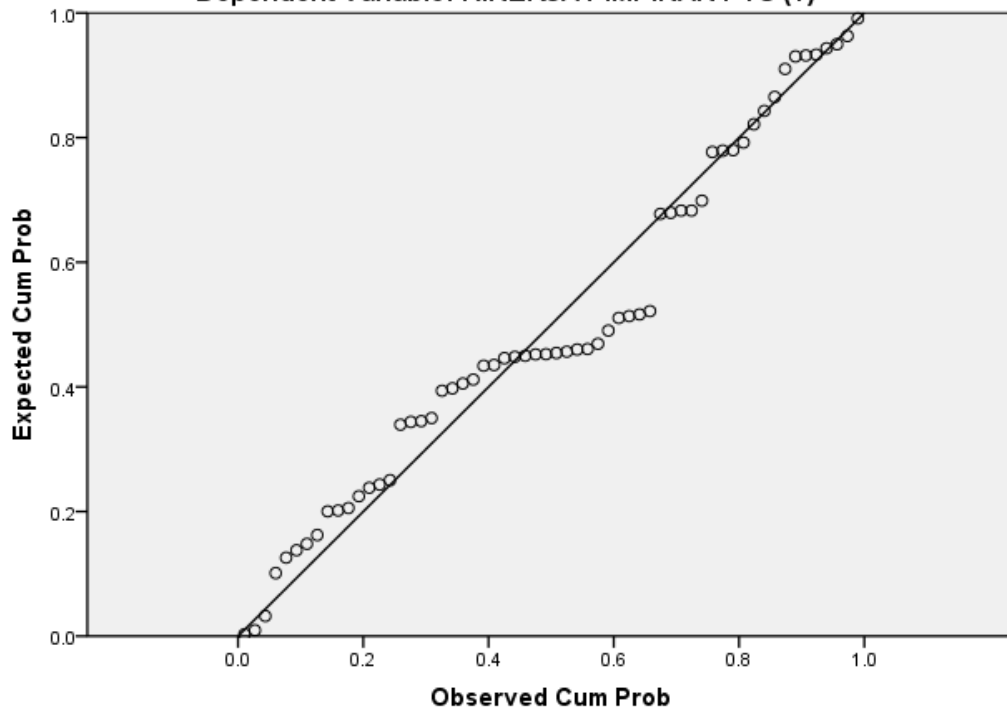
Output Regresi Ganda

Charts



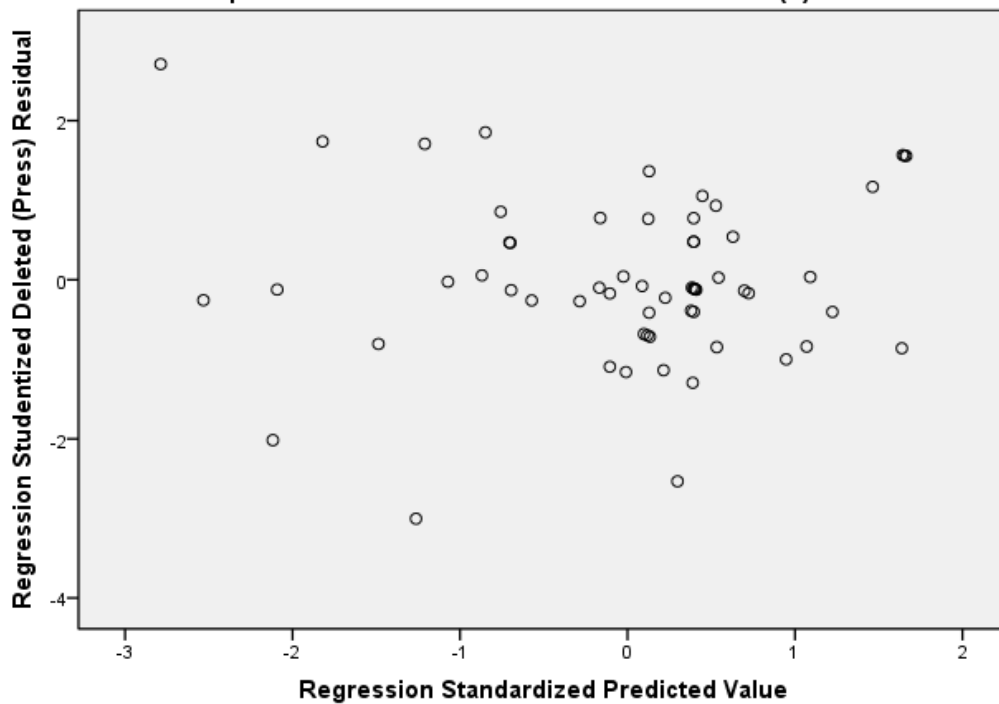
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KINERJA PIMPINAN PTS (Y)



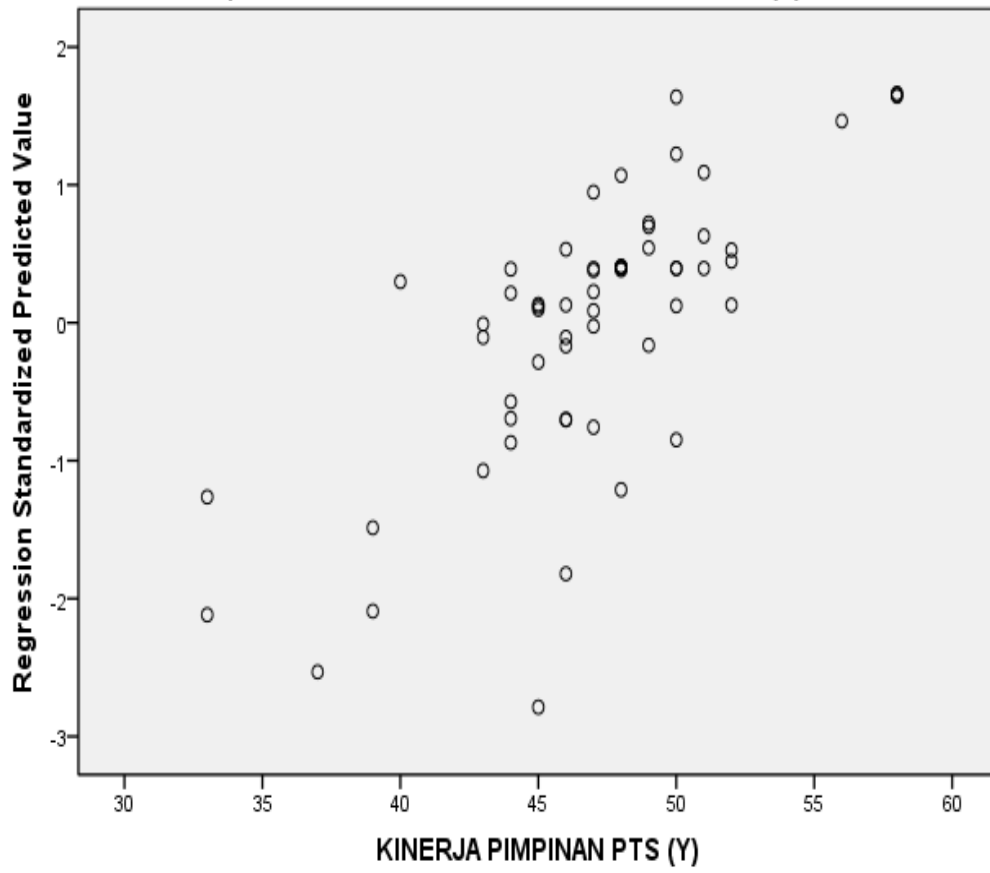
Scatterplot

Dependent Variable: KINERJA PIMPINAN PTS (Y)



Scatterplot

Dependent Variable: KINERJA PIMPINAN PTS (Y)



ANALISIS STRATEGY GAP PADA PT INDONESIA POWER DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Anneke Wangkar

ABSTRAK

Ketika suatu perusahaan menjadi semakin besar, peran informasi didalam perusahaan menjadi semakin besar pula. Salah satu keahlian yang paling penting dalam bisnis adalah kemampuan untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam sebuah tindakan/aksi. Hal ini semakin menjadi sangat sulit dalam perusahaan yang makin besar dan kompleks, dimana batasan antara orang-orang yang memformulasikan strategi dengan yang melaksanakannya sangat signifikan.

Analisis Strategy Gap ditujukan untuk mendefinisikan penyebab-penyebab gap antara sistem yang sedang berjalan dengan strategi PT. INDONESIA POWER. Hasil keluaran dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk pihak manajemen berdasarkan pada hasil analisis di empat area, yaitu Measures, Processes, People dan Technology.

Diharapkan bahwa rekomendasi tersebut dapat membantu menyelaraskan IS Strategic Plan dan eksekusi sehingga meningkatkan competitive advantage PT. INDONESIA POWER.

Kata kunci : Manajemen Strategik, Strategy Gap, SWOT Analysis, Porter Five Forces, Information System, IS Strategic Planning.

ABSTRACK

When a company becomes larger, the role of information with in the company to be greater. One of the most important skill in business is the ability to translate corporate strategy into an action. It is getting to be very difficult in the company increasingly large and complex, where the boundaries between those who formulate the strategy to implement highly significant.

Strategy Gap Analysis is intended to define the causes of the gap between the current system with the strategy of PT. INDONESIA POWER. The output of this thesis is the recommendation for the management based on the results of the analysis in four areas, namely Measures, Processes, People and Technology.

It is hoped that these recommendations can help align the IS Strategic Plan and execution thereby increasing competitive advantage PT. INDONESIA POWER.

Keywords: Strategic Management, Strategy Gap, SWOT Analysis, Porter's Five Forces, Information Systems, IS Strategic Planning.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam beberapa dasawarsa terakhir sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, tanpa kecuali pada proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan atau organisasi cenderung memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi yang bertujuan untuk mendongkrak pendapatan dan memperbaiki kinerja. Pemanfaatan teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung sudah menjadi menu utama dalam proses bisnis. Fenomena tersebut secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi perilaku dan kebutuhan semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu keahlian yang paling penting dalam bisnis manapun juga adalah kemampuan untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam sebuah tindakan/aksi. Hal ini semakin menjadi sangat sulit dalam perusahaan yang makin besar dan kompleks, dimana batasan antara orang-orang yang memformulasikan strategi dengan yang melaksanakannya sangat signifikan.

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat dari “era industri” ke “era informasi”, yang dikarakteristikan dengan persaingan global dan didasarkan pada pengetahuan, setiap organisasi harus memikirkan kembali asumsi-asumsi mendasar dimana mereka bersaing. Dan dengan ekonomi global yang ada saat ini, setiap pelaku bisnis harus membuat system umpan balik yang secara efektif memonitor aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan strategis mereka..Hal inipun juga dirasakan oleh perusahaan PT. INDONESIA POWER untuk dapat bersaing di era informasi saat ini.

PT. INDONESIA POWER adalah salah satu anak perusahaan listrik milik PT. PLN (persero) yang didirikan pada tanggal 03 Oktober 1995 dengan nama PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I (PT. PLN PJB I) dan pada tanggal 03 Oktober 2000 PT. PLN PJB I resmi berganti nama menjadi PT. INDONESIA POWER. PT. INDONESIA POWER merupakan perusahaan pembangkit tenaga listrik terbesar di Indonesia dengan delapan Unit Bisnis Pembangkitan utama di beberapa lokasi strategis di Pulau Jawa dan Pulau Bali serta satu Unit Bisnis yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan yang disebut Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan (UBJP).

Kiprah PT. INDONESIA POWER dalam pengembangan usaha penunjang di bidang pembangkit tenaga listrik juga dilakukan dengan membentuk anak perusahaan PT. COGINDO DAYABERSAMA (saham 99.9%) yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan manajemen energi dengan penerapan konsep *cogeneration* dan *distributed generation*, juga PT. INDONESIA POWER mempunyai saham 60% di PT. ARTA DAYA COALINDO yang bergerak di bidang usaha perdagangan batubara. Aktivitas kedua anak perusahaan ini diharapkan dapat lebih menunjang peningkatan pendapatan perusahaan di masa mendatang.

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan dalam perusahaan, PT. INDONESIA POWER harus memasuki era dimana informasi harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis. PT. INDONESIA POWER sendiri menyadari pentingnya peranan teknologi, termasuk teknologi komputer.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan *fact finding strategy gap*, yaitu melakukan analisa terhadap strategi perusahaan dan juga sistem yang berjalan saat ini, untuk mengetahui apakah sistem yang berjalan saat ini telah sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dan bagaimana pengukurannya, dan juga memberikan rekomendasi terhadap *is strategic planning* yang ada di perusahaan agar dapat menjembatani gap yang ada saat ini.

Adapun untuk *fact finding strategy gap*, ada 4 kegiatan yang akan dilakukan, yaitu: *Measures, Processes, People* dan *Technology* dimana 4 kegiatan ini dilakukan untuk menjembatani *gap* yang ada antara strategi dengan eksekusi dan menuangkannya dalam suatu Analisis *strategy gap* yang dapat memberikan masukan bagi PT. INDONESIA POWER untuk bersaing.

1.2. Rumusan Permasalahan

Dengan perubahan yang sangat cepat dan era globalisasi, prioritas terhadap keberhasilan implementasi strategi dan Teknologi Informasi harus sesuai dengan ekspektasi PT. INDONESIA POWER. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sendiri pada saat ini adalah :

- a. Kesulitan dalam mengetahui gap antara strategi perusahaan dengan eksekusi dari strategi yang dijalankan tersebut. Dimana tidak diketahui faktor penyebab gap yang ada tersebut.
- b. Belum adanya suatu metodologi yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap sistem yang berjalan saat ini, apakah sistem ini sudah sesuai dengan strategi dari perusahaan.
- c. Kesulitan dalam perencanaan *IS strategic plan* perusahaan kedepan. Termasuk didalamnya sistem yang dibutuhkan untuk evaluasi dan benefitnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Strategi

Menurut Suwarsono (2002, p. 6), manajemen strategik dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Pengertian ini juga mengandung implikasi bahwa perusahaan berusaha mengurangi kelemahannya, dan berusaha melakukan adaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Pengertian tersebut juga menunjuk bahwa perusahaan berusaha untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman bisnis.

2.2. Strategy Gap

Menurut Coveney (2003, p. 2), strategi gap dapat didefinisikan sebagai sebuah ancaman bagi performansi di masa mendatang dan bahkan kelangsungan hidup dari sebuah organisasi dan dapat dijamin bahwa mengganggu efisiensi dan efektifitas dari senior eksekutif dan tim manajemennya. Berdasarkan penelitian dan pengalaman yang ada, penyebab utama dari strategi gap dapat digolongkan ke dalam tiga bidang yang saling berinteraksi, yaitu :

1. Cara manajemen bertindak untuk mengimplementasikan sasaran strategis.
2. Proses-proses tradisional (seperti penganggaran belanja, peramalan, pelaporan) yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi.
3. Sistem teknologi yang digunakan untuk mendukung proses-proses tersebut.

Keefektifan Sistem Informasi dapat diukur melalui penggunaan Sistem Informasi, kepuasan pengguna informasi, kualitas dari pembuatan keputusan, produktifitas dari analisis *cost/benefit*, dan kualitas sistem (Grover et al., 1996). Model kesuksesan Sistem Informasi oleh DeLone dan McLean terdiri dari enam bagian yang saling bergantung yaitu Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kegunaan, Kepuasan Pengguna, Pengaruh Individu, dan Pengaruh Organisasi (DeLone and McLean, 1992, p.63).

Kepuasan pengguna secara umum adalah sebuah hasil dalam membandingkan harapan pengguna akan Sistem Informasi dan performansi yang dirasakan. Gap adalah ketidakcocokan diantara harapan dan performansi. Jika nilai gap adalah positif, ini berarti bahwa performansi yang dirasakan melebihi harapan. Sebaliknya, jika nilai gap adalah negatif, maka performansi yang dirasakan adalah

dibawah harapan. Sebuah gap positif yang besar menyatakan pemborosan sumber daya Sistem Informasi. Sementara itu, sebuah gap negatif yang besar menyatakan kebutuhan akan peningkatan performansi (Remenyi, et. al., 1995). Dalam pengukuran kepuasan pengguna informasi, ada beberapa model seperti pendekatan Miller-Doyle, model Kim, dan sebuah model gap (Remenyi, et. al., 1995).

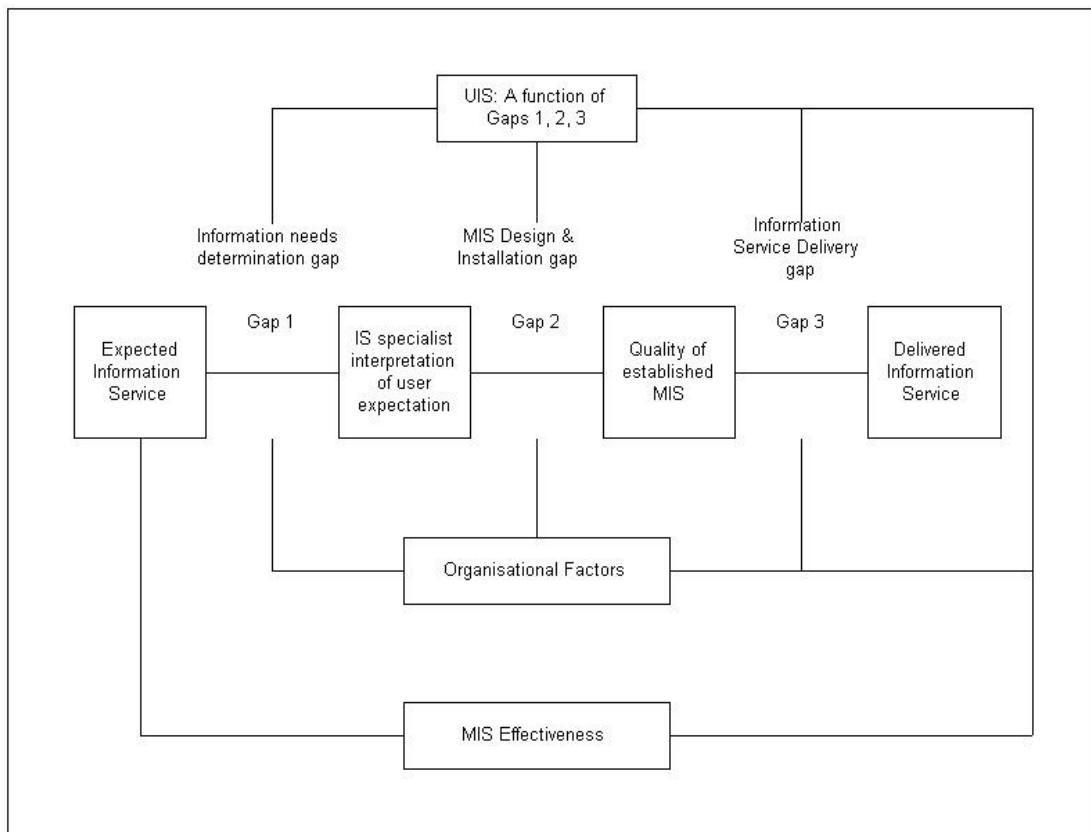
a. Pendekatan Miller-Doyle

Menurut Remenyi, et, al., (1995), pendekatan Miller-Doyle didesain untuk mengukur efektifitas keseluruhan fungsi Sistem Informasi yang dirasakan dan menggunakan kuesioner yang terdiri dari lima bagian yang diberi nama bagian A sampai bagian E. Bagian A terdiri dari 34 pertanyaan yang mengukur tingkat kepentingan Sistem Informasi yang dirasakan untuk menjamin bahwa Sistem Informasi akan efektif dan berhasil. Untuk pertanyaan-pertanyaan bagian A digunakan skala semantic differential (1 – tidak relevan, 7 – sangat kritikal). Bagian B terdiri dari empat pertanyaan atas kebutuhan Sistem Informasi dimasa mendatang; Bagian C terdiri dari 34 pertanyaan yang sama dengan bagian A tetapi dalam bagian C ini responden ditanyakan untuk menilai 34 pertanyaan tersebut dengan mengacu kepada performansi actual yang didapatkan dalam organisasi mereka. Skala 7-poin kembali digunakan tetapi dalam kasus ini 1 berarti (sangat rendah) dan 7 berarti sangat bagus. Bagian D terdiri dari empat pertanyaan yang berkaitan dengan performansi organisasi dalam membangun sistem baru; Bagian E terdiri dari empat pertanyaan yang mengambil data demografi. Ada juga pertanyaan yang menanyakan nilai performansi Sistem Informasi dari organisasi secara keseluruhan yang menggunakan skala 1 (gagal total) – 7 (sangat berhasil) (Remenyi, et, al., 1995, p.121).

b. Model Kim

Dalam model Kim, kepuasan pengguna informasi dipengaruhi oleh pengalaman sesudah implementasi dan harapan pada saat sebelum implementasi Sistem Informasi (Remenyi, et. al., 1995). Model ini akan mengukur kepuasan pengguna informasi dengan ketidaksesuaian nilai persepsi pengguna atas performansi Sistem Informasi dan nilai harapan pengguna atas Sistem Informasi.

Model ini akan menunjukkan bagaimana ketidaksesuaian yang muncul selama pengembangan dan proses pengiriman layanan mempengaruhi kepuasan pengguna informasi. Tahap pengembangan terdiri dari dua sub-tahap, yang adalah penentuan kebutuhan Sistem Informasi dan desain dan instalasi dari Sistem Informasi (Remenyi, et. al., 1995). Kedua sub-tahap ini akan menyebabkan tiga gap yang mempengaruhi kepuasan pengguna informasi (lihat gambar dibawah).



Gambar 1. Kepuasan Pengguna Informasi – Kim Model

c. Model Gap

Dalam model gap, kepuasan pengguna informasi diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari empat bagian. Bagian pertama akan mengambil informasi tentang responden, seperti posisi individu, lama bekerja, lama dari pengalaman kerja dengan komputer, dll. Bagian ini diikuti oleh tiga bagian lain yang diberi nama bagian A, bagian B dan bagian C. Bagian A dan B terdiri dari jumlah pertanyaan yang sama yang mengambil informasi berbagai aspek dari sistem.

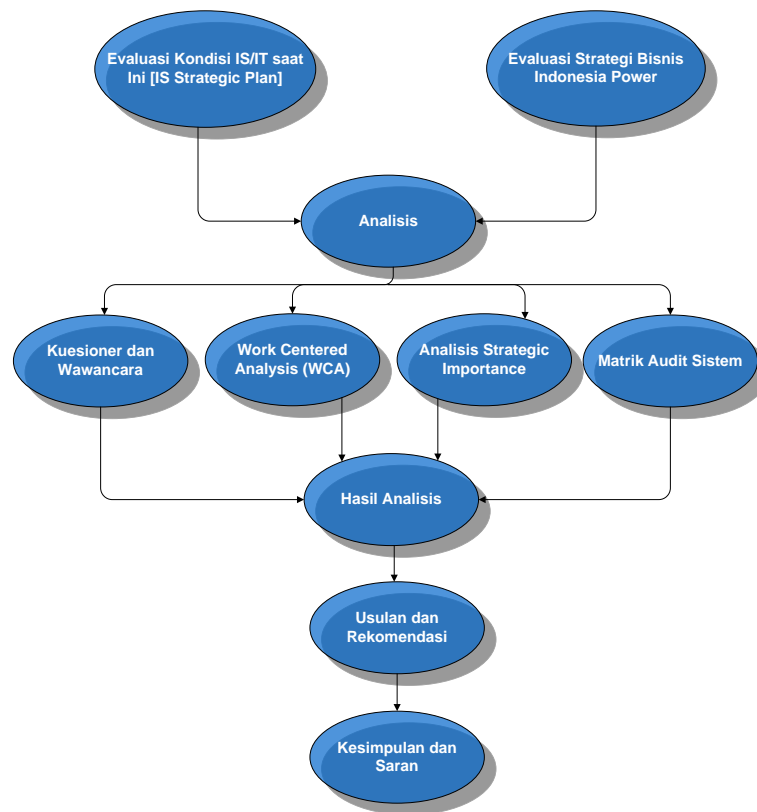
“Bagian A mengukur tingkat atribut-atribut yang dirasakan penting bagi efektifitas dari sistem. Harapan diukur berdasarkan skala 1 (tidak relevan) sampai 4 (kritisal).

Bagian B menggunakan hal-hal yang sama tetapi responden ditanya untuk menilai performansi dari Departmen Sistem Informasi berdasarkan skala 1 (sangat rendah) sampai 4 (sangat bagus).

Bagian C terdiri dari pertanyaan umum mengenai kepuasan keseluruhan atas sistem jaringan komputer. .” (Remenyi, et, al., 1995, p. 130). Gap ditentukan dengan mengurangi nilai performansi dengan nilai harapan.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

Sebelum menganalisa dan merancang suatu sistem perlu disusun suatu kerangka pikir yang menjelaskan pola pikir secara keseluruhan dari kegiatan penelitian (langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dari tahap awal hingga tahap akhir). Oleh karena itu penulis menyusun kerangka pikir untuk analisis strategi gap ini sebagai berikut :



Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Evaluasi Kondisi IS/IT saat ini
Disini akan dijelaskan mengenai kondisi IS/IT saat ini yang diambil dari IS Strategic Plan yang ada dalam PT. Indonesia Power.
2. Evaluasi Strategi Bisnis Indonesia Power
Disini akan dijelaskan mengenai strategi bisnis dari PT. Indonesia Power.
3. Analisis
Adapun analisis yang kami lakukan meliputi 4 kegiatan, yaitu kuesioner (metode kuantitatif untuk mengetahui gap yang ada dalam sistem saat ini), WCA (metode kualitatif untuk mengetahui proses bisnis yang penting bagi PT. Indonesia Power), Analisis Strategic Importance (metode kualitatif untuk mengetahui pentingnya suatu sistem informasi terhadap strategi perusahaan yang berjalan), Matrik Audit Sistem (metode kualitatif untuk penilaian terhadap sistem aplikasi yang sedang berjalan saat ini).
4. Hasil Analisis
Dari hasil analisa tersebut akan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan gap yang ada dalam sistem saat ini yang berhubungan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan.
5. Usulan dan Rekomendasi
Hasil analisis akan digunakan untuk memberikan masukan mengenai usulan dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh PT. Indonesia Power di dalam mengurangi strategi gap yang ada.
6. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil evaluasi tersebut akan diambil beberapa kesimpulan serta saran yang terbaik bagi PT. Indonesia Power.

4. METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Teknik Pengumpulan data

Data yang kami peroleh meliputi data primer dan data sekunder yang ditujukan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam internal perusahaan dan membandingkannya dengan persepsi, harapan dan kinerja di benak pelanggan. Sumber data yang diperoleh penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

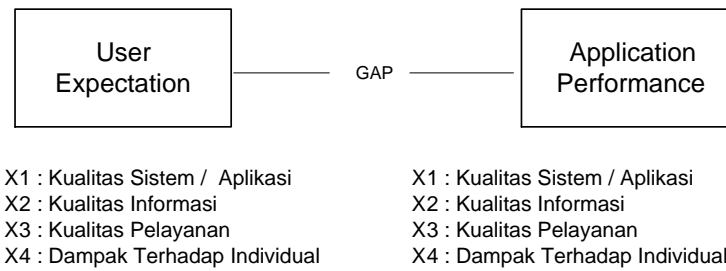
1. Wawancara, sebagai teknik komunikasi langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan serta ditujukan kepada pihak manajemen perusahaan PT. Indonesia Power atau yang mewakilinya, seperti: Senior Manajer, Manager, Staff IT, dan pengguna dari aplikasi yang bersangkutan.
2. Kuesioner, daftar pertanyaan yang dibagikan dua kali. Yang pertama dibuat dalam bentuk sederhana dengan metode pertanyaan terbuka dan tertutup yang disampaikan kepada responden. Kuesioner kedua menggunakan metode pertanyaan tertutup. Langkah-langkah penyusunan kuesioner adalah sebagai berikut :
 - a) Menentukan aspek-aspek yang hendak diteliti.
 - b) Menentukan indikator penelitian.
 - c) Menuangkan aspek yang diteliti, indikator penelitian dengan nomor item berikut responden dalam kisi-kisi kuesioner.
 - d) Menyusun daftar pertanyaan yang redaksinya menggunakan bahasa sederhana agar mudah dimengerti sehingga dapat menjaring data yang dibutuhkan.
 - e) Menentukan alternatif jawaban (pada kuesioner kedua, berdasarkan masukan-masukan dari kuesioner pertama).
 - f) Menentukan bobot dari masing-masing alternatif jawaban.

Jenis instrumen yang digunakan dalam kuesioner pertama adalah instrumen yang bersifat terbuka dan tertutup, yaitu seperangkat daftar pertanyaan tertulis dan disertai alternatif jawaban yang sudah disediakan serta meminta inputan dari responden. Kuesioner kedua bersifat tertutup dengan memasukkan inputan dari responden kuesioner pertama, sehingga responden tinggal memilih alternatif jawaban yang tersedia.

Adapun kriteria penilaian atas jawaban hasil dan kusioner disusun berdasarkan skala ordinal 6, yaitu untuk setiap pertanyaan disediakan pilihan jawaban dan masing-masing jawaban diberi bobot tersendiri, yaitu nilai terendah untuk pilihan [1 – Sangat Rendah] dan bertambah sehingga pilihan [6 – Sangat Tinggi] mendapatkan nilai tertinggi.

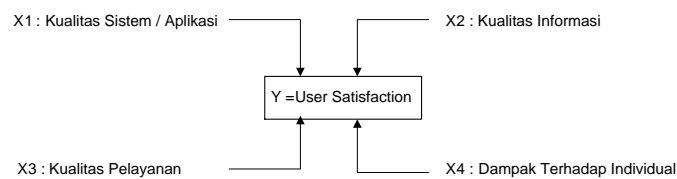
4.2 Model Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan 2 model penelitian, yaitu model untuk analisis gap (Gambar 4.1) dan model untuk analisa regresi (Gambar 4.2). Model pertama, analisis gap, merupakan modifikasi dari model gap. Analisis gap dilakukan untuk menentukan kepuasan pengguna dengan menganalisa gap antara nilai ekspektasi pengguna dan nilai performansi dari aplikasi.



Gambar 4.1 Model Penelitian untuk Analisis Gap

Analisis regresi dilakukan untuk menentukan apakah faktor faktor diatas, X1, X2, X3, X4 mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi.



Gambar 4.2 Model Penelitian untuk Analisis Regresi

4.3 Variabel Penelitian

Ada dua variable yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

◆ *Variabel bebas*

X_1, X_2, X_3, X_4 = variable yang mempengaruhi Y (kepuasan pengguna) dalam penelitian ini.

X_1 = kualitas sistem / aplikasi. Kualitas sistem / aplikasi diukur dengan jawaban responden dengan skala 1 (sangat rendah) sampai 6 (sangat tinggi).

X_2 = kualitas informasi. Kualitas informasi diukur dengan jawaban responden dengan skala 1 (sangat rendah) sampai 6 (sangat tinggi).

X_3 = kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan diukur dengan jawaban responden dengan skala 1 (sangat rendah) sampai 6 (sangat tinggi).

X_4 = dampak terhadap individual. Dampak terhadap individual diukur dengan jawaban responden dengan skala 1 (sangat rendah) sampai 6 (sangat tinggi).

◆ *Variabel tidak bebas*

Y = kepuasan pengguna terhadap sistem aplikasi, yang bergantung pada X_1, X_2, X_3 , dan X_4 .

Hal ini diukur dengan jawaban responden dengan skala 1 (sangat rendah) sampai 6 (sangat tinggi).

Alasan-alasan dalam pemilihan variabel X adalah sebagai berikut :

X_1 = kualitas sistem / aplikasi

Kualitas sistem / aplikasi yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap departemen. Sistem yang baik akan menunjang operasional dari setiap departemen.

X_2 = kualitas informasi

Kualitas informasi yang baik akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan yang cepat oleh manajemen.

X_3 = kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan yang merupakan indikator kualitas layanan yang disediakan oleh departemen IT.

X_4 = dampak terhadap individual

Dampak terhadap individual adalah variabel yang penting karena sistem aplikasi akan mempengaruhi individu baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pertama

H_0 = Tidak ada gap yang signifikan diantara ekspektasi pengguna tentang efektifitas dan performansi dari aplikasi

H_1 = Ada gap yang signifikan diantara ekspektasi pengguna tentang efektifitas dan performansi dari aplikasi

Hipotesis ini akan dianalisa dengan menggunakan model penelitian pertama, Analisis Gap.

Keempat hipotesis dibawah ini akan dianalisa dengan menggunakan model penelitian kedua yaitu Analisis Regresi.

Hipotesis kedua

H_0 = Kualitas sistem / aplikasi tidak mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi secara signifikan.

H_1 = Kualitas sistem / aplikasi mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi secara signifikan.

Hipotesis ketiga

H_0 = Kualitas informasi tidak mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi secara signifikan.

H_1 = Kualitas informasi mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi secara signifikan.

Hipotesis keempat

H₀= Kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi secara signifikan.

H₁= Kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi secara signifikan.

Hipotesis kelima

H₀= Dampak terhadap individual tidak mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi secara signifikan.

H₁= Dampak terhadap individual tidak mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi secara signifikan.

Dari keempat variabel X yang disebut diatas, akan dilakukan analisa regresi, untuk menentukan variabel-variabel apa saja yang paling bagus untuk menjelaskan variabel Y yaitu kepuasan pengguna terhadap sistem aplikasi.

4.5 Validitas dan Reliabilitas

Data yang didapatkan dari penelitian haruslah valid dan reliabel. Validitas menunjukkan derajat akurasi yaitu akurasi antara data sebenarnya dan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Reliabilitas menunjukkan derajat konsistensi yaitu konsistensi dalam interval waktu tertentu.

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, sebuah instrumen penelitian yang valid dan reliabel diperlukan. Sebuah instrumen yang valid berarti bahwa instrumen yang digunakan untuk pengukuran tersebut adalah cocok dengan data. Sedangkan, sebuah instrumen yang reliabel berarti bahwa instrumen yang digunakan untuk pengukuran tersebut akan memberikan hasil yang sama dalam beberapa pengukuran.

4.6 Analisis Statistik

Penelitian ini akan menggunakan *Paired-Sample T-test* untuk model penelitian pertama dan Analisis Regresi Berganda untuk model penelitian kedua.

4.6.1 *Paired-Sample T Test*

Paired-sample T test dilakukan untuk perbedaan rata-rata dua populasi. Test untuk perbedaan rata-rata dua populasi adalah (Aczel, 1999, p.330):

$$t = \frac{D - \mu_{D0}}{S_D / \sqrt{n}}$$

dimana:

$$D_i = X_{1i} - X_{2i}$$

$$D = \sum D_i / n$$

1

$$S_D^2 = \frac{\sum (D_i - D)^2}{n-1}$$

4.6.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda adalah sebuah metode analisa perubahan dalam sebuah variabel (variabel tak bebas) dengan menggunakan sekumpulan variabel yang diketahui (variabel bebas), untuk memperkirakan nilai rata-rata dari variabel tak bebas berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui (Galliers, 1991). Hasil dari analisis regresi adalah *R-squared* (R^2 , multiple coefficient of determination) yang menjelaskan seberapa bagus sekumpulan variabel bebas menjelaskan variabel tak bebas.

F-test (tes Anova) digunakan untuk mengetes dua sampel atau lebih. Asumsi yang digunakan dalam *F-test* adalah (Santoso, S., 2001):

- ◆ Populasi terdistribusi secara normal
- ◆ Populasi memiliki varians yang sama
- ◆ Tidak ada relasi diantara setiap sampel

Nilai *F-value* dan nilai signifikan yang dihasilkan, akan dianalisa. Jika nilai signifikan sama dengan 0, ini berarti bahwa regresi tersebut sebagai sebuah keseluruhan adalah signifikan.

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Kuesioner dibagikan kepada 54 responden dari PT. Indonesia Power, Jakarta. Dari 54 responden tersebut, 15 responden adalah untuk aplikasi ORAFIN, 16 responden adalah untuk aplikasi PRONIA, 10 responden adalah untuk aplikasi HRMS, dan sisanya adalah untuk aplikasi CMMS.

Validitas dan reabilitas dari semua data harus diuji sebelum digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas dan reabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha. Software SPSS versi 18. digunakan untuk menguji semua Variabel dependen (X1=kualitas sistem / aplikasi, X2=kualitas informasi, X3=kualitas pelayanan, dan X4=dampak terhadap individual) pada kedua bagian yaitu Kinerja Sistem Aplikasi dan Harapan Pengguna Terhadap Sistem Aplikasi serta Kepuasan Pengguna Terhadap Sistem Aplikasi (variabel independen, Y=kepuasan pengguna). Hasil dari uji validitas dan reabilitas dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Harapan Pengguna		Kinerja Sistem Aplikasi		Kepuasan Pengguna	
Item	Corrected Item - Total Correlation	Item	Corrected Item - Total Correlation	Item	Corrected Item - Total Correlation
Variabel X1		Variabel X1		Variabel Y	
EX1_1	0,8905	PX1_1	0,9102	Y_1	0,8341
EX1_2	0,872	PX1_2	0,8779	Y_2	0,8875
EX1_3	0,9151	PX1_3	0,8991	Y_3	0,8067
EX1_4	0,9128	PX1_4	0,828	Y_4	0,6488
EX1_5	0,8819	PX1_5	0,9144		
EX1_6	0,9335	PX1_6	0,8718		
EX1_7	0,8878	PX1_7	0,8552		
EX1_8	0,8876	PX1_8	0,9353		
EX1_9	0,9083	PX1_9	0,8906		
Variabel X2		Variabel X2			
EX2_1	0,9119	PX2_1	0,8945		
EX2_2	0,929	PX2_2	0,8841		
EX2_3	0,938	PX2_3	0,9031		
EX2_4	0,8711	PX2_4	0,8734		
EX2_5	0,9117	PX2_5	0,8748		
EX2_6	0,8908	PX2_6	0,8522		
Variabel X3		Variabel X3			
EX3_1	0,8999	PX3_1	0,8601		

EX3_2	0,9103	PX3_2	0,8905		
EX3_3	0,8988	PX3_3	0,8884		
EX3_4	0,9126	PX3_4	0,8508		
EX3_5	0,8932	PX3_5	0,9059		
Variabel X4		Variabel X4			
EX4_1	0,8793	PX4_1	0,9172		
EX4_2	0,8785	PX4_2	0,9356		
EX4_3	0,857	PX4_3	0,9031		
EX4_4	0,8561	PX4_4	0,9343		
EX4_5	0,8809	PX4_5	0,9294		
EX4_6	0,8514	PX4_6	0,9235		

Data dapat dikatakan valid jika nilai dari “Corrected Item – Total Correlation” lebih besar dari 0,3. Semua variabel dari tabel 1 memiliki nilai “Corrected Item – Total Correlation” lebih besar dari 0,3. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua nilai variabel tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Analisis Reabilitas

Variabel	Deskripsi	Koefisien Realibilitas (Nilai Alpha)
Harapan Pengguna		
X1	Kualitas Sistem / Aplikasi	0,9860
X2	Kualitas Informasi	0,9808
X3	Kualitas Pelayanan	0,9806
X4	Dampak Terhadap Individual	0,9764

Kinerja Sistem Aplikasi		
X1	Kualitas Sistem / Aplikasi	0,9740
X2	Kualitas Informasi	0,9596
X3	Kualitas Pelayanan	0,9672
X4	Dampak Terhadap Individual	0,9789
Kepuasan Pengguna		
Y	Kepuasan Pengguna	0,9065

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai Alpha lebih besar dari 0,70. Semua data dari variabel-variabel dari tabel 2 diatas adalah reliabel dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel dibawah ini menunjukkan analisis deskriptif dari item-item kuesioner untuk Harapan Pengguna dan Kinerja Sistem Aplikasi. Tabel 3 menunjukkan perbandingan antara Harapan Pengguna (HP) dan Kinerja Sistem Aplikasi (KSA) untuk semua item. Tabel 4 menunjukkan perbandingan antara HP dan KSA untuk tiap variabel.

Tabel 3. Perbandingan antara HP dan KSA Untuk Semua Item

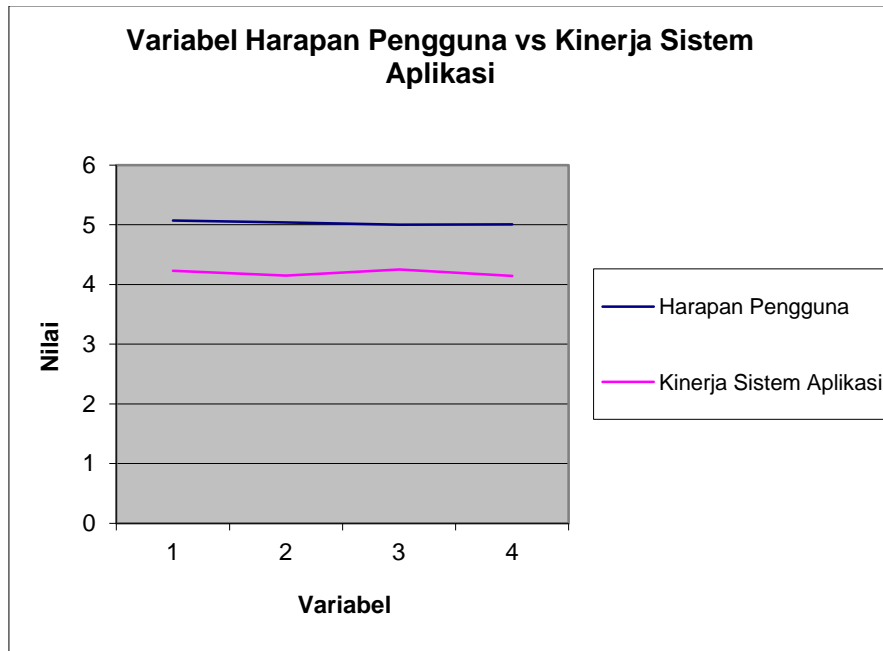
Variabel	Item	HP	KSA	Gap
X1	X1_1	5,00	4,15	-0,85
	X1_2	4,98	3,91	-1,07
	X1_3	5,07	4,19	-0,89
	X1_4	5,09	4,13	-0,96
	X1_5	5,09	4,31	-0,78
	X1_6	5,02	4,06	-0,96
	X1_7	5,06	4,20	-0,85
	X1_8	5,20	4,52	-0,69
	X1_9	5,11	4,57	-0,54

X2	X2_1	5,13	4,22	-0,91
	X2_2	4,96	4,09	-0,87
	X2_3	4,94	4,15	-0,80
	X2_4	5,07	4,26	-0,81
	X2_5	4,98	4,07	-0,91
	X2_6	5,13	4,09	-1,04
X3	X3_1	4,96	4,07	-0,89
	X3_2	5,02	4,09	-0,93
	X3_3	5,02	4,39	-0,63
	X3_4	4,98	4,33	-0,65
	X3_5	5,02	4,35	-0,67
X4	X4_1	4,83	4,00	-0,83
	X4_2	4,85	4,02	-0,83
	X4_3	5,09	4,20	-0,89
	X4_4	4,91	4,15	-0,76
	X4_5	5,20	4,30	-0,91
	X4_6	5,15	4,19	-0,96

Tabel 4. Perbandingan Antara Harapan Pengguna dan Kinerja Sistem Aplikasi per Variabel

No,	Variabel	Deskripsi	HP	KSA	Gap
1	X1	Kualitas Sistem / Aplikasi	5,07	4,23	-0,8
2	X2	Kualitas Informasi	5,04	4,15	-0,9
3	X3	Kualitas Pelayanan	5	4,25	-0,8
4	X4	Dampak Terhadap Individual	5,01	4,14	-0,9

Dari tabel 4 kita dapat melihat bahwa gap dari semua variabel memiliki nilai negatif. Ini berarti bahwa Harapan Pengguna (HP) lebih tinggi dari pada Kinerja Sistem Aplikasi (KSA). Dengan demikian, performansi dari sistem aplikasi belum memenuhi harapan dari pengguna. Gambar 2 akan memperlihatkan gap antara Harapan Pengguna dan Kinerja Sistem Aplikasi.



Gambar 2. Nilai Rata-Rata dari Variabel Harapan Pengguna vs Kinerja Sistem Aplikasi

Dari analisis Strategic Importance, Critical Success Factor, Pengaruh Timeframe, dan Pengaruh Keuangan, kami menentukan pengaruh bisnis secara keseluruhan dari 4 sistem aplikasi, adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan bobot pengaruh bisnis, adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Rentang Nilai Pengaruh Bisnis

Dampak	Keterangan	Bobot
0% - 9,9%	<i>Minor Negligible impact</i>	1,0
10% - 19,9%	<i>Negligible impact</i>	1,5
20% - 29,9%	<i>Minor impact</i>	2,0
30% - 39,9%	<i>Some impact</i>	2,5
40% - 49,9%	<i>Moderate impact</i>	3,0
50% - 59,9%	<i>Considerable impact</i>	3,5
60% - 69,9%	<i>Strong impact</i>	4,0

70% - 79,9%	<i>Heavy impact</i>	4,5
80% - 89,9%	<i>Very heavy impact</i>	5,0
90% - 99,9%	<i>Critical impact</i>	5,5
> 99,9%	<i>Massive impact</i>	6,0

Dari penilaian bobot diatas, kami mendapatkan hasil pengaruh bisnis untuk 4 sistem aplikasi (PRONIA, ORAFIN, MAXIMO, PROSDM) dengan perhitungan $((SIA + CSF + TIMEFRAME + KEUANGAN)/19)*100%$ adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Analisa Nilai Pengaruh Bisnis Untuk Setiap Aplikasi

Sistem	PRONIA	ORAFIN	MAXIMO	PROSDM
SIA	3,00	3,00	3,00	3,00
CSF	4,00	3,00	4,00	3,00
TIMEFRAME	5,00	4,00	5,00	4,00
KEUANGAN	5,00	3,00	4,00	2,00
Total	89,47	68,42	84,21	63,16
Bobot	5,00	4,00	5,00	4,00

Dari penilaian kinerja sistem, sesuai dengan FGD dan kuesioner yang dibagikan kepada para IT specialist yang mengetahui sistem secara keseluruhan, kami mendapatkan nilai kinerja system sebagai berikut :

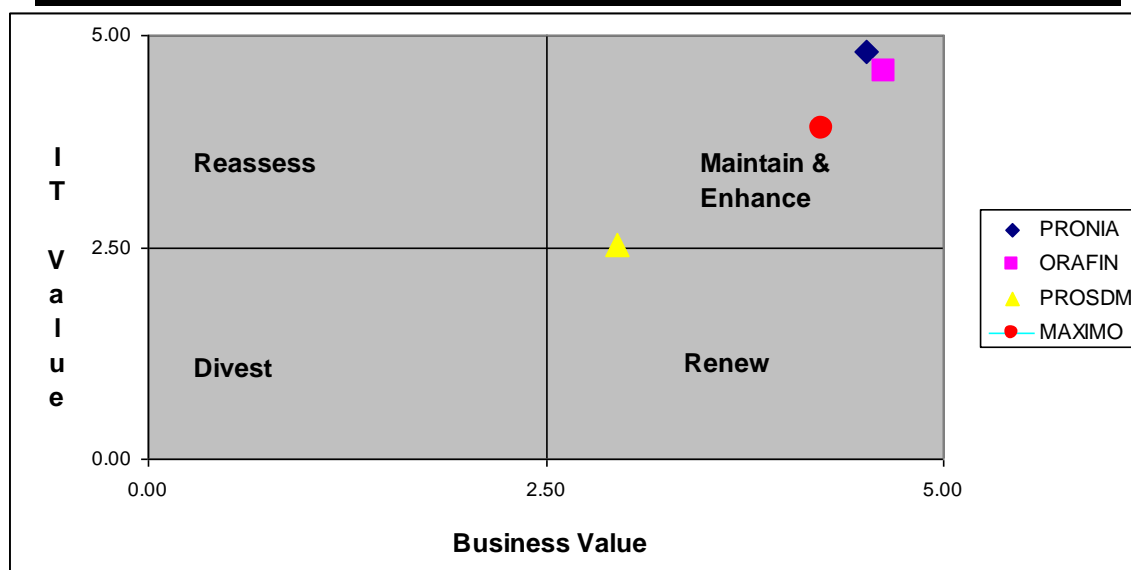
Tabel 7. Kinerja Setiap Sistem Aplikasi

PARAMETER SISTEM	Kualitas Sistem	Kualitas Informasi	Kualitas Pelayanan	Dampak Individual	NILAI
PRONIA	4,56	5,00	5,00	4,67	4,81
ORAFIN	4,56	4,50	4,40	4,83	4,57
MAXIMO	4,44	3,67	4,00	3,50	3,90
PROSDM	2,30	1,50	3,40	2,00	2,30

Analisis Matrik Audit sistem dilakukan untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan ke depan terhadap sistem aplikasi yang ada dalam sebuah organisasi. Adapun hasil analisis dan penilaian terhadap sistem aplikasi yang ada di PT INDONESIA POWER, kami memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 8. Analisa Matrik Audit Sistem Untuk Setiap Aplikasi

Kriteria	Business Value	Technical Value
• PRONIA	4,52	4,81
• ORAFIN	4,63	4,57
• MAXIMO	4,24	3,90
• PROSDM	2,95	2,53



Gambar 3. Analisa Matrik Audit Sistem dari aplikasi PRONIA, ORAFIN, PROSDM, dan MAXIMO

Bila dilihat dari gambar 3 diatas, hasil penilaian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. PRONIA

Sistem aplikasi PRONIA perlu dipelihara dan ditingkatkan, terutama dari segi kualitas sistem dan dampak terhadap individual. Karena sistem aplikasi ini memiliki nilai bisnis yang tinggi dan juga nilai sistem IT yang tinggi.

2. ORAFIN

Sistem aplikasi ORAFIN perlu dipelihara dan ditingkatkan, terutama dari segi kualitas pelayanan. Karena sistem aplikasi ini memiliki nilai bisnis yang tinggi dan juga nilai sistem IT yang tinggi.

3. MAXIMO

Sistem aplikasi MAXIMO perlu dipelihara dan ditingkatkan, terutama dari segi kualitas sistem, kualitas pelayanan dan dampak terhadap individual. Karena sistem aplikasi ini memiliki nilai bisnis yang tinggi dan juga nilai sistem IT yang tinggi.

4. PROSDM

Sistem aplikasi PROSDM perlu perbaharui, hal ini memungkinkan karena sistem PROSDM saat ini sebenarnya memiliki nilai bisnis yang tinggi tetapi tidak disertai dengan nilai IT yang tinggi.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap PT. INDONESIA POWER, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. berdasarkan kuesioner yang dilakukan kepada pengguna, terdapat gap antara harapan pengguna dan kinerja sistem aplikasi secara keseluruhan. Gap yang ada ini, berdasarkan 4 parameter yang digunakan, yaitu : Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, dan Dampak Terhadap Individual.
2. berdasarkan analisis strategi dan kinerja, terdapat gap antara strategi dan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Dimana gap yang paling besar terdapat dalam sistem aplikasi PROSDM.
3. dari hasil analisis matrik audit sistem, sistem aplikasi PRONIA, MAXIMO, dan ORAFIN perlu dipelihara dan ditingkatkan, sedangkan untuk sistem aplikasi PROSDM perlu untuk diperbaiki.

6.2. Saran

Dari analisis yang telah dilakukan, disarankan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh PT. INDONESIA POWER dalam menghadapi gap yang terjadi:

1. Keterlibatan user secara aktif sangat penting untuk dipertimbangkan dalam proses pengembangan aplikasi. Karena dengan keterlibatan user, maka kesenjangan yang ada dapat diminimalkan.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi gap dari sistem aplikasi yang ada.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas sistem dan dampak terhadap individual pada sistem aplikasi PRONIA, cara ini dapat dilakukan dengan :
 - a. Migrasi teknologi yang digunakan dari ASP ke ASP. NET sebagai bahasa pemrograman
 - b. Pembuatan kebijakan, aturan untuk meningkatkan kesediaan user untuk mengisi data secara konsisten.
 - c. Peningkatan laporan yang disediakan, sehingga manajemen dapat lebih terbantu untuk mengambil keputusan dari PRONIA.
4. Perlu adanya penerapan beberapa *patch* sistem aplikasi ORAFIN dan kustomisasi laporan agar sistem aplikasi dapat digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan.
5. Perlu adanya peningkatan kualitas sistem, kualitas pelayanan dan dampak terhadap individual pada sistem aplikasi MAXIMO, cara ini dapat dilakukan dengan :
 - a. Perlu adanya standarisasi terutama dalam penomoran material, sparepart dan peralatan, karena dengan standarisasi maka memudahkan dalam pemeliharaan aset.
 - b. Adanya upgrade atau otomatisasi terhadap aplikasi MAXIMO saat ini.
 - c. kustomisasi aplikasi MAXIMO agar sesuai dengan proses bisnis PT INDONESIA POWER.

6. Perlu adanya pertimbangan untuk memperbarui sistem PROSDM saat ini agar dapat menunjang strategi perusahaan kedepan. hal ini dapat dilakukan dengan penerapan PROSDM yang terintegrasi.
7. Perlu mempertimbangkan *outsource* untuk proyek aplikasi utama yang masih tergolong kurang sempurna seperti PROSDM. Selain biaya *outsource* relatif lebih rendah dibanding *built in house*, dengan adanya *outsource*, maka tingkat keberhasilan sistem (seperti PROSDM) akan meningkat pesat. *Outsource* juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kemampuan IT *officer* dari PT. INDONESIA POWER karena adanya *sharing knowledge* dari pihak vendor kepada IT *officer* PT. INDONESIA POWER. Dengan demikian, dimasa mendatang, PT. INDONESIA POWER akan memiliki IT *officer* yang memiliki kemampuan yang dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alter, Steven, 1999, *Information Systems : A Management Perspective*, Addison Wesley, New York.
- Anonymous. *Maximo 4 vs. Maximo 5*, [Online] Available: <http://www.maxcust.com/html/4vs5.html>
[2006, March 1]
- Cherry, Michael. 2001. *ASP.NET Improves Development of Web Applications*, [Online] Available: <http://www.directionsonmicrosoft.com/sample/DOMIS/update/2002/01jan/0102aidowa.htm>
[2006, March 1]
- Cherry, Michael. 2001. *ASP.NET Performance (Illustration)*, [Online] Available: http://www.directionsonmicrosoft.com/sample/DOMIS/update/2002/01jan/0102aidowa_illo3.htm [2006, March 1]
- Coveney, Michael, 2003, *The Strategy Gap, Leveraging Technology to Execute Winning Strategies*, John Wiley & Sons, New Jersey.
- Earl, M.J, 1989, *Management Strategies for Information Technology*, Prentice Hall International, Cambridge, England.
- Lynda M. Applegate, 1999, *Corporate Information Systems Management : Text and Cases*, Mc. Graw Hill, New York.
- Muhammad, Suwarsono, 2002, *Manajemen Strategik*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan, Yogyakarta.
- Remenyi, D., Money, A., Twite, A. 1995. *Effectiveness Measurement & Management of IT Costs & Benefits*, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford.

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MANADO

**Andre Tulungen
Herman Karamoy
Treesje Runtu**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : andreduckrz@yahoo.co

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang , salah satunya di bidang ekonomi .Pembangunan itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan sumber dana atau pendapatan yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan tersebut,salah satu pendapatan negara adalah pajak.Pajak mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan pajak adalah pajak reklame. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara perhitungan dan pelaporan pajak reklame yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Manado. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif , metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data, angka agar dapat memberikan gambaran.Hasil penelitian ini Dinas Pendapatan Kota Manado yang di bantu unit kerja terkait dalam melaksanakan proses perhitungan dan pelaporan Pajak Reklame sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Perda No. 6 Tahun 1998, dan Keputusan Wali Kota Manado No.33 Tahun 2005. Masih banyaknya pengusaha maupun perusahaan – perusahaan besar di Kota Manado yang melanggar aturan perpajakan daerah yang berlaku , karena masih belum maksimalnya penegakan hukum bagi para wajib pajak yang lalai atau terlambat melapor dan menghitung pajak oleh unit kerja terkait.

Kata Kunci : Pajak Reklme, Pendapatan Asli Daerah,

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is doing development in various fields, one of them in the economic field. Development was aimed at educating the nation and for the welfare of the people in a fair and prosperous Indonesia. Taxes have an important role in the implementation of development as a source of state income tax. One source of tax revenue is advertisement tax. The purpose of this study was to determine how the calculation and reporting of advertisement tax will be undertaken by the Department of Revenue of Manado.The method used in this study is a descriptive analysis, descriptive method is an analysis that collect, collate, process, and analyze the data, the numbers in order to provide the research gambaran.Hasil Revenue Office of Manado City in aids related units in implementing the intentional process advertisement tax and reporting are in accordance with the laws, regulations, and decisions mayor of Manado. But there are many proven entrepreneurs and companies - big companies in the city of Manado in violation of tax rules applicable local, because law enforcement is not maximal for taxpayers who neglected or delayed reporting and calculating taxes by related units.

Keywords : *Advertisement Tax, Revenue,*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai Negara yang berkembang, Negara Republik Indonesia tengah melakukan pembangunan di segala bidang, yaitu di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negara berupa pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Berdasarkan *self assessment system*, masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemerintah berharap dengan *self assessment system*, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja.

Salah satu sumber penerimaan dalam kabupaten/kota yang berasal dari pajak adalah pajak Reklame. Melihat potensi pajak reklame yang sedemikian besarnya, maka Pemerintah Kota Manado diharapkan mampu dan terus berupaya untuk menjangkau seluruh potensi Pajak Reklame tersebut yang merupakan bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame merupakan pajak yang di pungut atas penyelenggaraan reklame (benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk atau corak dan ragamnya di rancang untuk tujuan yang komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, atau orang atau badan usaha yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum) penyelenggaraan reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame. Dengan adanya pemasangan reklame, diwajibkan untuk membayar Pajak Reklame, karena itu pemerintah harus bisa memanfaatkan pajak reklame ini dengan sangat optimal dan melakukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui cara penghitungan, dan pelaporan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. ” Perpajakan Edisi Revisi 2011 (Mardiasmo, 2011: 1).

Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Mardiasmo(2008:10) antara lain :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah, harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dasar Hukum Pajak Reklame

Keberadaan Pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten /kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi Dasar Hukum Pajak Daerah di Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.

Objek Pajak Reklame

1. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng, atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
2. Reklame Megatron/Videotron/Large Electric Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan yang sejenis dengan itu.
4. Reklame Melekat (*stiker*), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, ataupun diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasannya tidak lebih dari 200 cm persegi per lembar.
5. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan baik untuk roda 4 maupun roda 2 adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
6. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenisnya.

7. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari perantara alat.
8. Reklame Slide/Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
9. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menunjukkan atau memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Bukan Objek Pajak Reklame

Marihot Pahala Siahaan (2009:385) yang objek pajak reklame Penyelenggara reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Marihot Pahala Siahaan (2009:386) pada pajak reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung tentang atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjukkan seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame yang meliputi menurut (Perda kota Manado no.6 thn 1998):

1. Nilai Objek Pajak Reklame
2. Nilai Strategis Pemasangan Reklame
Nilai strategis pemasangan reklame di tentukan oleh factor-faktor:
 1. Lokasi/kelas jalan
 2. Luas reklame
 3. Jumlah sudut pandang reklame
 4. Jenis produk rokok dan minuman beralkohol
 5. Jenis produk bukan rokok dan bukan minuman beralkohol

Menurut (Perda Kota Manado No.6 thn 1998) Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah:

Nilai Jual Reklame : Biaya pemasangan + Biaya Pemeliharaan + Nilai strategis x tarif pajak 25%. Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai sewa reklame. Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJORP) dengan Nilai Strategis (NS) dikalikan 25 (dua puluh lima persen).

Rumusnya:

$$\text{NSR} = \text{NJORP} + \text{NS} \times 25\%$$

Reklame Papan

Ukuran 1 m²

NJOPR : Biaya pembuatan pemasangan Reklame + Biaya pemeliharaan (10%)

NS : (Lokasi x Score)+(Luas Reklame x Score)+(Sudut Pandang x Score)+(Kelas Jalan x Score) : Titik Simpul x Harga Titik

Lokasi	Score	Luas Reklame	Score	Sudut pandang	Score	Kelas Jalan	Score
40%	10	15%	7	30%	8	15%	10

Kelas 1 : Harga Titik (HT) Rp 350.000 Titik Simpul (TS) 20

Kelas 2 : Harga Titik (HT) Rp 250.000 Titik Simpul (TS) 20

Biaya pembuatan Rp 125.000

Biaya pemeliharaan (10%) Rp 12.500

NJOPR Rp 137.500

Nilai Strategis (NS) Rp 156.625

Pajak = (NJOPR+NSxTarif pajak)

= Rp 137.500 + Rp 156.625 (40% x 10 + 15% x 7 + 30% x 8 + 15% x 10 : 20 x 100% x Rp 350.000) x 25%

= Rp 294.125 x 25%

= Rp 75.371

Pelaporan Pajak Reklame

Wajib Pajak Reklame wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) kota Manado, tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Reklame yang terutang. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD di isi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. SPTPD dianggap tidak dimasukan jika Wajib Pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Mendrofa (2011)	Pengaruh pemungutan Pajak Reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah	Untuk mengetahui Pengaruh pemungutan Pajak Reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah	Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pajak Reklame sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.	Kedua penelitian ini menggunakan Pajak Reklame sebagai subjek penelitian	Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame
Donna (2011)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Reklame	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Reklame	Menggunakan metode penelitian deskriptif.	Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa peran dari pemerintah	Kedua penelitian ini menggunakan Pajak Reklame sebagai subjek penelitian.	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek penelitiannya.

dan
masyarakat
sebagai
wajib pajak
sangat
mempengar
uhi Pajak
Reklame

Sumber : Data Olahan 2013

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Manado.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan langkah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Langkah-langkah tersebut yaitu :

1. Mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame.
2. Memilih prosedur serta teknik yang digunakan
3. Mencari data yang akan digunakan
4. Memberikan kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak Dinas Pendapatan Kota Manado

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Manado

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Menurut Harbani Pasalong (2012:70) Ada 2 jenis data, yaitu :

1. Data Kualitatif
Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis berbentuk uraian.
2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran.

Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara), Data primer dalam penelitian ini berupa data yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Kota Manado, yaitu berupa Surat Keputusan Wali Kota.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perpajakan dan pajak penghasilan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dalam perusahaan secara langsung untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data objek penelitian dengan cara sebagai berikut :
 - a. Wawancara melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden atau informan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian Harbani Pusalong (2012:130-141). Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Kota Manado dalam hal ini bagian Pajak Reklame tentang cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame.
 - b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen-dokumen yang bersifat tulisan dari perusahaan berupa profil perusahaan, sejarah perusahaan, dan struktur organisasi.
2. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan keterangan dengan mempelajari teori-teori dan informasi yang berasal dari literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa buku-buku mengenai Perpajakan dan Pajak Penghasilan.

Metode Analisis

Mudrajad Kuncoro (2009:192) Metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perusahaan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Manado yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Manado serta Peraturan Walikota Manado Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Manado, yang diberikan kewenangan mengemban tugas dibidang Pendapatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai hak mengelola pendapatan daerah guna pembiayaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Guna menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui sistem perencanaan yang sistematis, terencana dan terukur dalam kurun waktu yang ditentukan yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2016 sebagai pedoman untuk mengukur perencanaan organisasi dalam kurun waktu tertentu tersebut diatas

Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado relevan dengan kegiatan nasional dibidang pendapatan daerah juga mengacu dari visi Pemerintah Kota Manado 2011-2016, yaitu Manado Kota Model Ekowisata dan misi yaitu, menjadikan Manado sebagai Kota yang Menyenangkan.

Pembahasan

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kota Manado, antara lain adalah:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah kota Manado No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Subjek dan Objek Pajak Reklame Kota Manado, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor : 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame yaitu: Subjek Pajak Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak. Objek Pajak Reklame adalah Semua penyelenggaraan reklame.

Proses penerapan perhitungan Pajak Reklame yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Manado.

Reklame Billboard

Pada tanggal 2 Desember 2013 CV. RAPIH JAYA PERKASA melakukan permohonan izin pemasangan Reklame Billboard dengan rincian data sebagai berikut:

Ukuran: 5m x 6m x 1 sisi (vertikal)

Jumlah : 1 Unit

NJOPR : Biaya pembuatan pemasangan Reklame + Biaya pemeliharaan (10%)

NS : (Lokasi x Score)+(Luas Reklame x Score)+(Sudut Pandang x Score)+(Kelas Jalan x Score) : Titik Simpul x Harga Titik

Lokasi	Score	Luas Reklame	Score	Sudut pandang	Score	Kelas Jalan	Score
40%	10	15%	10	30%	8	15%	10

Kelas 1 : Harga Titik (HT) Rp 350.000 Titik Simpul (TS) 20

Kelas 2 : Harga Titik (HT) Rp 250.000 Titik Simpul (TS) 20

Biaya Pembuatan Rp 200.000 x 50 = Rp 10.000.000

Biaya Konstruksi Rp 125.000 x 50 =Rp 6.250.000

Rp 16.250.000

Biaya Pemeliharaan (10%) Rp 1.625.000

NJOPR Rp 17.875.000

Nilai Strategis Rp 164.500

NJOPR = Rp 17.875.000 : 50 Meter

= Rp 357.500

NJOPR = 30 meter x Rp 357.500

= Rp 10.725.000

Perhitungan= (NJOPR + NS x Tarif Pajak)

= Rp 10.725.000 + Rp 164.500 (40% x 10 + 15% x 10 + 30% x 8 + 15% x 10 : 20 x 100% x Rp 350.000) x 25%

= Rp 10.889.500 x 25%

Pajak = Rp 2.722.375

(Proses penerapan Pajak Reklame yang di lakukan Dinas Pendapatan Kota Manado sudah sesuai dengan Keputusan Wali Kota Manado No. 33 Tahun 2005).

Pajak Reklame merupakan salah satu pendapatan negara di sektor pajak yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Kota Manado saat ini telah membawa dampak strategis pada aktivitas usaha ekonomi baik di sektor swasta maupun pemerintah, sehingga membawa perubahan pesat terhadap

intensitas penggunaan sarana reklame. Hal ini sesuai dengan keputusan walikota manado no. 33 Tahun 2005. Tentang pelaksanaan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II manado No. 6 Tahun 1998.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan seperti:

1. Dinas Pendapatan Kota Manado yang dibantu oleh Unit Kerja Terkait (UKT) dalam melaksanakan proses perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. PERDA Nomor 6 Tahun 1998 dan Keputusan Wali Kota Manado.
2. Dinas Pendapatan Kota Manado yang dibantu oleh Unit Kerja Terkait (UKT) masih belum maksimal dalam penegakan hukum bagi para wajib pajak yang lalai/ terlambat dalam melapor dan menghitung pajak. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pengusaha maupun perusahaan-perusahaan besar di kota Manado yang melanggar aturan perpajakan daerah yang berlaku.

Saran

Setelah melakukan Penelitian ini dan Berdasarkan hasil analisis maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Menambah jumlah pegawai lapangan yang bertugas untuk menjangring potensi-potensi Pajak Reklame yang sampai saat ini belum teridentifikasi, tentunya dengan kompetensi yang baik.
2. Memberikan sanksi yang tegas kepada WP yang melanggar peraturan tentang Pajak Reklame.
3. Membuat suatu penelitian yang valid terlebih dahulu sebelum menentukan besarnya target penerimaan Pajak Reklame, sehingga nantinya target yang hendak dicapai benar-benar mencerminkan potensi yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu Yogyakarta
- Abdul Rahman 2010. *Administrasi Perpajakan*. Nuansa Bandung.
- Waluyo 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 2 Edisi 9 Salemba Empat Jakarta
- Ilyas,W., Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat.Jakarta.
- Aristanti Widyaningsih 2011. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Alfa Beta Bandung
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Airlangga Jakarta
- Juliansyah 2011. *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Group. Jakarta
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang “Pajak Daerah”.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

